

LAPORAN TRIWULANAN
TRIWULAN II - 2017





Laporan Triwulanan ini diterbitkan oleh
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
Versi digital (PDF) dapat diunduh melalui
www.ojk.go.id

Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djohadikusumo Lantai 4
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710
Phone. (021) 29600000
fax. (021) 386 6032
email: konsumen@ojk.go.id

Kata Pengantar



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan dan bimbingan-Nya, OJK dapat terus meningkatkan kinerja dalam mengemban tugas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan serta dalam memberikan edukasi dan perlindungan konsumen keuangan.

Secara umum, kinerja ekonomi global triwulan II-2017 melanjutkan pemulihan walaupun masih menghadapi tantangan. Hal ini didukung proyeksi terbaru beberapa lembaga internasional yang menunjukkan ketidakmerataan pemulihan ekonomi di mana *Emerging Markets* (EM) berbasis komoditas cenderung rentan terhadap volatilitas harga komoditas dunia. Begitu juga dengan kinerja perekonomian Amerika Serikat yang belum sepenuhnya solid dengan tingkat inflasi yang kembali menurun meskipun pertumbuhan ekonomi dan indikator tenaga kerja terus melanjutkan capaian positif. Perekonomian Zona Euro

juga mengalami kendala, tercermin dari peningkatan tren inflasi yang kembali melambat, walaupun dari sisi sektor manufaktur dan tingkat pengangguran menunjukkan perbaikan. Sementara itu, perekonomian Jepang melanjutkan tren yang membaik di mana inflasi kembali meningkat dan kinerja ekspor membaik. Pemulihan ekonomi Tiongkok juga terpantau cukup menggembirakan tercermin dari pertumbuhan ekonomi dan sektor manufaktur yang menunjukkan tren positif.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2017 relatif tumbuh stabil yaitu sebesar 5,01% *yoy*. Hal ini didukung oleh meningkatnya pertumbuhan investasi baik oleh pemerintah maupun swasta serta konsumsi rumah tangga yang relatif terjaga ditengah momentum bulan puasa dan lebaran. Kinerja eksternal juga membukukan surplus sebesar USD3,60 miliar walaupun kinerja ekspor dan impor masih belum solid.



Kata Pengantar

Kinerja Industri Jasa Keuangan secara umum menunjukkan tren positif. Industri Perbankan mencatat perkembangan yang cukup baik, tercermin dari kenaikan aset, kredit, dan dana pihak ketiga dari Bank Umum masing-masing sebesar 2,87% (*qtq*), 2,77% (*qtq*), dan 2,63% (*qtq*). Kondisi permodalan juga masih solid tercermin dari CAR sebesar 22,74% serta tingkat efisiensi yang makin baik tercermin dari penurunan BOPO menjadi 79,00%. Pada Industri Pasar Modal, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat mengalami kenaikan sebesar 4,70% (*qtq*) dengan *net buy* investor nonresiden sebesar Rp9 triliun pada triwulan II-2017. Peningkatan indeks tersebut dipengaruhi oleh Moody's yang meningkatkan *outlook* industri perbankan Indonesia dari stabil menjadi positif. Kinerja Industri Keuangan Non Bank (IKNB) juga bergerak positif tercermin dari peningkatan total aset IKNB sebesar 2,84% (*qtq*).

Di bidang pengaturan, OJK telah menerbitkan sembilan Peraturan OJK (POJK) untuk

memperkuat sektor jasa keuangan. Peraturan yang diterbitkan terdiri dari lima POJK yang mengatur sektor Perbankan, dan tiga POJK yang mengatur sektor Pasar Modal serta satu POJK yang mengatur sektor IKNB. Pada bidang pengawasan, beberapa kegiatan strategis dilakukan dalam rangka pengembangan infrastruktur sektor jasa keuangan, antara lain: peluncuran Sistem Informasi Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT), pengembangan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), *Roadmap* Pengembangan Keuangan Syariah serta penyusunan *Roadmap* Pengawasan Terintegrasi.

Pada bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, OJK mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan antara lain melalui pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di beberapa daerah, peluncuran Galeri Investasi *Mobile* di Universitas Cenderawasih, serta pelaksanaan kegiatan Safari Ramadhan

di empat lokasi. Selain itu, dalam rangka meningkatkan perlindungan konsumen, OJK melakukan beberapa kegiatan strategis antara lain menyusun Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan (SPKK) tahun 2013-2027, pelaksanaan Kegiatan *Thematic Surveillance* dan Operasi Intelijen Pasar serta pengembangan secara berkala *Investor Alert Portal*.

Dalam rangka pengembangan kapasitas manajemen internal, OJK berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai kegiatan pengembangan kompetensi dan pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SIMFOSIA). OJK juga mengembangkan berbagai sarana infrastruktur untuk mendukung pengawasan sektor jasa keuangan dan pengelolaan manajemen internal, antara lain melalui pengembangan Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi, Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT), Sistem Informasi *Risk*

Based Supervision (SIRIBAS), Sistem Informasi Pelaporan Gratifikasi (SIPEGA) serta Sistem Informasi Akuntansi OJK (SI-AUTO).

Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pegawai yang telah menjalankan tugas dengan baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai strategis institusi. OJK berupaya memperbaiki kinerjanya secara terus menerus dan meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang efektif dengan anggota Komite Stabilitas Sektor Jasa Keuangan dan para pemangku kepentingan terkait lainnya, dalam rangka mewujudkan industri keuangan nasional yang stabil, kontributif dan inklusif.

**Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan**

Wimboh Santoso

DAFTAR ISI

iii	KATA PENGANTAR
vi	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR GRAFIK
	DAFTAR GAMBAR
xiii	RINGKASAN EKSEKUTIF
1	BAB I. TINJAUAN INDUSTRI SEKTOR JASA KEUANGAN
3	1.1 PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA DAN DUNIA
3	1.1.1 Perkembangan Ekonomi Global
5	1.1.2 Perkembangan Ekonomi Domestik
6	1.1.3 Perkembangan Pasar Keuangan
6	1.2 PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN
6	1.2.1 Perkembangan Bank Umum Konvensional
9	1.2.2 Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
11	1.2.3 Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
13	1.2.4 Penguatan Sektor Riil Melalui Penyaluran Kredit Produktif
15	1.3 PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL
15	1.3.1 Perkembangan Perdagangan Efek
17	1.3.2 Perkembangan Perusahaan Efek
18	1.3.3 Perkembangan Pengelolaan Investasi
20	1.3.4 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik
25	1.3.5 Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
27	1.4 PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK
28	1.4.1 Perkembangan Perasuransian Konvensional dan BPJS
29	1.4.2 Perkembangan Industri Dana Pensiun
31	1.4.3 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan
33	1.4.4 Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura
35	1.4.5 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
35	1.4.6 Perkembangan Industri Jasa Keuangan Khusus (LJKK)
38	1.4.7 Perkembangan Industri Jasa Penunjang IKNB
39	1.4.8 Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Mikro
39	1.5 PERKEMBANGAN PROGRAM <i>FLAGSHIP</i> OJK
39	1.5.1 Layanan Keuangan Tanpa Kantor (LAKU PANDAI)
40	1.5.2 Jangkau, Sinergi, dan <i>Guideline</i> (JARING)
41	1.5.3 Simpanan Pelajar (SIMPEL)
41	1.5.4 Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) Sektor Riil
41	1.5.5 Efek Beragun Aset – Surat Partisipasi (EBA SP)
41	1.5.6 Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)
42	1.5.7 Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)
42	1.5.8 Asuransi Nelayan
42	1.5.9 Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal
43	BAB II. TINJAUAN OPERASIONAL SEKTOR JASA KEUANGAN
45	2.1 AKTIVITAS PENGATURAN
45	2.1.1 Pengaturan Bank
47	2.1.2 Pengaturan Pasar Modal
47	2.1.3 Pengaturan IKNB
49	2.2 AKTIVITAS PENGAWASAN
49	2.2.1 Pengawasan Terintegrasi
49	2.2.2 Pengawasan Perbankan
54	2.2.3 Pengawasan Pasar Modal
59	2.2.4 Pengawasan IKNB
68	2.3 AKTIVITAS PENGEMBANGAN
68	2.3.1 Pengembangan Pengawasan Terintegrasi

2.3.2	Pengembangan Industri Perbankan	69
2.3.3	Pengembangan Industri Pasar Modal	69
2.3.4	Pengembangan IKNB	71
2.4	STABILITAS SISTEM KEUANGAN	73
2.4.1	Pasar Keuangan dan Lembaga Jasa Keuangan	73
2.4.2	Respons Kebijakan	74
2.5	EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	75
2.5.1	Peraturan Edukasi dan Perlindungan Konsumen	75
2.5.2	Inklusi Keuangan	75
2.5.3	Literasi dan Edukasi Keuangan	76
2.5.4	Perlindungan Konsumen	78
2.6	PENYIDIKAN SEKTOR JASA KEUANGAN	83
2.6.1	Koordinasi dengan Instansi Terkait	83
2.6.2	Penanganan Perkara	83
2.6.3	Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi)	84
2.6.4	Sosialisasi Satgas Waspada Investasi	84
2.6.5	Penyampaian Informasi Melalui Media	84
2.6.6	Penanganan Permasalahan Investasi oleh Satgas Waspada Investasi	84
2.7	PENANGANAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME	84
2.8	HUBUNGAN KELEMBAGAAN	86
2.8.1	Kerja sama Domestik	86
2.8.2	Kerja Sama Internasional	88
2.9	HUBUNGAN KOORDINASI KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER	90
BAB III.	TINJAUAN INDUSTRI DAN OPERASIONAL SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH	91
3.1	TINJAUAN INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH	93
3.1.1	Perkembangan Perbankan Syariah	93
3.1.2	Perkembangan Industri Pasar Modal Syariah	95
3.1.3	Perkembangan IKNB Syariah	97
3.2	PENGATURAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH	99
3.2.1	Pengaturan Perbankan Syariah	99
3.2.2	Pengaturan IKNB Syariah	100
3.3	PENGAWASAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH	100
3.3.1	Pengawasan Perbankan Syariah	100
3.3.2	Pengawasan Pasar Modal Syariah	102
3.3.3	Pengawasan IKNB Syariah	102
3.4	PENGEMBANGAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH	102
3.4.1	Pengembangan Perbankan Syariah	102
3.4.2	Pengembangan Pasar Modal Syariah	105
3.4.3	Pengembangan IKNB Syariah	106
BAB IV.	MANAJEMEN STRATEGIS DAN TATA KELOLA ORGANISASI	107
4.1	MANAJEMEN STRATEGI DAN KINERJA OJK	109
4.1.1	Pelaksanaan Siklus Manajemen Strategi dan Kinerja	109
4.1.2	Pelaksanaan Sasaran Strategis OJK	110
4.2	AUDIT INTERNAL, MANAJEMEN RISIKO, DAN PENGENDALIAN KUALITAS	110
4.3	RAPAT DEWAN KOMISIONER	112
4.4	KOMUNIKASI	113
4.4.1	Komunikasi Informasi OJK	113
4.4.2	Kunjungan Instansi	115
4.4.3	OJK TV	115
4.5	KEUANGAN	115
4.5.1	Realisasi Anggaran	115
4.5.2	Penyempurnaan Pengelolaan Keuangan	117
4.6	SISTEM INFORMASI	117
4.6.1	Penguatan Sistem Informasi untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas Pokok	117
4.6.2	Penguatan Sistem Informasi untuk Meningkatkan Kapasitas Organisasi	120

120	4.7	LOGISTIK
120	4.7.1	Penyiapan Gedung Kantor Pusat
120	4.7.2	Penyiapan Gedung Kantor Regional/OJK
120	4.7.3	Pengembangan Pengaturan dan Sistem Logistik
121	4.8	SDM DAN TATA KELOLA ORGANISASI
121	4.8.1	Pengelolaan Sumber Daya Manusia
121	4.8.2	Pengembangan Organisasi
122	4.8.3	Kebijakan Sumber Daya Manusia
122	4.8.4	Sistem Informasi Sumber Daya Manusia
123	4.9	OJK INSTITUTE
123	4.9.1	Program Pengembangan Kompetensi
123	4.9.2	Program Pendidikan Formal
123	4.9.3	Program Pengenalan Calon Pegawai
123	4.9.4	Program Penugasan
124	4.9.5	Program Peningkatan Kompetensi SDM Sektor Jasa Keuangan
124	4.9.6	Program Asesmen Kepemimpinan
124	4.9.7	Program Kaji Ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
124	4.9.8	Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian di OJK
124	4.10	MANAJEMEN PERUBAHAN
124	4.10.1	Kultur dan Manajemen Perubahan
125	4.10.2	<i>Monitoring</i> Program Budaya
126	4.10.3	Media Komunikasi Budaya dan Perubahan
127		Akronim

DAFTAR TABEL

7	Tabel I.1	Kondisi Umum Perbankan Konvensional
7	Tabel I.2	Tingkat Konsentrasi Aset BUK
10	Tabel I.3	Kondisi Umum BPR
11	Tabel I.4	Kredit BPR berdasarkan Jenis Penggunaan
12	Tabel I.5	Konsentrasi Penyaluran UMKM
13	Tabel I.6	Kredit UMKM berdasarkan Kelompok Bank
13	Tabel I.7	Konsentrasi Kredit Perbankan Menurut Sektor Ekonomi (%)
16	Tabel I.8	Perkembangan Transaksi Perdagangan Saham
17	Tabel I.9	Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Utang (laporan CTP PLTE)
17	Tabel I.10	Jumlah Perusahaan Efek
17	Tabel I.11	Jumlah Lokasi Kegiatan PE Selain Kantor Pusat
17	Tabel I.12	Proses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek
18	Tabel I.13	Proses Perpanjangan Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek
18	Tabel I.14	Proses Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas
18	Tabel I.15	Perkembangan NAB per Jenis Reksa Dana
19	Tabel I.16	Perkembangan Reksa Dana Dan Produk Investasi Lainnya
19	Tabel I.17	Jenis Reksa Dana Yang Mendapat Surat Efektif
20	Tabel I.18	Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin
20	Tabel I.19	Tabel Perkembangan Jumlah dan Nilai Emisi
21	Tabel I.20	Tabel Perkembangan Nilai Emisi Berdasarkan Sektor Industri pada Triwulan II-2017
21	Tabel I.21	Perusahaan Yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham
22	Tabel I.22	Perusahaan Yang Melakukan Penawaran Umum Terbatas
22	Tabel I.23	Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang
23	Tabel I.24	Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang
24	Tabel I.25	Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang
24	Tabel I.26	Rencana Penggunaan Dana Atas EPP yang Melakukan Aksi Korporasi Berdasarkan Sektor Industri
25	Tabel I.27	Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal
26	Tabel I.28	Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal

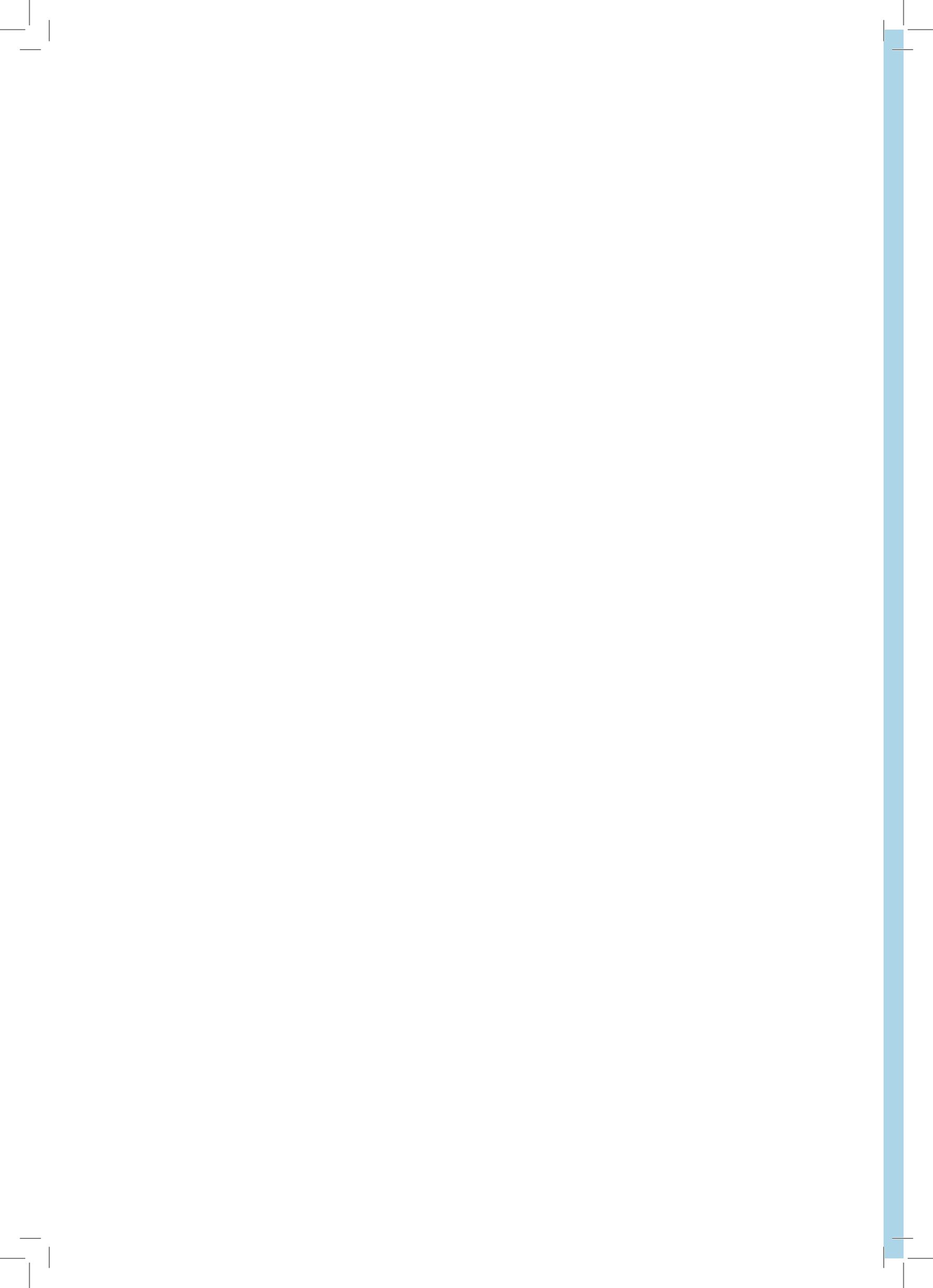
Tabel I.29	Perkembangan Profesi Penunjang Pasar Modal	26
Tabel I.30	Pendidikan Profesi Lanjutan Akuntan Triwulan II-2017	27
Tabel I.31	Pendidikan Profesi Lanjutan Konsultan Hukum Triwulan II-2017	27
Tabel I.32	Pendidikan Profesi Lanjutan Penilai Triwulan II-2017	27
Tabel I.33	Total Aset IKNB	27
Tabel I.34	Indikator Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS	28
Tabel I.35	Jumlah Industri Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS	29
Tabel I.36	Densitas dan Penetrasi Industri Perasuransian Konvensional dan BPJS	29
Tabel I.37	RBC Industri Asuransi	29
Tabel I.38	Distribusi Aset Industri Dana Pensiun	30
Tabel I.39	Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun	30
Tabel I.40	Portofolio Investasi Dana Pensiun	30
Tabel I.41	Jumlah Dana Pensiun	31
Tabel I.42	Piutang Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan sektor Ekonomi	32
Tabel I.43	Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan	32
Tabel I.44	NPF Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan sektor Ekonomi	33
Tabel I.45	Pembiayaan/Penyertaan Berdasarkan sektor Ekonomi	34
Tabel I.46	Pembiayaan Berdasarkan Jenis Infrastruktur	35
Tabel I.47	Indikator Keuangan Industri Jasa Penunjang IKNB	38
Tabel I.48	Jumlah Perusahaan Jasa Penunjang IKNB	39
Tabel I.49	Jumlah LKM	39
Tabel I.50	Indikator Keuangan Lembaga Keuangan Mikro	39
Tabel I.51	Realisasi Laku Pandai Triwulan II-2017	39
Tabel I.52	NPL Kegiatan Usaha Kredit Maritim (%)	41
Tabel II.1	Pemeriksaan Bank Umum	49
Tabel II.2	Pemeriksaan Khusus Bank	50
Tabel II.3	Produk dan Aktivitas Baru Perbankan Triwulan II-2017	50
Tabel II.4	<i>Track Record</i> Tindak Tipibank Triwulan II-2017	51
Tabel II.5	Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan	51
Tabel II.6	Pemberian Keterangan Ahli/Saksi Triwulan II-2017	51
Tabel II.7	Perizinan Perubahan Jaringan Kantor BUK*	52
Tabel II.8	Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional	52
Tabel II.9	FPT Calon Pengurus dan PSP Bank Umum selama Triwulan II-2017	53
Tabel II.10	Perizinan BPR	53
Tabel II.11	Daftar Hasil <i>Fit and Proper Test New Entry</i> BPR	54
Tabel II.12	Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik	56
Tabel II.13	Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik	56
Tabel II.14	Penyampaian Laporan Bulanan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	59
Tabel II.15	Penyampaian Laporan Bulanan Dana Pensiun	60
Tabel II.16	Penerimaan Laporan Berkala Dana Pensiun	61
Tabel II.17	Penyampaian Laporan Bulanan Lembaga Pembiayaan	61
Tabel II.18	Penerbitan LHP Lembaga Pembiayaan	61
Tabel II.19	Penegakan Kepatuhan kepada Lembaga Pembiayaan	62
Tabel II.20	Penerbitan Izin Usaha Penuh LKM selama Triwulan II-2017	62
Tabel II.21	Penerbitan Izin Usaha Bersyarat LKM selama Triwulan II-2017	62
Tabel II.22	Pendampingan Langsung Penyusunan Laporan Keuangan LKM selama Triwulan II-2017	62
Tabel II.23	Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Kelembagaan Jasa Penunjang IKNB selama Triwulan II 2017	63
Tabel II.24	Pendaftaran Profesi selama Triwulan II-2017	63
Tabel II.25	Jumlah Penetapan Hasil Pengujian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) selama Triwulan II-2017	63
Tabel II.26	Jumlah Perusahaan Penunjang Berdasarkan Jenis Usaha	63
Tabel II.27	Permohonan Pemberian Izin Usaha	64
Tabel II.28	Jumlah Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank Konvensional	64
Tabel II.29	Jumlah Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank Konvensional	64
Tabel II.30	Permohonan Perubahan Kepemilikan Perusahaan, Anggaran Dasar, Pemegang Saham, Peraturan Dana Pensiun serta Merger dan Akuisisi IKNB Triwulan II-2017	65
Tabel II.31	Permohonan Akuisisi IKNB	65

65	Tabel II.32	Pelaporan Pembukaan, Penutupan dan Perubahan Alamat Kantor Cabang IKNB
66	Tabel II.33	Pencatatan Kantor Pemasaran dan Kantor Selain Kantor Cabang IKNB
66	Tabel II.34	Permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pihak Utama IKNB
66	Tabel II.35	Pelaporan Perubahan Kepengurusan IKNB
67	Tabel II.36	Pelaporan Syarat Keberlanjutan Pengurus IKNB
67	Tabel II.37	Pelaporan Tenaga Ahli
67	Tabel II.38	Pelaporan Tenaga Asing
67	Tabel II.39	Permohonan Pelaporan/Persetujuan Produk serta <i>Bancassurance</i>
68	Tabel II.40	Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Kelembagaan Jasa Penunjang IKNB selama Triwulan II-2017
68	Tabel II.41	Pendaftaran Profesi selama Triwulan II-2017
68	Tabel II.42	Jumlah Penetapan Hasil Pengujian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) selama Triwulan II-2017
68	Tabel II.43	Jumlah Perusahaan Penunjang Berdasarkan Jenis Usaha
78	Tabel II.44	Pelayanan Konsumen Per Sektor Triwulan II-2017
79	Tabel II.45	Akumulasi Pelayanan Konsumen Per Sektor 2013-Triwulan II-2017
80	Tabel II.46	Penerimaan Layanan per <i>Business Unit</i>
82	Tabel II.47	Jumlah Data Layanan Konsumen OJK Kejahatan Berbasis Internet
86	Tabel II.48	Hubungan Kerja Sama Domestik OJK
94	Tabel III.1	Indikator Perbankan Syariah
96	Tabel III.2	Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah
96	Tabel III.3	Perkembangan Indeks Saham Syariah
96	Tabel III.4	Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi
96	Tabel III.5	Perkembangan Reksa Dana Syariah
97	Tabel III.6	Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara
98	Tabel III.7	Aset IKNB Syariah
98	Tabel III.8	Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah
99	Tabel III.9	Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah
101	Tabel III.10	Layanan Perizinan Perbankan Syariah
114	Tabel IV.1	Judul Siaran Pers Triwulan II-2017
114	Tabel IV.2	Jumpa Pers Triwulan II-2017
115	Tabel IV.3	Kunjungan Instansi Triwulan II-2017
120	Tabel IV.4	Kantor Regional dan Kantor OJK yang Telah Menempati Gedung Sendiri

DAFTAR GRAFIK

3	Grafik I.1	Tingkat PCE Amerika Serikat
3	Grafik I.2	Aliran Modal Nonresiden di Pasar Obligasi <i>Emerging Markets</i>
4	Grafik I.3	Aliran Modal Nonresiden di Pasar Saham <i>Emerging Markets</i>
4	Grafik I.4	Inflasi Zona Euro
4	Grafik I.5	Kinerja Eksternal Tiongkok
4	Grafik I.6	Perkembangan Harga Komoditas Dunia
5	Grafik I.7	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
5	Grafik I.8	Tingkat Inflasi Indonesia
5	Grafik I.9	Neraca Perdagangan Indonesia
6	Grafik I.10	Perkembangan Indeks Saham Global dan Regional
6	Grafik I.11	Perkembangan Nilai Tukar Global dan Regional
7	Grafik I.12	Perkembangan Aset BUK
8	Grafik I.13	Tren Pertumbuhan DPK
8	Grafik I.14	Tren Pertumbuhan Kredit (<i>qtq</i>)
8	Grafik I.15	Tren Pertumbuhan Kredit (<i>yoy</i>)
9	Grafik I.16	Tren NPL <i>Gross</i>
9	Grafik I.17	Tren Rentabilitas dan Efisiensi
10	Grafik I.18	Tren Aset BPR
10	Grafik I.19	Tren Pertumbuhan DPK (<i>qtq</i>)
10	Grafik I.20	Tren Pertumbuhan DPK (<i>yoy</i>)
11	Grafik I.21	ROA dan BOPO BPR

Grafik I.22	Penyebaran UMKM berdasarkan Wilayah	12
Grafik I.23	NPL Gross Sektor Ekonomi	14
Grafik I.24	Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama (<i>qtq</i>)	15
Grafik I.25	Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama (<i>ytd</i>)	15
Grafik I.26	Perkembangan Indeks Industri (<i>qtq</i>)	16
Grafik I.27	Perkembangan IHSG dan Nilai Rata-rata Perdagangan Saham Harian	16
Grafik I.28	Perkembangan IHSG dan Net Asing	16
Grafik I.29	Indonesia Government Securities Yield Curve (IBPA-IGSYC)	17
Grafik I.30	Rencana Penggunaan Dana	25
Grafik I.31	<i>Market Share</i> BAE Berdasarkan Jumlah Klien Triwulan II 2017	25
Grafik I.32	<i>Market Share Company Rating</i> Triwulan II 2017	26
Grafik I.33	Komposisi Jumlah Pelaku IKNB Triwulan II-2017	28
Grafik I.34	Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun Per Triwulan II-2017	30
Grafik I.35	Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan	31
Grafik I.36	Piutang Perusahaan Pembiayaan	31
Grafik I.37	Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas	34
Grafik I.38	Pertumbuhan Pembiayaan/Penyertaan Modal	34
Grafik I.39	Sumber Pendanaan Perusahaan Modal Ventura	35
Grafik I.40	Tren Aset, Liabilitas dan Ekuitas	35
Grafik I.41	Pertumbuhan Aset LJKK	35
Grafik I.42	Pertumbuhan Aset Perusahaan Penjaminan	35
Grafik I.43	<i>Outstanding</i> Penjaminan	36
Grafik I.44	Pertumbuhan Aset Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	36
Grafik I.45	Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Ekspor Indonesia	36
Grafik I.46	Aset dan <i>Outstanding</i> Penyaluran Pinjaman PT SMF (Persero)	36
Grafik I.47	Pertumbuhan Aset PT Pegadaian	37
Grafik I.48	<i>Outstanding</i> Pinjaman PT Pegadaian (Persero)	37
Grafik I.49	Pertumbuhan Aset PT PNM (Persero)	37
Grafik I.50	Pertumbuhan Pemberian Pinjaman dan Pembiayaan Modal PT PNM (Persero)	37
Grafik I.51	Pertumbuhan Aset PT Danareksa (Persero)	38
Grafik I.52	Pertumbuhan Portofolio PT Danareksa (Persero)	38
Grafik I.53	Pertumbuhan Piutang Usaha PT Danareksa	38
Grafik I.54	Wilayah Penyebaran Agen LAKU PANDAI	39
Grafik I.55	Kredit & NPL Sektor Maritim terkait JARING	40
Grafik II.1	Profil Konglomerasi Keuangan Indonesia dan Cakupan Pengawasan Terintegrasi	49
Grafik II.2	Penyebaran Jaringan Kantor BUK Pada Triwulan II-2017	53
Grafik II.3	Penyebaran Jaringan Kantor BPR Triwulan II-2017	53
Grafik II.4	Rincian Permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pihak Utama IKNB	66
Grafik II.5	IHSG dan Arus Modal Nonresiden di Pasar Saham	73
Grafik II.6	<i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i> Perbankan	73
Grafik II.7	<i>Risk-Based Capital (CAR)</i> Industri Asuransi Jiwa dan Asuransi Umum	74
Grafik II.8	<i>Gearing Ratio</i> Perusahaan Pembiayaan	74
Grafik II.9	Rincian Layanan Informasi	78
Grafik II.10	Rincian Layanan Pertanyaan	78
Grafik II.11	Rincian Layanan Pengaduan	79
Grafik II.12	Tingkat Penyelesaian Layanan	79
Grafik II.13	Kanal Layanan	80
Grafik II.14	Perbandingan Penerimaan Layanan Berdasarkan Satuan Kerja	80
Grafik II.15	Jumlah Pelanggaran Iklan Berdasarkan Kategori	82
Grafik III.1	Sektor Industri Saham Syariah di Indonesia	95
Grafik III.2	Perkembangan Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah	97
Grafik III.3	Jumlah Entitas IKNB Syariah Triwulan II-2017	98
Grafik IV.1	Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK)	110
Grafik IV.2	Jumlah Laporan Gratifikasi	111
Grafik IV.3	Gambaran Topik yang Dibahas dalam Rapat Dewan Komisioner	112
Grafik IV.4	Statistik Pengunjung <i>Website</i> OJK	113
Grafik IV.5	Realisasi Anggaran	115





Ringkasan Eksekutif



Ringkasan Eksekutif

TINJAUAN PEREKONOMIAN DUNIA DAN INDONESIA

Secara umum, kondisi perekonomian global selama triwulan II-2017 masih terjaga meskipun masih menghadapi tantangan. Hal ini ditunjukkan dari penurunan tingkat pengangguran AS walaupun terdapat penurunan tingkat inflasi. Perekonomian Zona Euro mengalami pemulihan tercermin dari sektor manufaktur dan tingkat pengangguran menunjukkan perbaikan walaupun sedikit terkendala pada perlambatan tingkat inflasi. Pada Zona Asia, perbaikan perekonomian Jepang berlanjut, diindikasikan oleh inflasi yang kembali meningkat, kinerja ekspor yang terus membaik serta keputusan Bank sentral Jepang (BoJ) untuk melakukan pengetatan kebijakan moneter. Sama halnya dengan Jepang, perekonomian Tiongkok terpantau cukup mengembirakan, tercermin dari pertumbuhan ekonomi serta pertumbuhan ekspor dan impor yang terus menunjukkan tren positif, sektor manufaktur mencatatkan kinerja yang positif serta inflasi masih tercatat pada level yang rendah.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II-2017 tumbuh sama dengan tingkat pertumbuhan triwulan sebelumnya terutama dipengaruhi oleh meningkatnya pertumbuhan investasi, baik oleh Pemerintah maupun swasta serta konsumsi rumah tangga juga relatif terjaga

sehubungan dengan momentum bulan puasa dan Lebaran. Pada akhir periode laporan, kinerja perdagangan eksternal, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus sebesar USD3,6 miliar. Tingkat inflasi melanjutkan peningkatan meskipun berada dalam rentang target $4\pm 1\%$ di mana inflasi tercatat sebesar 4,37% yoy. Pasar keuangan domestik juga mencatatkan kinerja yang positif, diiringi oleh masuknya kembali dana investor nonresiden di pasar modal. Kendati perkembangan beberapa indikator belum solid dan terdapat *downside risks*, kepercayaan terhadap perekonomian domestik masih tinggi, hal ini tercermin dari peningkatan *rating* S&P menjadi *investment grade* (dari BB+ menjadi BBB dengan *outlook stable*) dan peningkatan *outlook* perbankan oleh Moody's (dari stabil menjadi positif).

Pasar keuangan domestik terpantau menguat di mana IHSG tercatat tumbuh sebesar 4,7% qdq, dengan *net buy* investor nonresiden sebesar Rp9 triliun (triwulan I-2017: *net buy* Rp8,3 triliun). Selain itu, Pasar surat utang dalam negeri juga terpantau mengalami penguatan tercermin dari imbal hasil (*yield*) SBN turun rata-rata sebesar 20 *basis point*. Dari sisi nilai tukar, Rupiah terpantau stabil walaupun secara *point-to-point* mencatat pelemahan tipis sebesar 0,02%.

TINJAUAN OPERASIONAL SEKTOR JASA KEUANGAN

Untuk mendukung terwujudnya misi OJK yaitu mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Selama periode laporan OJK melakukan beberapa inisiatif antara lain:

1. Sistem Informasi Perizinan Dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) Penerbitan Obligasi dan Sukuk
Sistem informasi ini merupakan upaya mempercepat dan menyederhanakan proses perizinan dengan cara mengintegrasikan proses di bidang Pasar Modal dan Perbankan. Melalui SPRINT, proses perizinan Penerbitan Obligasi dan Sukuk untuk emiten bank dipersingkat dari semula membutuhkan waktu 105 hari menjadi 22 hari kerja.
2. Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)
SLIK dibangun untuk mengakomodasi kebutuhan informasi debitur kepada industri, OJK, dan lembaga lain. Melalui SLIK, lembaga di bidang keuangan akan menyampaikan laporan debitur secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat

waktu sehingga diharapkan kualitas informasi debitur dapat tetap terjaga.

3. Penyusunan *Roadmap* Pengawasan Terintegrasi
Roadmap ini bertujuan memberikan arah kebijakan, pengembangan sistem/metodologi pengawasan, dan penguatan implementasi pengawasan terintegrasi terhadap Konglomerasi Keuangan (KK), sejalan dengan kebijakan umum pengawasan terhadap Sektor Jasa Keuangan yang tertuang dalam *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2015 - 2019.
4. Penguatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)
Tim percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) merupakan forum koordinasi antar instansi dan *stakeholders* terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Selama periode laporan, OJK mengukuhkan TPAKD Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan.
5. Safari Ramadhan
OJK melaksanakan kegiatan Safari Ramadhan sebagai bentuk edukasi

dalam hal perencanaan keuangan yang diselenggarakan secara rutin khusus pada bulan Ramadhan di empat lokasi dengan total 471 peserta.

Selain menjalankan fungsi pengaturan, pengawasan serta edukasi dan perlindungan konsumen, OJK senantiasa menjalin kerja sama dan koordinasi dengan menandatangani tujuh MoU antara lain bersama Persyarikatan Muhammadiyah, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia *Banking School*, Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Pertahanan, serta Forum Rektor Indonesia. OJK juga melakukan hubungan kelembagaan domestik dengan menyelenggarakan 39 kegiatan kelembagaan yang melibatkan beberapa lembaga negara, antara lain: *Focus Group Discussion* (FGD) mengenai tindak lanjut UU PPKSK, perkembangan industri jasa keuangan syariah, program inklusi keuangan, penguatan TPAKD dan Satgas Waspada Investasi, implementasi KUR, perkembangan perekonomian daerah serta peningkatan UMKM. Terkait dengan kelembagaan internasional OJK menyelenggarakan Penandatanganan *Letter of Intent* antara OJK dan *The Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP)* untuk menandai dimulainya proses penyusunan Perjanjian Bilateral dalam implementasi *ASEAN Banking Integration Framework* (ABIF) yang diharapkan membuka jalan bagi ekspansi perbankan Indonesia ke Filipina.

Terkait penguatan kapasitas organisasi dalam rangka implementasi manajemen strategi, OJK melakukan evaluasi pelaksanaan *strategy map*, *scorecard*, realisasi RKA dan penilaian kinerja triwulan I-2017 melalui pengisian capaian

masing-masing Satuan Kerja (Satker) pada Sistem Pengelolaan Kinerja (SIMPEL). Untuk mendukung pengembangan pengawasan sektor jasa keuangan, OJK mengembangkan beberapa sistem informasi antara lain Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT), Sistem Informasi *Risk Based Supervision* (SIRIBAS), Sistem Informasi Penetapan Tarif Premi Asuransi (SIPETIR), Sistem Monitoring Data Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi (SIKARIN), Sistem Informasi Pasar Modal Terpadu (SIPM), dan Sistem Informasi Perbankan.

Pada periode laporan, OJK menerima secara resmi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan OJK Tahun Anggaran 2016 yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di mana hasil tersebut merupakan yang keempat kalinya sejak OJK mulai beroperasi pada 2012. OJK juga memperoleh penghargaan *The Global Inclusion Award 2017* sebagai pemenang untuk regional Asia dan Pasifik yang merupakan apresiasi terhadap OJK dalam menunjukkan komitmen untuk meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat Indonesia yang tampak dari berbagai upaya untuk memenuhi target inklusi keuangan sebesar 75% pada 2019.

Dalam rangka memberikan edukasi kepada media terhadap perkembangan sektor keuangan dan berbagai aspek kebijakan di sektor keuangan, OJK menyelenggarakan 44 siaran pers dan 12 jumpa pers serta tiga *Focus Group Discussion* untuk wartawan. OJK juga menerima 13 kunjungan instansi dengan total 1.043 peserta. Ulasan lengkap mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OJK dalam mewujudkan visi OJK selama triwulan II-2017 dijabarkan dalam buku Laporan Triwulanan II-2017.

Perkembangan Program Flagship OJK

OJK melaksanakan sejumlah Program *Flagship* dalam rangka mendukung sektor-sektor prioritas pemerintah. Sampai pertengahan 2017 ini, Program *Flagship* OJK tersebut menunjukkan perkembangan positif.

PROGRAM JANGKAU, SINERGI DAN GUIDELINE (JARING)



Melibatkan 15 bank partner dan konsorsium lembaga pembiayaan. Penyaluran kredit **↑6,52% (qta)** menjadi **Rp26,1 triliun**

ASURANSI KERANGKA KAPAL

Jumlah kapal yang dilindungi asuransi adalah **4.401 kapal**



ASURANSI USAHA TANI PADI (AUTP)

Sejak 2015, lahan pertanian yang terdaftar **↑65,82%** menjadi **859.811,38 (ha)** atau **85,98%** dari **target 1 Juta Ha.**



EFEK BERAGUN ASET - SURAT PARTISIPASI (EBA SP)

Sejak 2015, OJK memberikan izin empat EBA-SP dengan total nilai sekuritisasi sebesar **RP2,47 triliun.**



ASURANSI USAHA TERNAK SAPI (AUTS)

Sejak 2015, jumlah sapi yang terlindungi AUTS adalah **41.373 ekor sapi** atau **34,48%** dari **target 120 ribu** ekor sapi di 26 Provinsi.



LAYANAN KEUANGAN MIKRO (LAKU MIKRO)

Total rekening SiPintar sebanyak **1.024.556** jumlah outlet sebanyak **9.015.**



LAKU PANDAI

Jumlah agen Laku Pandai mencapai **368.214 agen.** Jumlah dana dan nasabah tabungan masing-masing sebesar **Rp1.120,6 milyar** dan **10.016.335 nasabah.**



SimPel
Simpanan Pelajar

JUMLAH BANK 279 BANK

JUMLAH REKENING 6.756.087

NOMINAL RP1,04 TRIILIUN

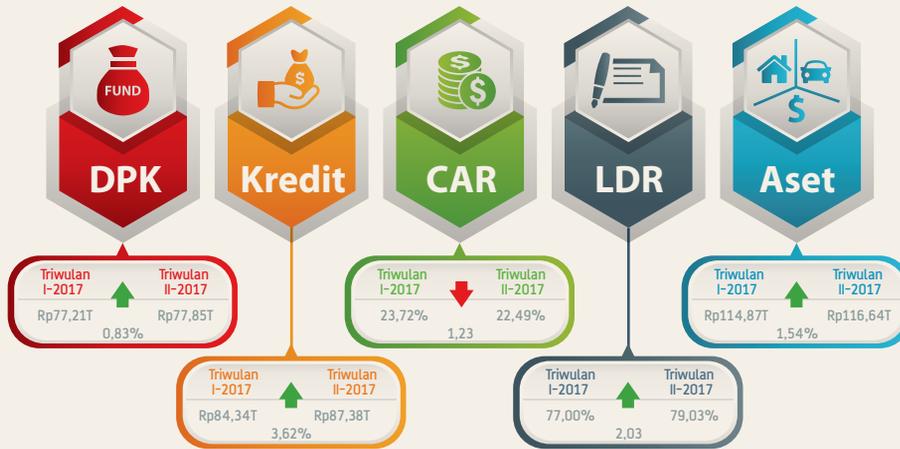
JUMLAH PERJANJIAN KERJASAMA 147.493



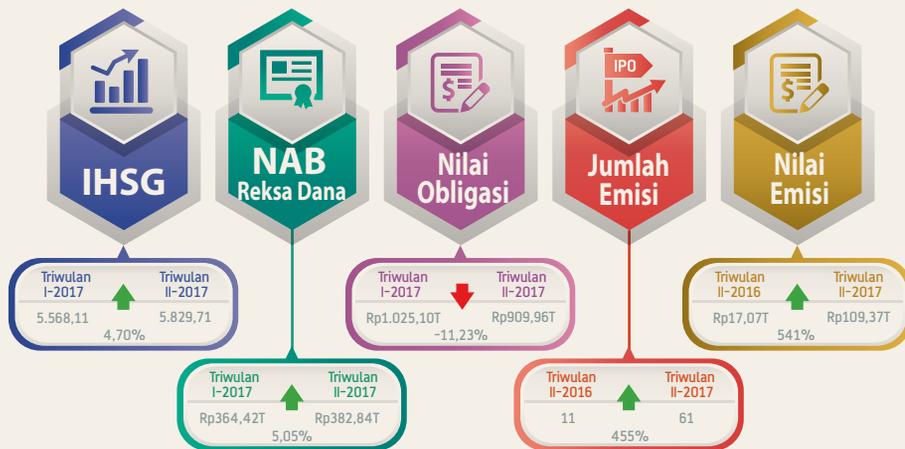
Bank Umum Konvensional



BPR

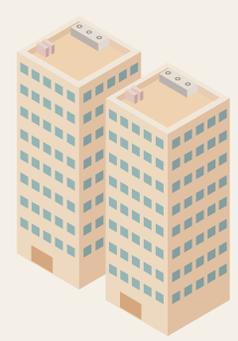
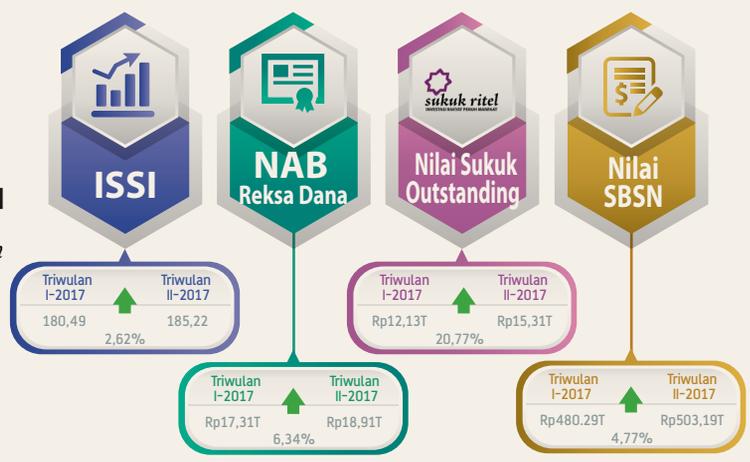
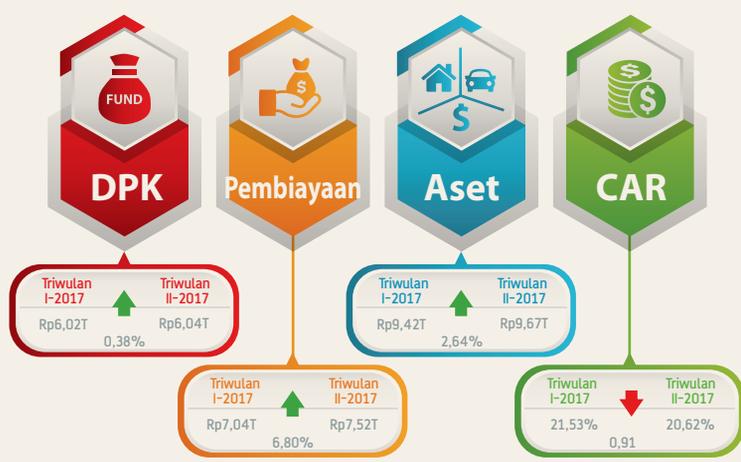
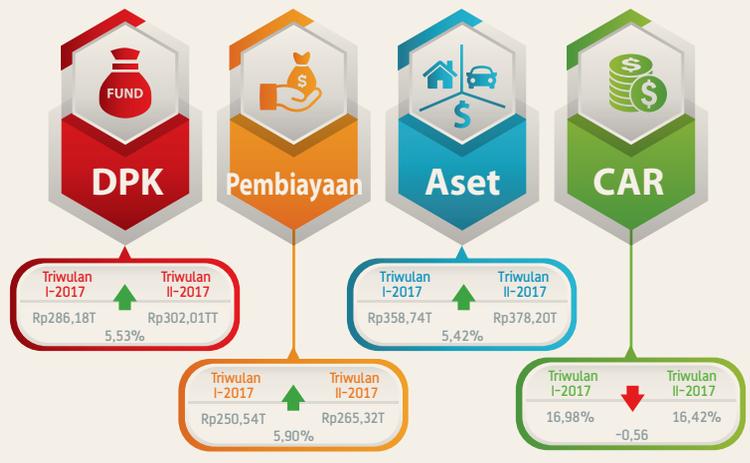


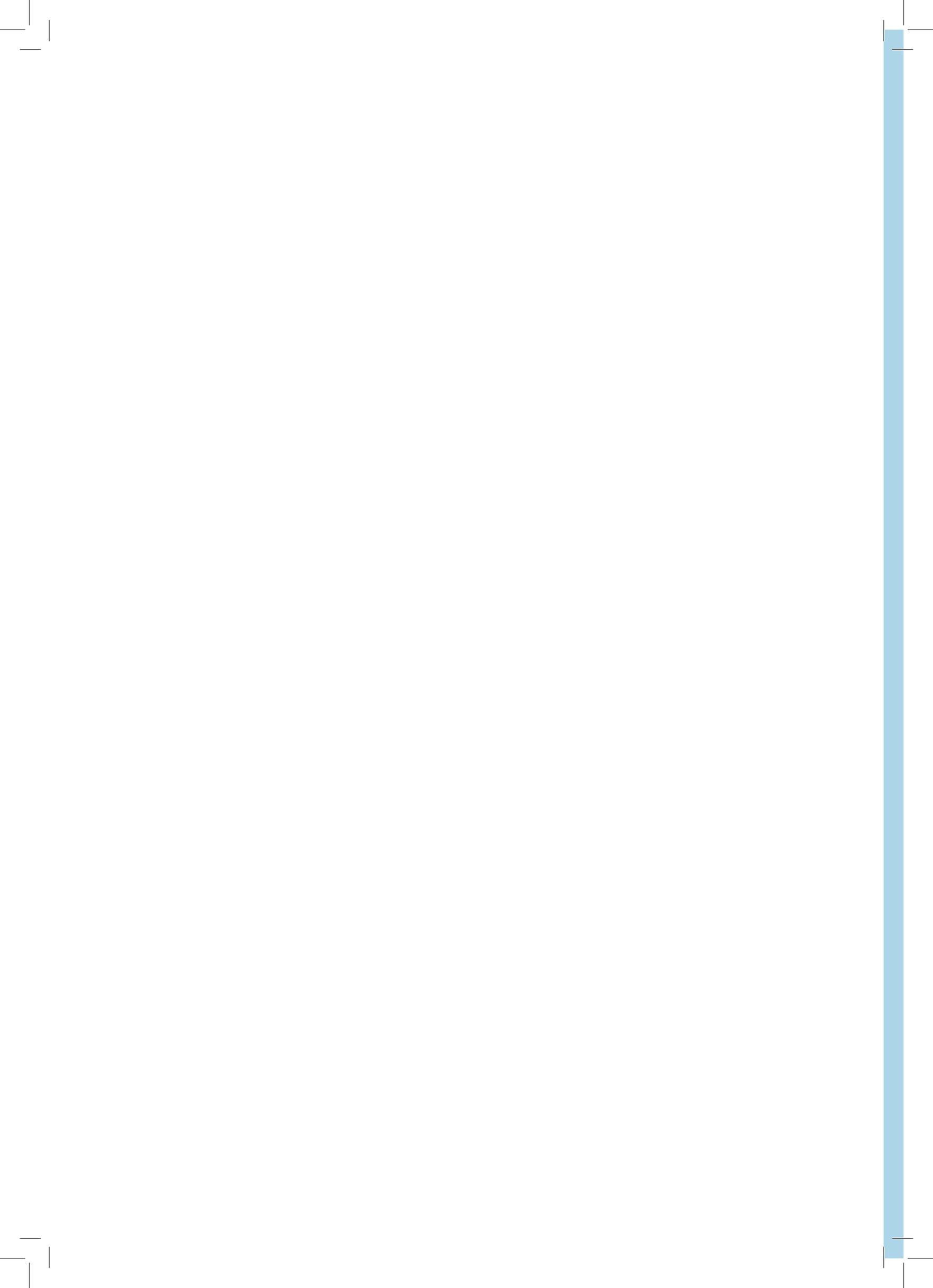
Pasar Modal



IKNB









Tinjauan
Industri
**Sektor Jasa
Keuangan**

Tinjauan Industri Sektor Jasa Keuangan



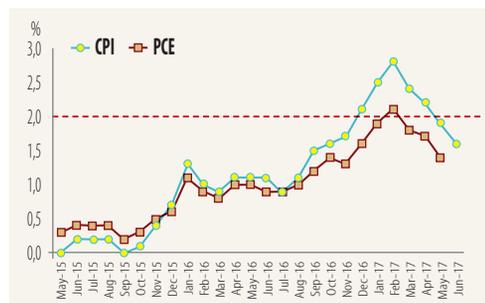
1.1 PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA DAN DUNIA

1.1.1 Perkembangan Ekonomi Global

Kondisi perekonomian global saat ini melanjutkan pemulihan walaupun masih menghadapi tantangan. Indikator-indikator ekonomi di negara-negara maju maupun berkembang menunjukkan sejumlah perkembangan positif, namun belum pada level yang solid. Beberapa faktor risiko yang dapat memengaruhi arah pemulihan global ke depan di antaranya adalah ketidakpastian mengenai kebijakan ekonomi beberapa negara, meningkatnya ketegangan geopolitik, dan masih rendahnya harga komoditas.

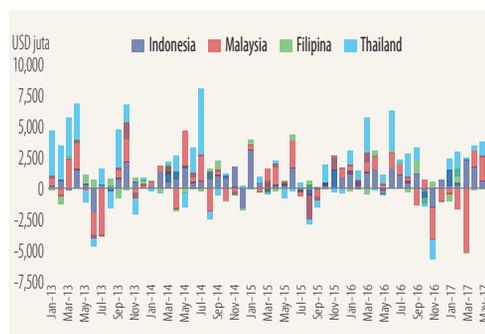
Sepanjang periode laporan, kinerja ekonomi AS melanjutkan pemulihan. Tingkat pengangguran melanjutkan kecenderungan menurun, dan tercatat pada level 4,4%. Pertumbuhan ekonomi AS juga meningkat menjadi 2,1% yoy. *The Fed* kembali menaikkan *Fed Funds Rate* menjadi pada kisaran 1,00%-1,25%. Meskipun terdapat arah perbaikan pada beberapa indikator, tingkat inflasi AS kembali berbalik arah setelah mencapai posisi tertingginya pada Februari 2017. Tingkat *Personal Consumption Expenditures* tercatat sebesar 1,4%.

Grafik I - 1 Tingkat PCE Amerika Serikat

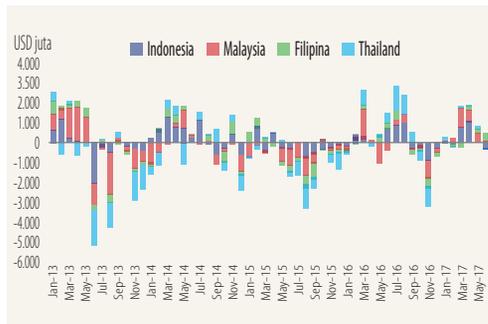


Hal ini mendorong ekspektasi pasar bahwa laju normalisasi kebijakan moneter AS (kenaikan FFR dan normalisasi neraca *The Fed*) akan lebih lambat. Menyikapi kondisi tersebut, pasar keuangan global terpantau tidak menunjukkan gejala yang berarti dengan aliran dana yang masuk ke negara-negara berkembang (*emerging markets*) masih meningkat signifikan.

Grafik I - 2 Aliran Modal Nonresiden di Pasar Obligasi Emerging Markets

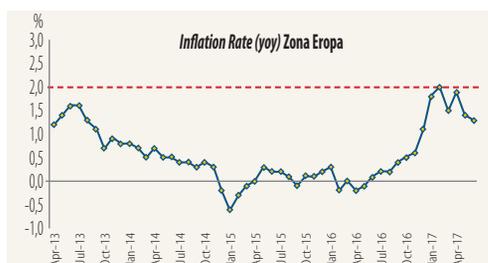


Grafik I - 3 Aliran Modal Nonresiden di Pasar Saham Emerging Markets



Pemulihan Zona Euro terkendala pada tren inflasi yang kembali melambat di mana tingkat inflasi tercatat pada level 1,3%. Di sisi lain, data sektor manufaktur menunjukkan perbaikan dan tingkat pengangguran berada dalam tren menurun. Risiko guncangan di Eropa terkait *Eurocepticism* juga cenderung mereda seiring kemenangan Macron dalam pemilu Perancis putaran kedua dan masih tingginya peluang Angela Merkel dalam pemilu Jerman.

Grafik I - 4 Inflasi Zona Euro

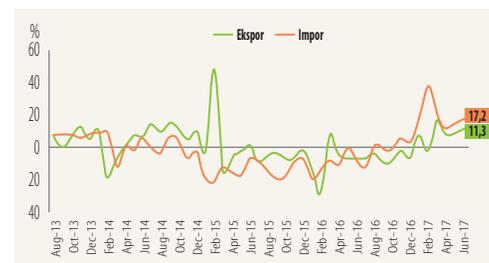


Data perekonomian Jepang melanjutkan tren yang membaik walaupun belum solid di mana inflasi kembali meningkat dan kinerja ekspor yang terus membaik. Bank Sentral Jepang (BoJ) cenderung berhati-hati dalam pengetatan kebijakan moneter. BoJ diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuan pada level -0,1% dan tidak terburu-buru dalam normalisasi kebijakan moneter.

Pemulihan ekonomi Tiongkok terpantau cukup menggembirakan di mana pertumbuhan ekonomi berada pada level 6,9% yoy. Pertumbuhan ekspor kembali melanjutkan tren

peningkatan diikuti oleh pertumbuhan impor. Sektor manufaktur juga mencatatkan kinerja yang positif. Inflasi masih tercatat pada level yang rendah, dengan capaian inflasi sebesar 1,5% yoy.

Grafik I - 5 Kinerja Eksternal Tiongkok



Pergerakan harga komoditas dunia pada periode laporan cenderung melemah di mana harga minyak kembali bergerak melemah. Negara-negara anggota OPEC masih ragu dalam memangkas produksinya dan permasalahan politik yang terjadi di Timur Tengah menjadi faktor pendorong masih lemahnya harga minyak yang berimbas pergerakan komoditas lainnya.

Grafik I - 6 Perkembangan Harga Komoditas Dunia



Bank Dunia dalam *Global Economic Prospects* memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global 2017 sebesar 2,7%, lebih tinggi dari pertumbuhan 2016. Peningkatan pertumbuhan tersebut didorong perbaikan sektor manufaktur dan perdagangan, serta membaiknya *market confidence*. Pertumbuhan ekonomi negara-negara EM yang berbasis komoditas diprediksi relatif stagnan seiring dengan harga komoditas yang diperkirakan relatif rendah di 2017.

1.1.2 Perkembangan Ekonomi Domestik

Pertumbuhan ekonomi domestik melemah di mana inflasi cenderung meningkat, perbaikan sektor riil belum solid, dan kinerja eksternal belum konklusif. Di tengah beberapa faktor risiko yang ada, persepsi risiko dan prospek perekonomian domestik terpantau membaik seiring masih terjaganya fundamental ekonomi dalam negeri.

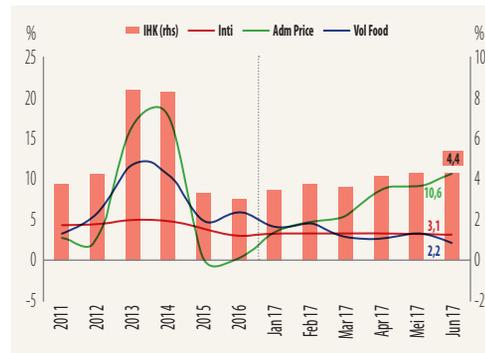
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode laporan tumbuh sebesar 5,01% yoy, sama dengan tingkat pertumbuhan triwulan sebelumnya. Terjaganya pertumbuhan ekonomi ini terutama dipengaruhi oleh meningkatnya pertumbuhan investasi, baik oleh Pemerintah maupun swasta. Sementara itu, konsumsi rumah tangga juga relatif terjaga sehubungan dengan momentum bulan puasa dan Lebaran.

Grafik I - 7 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia



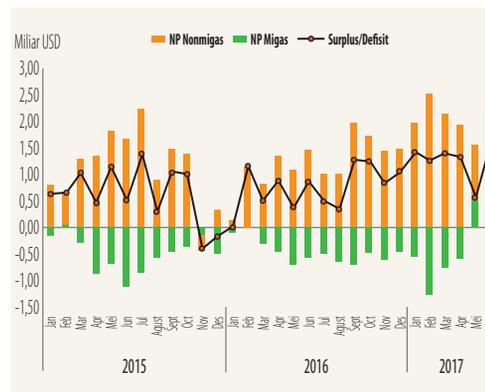
Inflasi terus melanjutkan peningkatan meskipun masih berada dalam rentang target $4 \pm 1\%$ yaitu sebesar 4,37% yoy atau lebih tinggi dibanding posisi periode sebelumnya. Hal ini turut didorong peningkatan inflasi dari sisi *administered price*. Sementara itu, dari sisi *demand*, tingkat inflasi inti (*core inflation*) belum menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Grafik I - 8 Tingkat Inflasi Indonesia



Sementara itu, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) membukukan surplus sebesar USD0,7 miliar, ditopang oleh surplus transaksi modal dan finansial yang lebih besar daripada defisit transaksi berjalan. Dari sisi kinerja perdagangan eksternal, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus sebesar USD3,6 miliar.

Grafik I - 9 Neraca Perdagangan Indonesia



Kinerja sektor riil belum sepenuhnya solid di mana kinerja manufaktur Indonesia (tercermin dari indikator *Purchasing Manager's Index*) berada dalam zona kontraksi, menurun setelah beberapa waktu mencatatkan kinerja yang positif. Penjualan semen tumbuh melambat serta penjualan ritel dan kendaraan bermotor yang bergerak terbatas.

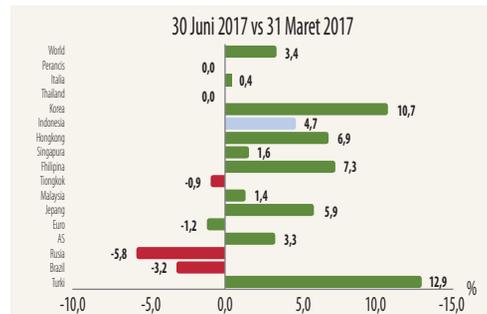
Di tengah perkembangan makroekonomi tersebut, persepsi risiko domestik terpantau menunjukkan tren positif di mana *Credit Default Swap* (CDS) lima tahun cenderung menguat. Pasar keuangan domestik juga mencatatkan kinerja yang positif, diiringi oleh masuknya kembali dana investor nonresiden di pasar modal. Kendati perkembangan beberapa indikator belum solid dan terdapat *downside risks* yang relatif besar, kepercayaan terhadap perekonomian domestik masih tinggi, hal ini tercermin dari peningkatan *rating* S&P menjadi *investment grade* (dari BB+ menjadi BBB- dengan *outlook stable*) dan peningkatan *outlook* perbankan oleh Moody's (dari stabil menjadi positif).

1.1.3 Perkembangan Pasar Keuangan

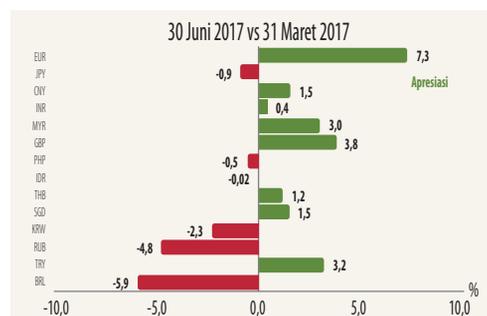
Sejalan dengan kondisi perekonomian AS dan ekspektasi pasar terhadap laju normalisasi kebijakan moneter AS yang lebih lambat serta sentimen positif domestik, pasar keuangan domestik menunjukkan pergerakan menguat. Arah penguatan ini juga diiringi oleh masuknya aliran masuk modal investor nonresiden.

Ekspektasi pasar terhadap laju normalisasi kebijakan moneter AS (kenaikan FFR dan normalisasi neraca *The Fed*) yang lebih lambat dari proyeksi awal *The Fed*, mengakibatkan aliran dana portofolio belum keluar dari pasar keuangan *emerging markets*, termasuk Indonesia. Sentimen domestik yang terjadi selama periode laporan lebih berpengaruh terhadap penguatan pasar saham domestik. IHSG tercatat tumbuh sebesar 4,7% *qtq*, dengan *net buy* investor nonresiden sebesar Rp9 triliun (triwulan I-2017: *net buy* Rp8,3 triliun). Dari sisi nilai tukar, Rupiah cenderung stabil. Secara *point-to-point* mencatat pelemahan tipis sebesar 0,02%.

Grafik I - 10 Perkembangan Indeks Saham Global dan Regional



Grafik I - 11 Perkembangan Nilai Tukar Global dan Regional



Pasar surat utang dalam negeri juga terpantau mengalami penguatan tercermin dari imbal hasil (*yield*) SBN turun rata-rata sebesar 20 *basis point*. Sebagaimana di pasar saham, arah penguatan pasar SBN pada awal 2017 ini juga diiringi oleh peningkatan aksi beli investor nonresiden. Pada triwulan II-2017, tercatat *net buy* investor nonresiden di pasar SBN sebesar Rp47,3 triliun.

1.2 PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN

1.2.1 Perkembangan Bank Umum Konvensional

Pada periode laporan¹, kondisi ketahanan BUK cukup baik ditopang permodalan yang solid dengan CAR mencapai 22,74%. Kuatnya permodalan tersebut didorong oleh meningkatnya rentabilitas (ROA) menjadi 2,47%, serta meningkatnya efisiensi yang tercermin

1. Data kinerja perbankan triwulan II-2017 menggunakan data posisi Juni 2017

Tabel I - 1 Kondisi Umum Perbankan Konvensional

Rasio	2016		2017		Δ qtq	Δ yoy	
	Juni	Desember	Maret	Juni		Triwulan II-2017	Triwulan II-2016
Bank Umum Konvensional							
Total Aset (dalam miliar rupiah)	6.146.653	6.475.602	6.571.793	6.754.376	↑ 2,78%	↑ 7,22%	↑ 9,89%
Kredit (dalam miliar rupiah)	4.010.165	4.199.713	4.191.886	4.305.803	↑ 2,72%	↑ 9,05%	↑ 7,37%
Dana Pihak Ketiga (dalam miliar rupiah)	4.397.620	4.630.352	4.703.466	4.821.228	↑ 2,50%	↑ 5,79%	↑ 9,63%
- Giro (dalam miliar rupiah)	1.055.331	1.104.583	1.123.869	1.165.754	↑ 3,73%	↑ 1,44%	↑ 10,46%
- Tabungan (dalam miliar rupiah)	1.366.924	1.487.077	1.425.243	1.489.947	↑ 4,54%	↑ 16,55%	↑ 9,00%
- Deposito (dalam miliar rupiah)	1.975.364	2.038.692	2.154.355	2.165.527	↑ 0,52%	↑ 1,63%	↑ 9,63%
CAR (%)	22,56	22,93	22,88	22,74	↓ (14)	↑ 228	↑ 18
ROA (%)	2,31	2,23	2,50	2,47	↓ (3)	↑ 2	↑ 16
NIM (%)	5,59	5,63	5,38	5,35	↓ (3)	↑ 27	↓ (24)
BOPO (%)	82,23	82,22	80,15	79,00	↓ (115)	↑ 83	↓ (322)
NPL Gross (%)	2,95	2,86	2,98	2,90	↓ (8)	↑ 49	↓ (5)
NPL Net (%)	1,39	1,20	1,29	1,35	↑ 6	↑ 17	↓ (4)
LDR (%)	91,19	90,70	89,12	89,31	↑ 19	↑ 273	↓ (188)

Ket : ↑ Menunjukkan peningkatan pertumbuhan dan berdampak baik ↓ Menunjukkan penurunan pertumbuhan dan berdampak kurang baik
 ↓ Menunjukkan penurunan pertumbuhan dan berdampak baik ↑ Menunjukkan peningkatan pertumbuhan dan berdampak kurang baik

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI) dan LBU, Juni 2017

pada penurunan rasio BOPO menjadi 79,00%. Aset dan DPK BUK juga tumbuh lebih baik dari tahun sebelumnya.

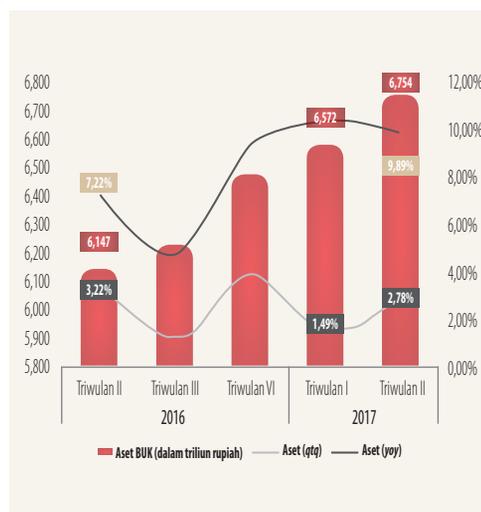
Selain itu, risiko kredit terjaga dengan menurunnya NPL gross menjadi 2,90%.

A. Aset

Pada periode laporan, Total aset BUK meningkat menjadi sebesar 9,89% (yoy) lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 7,22% (yoy). Dilihat secara kuartalan, aset BUK juga tumbuh 2,78% (qtq), meningkat dari triwulan sebelumnya (1,49% qtq). Peningkatan tersebut utamanya di dorong oleh meningkatnya kredit dan surat berharga sebagai dua komponen terbesar aset perbankan.

Secara umum, aset perbankan Indonesia terindikasi memiliki tingkat konsentrasi yang cukup tinggi. Hal tersebut tercermin dari *Concentration Ratio* (CR) aset 4 BUK terbesar yang mencapai 47,96% sedangkan *Concentration Ratio* (CR) aset 20 BUK terbesar bahkan mencapai 79,42% dari aset perbankan.

Grafik I - 12 Perkembangan Aset BUK



Sumber: SPI, Juni 2017

Tabel I - 2 Tingkat Konsentrasi Aset BUK

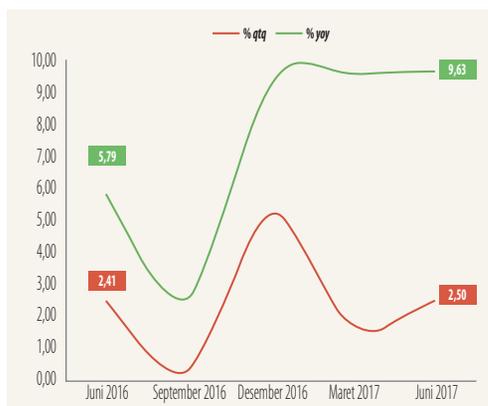
Tahun	Aset	
	CR4 (%)	CR20 (%)
2014	45,94	79,70
2015	46,24	79,47
2016	48,18	80,14
Triwulan I-2017	47,52	79,37
Triwulan II-2017	47,96	79,42

B. Dana Pihak Ketiga

Sumber dana BUK didominasi oleh DPK dengan porsi mencapai 89,30%. Pada periode laporan, DPK BUK tumbuh 2,50% (*qtq*), lebih baik dibandingkan pada triwulan sebelumnya (1,58%, *qtq*), dan secara tahunan juga mengalami pertumbuhan sebesar 9,63% (*yoy*), apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dilihat dari porsinya, komponen DPK didominasi oleh deposito sebesar 44,92%, diikuti tabungan dan giro masing-masing sebesar 30,90% dan 24,18%. Pertumbuhan DPK dipengaruhi kenaikan giro, tabungan dan deposito masing-masing sebesar 3,37% (*qtq*), 4,54% (*qtq*), dan 0,52% (*qtq*), atau lebih baik dari periode sebelumnya.

Grafik I - 13 Tren Pertumbuhan DPK



Sumber: SPI, Juni 2017

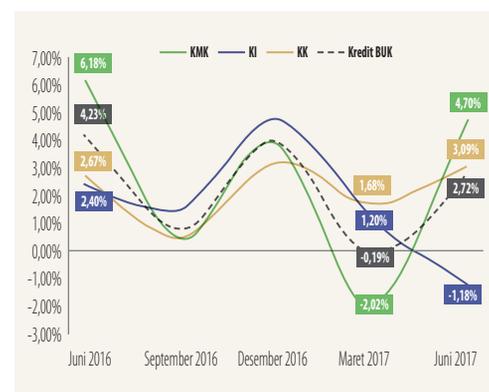
C. Kredit

Pada periode laporan kredit BUK tumbuh 7,32% (*yoy*), melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (9,05%, *yoy*). Apabila dilihat secara kuartalan kredit BUK tumbuh 2,72% (*qtq*), lebih baik dibandingkan periode sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar -0,19% (*qtq*). Peningkatan kredit pada triwulan berjalan seiring dengan adanya tren *seasonal* Hari Raya Idul Fitri.

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit masih didominasi oleh KMK sebesar 47,19%, diikuti

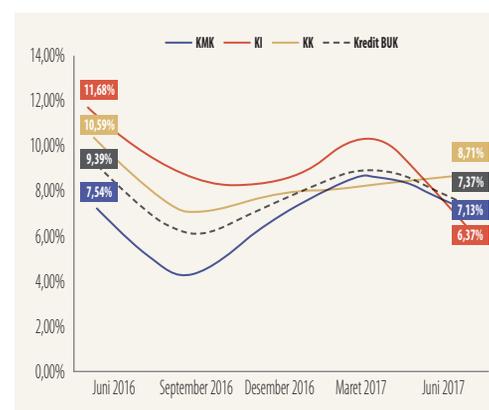
KK dan KI masing-masing sebesar 27,74% dan 25,08%. Pertumbuhan tertinggi terdapat pada KK sebesar 8,71% (*yoy*), diikuti KMK dan KI masing-masing sebesar 7,13% (*yoy*) dan 6,37% (*yoy*). Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pertumbuhan kredit ketiga jenis penggunaan tersebut juga melambat yang dipengaruhi oleh perekonomian domestik yang masih tumbuh terbatas serta harga komoditas yang tumbuh melambat meskipun terdapat *recovery* pada beberapa periode sebelumnya.

Grafik I - 14 Tren Pertumbuhan Kredit (*qtq*)



Sumber: SPI, Juni 2017

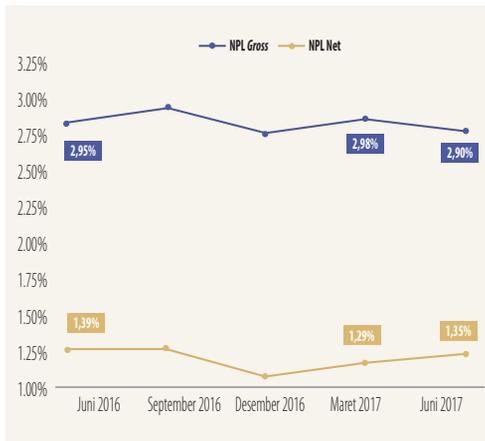
Grafik I - 15 Tren Pertumbuhan Kredit (*yoy*)



Sumber: SPI, Juni 2017

Dari ketiga jenis penggunaan, KMK dan KI memiliki NPL tertinggi sebesar 3,42% dan 3,24%, namun masih dibawah *threshold* 5%. Sementara itu, NPL KK cukup rendah sebesar 1,70%. Tingginya NPL kredit produktif (KMK dan KI) menunjukkan kinerja korporasi belum sepenuhnya pulih sehingga mempengaruhi kehati-hatian perbankan dalam menyalurkan kredit.

Grafik I - 16 Tren NPL Gross

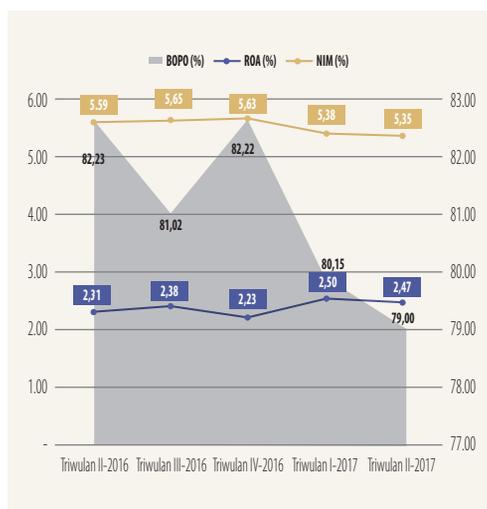


Sumber: SPI, Juni 2017

D. Rentabilitas

Rentabilitas BUK pada periode laporan, relatif stabil dengan ROA sebesar 2,47%, menurun 3 bps dari triwulan sebelumnya namun meningkat secara signifikan sebesar 16 bps (yoy) bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut didorong peningkatan laba sebesar 17,81% (yoy).

Grafik I - 17 Tren Rentabilitas dan Efisiensi



Sumber: SPI, Juni 2017

Rentabilitas tersebut didukung efisiensi yang membaik tercermin dari penurunan BOPO menjadi 79,00%.

E. Permodalan

Kondisi permodalan BUK masih solid tercermin dari CAR sebesar 22,74% meskipun sedikit melambat dibandingkan dengan periode sebelumnya, namun meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi tersebut dipengaruhi kenaikan modal BUK sebesar 8,42% (yoy) yang antara lain dipengaruhi oleh penambahan modal disetor dan kenaikan laba. Solidnya permodalan tersebut menunjukkan ketahanan BUK masih cukup kuat (*resilient*) dalam menyerap potensi terjadinya risiko.

1.2.2 Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Pada periode laporan, industri BPR sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya maupun triwulan yang sama tahun sebelumnya. Namun demikian, Permodalan BPR masih solid, didukung oleh peningkatan rentabilitas dan efisiensi. Di sisi lain, kualitas kredit BPR belum menunjukkan perbaikan, tercermin dari NPL *gross* yang meningkat menjadi 6,93%.

A. Aset

Aset BPR tumbuh 1,54% (qtq), meningkat dibandingkan periode sebelumnya (1,21%, qtt). Pertumbuhan aset BPR dipengaruhi meningkatnya kredit BPR sebagai komponen aset terbesar.

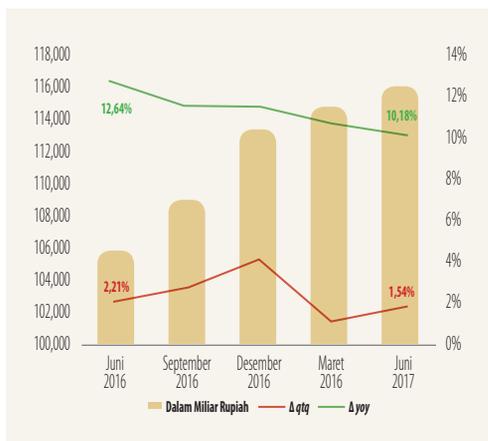
Tabel I - 3 Kondisi Umum BPR

Rasio	2016		2017		qtq	yoy	
	Juni	Desember	Maret	Juni	Triwulan II-2017	Triwulan II-2016	Triwulan II-2017
Total Aset (dalam miliar rupiah)	105.867	113.501	114.872	116.640	↑ 1,54%	↑ 12,64%	↑ 10,18%
Kredit (dalam miliar rupiah)	79.764	81.684	84.340	87.389	↑ 3,62%	↑ 8,16%	↑ 9,56%
Dana Pihak Ketiga (dalam miliar rupiah)	70.238	75.725	77.212	77.853	↑ 0,83%	↑ 14,12%	↑ 10,84%
- Tabungan (dalam miliar rupiah)	20.723	23.748	23.600	23.389	↓ -0,89%	↑ 14,72%	↑ 12,87%
- Deposito (dalam miliar rupiah)	49.516	51.977	53.612	54.465	↑ 1,59%	↑ 13,87%	↑ 9,99%
NPL Gross (%)	6,19	5,83	6,68	6,93	↑ 25	↑ 49	↑ 74
NPL Net (%)	4,51	4,20	4,88	4,59	↓ -30	↑ 95	↑ 8
ROA (%)	2,62	2,59	2,76	2,61	↓ -15	↓ -28	↓ -1
LDR (%)	79,67	76,24	77,00	79,03	↑ 203	↓ -293	↓ -64
CR (%)	14,85	19,01	15,25	15,10	↑ -15	↑ 108	↑ 25
BOPO (%)	82,33	81,19	80,81	81,39	↑ 58	↑ 28	↓ -94
CAR (%)	22,17	22,77	23,72	22,49	↑ -123	↑ 142	↑ 32

Ket : ↑ Menunjukkan peningkatan pertumbuhan dan berdampak baik ↓ Menunjukkan penurunan pertumbuhan dan berdampak kurang baik
 ↓ Menunjukkan penurunan pertumbuhan dan berdampak baik ↑ Menunjukkan peningkatan pertumbuhan dan berdampak kurang baik

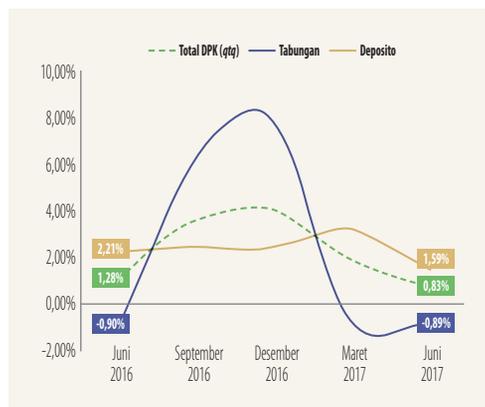
Sumber: SPI, Juni 2017

Grafik I - 18 Tren Aset BPR



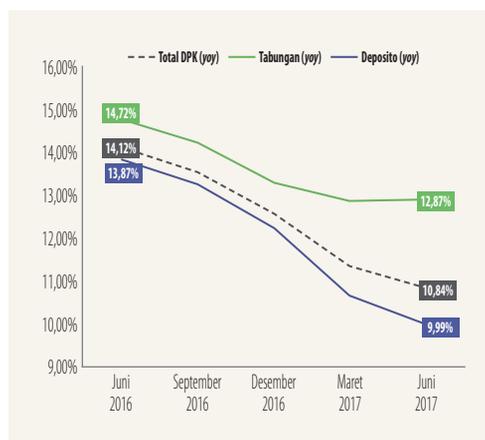
Sumber: SPI BPR, Juni 2017

Grafik I - 19 Tren Pertumbuhan DPK (qtq)



Sumber: SPI BPR, Juni 2017

Grafik I - 20 Tren Pertumbuhan DPK (yoy)



Sumber: SPI BPR, Juni 2017

B. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Porsi terbesar DPK didominasi deposito sebesar 69,96%, diikuti tabungan sebesar 30,04%. DPK BPR tumbuh melambat sebesar 0,83% (qtq), sejalan dengan melambatnya DPK industri perbankan secara keseluruhan. Perlambatan tersebut didorong oleh melambatnya pertumbuhan deposito sebesar 1,59% (qtq). Di sisi lain, tabungan berkontraksi sebesar -0,89% (qtq).

C. Kredit

Penyaluran kredit BPR tumbuh 3,62% (*qtq*), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya (3,25%, *qtq*). Apabila dilihat secara tahunan, Penyaluran kredit BPR pada triwulan II-2017 meningkat 9,56% (*yoy*), tumbuh lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 8,16% (*yoy*). Pertumbuhan kredit sejalan dengan pertumbuhan ekonomi domestik yang tercermin pada pertumbuhan KMK dan KI BPR masing-masing sebesar 9,26% (*yoy*) dan 15,52% (*yoy*). Selain itu, KK BPR yang menjadi motor penyaluran kredit BPR juga tumbuh lebih baik dari tahun sebelumnya menjadi 9,02% (*yoy*).

Dilihat dari pertumbuhannya, hampir semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan kredit. Hal tersebut utamanya di dorong oleh peningkatan kredit pada sektor perdagangan besar dan eceran serta sektor bukan lapangan usaha-lainnya.

Tabel I - 4 Kredit BPR berdasarkan Jenis Penggunaan

Jenis Penggunaan	2016		2017	Porsi	Δ <i>qtq</i>		Δ <i>yoy</i>
	Juni	Maret	Juni		Triwulan II-2017	Triwulan II-2017	
Modal Kerja	35.665	37.172	38.967	45,08%	4,83%	9,26%	
Investasi	5.287	5.965	6.107	7,07%	2,39%	15,52%	
Konsumsi	38.813	41.203	42.315	48,95%	2,70%	9,02%	
Total	79.764	84.340	86.440	100%	2,49%	8,37%	

Sumber: SPI, Juni 2017

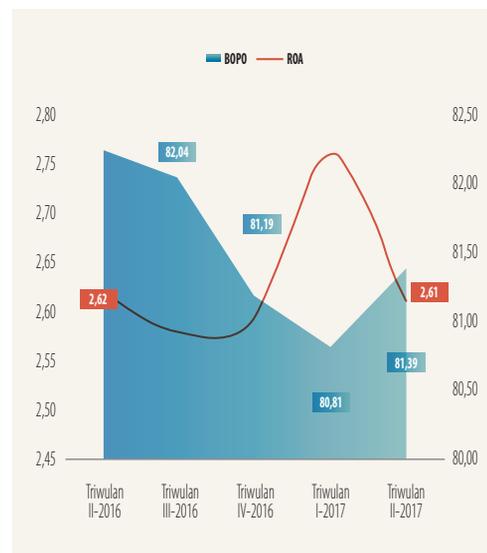
D. Rentabilitas

Rentabilitas BPR menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dengan ROA sebesar 2,61% (*qtq*). Hal tersebut didukung oleh penurunan efisiensi BPR yang tercermin dari peningkatan BOPO menjadi 81,39% (*qtq*).

E. Permodalan

Permodalan BPR masih terjaga dengan CAR sebesar 22,49%. Tingginya permodalan BPR tersebut relatif memadai untuk menyerap risiko yang dihadapi.

Grafik I - 21 ROA dan BOPO BPR



Sumber: SPI, Juni 2017

1.2.3 Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pada periode laporan, kredit UMKM tumbuh sebesar 3,93% (*qtq*), menjadi sebesar Rp830,80 triliun, meningkat dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 0,34%. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya kredit UMKM ke sektor perdagangan besar dan eceran serta industri pengolahan dan pertanian seiring dengan momen Hari Raya Idul Fitri.

Berdasarkan sektor ekonomi, kredit UMKM terpusat pada sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 53,37%, diikuti oleh industri pengolahan (10,82%), serta pertanian, perburuan dan kehutanan (8,80%). Kredit UMKM ketiga sektor tersebut tumbuh dengan sektor industri pengolahan serta sektor pertanian,

Tabel I - 5 Konsentrasi Penyaluran UMKM

Sektor Ekonomi	Nominal (dalam miliar rupiah)			Porsi			Δ qtq	Δ yoy	
	Juni 2016	Maret 2017	Juni 2017	Juni 2016	Maret 2017	Juni 2017	Triwulan II-2017	Triwulan II-2016	Triwulan II-2017
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan									
Baki Debet	64.227	67.977	73.104	8,29%	8,50%	8,80%	7,54%	11,18%	13,82%
NPL	2.813	2.892	2.693	4,38%	4,25%	3,68%	-6,88%	11,61%	-4,25%
Industri Pengolahan									
Baki Debet	79.091	84.144	89.894	10,21%	10,53%	10,82%	6,83%	6,52%	13,66%
NPL	3.174	3.536	3.408	4,01%	4,20%	3,79%	-3,62%	20,47%	7,37%
Perdagangan Besar dan Eceran									
Baki Debet	419.701	433.551	443.403	54,18%	54,23%	53,37%	2,27%	12,35%	5,65%
NPL	17.391	19.125	19.395	4,14%	4,41%	4,37%	1,41%	6,57%	11,52%
Lainnya									
Baki Debet	211.561	213.734	224.400	27,31%	26,74%	27,01%	4,99%	3,05%	6,07%
NPL	10.122	12.255	12.220	4,78%	5,73%	5,45%	-0,29%	0,89%	20,73%
Baki Debet UMKM	774.581	799.406	830.801				3,93%	8,96%	7,26%
NPL UMKM	33.500	37.808	37.716	4,32%	4,73%	4,54%	-0,24%	6,33%	12,59%

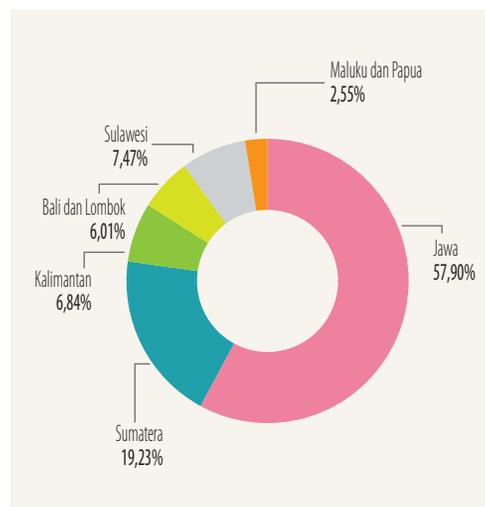
Ket: *Shaded area* merupakan rasio NPL

Sumber: SPI, Juni 2017

perburuan, dan kehutanan tumbuh diatas rata-rata industri masing-masing sebesar 6,83% (qtq) dan 7,54% (qtq). Sektor perdagangan besar dan eceran merupakan sektor pendorong pertumbuhan utama meskipun hanya tumbuh sebesar 2,27% (qtq).

Secara spasial, sebagian besar kredit UMKM terpusat di pulau Jawa dan Sumatera, di mana total porsi lima provinsi terbesar (DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara) sebesar 58,00%, sedikit menurun dari 58,39% pada triwulan sebelumnya. Sementara itu, di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, dan Papua) hanya sebesar 22,87%, meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 22,61%. Rendahnya penyaluran kredit tersebut disebabkan jumlah penduduk yang lebih sedikit, jumlah *bankable entrepreneurs* yang relatif terbatas, serta jangkauan bank yang lebih terbatas karena infrastruktur yang kurang memadai.

Grafik I - 22 Penyebaran UMKM berdasarkan Wilayah



Sumber: SPI, Juni 2017

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar kredit UMKM disalurkan oleh BUMN (56,82%) dan BUSN Devisa (35,02%). Secara kuartalan, pertumbuhan tertinggi terdapat pada kelompok KCBA dan Bank Campuran sebesar 9,72% (qtq).

Tabel I - 6 Kredit UMKM berdasarkan Kelompok Bank (dalam miliar rupiah)

Kelompok Bank	Baki Debet (dalam miliar rupiah)	Porsi	Δ <i>qtq</i>	
	Triwulan II-2016		Triwulan II-2016	Triwulan II-2017
BUMN	472.057	56,82%	3,99%	11,50%
BPD	60.133	7,24%	5,67%	12,43%
BUSN	290.937	35,02%	3,33%	2,86%
KCBA dan Campuran	7.673	0,92%	9,72%	-48,51%
Total UMKM	830.801	100%	3,93%	7,27%

Sumber: SPI Juni 2017

1.2.4 Penguatan Sektor Riil Melalui Penyaluran Kredit Produktif

Terdapat enam sektor yang menjadi prioritas pemerintah, yaitu sektor pertanian, perikanan, pertambangan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, serta industri pengolahan. Keenam

sektor tersebut penting bagi perekonomian Indonesia karena mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar, menciptakan dampak lanjutan bagi sektor ekonomi lainnya, serta menjadi kontributor yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran merupakan sektor ekonomi lapangan usaha yang paling banyak menerima kredit perbankan dengan porsi masing-masing sebesar 17,47% dan 18,82%. Selain itu, untuk sektor non lapangan usaha, penerima kredit perbankan dengan porsi terbesar adalah sektor rumah tangga yaitu sebesar 23,03%.

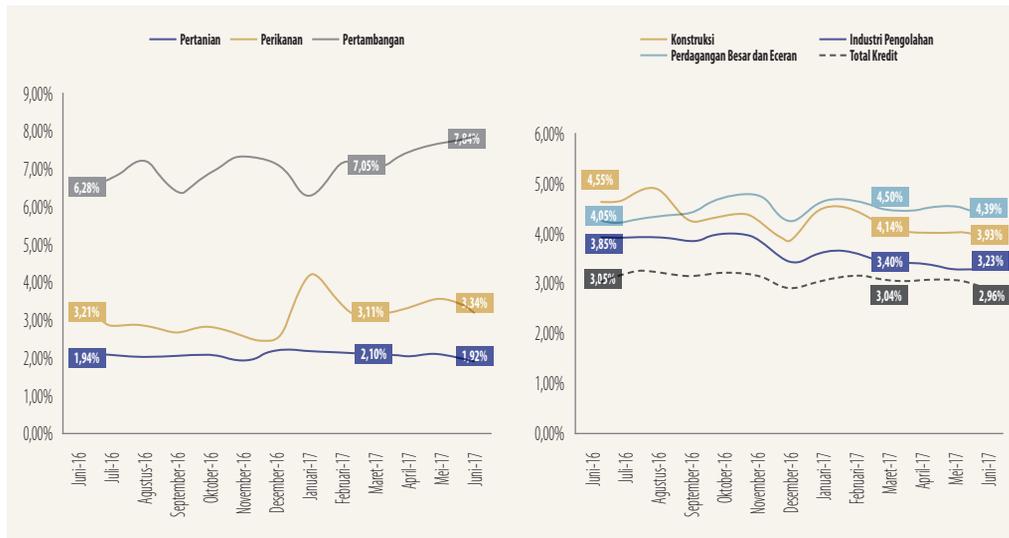
Penyaluran kredit pada periode ini tumbuh 2,77% (*qtq*), meningkat dibanding periode sebelumnya yang berkontraksi 0,17% (*qtq*). Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor *seasonal* Hari Raya Idul Fitri yang turut meningkatkan kredit antara lain pada sektor rumah tangga dan industri

Tabel I - 7 Konsentrasi Kredit Perbankan Menurut Sektor Ekonomi (%)

No.	Sektor Ekonomi	Kredit (dalam triliun rupiah)				<i>qtq</i> Triwulan II-2017	<i>yoy</i> Triwulan II-2016	<i>yoy</i> Triwulan II-2017	Porsi
		Maret 2016	Juni 2016	Maret 2017	Juni 2017				
Lapangan Usaha									
1	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	252,96	266,09	284,46	296,65	4,29%	20,09%	11,49%	6,61%
2	Perikanan	9,13	9,26	9,78	10,29	5,14%	14,11%	11,14%	0,23%
3	Pertambangan dan Penggalian	120,77	119,95	124,80	122,47	-1,87%	-14,47%	2,10%	2,73%
4	Industri Pengolahan	729,42	745,52	756,53	784,68	3,72%	6,01%	5,25%	17,47%
5	Listrik, Gas, dan Air	98,63	111,13	138,23	127,07	-8,07%	26,41%	14,34%	2,83%
6	Konstruksi	170,30	192,66	215,28	234,15	8,76%	18,03%	21,54%	5,21%
7	Perdagangan Besar dan Eceran	779,60	819,93	836,52	845,29	1,05%	7,90%	3,09%	18,82%
8	Penyediaan Akomodasi dan PMM	88,08	90,76	94,40	96,72	2,46%	15,11%	6,57%	2,15%
9	Transportasi	175,91	177,59	171,08	173,98	1,70%	2,70%	-2,04%	3,87%
10	Perantara Keuangan	167,33	179,55	196,33	212,05	8,01%	11,44%	18,10%	4,72%
11	<i>Real Estate</i>	184,04	198,24	206,87	211,33	2,16%	16,69%	6,60%	4,71%
12	Administrasi Pemerintahan	13,52	13,69	22,64	22,19	-1,97%	24,26%	62,07%	0,49%
13	Jasa Pendidikan	8,10	8,43	8,89	9,25	4,06%	13,32%	9,66%	0,21%
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	15,06	16,24	16,57	17,45	5,32%	18,71%	7,40%	0,39%
15	Jasa Kemasyarakatan	53,74	56,27	58,49	60,22	2,95%	-7,32%	7,02%	1,34%
16	Jasa Perorangan	2,61	2,66	2,64	2,68	1,36%	-2,39%	0,87%	0,06%
17	Badan Internasional	0,08	0,19	0,19	0,16	-15,10%	118,90%	-14,34%	0,00%
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	11,22	12,04	2,39	3,25	35,74%	14,58%	-73,02%	0,07%
Bukan Lapangan Usaha									
19	Rumah Tangga	922	944	1.002	1.034	3,22%	9,11%	9,55%	23,03%
20	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	197,55	204,04	221,86	227,04	2,34%	7,58%	11,27%	5,06%
Total Industri		4.000	4.168	4.370	4.491	2,77%	8,89%	7,75%	100%

Sumber: Diolah dari Statistik Perbankan Indonesia, Juni 2017

Grafik I - 23 NPL Gross Sektor Ekonomi



Sumber: SPI, Juni 2017

pengolahan. Selain itu, kredit kepada sektor perdagangan besar dan eceran juga tumbuh meskipun relatif terbatas. Meningkatnya kredit rumah tangga menunjukkan bahwa konsumsi masih menjadi motor penggerak perekonomian. Peningkatan kredit rumah tangga utamanya di dorong oleh kredit kepemilikan rumah tinggal dan kendaraan bermotor. Sementara itu, tingginya kredit pada sektor konstruksi sejalan dengan berlanjutnya proyek pembangunan infrastruktur pemerintah dan konstruksi swasta.

Di sektor ekonomi bukan lapangan usaha, kredit rumah tangga tumbuh 1,50% (*q*₁_q) melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Perlambatan tersebut antara lain dipengaruhi Kredit sektor perdagangan besar dan eceran menunjukkan perlambatan dari 7,90% (*y*₀) pada periode yang sama tahun sebelumnya

menjadi 3,09% (*y*₀). Perlambatan antara lain dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi global yang masih terbatas. Meskipun demikian, peningkatan kredit pada sektor ini antara lain ditopang oleh meningkatnya penyaluran kredit kepada subsektor perdagangan besar dalam negeri (a.l. penjualan makanan dan minuman, tekstil, produk antara), perdagangan eceran, dan penjualan kendaraan bermotor.

Di sisi lain, perbaikan signifikan terjadi pada kredit sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh 2,10% (*y*₀), dibandingkan Juni 2016 yang berkontraksi 14,47% (*y*₀). Hal tersebut utamanya ditopang oleh meningkatnya kredit pada subsektor pertambangan biji logam. Selain itu, kredit pada subsektor pertambangan lainnya juga membaik seiring dengan mulai pulihnya harga komoditas meskipun masih terbatas.

Risiko kredit pada triwulan II-2017 menurun yang tercermin dari turunnya NPL *gross* menjadi 2,96%. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, perbaikan kualitas kredit terdapat pada beberapa sektor antara lain pada sektor industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran; konstruksi; serta pertanian, perburuan, dan kehutanan. Perbaikan kualitas kredit terjadi seiring dengan pemulihan ekonomi global meskipun masih terbatas. Sektor perikanan menunjukkan sedikit peningkatan NPL menjadi 3,34%, namun masih terjaga di bawah *threshold* 5%. Sementara itu, sektor pertambangan masih belum menunjukkan perbaikan kualitas kredit dengan NPL sebesar 7,84%.

1.3 PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL

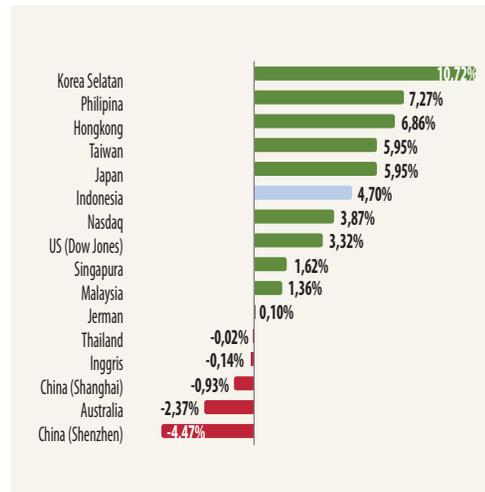
1.3.1 Perkembangan Perdagangan Efek

Selama triwulan II-2017 Pasar Modal Indonesia menunjukkan peningkatan yang dipengaruhi kinerja Emiten yang lebih baik dibandingkan periode sebelumnya dan stabilitas indikator makro ekonomi domestik masih terjaga, serta naiknya proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2017 menjadi 3,5%

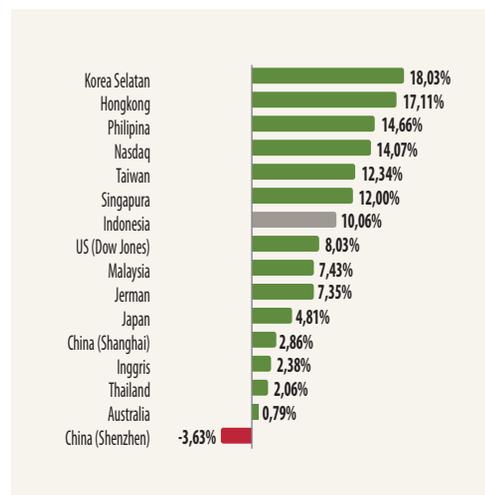
Dari sisi domestik, hal-hal yang mempengaruhi kinerja Pasar Modal di antaranya Bank Indonesia menahan BI *7-days* Repo Rate di level 4,75%, dengan suku bunga *Deposit Facility* tetap 4,00% dan *Lending Facility* tetap 5,50%. S&P merilis revisi *rating* surat utang Indonesia tenor 10 tahun ke level *investment grade*, serta penguatan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS menjadi Rp 13.319,-/USD.

Faktor-faktor tersebut membuat kinerja indeks saham dan obligasi mengalami peningkatan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada penutupan akhir periode laporan berada pada posisi 5.829,71 atau mengalami kenaikan sebesar 4,70% jika dibandingkan dengan posisi pada akhir periode sebelumnya.

Grafik I - 24 Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama (qtq)



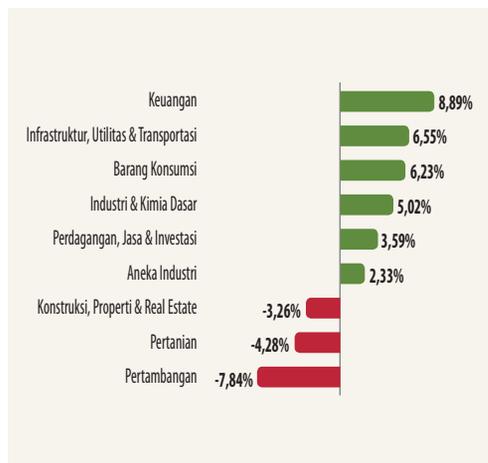
Grafik I - 25 Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama (ytd)



Nilai kapitalisasi pasar saham mengalami kenaikan sebesar 5,24% atau menjadi Rp6.372,81 triliun. Rata-rata nilai perdagangan per hari mengalami kenaikan sebesar Rp1.450,21 miliar (20,73%) menjadi sebesar Rp8.445,45 miliar. Di sisi lain, volume perdagangan dan frekuensi per hari mengalami penurunan masing-masing sebesar Rp4.989,52 juta (-31,13%) dan 35 kali (-10,52%) menjadi sebesar Rp11.036,95 juta dan 301 kali transaksi. Secara regional, IHSG menempati posisi keenam setelah Jepang dengan pertumbuhan sebesar 4,70% (qtq) dan 10,06% (ytd).

Sebagian besar kinerja indeks sektoral mengalami kenaikan di mana kenaikan tertinggi terdapat pada indeks sektor keuangan sebesar 8,89%. Peningkatan indeks tersebut dipengaruhi oleh Moody's yang meningkatkan *outlook* industri perbankan Indonesia dari stabil menjadi positif. Di sisi lain, indeks yang mengalami penurunan terbesar yakni indeks pertambangan sebesar -7,84%. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan harga minyak setelah meningkat pada 2016 serta *futures market* menunjukkan bahwa sampai dengan 2019 harga minyak akan tetap berada pada level rendah yaitu di sekitar harga psikologis sebesar USD50/barel.

Grafik I - 26 Perkembangan Indeks Industri (qtq)



Grafik I - 27 Perkembangan IHSG dan Nilai Rata-rata Perdagangan Saham Harian

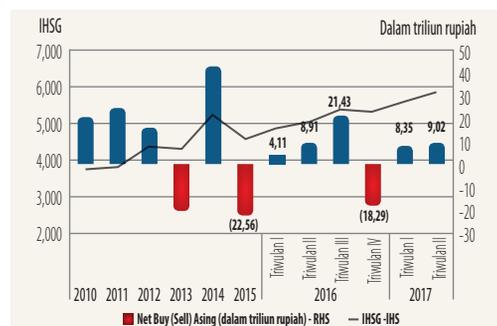


Tabel I - 8 Perkembangan Transaksi Perdagangan Saham

Indikator (Rata-rata harian)	2016				2017	
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II
Nilai Perdagangan Saham Harian (dalam miliar rupiah)	5.707,40	5.827,91	7.959,78	10.470,64	6.995,23	8.445,45
Investor Asing (dalam miliar rupiah)						
Beli	2.682,89	2.528,81	3.451,13	2.596,91	2.411,95	3.365,73
Jual	2.615,57	2.387,30	3.087,85	2.860,15	2.227,32	3.195,46
Investor Domestik (dalam miliar rupiah)						
Beli	3.024,52	3.299,11	4.508,65	7.900,73	4.583,28	5.079,71
Jual	3.091,84	3.440,61	4.871,92	7.610,49	4.717,91	5.249,99
Frekuensi Perdagangan Saham Harian	236.976	242.989	282.768	294.098	336.568	301.152

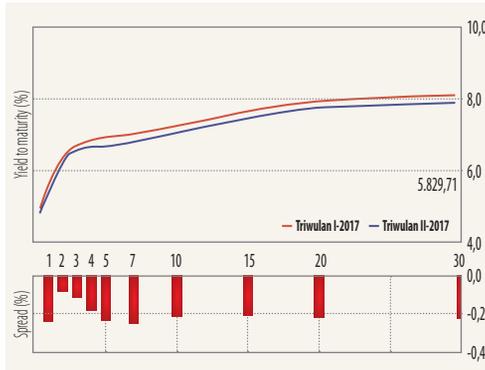
Selama triwulan II-2017, transaksi investor asing membukukan *net buy* sejumlah Rp9,02 triliun.

Grafik I - 28 Perkembangan IHSG dan Net Asing



Periode	IHSG	Net Sell/Buy (dalam triliun rupiah)
2015	Triwulan I	2015
	Triwulan II	(1,65)
	Triwulan III	(16,87)
	Triwulan IV	(9,46)
Total		-22,59
2016	Triwulan I	2016
	Triwulan II	8,91
	Triwulan III	21,43
	Triwulan IV	(18,29)
Total		16,17
2017	Triwulan I	2017
	Triwulan II	9,02
Total		17,37

Grafik I - 29 Indonesia Government Securities Yield Curve (IBPA-IGSYC)



Secara umum kinerja pasar Obligasi mengalami peningkatan dibanding periode sebelumnya tercermin dari penurunan rata-rata *yield* Obligasi Pemerintah untuk seluruh tenor sebesar -21 *bps* serta Rata-rata *yield* tenor pendek, menengah, dan panjang mengalami penurunan masing-masing sebesar -15,7 *bps*, -23,6 *bps*, dan -21,5 *bps*.

Tabel I - 9 Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Utang (laporan CTP PLTE)

Jenis Transaksi	Triwulan I-2017			Triwulan II-2017		
	Volume (dalam triliun rupiah)	Nilai (dalam triliun rupiah)	Frekuensi (Kali)	Volume (dalam triliun rupiah)	Nilai (dalam triliun rupiah)	Frekuensi (Kali)
Obligasi:						
- Korporasi	58,84	59,18	6.212	68,47	68,61	6.386
- SBN	955,64	965,92	48.514	814,57	841,36	45.205
Total	1.014,48	1.025,10	54.726	883,04	909,96	51.591
Repo	103,72	100,12	369	60,76	60,54	248

Volume perdagangan obligasi pemerintah, nilai perdagangan pemerintah dan frekuensi transaksi mengalami penurunan jika dibandingkan dengan triwulan I-2017 yaitu masing-masing sebesar Rp141,07 triliun (-14,76%), Rp124,56 triliun (-12,90%) dan 3.309 kali transaksi (-6,82%) menjadi Rp814,57 triliun, Rp841,36 triliun dan 45.205 kali.

Pada obligasi korporasi, volume, nilai dan frekuensi transaksi perdagangan mengalami peningkatan masing-masing sebesar Rp9,63 triliun (+16,36%), Rp9,43 triliun (+15,93%) dan 174 kali transaksi (+2,80%) menjadi Rp68,47 triliun, Rp68,61 triliun dan 6.386 kali.

1.3.2 Perkembangan Perusahaan Efek

Tabel I - 10 Jumlah Perusahaan Efek

No	Jenis Izin Usaha	Jumlah
1	Perantara Pedagang Efek	34
2	Penjamin Emisi Efek *)	3
3	Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek	87
4	Perantara Pedagang Efek + Manajer Investasi	2
5	Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	-
6	Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	3
Total		129

*) Khusus izin Penjamin Emisi Efek yang tidak melakukan aktivitas sebagai Perantara Pedagang Efek

Pada periode laporan, tidak terdapat penerbitan izin baru atau peningkatan izin usaha Perusahaan Efek (PE), namun terdapat tiga pencabutan izin usaha Perusahaan Efek sehingga jumlah PE yang terdaftar di OJK menjadi 129 PE. Terkait dengan kegiatan PE di berbagai lokasi selain Kantor Pusat, OJK mencatat pelaporan pembukaan sejumlah 16 lokasi kantor cabang dan penutupan sejumlah tujuh lokasi kantor cabang.

Tabel I - 11 Jumlah Lokasi Kegiatan PE Selain Kantor Pusat

Periode	2017	2017
	s.d Triwulan I	s.d Triwulan II
Jumlah lokasi selain Kantor Pusat	669	678

Terkait izin Wakil Perusahaan Efek, OJK menerbitkan izin orang perorangan sebanyak 116 izin dengan rincian 108 izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan sebanyak delapan izin Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) sehingga jumlah pemegang izin mencapai 9.169 WPPE dan 2.032 WPEE.

Tabel I - 12 Proses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek

Jenis Izin	Triwulan I 2017		Triwulan II 2017		Izin Total s/d Triwulan II	Total Pemegang Izin
	Dokumen yang Masuk	Pembelian Izin	Dokumen yang Masuk	Pembelian Izin		
WPPE	183	96	181	108	204	9.169
WPEE	11	6		8	14	2.032
Total	194	102		116	218	11.201

Pada periode laporan OJK menerima 198 dokumen perpanjangan izin dengan rincian 191 dokumen perpanjangan izin WPPE dan tujuh dokumen perpanjangan izin WPEE serta menerbitkan 94 perpanjangan izin WPPE dan tujuh perpanjangan izin WPEE. Selanjutnya, OJK menerbitkan 246 perpanjangan izin dengan rincian 227 perpanjangan izin WPPE dan 19 perpanjangan izin WPEE sehingga secara total OJK menerbitkan 5.204 perpanjangan izin dengan rincian 4.482 perpanjangan izin WPPE dan 677 perpanjangan izin WPEE.

Tabel I - 13 Proses Perpanjangan Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek

Jenis Izin	Triwulan I 2017		Triwulan II 2017		Izin Total s/d Triwulan II	Total
	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin		
WPPE	244	133	191	94	227	4.482
WPEE	20	12	7	7	19	677
Total	264	145	198	101	246	5.204

OJK menerima 362 dokumen perizinan dengan rincian 333 dokumen permohonan izin WPPEP dan 29 permohonan WPPEPT serta menerbitkan 21 izin WPPEP dan dua untuk izin WPPEPT. Sampai akhir periode laporan total izin WPPEP sebanyak 40 dan WPPEPT sebanyak dua.

Tabel I - 14 Proses Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas

Jenis Izin	Triwulan I 2017		Triwulan II 2017		Izin Total s/d Triwulan II	Total
	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin		
WPPEP	118	19	333	21	40	40
WPPEPT	4	0	29	2	2	2
Total	122	19	362	23	42	42

1.3.3 Perkembangan Pengelolaan Investasi

Sepanjang triwulan II-2017, kinerja Reksa Dana menunjukkan pertumbuhan yang cukup

menggembirakan tercermin dari pertumbuhan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana sebesar Rp18,42 triliun (5,05%) menjadi Rp382,84 triliun.

Pada triwulan II-2017, NAB Reksa Dana Pendapatan Tetap menunjukkan kenaikan jumlah NAB terbesar yaitu Rp6,90 triliun (9,01%), diikuti oleh Reksa Dana Terproteksi Rp5,43 triliun (6,11%), Reksa Dana Pasar Uang Rp4,71 triliun (11,52%), Reksa Dana Syariah Rp1,61 triliun (9,29%), Reksa Dana Campuran Rp1,25 triliun (5,48%), dan Reksa Dana Indeks Rp0,13 triliun (15,17%). Di sisi lain, Reksa Dana Saham mengalami penurunan sebesar Rp1,58 triliun (-1,44%) dan ETF sebesar Rp0,026 triliun (-0,36%) banyaknya *redemption* untuk merealisasikan keuntungan/melakukan *profit taking* kembali atas investasi dalam portofolio saham pada periode sebelumnya.

Tabel I - 15 Perkembangan NAB per Jenis Reksa Dana

NAB Per Jenis Reksa Dana	2016 (dalam triliun rupiah)			2017 (dalam triliun rupiah)	
	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II
RD Pasar Uang	26,96	30,51	28,54	40,89	45,59
RD Pendapatan Tetap	62,94	68,67	69,56	76,54	83,44
RD Saham	112,41	101,89	113,10	109,73	108,16
RD Campuran	21,15	22,16	21,05	22,75	24,00
RD Terproteksi	70,57	75,40	84,92	88,86	92,29
RD Indeks	0,86	0,51	0,60	0,87	1,00
ETF	4,65	5,49	6,06	7,46	7,44
RD Syariah*	9,90	12,09	14,91	17,31	18,91
Total	309,44	316,72	338,75	364,42	382,84

*) termasuk ETF Saham Syariah

Selanjutnya, dana kelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) meningkat sebesar 23,80% menjadi Rp20,08 triliun. Namun demikian, jumlah kontrak RDPT mengalami penurunan menjadi 76 RDPT dimana 54 RDPT proyek dengan dana kelolaan sebesar Rp16,09 triliun dan 22 RDPT non proyek dengan dana kelolaan sebesar Rp3,99 triliun.

Tabel I - 16 Perkembangan Reksa Dana Dan Produk Investasi Lainnya

Jenis Investasi	2016			2017	
	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II
Reksa Dana					
Jumlah	1.226	1.347	1.425	1.491	1.552
Total NAB	309,44	316,72	338,75	364,42	382,84
RDPT					
Jumlah	63	69	73	77	76
Total NAB	20,47	19,19	17,64	16,22	20,08
EBA					
Jumlah	7	7	7	7	7
Nilai Sekuritisasi	2,13	1,96	1,79	1,63	1,56
EBA-SP					
Jumlah	1	2	3	3	4
Nilai Sekuritisasi	0,20	0,70	1,70	1,43	2,47
DIRE					
Jumlah	1	2	2	3	3
Total Nilai	0,56	0,56	0,56	0,56	0,59
KPD					
Jumlah	279	317	372	372	377
Total Nilai	144,59	165,62	164,01	177,89	187,09

*) Dalam Rp triliun

Selama periode laporan, OJK menerbitkan satu surat izin baru Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP), sehingga EBA-SP berjumlah empat KIK dengan dana kelolaan sebesar Rp2,47 triliun. Adapun selama periode laporan OJK tidak menerbitkan izin baru untuk Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (EBA), sehingga jumlah KIK EBA tetap berjumlah tujuh KIK dengan dana kelolaan sebesar Rp1,56 triliun atau menurun sebesar 4,29%. Penurunan tersebut karena adanya hutang (KPR) yang menjadi sekuritisasi dalam KIK EBA yang telah jatuh tempo. Selain itu, OJK juga menerbitkan satu Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estate (KIK DIRE) sehingga berjumlah empat KIK DIRE dengan dana kelolaan sebesar Rp0,59 triliun atau meningkat sebesar 5,36% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) meningkat sebesar 5,63% menjadi Rp187,09 triliun. Selain itu, jumlah kontrak KPD juga meningkat sebesar 1,34% menjadi 377 KPD. Sampai akhir periode laporan, OJK menerbitkan 182 Surat Efektif pernyataan pendaftaran Reksa Dana yang unit penyertaannya ditawarkan melalui penawaran umum.

Tabel I - 17 Jenis Reksa Dana Yang Mendapat Surat Efektif

Jenis Reksa Dana	Jumlah Surat Efektif
Reksa Dana Saham	18
Reksa Dana Campuran	20
Reksa Dana Pendapatan Tetap	24
Reksa Dana Pasar Uang	12
Reksa Dana Terproteksi	88
ETF-Pendapatan Tetap	1
ETF-Saham	2
Reksa Dana Syariah Campuran	2
Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap	3
Reksa Dana Syariah Saham	4
Reksa Dana Syariah Terproteksi	4
Reksa Dana Syariah Pasar Uang	2
Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Luar Negeri	1
Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk	1
Total	182

OJK menerbitkan 55 surat pembubaran Reksa Dana yang terdiri dari 53 Reksa Dana Konvensional dan dua Reksa Dana Syariah. Adapun rincian pembubaran Reksa Dana tersebut terdiri dari :

- 34 Reksa Dana Terproteksi terdiri dari 29 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK dan lima Reksa Dana tidak terpenuhinya minimum dana kelolaan;
- Satu Reksa Dana Campuran yang dibubarkan karena tidak dapat memenuhi minimum dana kelolaan;
- Enam Reksa Dana Saham terdiri dari empat Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK dan dua Reksa Dana tidak terpenuhinya minimum dana kelolaan;
- Tiga Reksa Dana Pendapatan Tetap terdiri dari dua Reksa Dana dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari berturut-turut dan satu Reksa Dana dibubarkan karena tidak dapat memenuhi minimum dana kelolaan;
- Sembilan Reksa Dana Pasar Uang terdiri dari enam Reksa Dana Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK, dua Reksa

Dana karena tidak dapat memenuhi minimum dana kelolaan, dan satu Reksa Dana karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari berturut-turut;

- Satu Reksa Dana Syariah Saham dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK
- Satu Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK.

Terdaftar APERD, sehingga jumlah MI dan APERD masing-masing menjadi 87 MI dan 34 APERD. Selain itu, OJK tidak menerbitkan izin kepada PI institusi sehingga tetap berjumlah 3 PI institusi.

Adapun pelaku individu industri Pengelolaan investasi mengalami peningkatan pada WAPERD sebesar 0,51%. Di sisi lain WMI mengalami penurunan sebesar 40,82%. Penurunan tersebut dikarenakan adanya 1.339 izin WMI yang dicabut dikarenakan tidak melakukan perpanjangan izin WMI. Selain itu, selama periode ini OJK tidak menerbitkan izin kepada PI individu.

Tabel I - 18 Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin

INDIVIDU	2016			2017	
	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II
Wakil Manajer Investasi (WMI)	2.932	2.959	3.043	3.136	1.856
Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD)	20.912	21.672	22.271	23.182	23.300
Penasehat Investasi (PI)	3	4	4	4	4
INSTITUSI					
Manajer Investasi (MI)	84	84	85	85	87
Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)	30	30	32	32	34
Penasehat Investasi (PI)	2	2	3	3	3

Selama periode triwulan II-2017, OJK memberikan dua izin MI dan dua Surat Tanda

1.3.4 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik

Selama triwulan II-2017, jumlah dan nilai emisi Penawaran Umum mengalami peningkatan masing-masing sebesar 455% dan 541%. Jumlah emisi Penawaran Umum Perdana Saham meningkat sebesar 157%, namun untuk nilai emisi menurun sebesar -23%. Jumlah emisi Penawaran Umum Terbatas mengalami penurunan sebesar -25%, namun terdapat peningkatan nilai emisi sebesar 19%. Terdapat peningkatan jumlah emisi dan nilai emisi pada Penawaran Umum Obligasi sebesar 13% dan 56%.

Tabel I - 19 Tabel Perkembangan Jumlah dan Nilai Emisi

Jenis Penawaran Efek	Triwulan II-2016		Triwulan I-2017		Triwulan II-2017		Δ (%) Jumlah Emisi Triwulan II-2016 : Triwulan II-2017	Δ % Nilai Emisi Triwulan II-2016 : Triwulan II-2017
	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (dalam miliar rupiah)	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (dalam miliar rupiah)	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (dalam miliar rupiah)		
Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	7	4.190	2	571	18	3.222	157%	-23%
Penawaran Umum Terbatas (PUT/ <i>Rights Issue</i>)	12	37.244	8	9.491	9	44.269	-25%	19%
Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang	30	39.615	36	56.246	34	61.878	13%	56%
a. Obligasi/ Sukuk +Subordinasi	7	6.940	0	0	7	7.860	0%	13%
b. PUB Obligasi/ Sukuk Tahap I	15	21.480	1	500	18	34.620	20%	61%
c. PUB Obligasi/ Sukuk Tahap II dst	8	11.195	12	22.592	9	19.398	13%	73%
Total Emisi	11	17.072	23	33.154	61	109.369	455%	541%

Tabel I - 20 Tabel Perkembangan Nilai Emisi Berdasarkan Sektor Industri pada Triwulan II-2017

No	Sektor Industri	Penawaran Umum Perdana	Penawaran Umum Terbatas	Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang
1	Perbankan	-	7.384.828	24.810.000
2	Asuransi dan Pembiayaan	80.430	177.314	9.150.000
3	Sekuritas dan Investasi	-	-	1.100.000
4	Perdagangan	445.271	232.619	3.200.000
5	Perhubungan dan Telekomunikasi	82.500	95.718	5.880.000
6	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata dan Perusahaan Jasa Lainnya	252.108	1.295.046	-
7	Properti dan Perhotelan	587.563	-	-
8	Real Estate dan Konstruksi	578.560	-	5.468.000
9	Tekstil, Garmen, dan Alas Kaki	-	-	-
10	Barang Konsumsi	640.329	-	2.000.000
11	Aneka Industri Lainnya	852.822	-	400.000
12	Industri Dasar	-	-	3.000.000
13	Industri Logam	-	-	-
14	Industri Kimia	-	-	4.569.500
15	Agrobisnis	-	-	1.000.000
16	Pertambangan dan Kehutanan	-	35.083.696	1.300.000
Total		3.519.583	44.269.221	61.877.500

(dalam jutaan rupiah)

A. Penawaran Umum Perdana Saham

Selama periode laporan, terdapat 20 perusahaan yang mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, di mana sebanyak 18 Perusahaan telah mendapat surat efektif.

Tabel I - 21 Perusahaan Yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham

No.	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Tanggal Efektif	Nilai Emisi (dalam jutaan rupiah)
1	PT Forzaland Indonesia Tbk	Properti dan Perhotelan	18 April 2017	68.750
2	PT Sanurhastha Tbk	Properti dan Perhotelan	20 April 2017	27.563
3	PT Sariguna Primatirta Tbk.	Barang dan Konsumsi	21 April 2017	51.750
4	PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk	Real Estate dan Konstruksi	28 April 2017	62.100
5	PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk.	Perhubungan dan Telekomunikasi	28 April 2017	82.500
6	PT Terregra Asia Energy Tbk.	Perdagangan	28 April 2017	110.000
7	PT Alfa Energi Investama Tbk	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata, dan Perusahaan Jasa Lainnya	29 Mei 2017	150.000

8	PT First Indo American Leasting Tbk	Asuransi dan Pembiayaan	30 Mei 2017	80.430
9	PT Totalindo Eka Persada Tbk.	Real Estate dan Konstruksi	09 Juni 2017	516.460
10	PT Hartadinata Abadi Tbk	Barang dan Konsumsi	12 Juni 2017	331.579
11	PT Kirana Megatara Tbk.	Aneka Industri Lainnya	12 Juni 2017	527.822
12	PT Buyung Poetra Sembada Tbk	Barang dan Konsumsi	14 Juni 2017	217.000
13	PT Megapower Makmur Tbk.	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata, dan Perusahaan Jasa Lainnya	16 Juni 2017	49.020
14	PT Integra Indocabinet Tbk.	Aneka Industri Lainnya	14 Juni 2017	325.000
15	PT Armidian Karyatama Tbk	Properti dan Perhotelan	14 Juni 2017	491.250
16	PT MAP Boga Adiperkasa Tbk.	Perdagangan	14 Juni 2017	372.523
17	PT Marga Abhinaya Abadi Tbk.	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata, dan Perusahaan Jasa Lainnya	16 Juni 2017	53.088
18	PT Mark Dynamics Indonesia Tbk.	Barang dan Konsumsi	21 Juni 2017	40.000
TOTAL				3.556.835

B. Penawaran Umum Terbatas (*Right Issue*)

Selama triwulan II-2017, terdapat 12 perusahaan yang menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Terbatas dan sembilan perusahaan telah mendapatkan Pernyataan Efektif dengan nilai emisi Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau *right issue* sebesar Rp44.3triliun.

Tabel I - 22 Perusahaan Yang Melakukan Penawaran Umum Terbatas

No.	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Tanggal Efektif	Nilai Emisi (dalam jutaan rupiah)
1	PT Verena Multi Finance Tbk	Asuransi dan Pembiayaan	27 April 2017	177.314
2	PT Bank Permata Tbk.	Perbankan	08 Mei 2017	2.999.678
3	PT Intraco Penta Tbk	Perdagangan	23 Mei 2017	232.619
4	PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	Perbankan	07 Juni 2017	1.319.998

5	PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	Perbankan	12 Juni 2017	1.006.222
6	PT Bank QNB Indonesia Tbk	Perbankan	21 Juni 2017	2.058.930
7	PT Bumi Resources Tbk	Pertambangan dan Kehutanan	22 Juni 2017	35.083.696
8	PT Logindo Samudera makmur Tbk	Perhubungan dan Telekomunikasi	19 Juni 2017	95.718
9	PT MNC Sky Vision Tbk	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata, dan Perusahaan Jasa Lainnya	22 Juni 2017	1.295.046
TOTAL				44.269.221

C. Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang

Pada periode laporan, terdapat tujuh Perusahaan melakukan Penawaran Umum Obligasi, 18 Perusahaan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi (PUB Obligasi) Tahap I dan sembilan Perusahaan yang telah melakukan PUB Obligasi Tahap II dan seterusnya dengan total nilai emisi sebesar Rp61.88triliun.

Tabel I - 23 Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang

Penawaran Umum obligasi					
No	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Jenis PUB	Tanggal Efektif	Nilai Emisi (dalam jutaan rupiah)
1	PT Indofood Sukses Makmur Tbk	Barang Konsumsi	Obligasi	22 Mei 2017	2.000.000
2	PT Oto Multiartha	Asuransi dan Pembiayaan	Obligasi	22 Mei 2017	1.000.000
3	PT Chandra Sakti Utama Leasing	Asuransi dan Pembiayaan	Obligasi	21 Juni 2017	500.000
4	PT Bank Mandiri Taspen Pos	Perbankan	Obligasi	21 Juni 2017	3.000.000
5	PT Bank Pembangunan Daerah Lampung	Perbankan	Obligasi	21 Juni 2017	610.000
6	PT Bank Capital Indonesia Tbk	Perbankan	Obligasi	22 Juni 2017	250.000
7	PT BRI Indonesia Agroniaga Tbk.	Perbankan	Obligasi	22 Juni 2017	500.000
Total					7.860.000

Tabel I - 24 Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang

PUB Obligasi Tahap I					
No	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Jenis PUB	Tanggal Efektif	Nilai Emisi (dalam jutaan rupiah)
1	PT Federal International Finance	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi III Tahap I	18 April 2017	3.500.000
2	PT Aneka Gas Industri Tbk	Aneka Industri Lainnya	PUB Obligasi I Tahap I dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I	23 Mei 2017	400.000
3	PT Indosat Tbk	Perhubungan dan Telekomunikasi	PUB II Tahap I	23 Mei 2017	2.700.000
			Sukuk Ijarah II Tahap I		300.000
4	PT Sumber Alfaria Trijaya	Perdagangan	PUB II Tahap I	16 Mei 2017	1.000.000
5	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.	Industri Dasar		14 Juni 2017	3.000.000
6	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi IV Tahap I	14 Juni 2017	1.000.000
7	PT Lautan Luas Tbk	Perdagangan	PUB Obligasi II Tahap I	15 Juni 2017	200.000
8	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Real Estate dan Konstruksi	PUB Obligasi II Tahap I	16 Juni 2017	3.500.000
9	PT AKR Corporindo Tbk.	Industri Kimia	PUB Obligasi I Tahap I	20 Juni 2017	1.000.000
10	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Perdagangan	PUB Obligasi I Tahap I dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I	21 Juni 2017	2.000.000
11	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Perbankan	PUB Obligasi I Tahap I	22 Juni 2017	3.000.000
12	PT Global Mediacom Tbk	Sekuritas dan Investasi	PUB Obligasi I Tahap I	21 Juni 2017	850.000
			PUB Sukuk Ijarah I Tahap I		250.000
13	PT Bank Victoria International Tbk.	Perbankan	PUB Obligasi I Tahap I	21 Juni 2017	300.000
			Subordinasi I Tahap I		50.000
14	PT Bank Maybank Indonesia Tbk.	Perbankan	PUB Obligasi II Tahap I	21 Juni 2017	1.000.000
15	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi II Tahap I	21 Juni 2017	1.500.000
16	PT Indomobil Finance Indonesia Tbk	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi II Tahap I	22 Juni 2017	500.000
17	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Perbankan	PUB Obligasi II Tahap I	21 Juni 2017	5.000.000
18	PT Pupuk Indonesia (Persero)	Industri Kimia	PUB Tahap I Tahun 2017	22 Juni 2017	3.569.500
Total					34.619.500

Tabel I - 25 Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang

PUB Obligasi Tahap II						
No	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Jenis PUB	Tanggal Efektif	Masa Penawaran	Nilai Emisi (dalam jutaan rupiah)
1	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Perbankan	PUB Obligasi II Tahap II	22-Nop-16	5-6 April 2017	5.100.000
2	PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	Agrobisnis	PUB Obligasi II Tahap II	22-Nop-16	17-Apr-17	1.000.000
3	PT XL Axiata Tbk.	Perhubungan dan Telekomunikasi	PUB Obligasi II Tahap II	23-Nop-15	21 & 25 April 2017	2.180.000
4	PT Tower Bersama Infrastrucutre Tbk.	Perhubungan dan Telekomunikasi	PUB Obligasi II Tahap II	24-Jun-16	13 & 17 April 2017	700.000
5	PT Batavia Prosperindo Finance Tbk	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi I Tahap II	20-Jun-16	02-Mei-17	300.000
6	PT Mandiri Tunas Finance	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi III Tahap II	29-Sep-16	29/05/2017	850.000
7	PT Hutama Karya (Persero)	Real Estate dan Konstruksi	PUB Obligasi I Tahap II	09-Des-16	30-31 Mei 2017	1.968.000
8	PT Medco Energi Internasional Tbk.	Pertambangan dan Kehutanan	PUB Obligasi II Tahap V	28-Jun-16	09/06/2017	1.300.000
9	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Perbankan	PUB Obligasi I Tahap II	21-Sep-16	9 - 12 Juni 2017	6.000.000
Total						19.398.000

Tabel I - 26 Rencana Penggunaan Dana Atas EPP yang Melakukan Aksi Korporasi Berdasarkan Sektor Industri

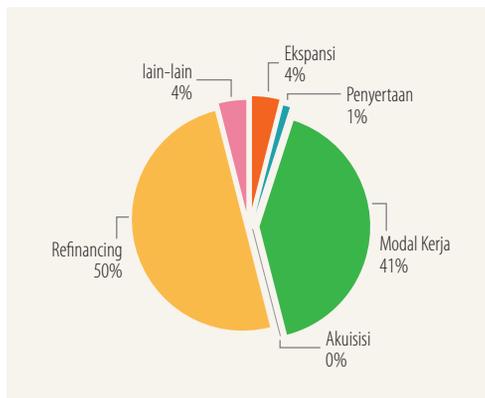
No	Sektor Industri	Ekspansi	Penyertaan	Akuisisi	Modal Kerja	Restruk. Hutang	Lain-Lain
1	Perbankan	2.995.028	-	-	21.646.980	5.387.939	-
2	Asuransi dan Pembiayaan	-	-	-	8.935.867	423.980	-
3	Sekuritas dan Investasi	-	-	-	99.385	993.850	-
4	Perdagangan	223.686	-	-	2.273.384	1.016.850	-
5	Perhubungan dan Telekomunikasi	-	96.809	-	977.618	39.711.553	-
6	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata dan Perusahaan Jasa Lainnya	55.825	-	-	653.600	60.723	742.768
7	Properti dan Perhotelan	337.944	56.000	-	10.219	166.523	-
8	Real Estate dan Konstruksi	25.035	300.000	-	5.008.350	681.180	-
9	Tekstil, Garmen, dan Alas Kaki	-	-	-	-	-	-
10	Barang Konsumsi	84.564	-	-	346.530	2.171.288	-
11	Aneka Industri Lainnya	281.122	300.688	-	134.921	506.854	-
12	Industri Dasar	-	-	-	1.622.947	1.940.260	2.993.867
13	Industri Logam	-	-	-	-	-	-
14	Industri Kimia	-	-	-	988.900	-	-
15	Agrobisnis	-	-	-	450.000	550.000	-
16	Pertambangan dan Kehutanan	-	-	-	2.055.862	780.000	520.000
Total		4.003.203	753.496	-	45.204.562	54.391.000	4.256.635

(dalam jutaan rupiah)

D. Rencana Penggunaan Dana

Dari seluruh Penawaran Umum tersebut, persentase terbesar penggunaan dana adalah untuk restrukturisasi hutang yaitu sebanyak 50,0% atau sekitar Rp54,4 triliun. Rincian porsi penggunaan dana lainnya adalah 41% atau sekitar Rp45,2 triliun untuk modal kerja; 4% atau sekitar Rp4 triliun untuk ekspansi; 4% atau sekitar Rp4 triliun untuk ekspansi; 4% atau sekitar Rp4,3 triliun untuk lain-lain dan 1% atau sekitar Rp753 miliar untuk penyertaan.

Grafik I - 30 Rencana Penggunaan Dana



* Data berdasarkan penggunaan dana setelah dikurangi oleh biaya Emisi

1.3.5 Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

A. Lembaga Penunjang Pasar Modal Serta Pemeringkat Efek

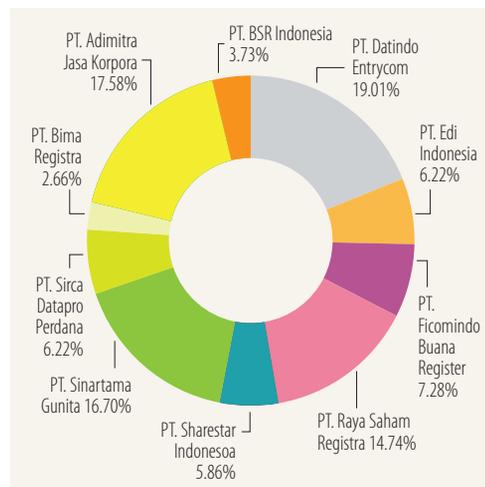
Lembaga Penunjang Pasar Modal merupakan Lembaga yang memberikan jasa pada satu pihak atau lebih sesuai izin kegiatan usahanya di Pasar Modal, terdiri dari Biro Administrasi Efek (BAE), Bank Kustodian, Wali Amanat, Pemeringkat Efek, dan Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM). Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal yang tercatat di OJK adalah sebagai berikut:

Tabel I - 27 Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal

Lembaga Penunjang	2017		Jenis
	Triwulan I	Triwulan II	
Biro Administrasi Efek	10	10	Surat Perizinan
Bank Kustodian	22	22	Surat Persetujuan
Wali Amanat	12	12	Surat Tanda Terdaftar
Pemeringkat Efek	2	2	Surat Perizinan
Ahli Syariah Pasar Modal	0	0	Surat Perizinan

B. Biro Administrasi Efek (BAE)

Grafik I - 31 Market Share BAE Berdasarkan Jumlah Klien Triwulan II 2017



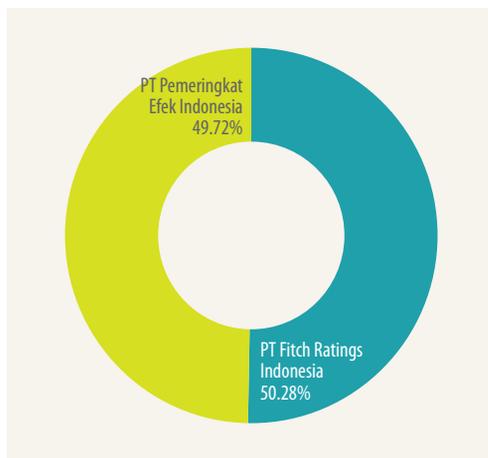
Berdasarkan jumlah klien yang dimiliki oleh BAE, PT Datindo Entrycom mendominasi pangsa pasar yang mencapai 19,01%, diikuti oleh PT Adimitra Jasa Korpora sebanyak 17,58%, dan PT Sinartama Gunita sebanyak 16,70%. Di sisi lain, BAE dengan jumlah klien paling sedikit adalah PT Bima Registra sebanyak 2,66%, diikuti oleh PT BSR Indonesia sebanyak 3,73% dan PT Sharestar Indonesia sebanyak 5,86%.

C. Pemeringkat Efek

Sampai dengan triwulan II-2017, total perusahaan yang diperingkat oleh

dua Pemeringkat Efek sebanyak 179 Perusahaan. Pangsa pasar berdasarkan jumlah perusahaan yang diperingkat masing-masing Pemeringkat Efek adalah PT Pemeringkat Efek Indonesia sebanyak 89 Perusahaan dan PT Fitch Ratings Indonesia sebanyak 90 Perusahaan. Berikut *market share company rating (%)* berdasarkan jumlah perusahaan yang diperingkat oleh Perusahaan Pemeringkat Efek Triwulan II-2017:

Grafik I - 32 Market Share Company Rating Triwulan II 2017



Dari 179 Perusahaan yang diperingkat oleh Perusahaan Pemeringkat Efek, sebanyak 170 Perusahaan masuk kategori *Investment Grade* dan sebanyak sembilan Perusahaan masuk dalam kategori *Non Investment Grade*. Berikut data lengkap komposisi peringkat perusahaan yang masuk kategori *Investment Grade* dan *Non Investment Grade* per triwulan II-2017:

Tabel I - 28 Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal

Perusahaan Pemeringkat Efek	<i>Investment Grade</i> (Perusahaan)		<i>Non Investment Grade</i> (Perusahaan)	
	Triwulan I-2017	Triwulan II-2017	Triwulan I-2017	Triwulan II-2017
PT Pemeringkat Efek Indonesia	76	81	3	8
PT Fitch Ratings Indonesia	86	89	1	1
Total	162	170	4	9

D. Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi Penunjang Pasar Modal adalah profesi yang menyediakan jasa pada satu pihak atau lebih di bidang Pasar Modal, terdiri dari Akuntan, Penilai, Konsultan Hukum dan Notaris. Berikut merupakan rangkuman pengawasan Profesi Penunjang Pasar Modal selama periode Triwulan II-2017:

- OJK menerbitkan sebanyak 12 Surat Tanda Terdaftar (STTD) dan enam Surat Keputusan Pemberian Izin Perorangan, yaitu sebanyak empat Akuntan yang memperoleh STTD; dua Konsultan Hukum yang memperoleh STTD; lima Penilai yang memperoleh STTD; satu Notaris yang memperoleh STTD dan enam ASPM yang memperoleh Surat Keputusan Pemberian Izin Perorangan
- OJK telah menetapkan sebanyak 12 Keputusan Dewan Komisioner terkait pembatalan STTD yang terdiri dari satu Akuntan tiga Konsultan Hukum serta delapan Notaris,
- OJK menerima informasi mengenai Profesi yang meninggal dunia yang terdiri dari: empat Akuntan dan dua Konsultan Hukum
- Terdapat satu Notaris yang melapor telah memasuki usia Pensiun.
- Terdapat pula satu Akuntan dan satu Penilai yang izinnya dicabut dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK).

Berikut merupakan hasil pemetaan profesi Penunjang Pasar Modal:

Tabel I - 29 Perkembangan Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi	Aktif	
	Triwulan I-2017	Triwulan II-2017
Akuntan	610	608
Konsultan Hukum	720	717
Penilai	206	210
Notaris	1.343	1.335
Penilai Pemerintah	251	251
ASPM	35	41

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme Profesi Penunjang Pasar Modal, OJK bekerjasama dengan asosiasi telah menyelenggarakan delapan Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL). Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Akuntan
FAPM-IAPI telah menyelenggarakan PPL sebanyak dua kali dengan detail sebagai berikut:

Tabel I - 30 Pendidikan Profesi Lanjutan Akuntan Triwulan II-2017

No.	Judul Kegiatan
1	<i>Critical Overview</i> Perkembangan SPAP Terbaru Terkait Standar Perikatan Asurans dan Standar Jasa Terkait
2	Audit Atas Laporan Keuangan Grup Serta Opini dan Pelaporan Atas Laporan Keuangan Emiten

- b. Konsultan Hukum
HKHPM telah menyelenggarakan PPL sebanyak tiga kali dengan detail sebagai berikut:

Tabel I - 31 Pendidikan Profesi Lanjutan Konsultan Hukum Triwulan II-2017

No.	Judul Kegiatan
1	<i>Role of ASEAN Lawyer to Implement ASEAN Disclosure Standard In Cross Border Transaction</i>
2	Penerapan Standar Mutu & <i>Law Firm Management</i>
3	Peran Konsultan Hukum Dalam Industri Perasuransian

- c. Penilai
FPPM-MAPPI telah menyelenggarakan PPL sebanyak tiga kali dengan detail sebagai berikut:

Tabel I - 32 Pendidikan Profesi Lanjutan Penilai Triwulan II-2017

No.	Judul Kegiatan
1	Analisis dan Implementasi perhitungan tingkat diskonto pada penilaian Properti dan Bisnis
2	PPL OJK 5 SKP – POJK 74/POJK.04/2016
3	Sharing Hasil Tanggapan OJK terhadap Laporan Penilaian Properti & Bisnis

1.4 PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK

Sepanjang periode laporan, kinerja Industri Keuangan Non Bank (IKNB) bergerak positif tercermin dari peningkatan total aset IKNB sebesar 2,84% menjadi Rp2.000,68 triliun. Penyumbang terbesar kenaikan adalah pada industri Asuransi Konvensional dan BPJS, Lembaga Pembiayaan dan Dana Pensiun.

Tabel I - 33 Total Aset IKNB (dalam triliun rupiah)

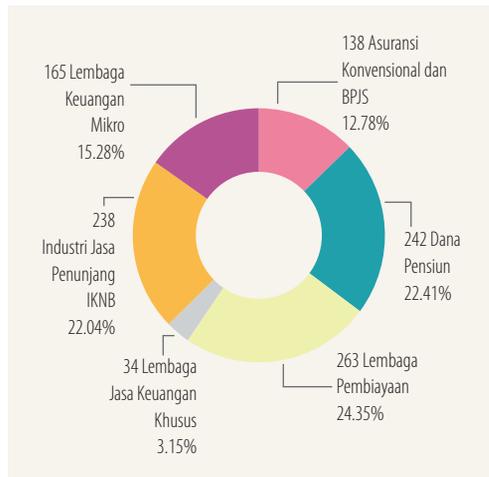
No	Industri	Tri-wulan II-2016	Tri-wulan III-2016	Tri-wulan IV-2016	Tri-wulan I-2017	Tri-wulan II-2017
1	Asuransi Konvensional dan BPJS	872,02	912,09	944,58	981,14	1.012,34
2	Dana Pensiun	227,01	235,51	238,30	246,80	254,13
3	Lembaga Pembiayaan	487,30	489,77	509,22	516,69	532,84
4	Lembaga Jasa Keuangan Khusus *)	170,70	175,57	184,81	193,18	193,77
5	Industri Jasa Penunjang IKNB **)	6,81	6,81	7,25	7,30	7,30
6	Lembaga Keuangan Mikro	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30
Total Aset		1.764,1	1.820,02	1.884,44	1.945,4	2.000,68

*) Revisi data dengan menambahkan aset PT PNM dan PT Danareksa

**) Aset Industri Jasa Penunjang IKNB adalah per Semester II 2016

Industri Lembaga Pembiayaan merupakan jumlah pelaku IKNB yang terbesar dengan jumlah sebanyak 263 pelaku bila dilihat berdasarkan jumlah pelaku, diikuti oleh Dana Pensiun, Industri Jasa Penunjang IKNB, Lembaga Keuangan Mikro, Asuransi Konvensional dan BPJS dan serta Lembaga Jasa Keuangan Khusus. Peningkatan tersebut seiring dengan pertumbuhan jumlah entitas Lembaga Keuangan Mikro yang berjumlah 165 LKM atau tumbuh tujuh LKM.

Grafik I - 33 Komposisi Jumlah Pelaku IKNB Triwulan II-2017



*) Data Pelaku IKNB per Juni 2017

**) Pelaku Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Keuangan Mikro termasuk syariah

1.4.1 Perkembangan Perasuransian Konvensional dan BPJS

Aset industri Asuransi dan BPJS tumbuh 3,2% menjadi Rp1.012,34 triliun. Peningkatan tersebut didorong oleh jumlah investasi yang naik 4,2% menjadi Rp850,03 triliun dengan investasi terbesar pada jenis investasi Deposito, Surat Berharga Negara (SBN), serta Reksa Dana. Bila dilihat dari jenis industri asuransi, maka kenaikan nilai investasi terbesar didominasi oleh asuransi sosial (BPJS) dan asuransi jiwa dengan total kenaikan investasi sebesar Rp19,13 triliun.

Peningkatan aset dan investasi tersebut didukung juga peningkatan kinerja industri dari

Tabel I - 34 Indikator Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS (dalam triliun rupiah)

No.	Jenis Indikator	Triwulan II-2016	Triwulan III-2016	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017	Triwulan II-2017
1	Total Aset					
	Asuransi Jiwa	363,16	385,24	395,11	419,50	434,76
	Asuransi Umum dan Reasuransi	139,41	136,70	139,47	140,70	140,34
	Asuransi Wajib	115,93	117,55	120,01	123,01	124,36
	BPJS	253,52	272,60	289,98	297,93	312,89
	Jumlah	872,02	912,09	944,58	981,14	1.012,34
2	Total Investasi					
	Asuransi Jiwa	313,02	334,44	343,27	365,22	378,89
	Asuransi Umum dan Reasuransi	68,16	69,13	69,71	71,80	71,97
	Asuransi Wajib	88,36	92,84	94,28	102,60	103,52
	BPJS	235,83	256,70	273,16	276,52	295,65
	Jumlah	705,36	753,12	780,42	816,14	850,03
3	Total Pendapatan Premi					
	Asuransi Jiwa	61,17	95,71	137,79	35,19	73,79
	Asuransi Umum dan Reasuransi	38,02	54,04	74,93	18,77	37,47
	Asuransi Wajib	5,77	8,69	11,73	2,88	5,74
	BPJS	55,25	84,69	116,28	29,26	61,60
	Jumlah	160,21	243,12	340,73	86,11	178,61
4	Total Klaim Bruto					
	Asuransi Jiwa	36,26	58,65	79,05	20,39	43,93
	Asuransi Umum dan Reasuransi	16,67	23,96	32,61	7,74	15,50
	Asuransi Wajib	4,56	7,18	9,91	2,64	5,21
	BPJS	41,77	63,87	86,80	25,70	52,63
	Jumlah	99,26	153,67	208,37	56,47	117,26
5	Total Liabilitas					
	Asuransi Jiwa	287,27	305,01	317,53	336,43	349,37
	Asuransi Umum dan Reasuransi	86,72	84,43	85,86	85,03	84,14
	Asuransi Wajib	93,56	95,16	97,96	99,05	100,24
	BPJS	33,33	36,33	40,56	40,37	44,78
	Jumlah	500,87	520,93	541,91	560,88	578,53

sisi pendapatan premi yang meningkat sebesar 11,5% (yoy) menjadi Rp178,61 triliun. Komposisi pendapatan premi masih didominasi Asuransi Jiwa dengan porsi sebesar 41,32%, diikuti oleh BPJS sebesar 20,98%, Asuransi Umum dan Reasuransi sebesar 34,49%, serta Asuransi Wajib sebesar 3,21%.

Sampai dengan periode laporan, tidak terdapat perubahan jumlah pelaku, yaitu 138 perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I - 35 Jumlah Industri Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS

No	Perusahaan Perasuransian	Triwulan II-2016	Triwulan III-2016	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017	Triwulan II-2017
1	Asuransi Jiwa					
	a. BUMN	1	1	1	1	1
	b. Swasta Nasional	27	27	23	24	24
	c. Patungan	22	22	28	27	27
	Sub Total	50	50	52	52	52
2	Asuransi Kerugian					
	a. BUMN	3	3	2	2	2
	b. Swasta Nasional	58	58	53	53	53
	c. Patungan	15	15	21	21	21
	Sub Total	76	76	76	76	76
3	Reasuransi	6	5	5	5	5
4	BPJS	2	2	2	2	2
5	Penyelenggara Asuransi Wajib	3	3	3	3	3
	Total Asuransi dan Reasuransi	137	136	138	138	138

Tabel I - 36 Densitas dan Penetrasi Industri Perasuransian Konvensional dan BPJS

Uraian	Triwulan II-2016	Triwulan III-2016	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017	Triwulan II-2017
GDP (dalam miliar rupiah)	12.406.800	12.406.800	12.406.800	12.406.800	12.406.800
Premi Bruto (dalam miliar rupiah)	289.221	300.882	323.564	335.199	340.656
Jumlah Penduduk (juta)	255	255	257	257	257
Penetrasi	2,33%	2,43%	2,61%	2,70%	2,75%
Densitas (dalam ribuan rupiah)	1.134,20	1.179,93	1.259,00	1.304,28	1.325,51

Catatan:

- 1) Angka Premi Bruto merupakan premi bulan Juni 2017 disetahunkan
- 2) Angka GDP merupakan angka sementara dari Indikator Ekonomi BPS per Februari 2016.
- 3) Penetrasi: Premi Bruto/GDP
- 4) Densitas: Premi Bruto/Jumlah penduduk

Selama periode laporan, densitas asuransi yang menggambarkan rata-rata pengeluaran tiap penduduk untuk pembayaran premi asuransi naik sebesar 1,63% menjadi Rp1.325,51. Sementara itu, tingkat penetrasi asuransi yang menggambarkan kontribusi premi bruto terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) adalah sebesar 2,75% atau naik 0,05%. Kenaikan terjadi karena laju pertumbuhan premi asuransi dibandingkan nilai PDB yang tetap.

Tabel I - 37 RBC Industri Asuransi

Uraian	Triwulan II 2016	Triwulan III 2016	Triwulan IV 2016	Triwulan I 2017	Triwulan II 2017
Asuransi Jiwa	527,6%	528,8%	497,4%	512,3%	491,2%
Asuransi Umum dan Reasuransi	265,1%	268,6%	266,7%	279,7%	278,6%

Ketahanan permodalan industri masih terjaga meskipun dengan rata-rata RBC untuk industri asuransi jiwa yang mengalami penurunan 21,1% menjadi 491,2% dibanding periode sebelumnya. Begitu juga dengan RBC Asuransi Umum yang mengalami penurunan 1,1% menjadi 278,6% dibanding periode sebelumnya. Kendati demikian, RBC kedua jenis industri asuransi tersebut masih memenuhi batas ketentuan RBC minimum yaitu 120%.

1.4.2 Perkembangan Industri Dana Pensiun

Selama periode laporan, Perkembangan industri Dana Pensiun mengalami peningkatan yang tercermin dari indikator pertumbuhan aset dan investasi dana pensiun yaitu masing-masing meningkat sebesar 2,97% dan 2,51% menjadi Rp254,13 triliun dan Rp245,30 triliun. Faktor utama yang mendorong kenaikan tersebut adalah membaiknya nilai IHSG sebesar 261.602 atau naik 4,70% dibandingkan triwulan sebelumnya.

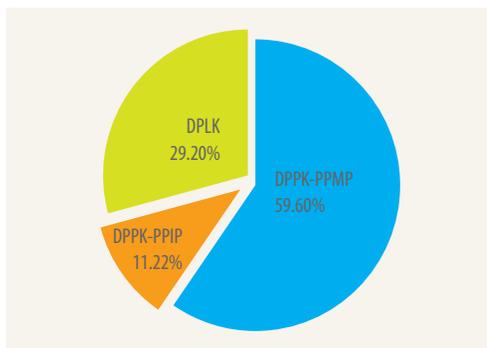
Tabel I - 38 Distribusi Aset Industri Dana Pensiun (triliun Rupiah)

Jenis Program	Triwulan II-2016	Triwulan III-2016	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017	Triwulan II-2017
DPPK-PPMP	144,72	148,31	147,81	150,62	152,65
<i>Growth</i>	1,53%	2,48%	-0,34%	1,90%	1,44%
DPPK-PPIP	25,55	26,56	26,65	26,92	28,34
<i>Growth</i>	9,39%	3,96%	0,33%	1,00%	3,23%
DPLK	56,74	60,64	63,84	66,72	73,14
<i>Growth</i>	4,63%	6,87%	5,29%	4,50%	6,21%
TOTAL ASET (dalam triliun rupiah)	227,01	235,51	238,30	244,26	254,13
<i>Growth</i>	3,13%	3,74%	1,19%	2,50%	2,97%

Tabel I - 39 Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun (triliun Rupiah)

Jenis Program	Triwulan II-2016	Triwulan III-2016	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017	Triwulan II-2017
DPPK-PPMP	136,82	141,07	139,87	142,99	146,19
<i>Growth</i>	0,90%	3,10%	-0,85%	2,23%	0,80%
DPPK-PPIP	24,95	25,93	26,07	26,24	27,49
<i>Growth</i>	9,11%	3,93%	0,54%	0,67%	2,49%
DPLK	55,66	59,81	62,83	65,48	71,62
<i>Growth</i>	4,73%	7,45%	5,06%	4,21%	6,19%
TOTAL INVESTASI (dalam triliun rupiah)	217,43	226,80	228,77	234,71	245,30
<i>Growth</i>	2,75%	4,31%	0,87%	2,59%	2,51%

Grafik I - 34 Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun Per Triwulan II-2017



Tabel I - 40 Portofolio Investasi Dana Pensiun (triliun Rupiah)

No.	Jenis Aset Investasi	Triwulan II 2016	Triwulan III 2016	Triwulan IV 2016	Triwulan I 2017	Triwulan II 2017
1	Surat Berharga Negara	48,11	52,91	54,33	56,10	57,08
2	Tabungan	0,24	0,26	0,19	0,21	0,19
3	Deposito <i>On Call</i>	1,25	1,45	1,09	1,71	2,04
4	Deposito Berjangka	54,73	56,91	57,35	62,80	65,59

No.	Jenis Aset Investasi	Triwulan II 2016	Triwulan III 2016	Triwulan IV 2016	Triwulan I 2017	Triwulan II 2017
5	Sertifikat Deposito	0,72	0,85	1,07	1,51	1,56
6	Sertifikat Bank Indonesia	-	-	0,44	0,004	-
7	Saham	29,18	29,98	28,71	29,93	30,29
8	Obligasi	47,44	49,08	48,39	48,54	49,18
9	Sukuk	2,25	1,84	1,95	2,12	2,37
10	Unit Penyertaan Reksadana/	14,24	13,87	13,94	14,50	14,59
11	<i>Medium Term Note</i>	-	-	0,07	0,13	0,19
12	Efek Beragun Aset dari KIK EBA	0,18	0,51	0,50	0,49	0,56
13	Unit Penyertaan berbentuk KIK	0,14	0,14	0,14	0,13	0,12
14	Kontrak Opsi Saham	-	-	-	-	-
15	<i>Repurchase Agreement</i>	-	-	-	-	-
16	Penempatan Langsung pada Saham	7,69	7,58	7,47	7,60	7,77
17	Tanah	3,37	3,35	4,42	4,69	4,75
18	Bangunan	2,03	2,11	1,99	2,08	2,10
19	Tanah dan Bangunan	5,87	5,96	6,70	6,76	6,91
Total		217,43	226,80	228,77	239,30	245,30

Di antara jenis investasi yang diperkenankan tersebut, terdapat empat jenis investasi yang mendominasi yaitu Deposito Berjangka (26,74%), Surat Berharga Negara (23,27%), Obligasi (20,05%), dan Saham (12,35%). Jumlah Dana Pensiun sampai akhir periode laporan adalah 242 pelaku dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I - 41 Jumlah Dana Pensiun

Jenis Dana Pensiun	Triwulan II-2016	Triwulan III-2016	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017	Triwulan II-2017
DPPK-PPMP	186	184	180	177	17
DPPK-PPIP	44	43	44	43	43
DPLK	25	25	25	25	24
JUMLAH	255	252	249	245	242

Terjadi pembubaran tiga Dana Pensiun yaitu DPPK-PPMP yaitu DPPK Tokio Marine Indonesia, DPPK Pegawai Indah Karya, dan DPLK Bank Maspion.

1.4.3 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan

Perkembangan industri perusahaan pembiayaan untuk periode laporan adalah sebagai berikut:

A. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan

Total aset dan liabilitas Perusahaan Pembiayaan mengalami kenaikan, masing-masing sebesar 2,85% dan 3,31%. Di sisi lain, ekuitas Perusahaan Pembiayaan meningkat sebesar 1,36%.

Grafik I - 35 Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan (triliun rupiah)



Catatan: Data sudah termasuk Pembiayaan Syariah

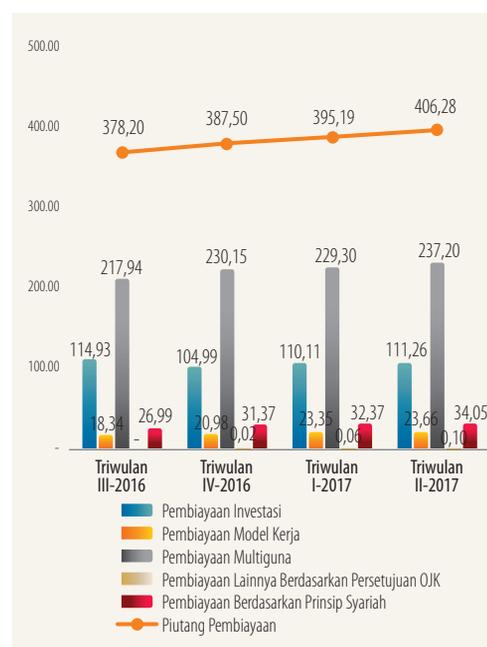
B. Jumlah dan Pangsa Pasar Perusahaan Pembiayaan

Sampai dengan triwulan II-2017 terdapat dua pencabutan izin usaha bagi perusahaan pembiayaan sehingga jumlah Perusahaan Pembiayaan menjadi 198 perusahaan. Bila dilihat berdasarkan total aset, sebanyak 74 perusahaan pembiayaan menguasai aset industri dengan porsi sebesar 92%. Sementara itu, 124 perusahaan pembiayaan hanya menguasai aset industri sebesar 8%.

C. Piutang Perusahaan Pembiayaan

Kinerja kegiatan industri Perusahaan Pembiayaan dalam melakukan penyaluran piutang mengalami peningkatan sebesar Rp11,09 triliun atau 2,81%, dengan komposisi piutang pembiayaan didominasi oleh Pembiayaan Multiguna dan Pembiayaan Investasi dengan proporsi masing-masing sebesar 58,38% dan 27,38%. Sementara itu, bila dilihat dari proporsi pembiayaan yang disalurkan berdasarkan sektor ekonomi, maka Sektor Ekonomi Lapangan Usaha mendominasi piutang dengan proporsi sebesar 75,09% (Rp315,30 triliun).

Grafik I - 36 Piutang Perusahaan Pembiayaan (dalam triliun rupiah)



Catatan: Data sudah termasuk Pembiayaan Syariah

Tabel I - 42 Piutang Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan sektor Ekonomi (triliun Rupiah)

Sektor Ekonomi	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017	Triwulan II-2017
A. Sektor Ekonomi Lapangan Usaha	241,13	250,79	315,30
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	19,40	15,77	19,00
2. Pertambangan dan Penggalian	19,04	20,11	22,24
3. Industri Pengolahan	30,43	32,42	35,71
4. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	22,02	23,77	21,21
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah	0,30	0,31	0,33
6. Konstruksi	10,39	11,39	12,90
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	40,04	46,61	65,47
8. Transportasi dan Pergudangan	22,09	20,95	24,10
9. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	5,13	5,37	9,84
10. Informasi dan Komunikasi	3,31	3,07	4,04
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,63	2,84	4,27
12. Real Estat	1,52	1,80	1,91
13. Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis	1,27	1,57	2,44
14. Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	23,38	23,96	36,88
15. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,26	3,57	6,90
16. Jasa Pendidikan	3,10	3,17	4,37
17. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,67	7,17	9,01
18. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	0,40	0,43	2,05
19. Kegiatan Jasa Lainnya	17,15	16,95	22,90
20. Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri untuk Memenuhi Kebutuhan	9,59	9,56	9,72
21. Kegiatan badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	0,01	0,01	0,01
B. Sektor Ekonomi Bukan Lapangan Usaha	159,11	157,15	104,61
1. Rumah Tangga	53,31	52,75	58,46
2. Bukan Lapangan Usaha Lainnya	105,79	104,39	46,15
JUMLAH	400,24	407,93	419,91

D. Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan

Tabel I - 43 Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan

Uraian	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017	Triwulan II-2017
FAR (%)	87,52%	87,91%	87,88%
NPF (%)	3,26%	3,16%	3,47%
Gearing Ratio (kali)	3,03	2,98	3,05

Seiring dengan pertumbuhan piutang pembiayaan, rasio FAR (*Financing to Asset Ratio*) masih terjaga pada rasio 87,88% atau masih dalam batas ketentuan, yaitu minimum 40%. Kualitas piutang pembiayaan (NPF) masih berada pada level 3,47% atau dalam batas ketentuan (maksimal 5%). Selain itu, *Gearing Ratio* pada periode laporan tercatat 3,05 kali atau masih memenuhi ketentuan (maksimal 10 kali).

Tabel I - 44 NPF Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan sektor Ekonomi

Sektor Ekonomi	Triwulan IV 2016	Triwulan I 2017	Triwulan II 2017
A. Sektor Ekonomi Lapangan Usaha	3,85%	3,79%	3,49%
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,50%	2,53%	2,46%
2. Pertambangan dan Penggalian	7,26%	7,65%	7,17%
3. Industri Pengolahan	2,00%	2,59%	2,44%
4. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	0,03%	0,03%	0,04%
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah	2,81%	2,69%	2,19%
6. Konstruksi	3,09%	3,64%	3,01%
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	2,02%	2,14%	2,30%
8. Transportasi dan Pergudangan	16,97%	15,09%	14,01%
9. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	9,03%	8,46%	5,28%
10. Informasi dan Komunikasi	1,83%	1,49%	5,10%
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,98%	1,68%	1,81%
12. Real Estat	3,75%	4,50%	4,49%
13. Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis	1,18%	2,51%	2,26%
14. Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	2,20%	2,62%	1,99%
15. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,77%	2,05%	1,88%
16. Jasa Pendidikan	1,32%	1,88%	1,93%
17. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,58%	2,13%	2,51%
18. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	1,34%	1,66%	1,13%
19. Kegiatan Jasa Lainnya	2,15%	2,40%	2,05%
20. Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri untuk Memenuhi Kebutuhan	2,10%	1,58%	1,81%
21. Kegiatan badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	1,47%	0,07%	2,66%
B. Sektor Ekonomi Bukan Lapangan Usaha	2,37%	2,15%	3,40%
1. Rumah Tangga	1,75%	2,12%	2,37%
2. Bukan Lapangan Usaha Lainnya	2,68%	2,16%	4,71%
JUMLAH	3,26%	3,16%	3,47%

E. Laba (Rugi) Perusahaan Pembiayaan

Laba bersih industri perusahaan pembiayaan mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp6,06 triliun seiring dengan peningkatan jumlah piutang pembiayaan.

F. Jenis Valuta Pinjaman

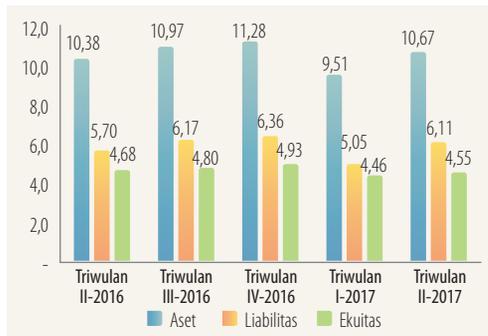
Pada triwulan II-2017, jumlah pinjaman sebesar Rp255,41 triliun yang diterima perusahaan pembiayaan, 55,32% berdenominasi Rupiah, diikuti oleh US Dollar 33,61%, dan Yen Jepang 11,07%. Untuk melindungi perusahaan dari fluktuasi nilai tukar valas, maka seluruh pinjaman berdenominasi mata uang asing tersebut telah dilakukan lindung nilai (*hedging*).

1.4.4 Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura

Perkembangan industri perusahaan modal ventura untuk periode triwulan II-2017 sebagai berikut:

A. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Modal Ventura

Total aset, liabilitas, dan ekuitas Perusahaan Modal Ventura naik, masing-masing sebesar 12,18%, 21,12%, dan 2,07% menjadi Rp10,67 triliun, Rp6,11 triliun, dan Rp4,55 triliun.

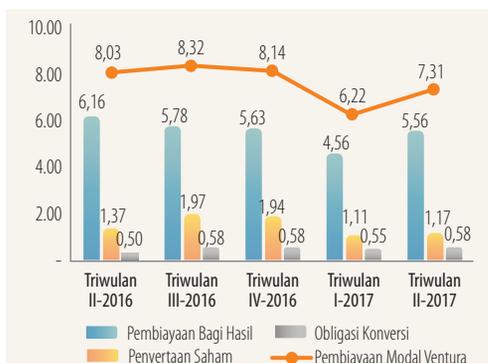
Grafik I - 37 Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas (dalam triliun Rupiah)

B. Jumlah Perusahaan Modal Ventura

Selama periode laporan, terdapat dua penambahan izin usaha baru Perusahaan Modal Ventura sehingga jumlah Perusahaan Modal Ventura menjadi 63 perusahaan.

C. Pembiayaan/Penyertaan Perusahaan Modal Ventura

Total pembiayaan/penyertaan meningkat sebesar 17,49% menjadi Rp7,31 triliun dengan proporsi terbesar berasal dari pembiayaan bagi hasil dengan proporsi sebesar 76,09% dari total pembiayaan/penyertaan dengan nilai sebesar Rp5,56 triliun. Sementara itu, bila dilihat berdasarkan jenis sektor ekonomi, maka sektor perdagangan, restoran, dan hotel mendominasi keseluruhan total pembiayaan/penyertaan yang disalurkan industri PMV dengan total pembiayaan/penyertaan sebesar Rp3,28 triliun atau dengan proporsi sebesar 43,75%.

Grafik I - 38 Pertumbuhan Pembiayaan/Penyertaan Modal (dalam triliun Rupiah)**Tabel I - 45** Pembiayaan/Penyertaan Berdasarkan sektor Ekonomi (dalam miliar rupiah)

Sektor Ekonomi	Triwulan II 2016	Triwulan III 2016	Triwulan IV 2016	Triwulan I 2017	Triwulan II 2017
1. Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	640	619	658	727	766
2. Pertambangan	509	525	581	538	980
3. Perindustrian	484	470	490	528	575
4. Konstruksi	563	559	505	498	516
5. Perdagangan, Restoran, dan Hotel	2.656	2.724	2.772	2.874	3.276
6. Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	306	334	286	168	159
7. Jasa Pendukung Bisnis	388	426	319	375	422
8. Jasa Sosial dan Masyarakat	959	994	999	138	160
9. Lain-Lain	1.683	1.834	1.715	549	633
JUMLAH	8.190	8.485	8.325	6.397	7.488

Catatan : Data Pembiayaan sebelum dikurangi pencadangan

D. Rasio Keuangan

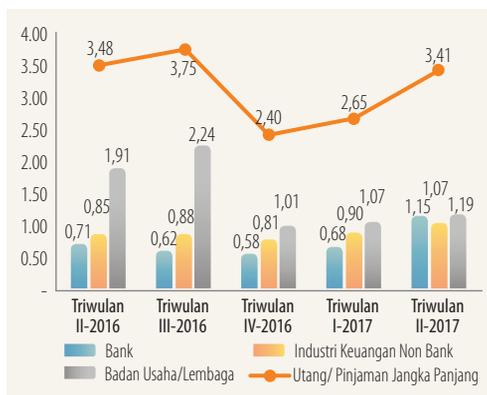
Kinerja Perusahaan Modal Ventura diukur dengan rasio keuangan yang terdiri dari Beban Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO), rasio Investasi Terhadap Total Aset (IFAR), *Return on Asset* (ROA), dan *Return on Equity* (ROE). Rasio keuangan tersebut masing-masing adalah 95,54%, 68,49%, 1,72%, dan 4,03%.

- Kenaikan BOPO dari 90,48% pada triwulan I-2017 menjadi 95,54% pada triwulan II-2017 menunjukkan adanya penurunan efisiensi dalam pengelolaan operasional Perusahaan Modal Ventura.
- Terjadi peningkatan IFAR dari 65,40% pada triwulan I-2017 menjadi 68,49% triwulan II-2017. Hal ini disebabkan peningkatan jumlah pembiayaan/penyertaan sebesar 17,49% atau dari Rp6,22 triliun menjadi Rp7,31 triliun.
- ROA mengalami penurunan dari 2,30% pada triwulan I-2017 menjadi 1,72% pada triwulan II-2017.
- ROE mengalami penurunan dari 4,90% pada triwulan I-2017 menjadi 4,03% pada triwulan II-2017.

E. Sumber Pendanaan

Perusahaan Modal Ventura menerima pinjaman jangka panjang yang berasal dari bank atau badan usaha lainnya dengan total pinjaman sebesar Rp3,41 triliun atau naik 28,69% dibandingkan triwulan sebelumnya.

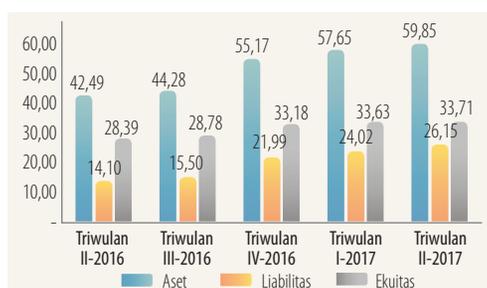
Grafik I - 39 Sumber Pendanaan Perusahaan Modal Ventura (dalam triliun Rupiah)



1.4.5 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Terdapat dua Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yaitu Indonesia Infrastructure Finance (IIF) dan Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan total aset Rp59,85 triliun dan total liabilitas Rp26,15 triliun pada triwulan II-2017. Total aset mengalami kenaikan sebesar 3,81% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sementara itu, jumlah pinjaman yang diberikan (pembiayaan) turun sebesar 6,04% menjadi Rp36,15 triliun dengan penurunan pinjaman terbesar adalah pada infrastruktur Transportasi yang turun sebesar 41,72% atau dari Rp5,45 triliun menjadi Rp3,18 triliun.

Grafik I - 40 Tren Aset, Liabilitas dan Ekuitas (dalam triliun Rupiah)



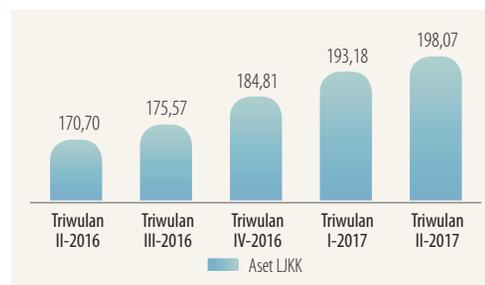
Tabel I - 46 Pembiayaan Berdasarkan Jenis Infrastruktur (dalam miliar rupiah)

Jenis Infrastruktur	Triwulan II 2016	Triwulan III 2016	Triwulan IV 2016	Triwulan I 2017	Triwulan II 2017
Air Minum	0,19	0,23	0,31	0,32	0,45
Jalan	3,30	4,38	7,26	8,08	7,53
Ketenagalistrikan	11,52	11,91	12,97	12,98	13,44
Minyak dan Gas Bumi	1,85	1,85	3,14	3,18	3,17
Telekomunikasi	1,46	0,70	1,53	1,53	2,31
Transportasi	1,54	2,72	5,34	5,45	3,18
Lainnya	5,15	5,19	6,93	6,94	6,07
Total	25,02	26,97	37,47	38,47	36,15

1.4.6 Perkembangan Industri Jasa Keuangan Khusus (LJKK)

Total Aset LJKK naik 2,21% menjadi Rp198,07 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Grafik I - 41 Pertumbuhan Aset LJKK (dalam triliun Rupiah)



A. Perusahaan Penjaminan

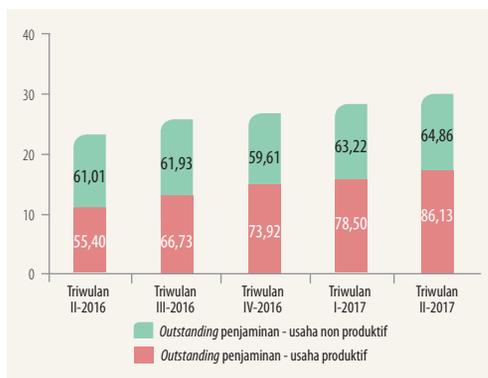
Pada periode laporan, tercatat total aset perusahaan penjaminan naik 0,83% menjadi Rp16,07 triliun.

Grafik I - 42 Pertumbuhan Aset Perusahaan Penjaminan (dalam triliun Rupiah)



Outstanding penjaminan selama periode laporan naik 6,54% menjadi Rp150,99 triliun yang didorong oleh nilai *Outstanding* usaha produktif dan non produktif yang masing-masing meningkat sebesar 9,72% dan 2,59%. Pertumbuhan *Outstanding* penjaminan tersebut seiring dengan misi pemerintah untuk mendorong peningkatan kemampuan akses UMKM melalui penjaminan kredit.

Grafik I - 43 Outstanding Penjaminan (dalam triliun Rupiah)



B. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

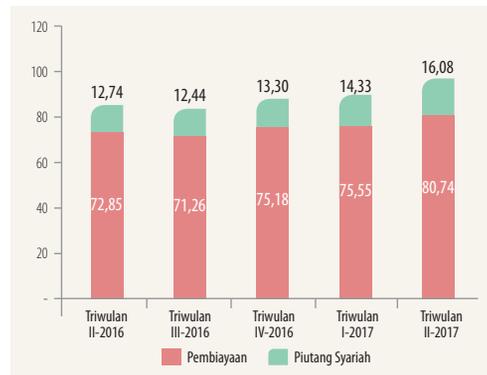
Total aset LPEI meningkat 2,94% menjadi Rp108,39 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Grafik I - 44 Pertumbuhan Aset Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (dalam triliun Rupiah)



Sampai dengan periode laporan, LPEI mencatat total pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp96,82 triliun atau naik 7,73%. Kenaikan tersebut terdiri dari naiknya pembiayaan melalui sistem konvensional sebesar 6,88% dan piutang melalui sistem syariah sebesar 12,24%.

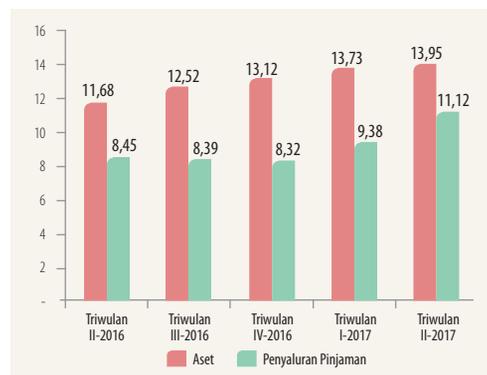
Grafik I - 45 Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Ekspor Indonesia (dalam triliun Rupiah)



C. Sarana Multigriya Finansial (PT. SMF)

Aset PT SMF (Persero) pada triwulan II-2017 turun 1,59% dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi Rp13,95 triliun. Nilai pinjaman yang disalurkan mengalami pertumbuhan sebesar 18,61% dari triwulan sebelumnya menjadi Rp11,12 triliun.

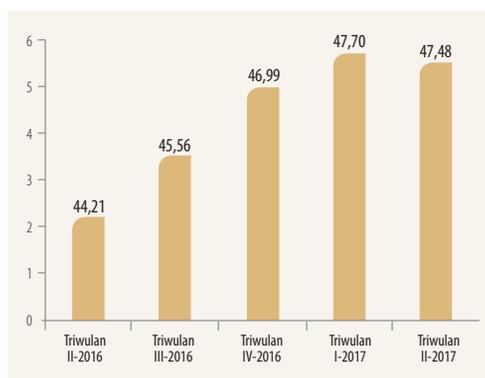
Grafik I - 46 Aset dan Outstanding Penyaluran Pinjaman PT SMF (Persero) (dalam triliun Rupiah)



D. Pergadaian

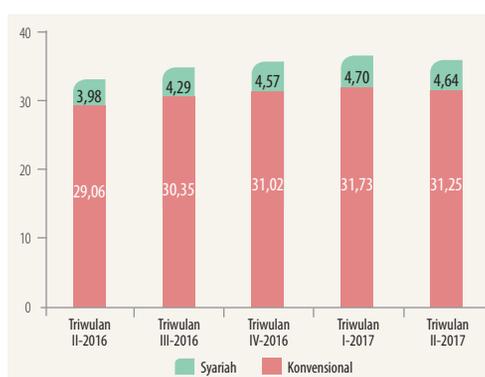
Sampai dengan periode ini, industri pergadaian yang berkewajiban menyampaikan laporan kepada OJK hanya PT Pegadaian (Persero). Adapun perusahaan gadai swasta yang telah terdaftar atau memiliki izin usaha dari OJK belum berkewajiban menyampaikan laporan keuangan berkala. Pada periode laporan, total aset PT Pegadaian (Persero) tercatat turun 0,46% menjadi Rp47,48 triliun.

Grafik I - 47 Pertumbuhan Aset PT Pegadaian (dalam triliun Rupiah)



Outstanding pinjaman yang disalurkan sebesar Rp35,89 triliun, atau turun sebesar 1,50%. Penurunan tersebut terjadi baik pada pinjaman konvensional maupun syariah. *Outstanding* konvensional turun sebesar 1,51%. Sementara itu, untuk *outstanding* syariah juga mengalami penurunan sebesar 1,37%.

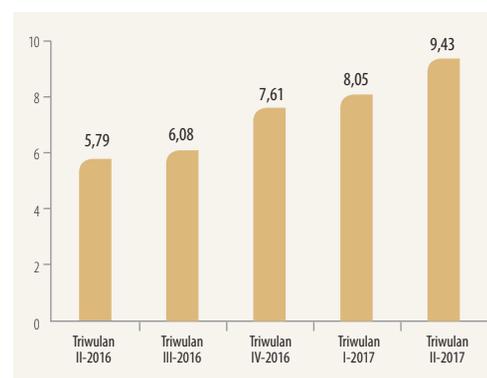
Grafik I - 48 Outstanding Pinjaman PT Pegadaian (Persero) (dalam triliun Rupiah)



E. PT Permodalan Nasional Madani (Persero)

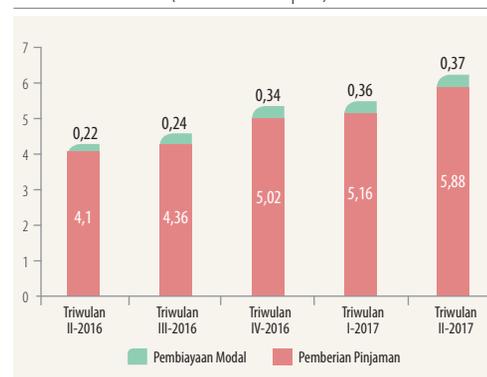
PT Permodalan Nasional Madani (Persero) merupakan badan usaha milik negara yang didirikan dengan tujuan memberikan jasa pembiayaan termasuk kredit program dan jasa manajemen untuk pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah. Aset PNM pada periode laporan tercatat sebesar Rp9,43 triliun, naik 17,17% dari triwulan sebelumnya.

Grafik I - 49 Pertumbuhan Aset PT PNM (Persero) (dalam triliun Rupiah)



Pada triwulan II-2017, baik pinjaman maupun pemberian modal mengalami kenaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang masing-masing sebesar 13,95% dan 1,44%.

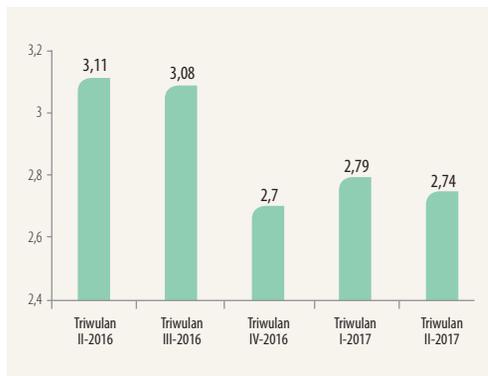
Grafik I - 50 Pertumbuhan Pemberian Pinjaman dan Pembiayaan Modal PT PNM (Persero) (dalam triliun Rupiah)



F. PT Danareksa (Persero)

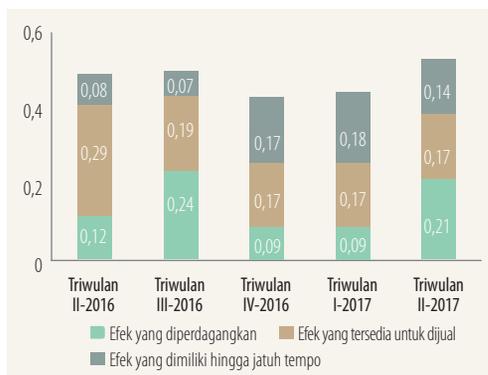
Aset PT Danareksa pada triwulan II-2017 sebesar Rp2,74 triliun, turun 1,64% dari triwulan sebelumnya

Grafik I - 51 Pertumbuhan Aset PT Danareksa (Persero) (dalam triliun Rupiah)



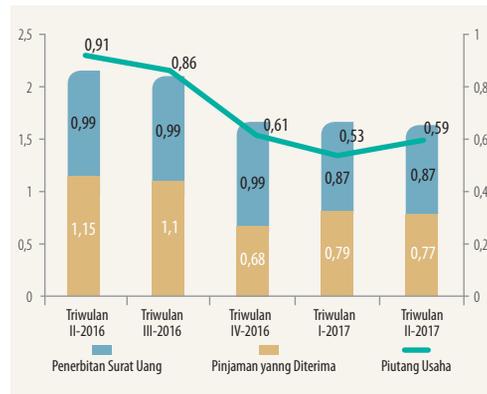
Portofolio efek PT Danareksa terdiri dari efek yang diperdagangkan, efek yang tersedia untuk dijual, dan efek yang dimiliki hingga jatuh tempo. Total portofolio efek PT Danareksa tercatat sebesar Rp0,53 triliun, naik 20,56% dari triwulan sebelumnya:

Grafik I - 52 Pertumbuhan Portofolio PT Danareksa (Persero) (dalam triliun Rupiah)



Piutang usaha PT Danareksa mengalami kenaikan 10,82% dari triwulan sebelumnya dan penurunan 35,46% dari triwulan yang sama pada tahun sebelumnya. Penurunan tersebut seiring dengan turunnya sumber dana PT Danareksa yang berasal dari pinjaman.

Grafik I - 53 Pertumbuhan Piutang Usaha PT Danareksa (dalam triliun Rupiah)



1.4.7 Perkembangan Industri Jasa Penunjang IKNB

Aset semester II-2016 meningkat 0,68% menjadi Rp7,30 triliun dibandingkan semester sebelumnya. Pendapatan jasa keperantaraan juga mengalami kenaikan 4,5% menjadi Rp1,11 triliun.

Tabel I - 47 Indikator Keuangan Industri Jasa Penunjang IKNB (dalam miliar rupiah)

No.	Jenis Indikator	Semester I-2015	Semester II-2015	Semester I-2016	Semester II-2016
1.	Aset	6,04	6,81	7,25	7,30
2.	Liabilitas	4,25	4,84	5,12	5,00
3.	Modal Sendiri	1,80	1,97	2,13	2,30
4.	Pendapatan Jasa Keperantaraan	1,01	1,14	1,06	1,11
5.	Laba/ (Rugi)	0,34	0,24	0,26	0,21

*menggunakan data Semester II 2016

Selama periode pelaporan, terdapat pencabutan izin kepada perusahaan jasa penunjang penilai kerugian asuransi IKNB sehingga sampai dengan periode laporan Jumlah Perusahaan adalah 236 perusahaan.

Tabel I - 48 Jumlah Perusahaan Jasa Penunjang IKNB

No.	Jenis Perusahaan	Triwulan I-2016	Triwulan II-2016	Triwulan III-2016	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017
1.	Pialang Asuransi	169	169	168	169	169
2.	Piala5g Reasuransi	38	38	40	40	40
3.	Jasa Penilai Kerugian Asuransi	28	27	27	28	27
Jumlah		235	234	235	237	236

*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, sejak Januari 2015, OJK sudah tidak mengawasi perusahaan agen asuransi dan konsultan aktuarial.

1.4.8 Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Mikro

Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang mendapatkan izin usaha sampai akhir periode laporan adalah 165 LKM dengan total aset sebesar Rp300,01 miliar.

Tabel I - 49 Jumlah LKM

No.	Jenis Badan Usaha	Triwulan II-2016	Triwulan III-2016	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017	Triwulan II-2017
1.	Konvensional	66	75	115	141	147
	Koperasi	50	58	98	124	129
	PT	16	17	17	17	18
2.	Syariah	13	14	14	17	18
	Koperasi	13	14	14	17	18
	PT	0	-	-	-	-
Jumlah		79	89	129	158	165

Tabel I - 50 Indikator Keuangan Lembaga Keuangan Mikro (miliar Rupiah)

No.	Jenis Indikator	Triwulan II 2016	Triwulan III 2016	Triwulan IV 2016	Triwulan I 2017	Triwulan II 2017
1.	Aset	255,38	275,00	283,84	296,77	300,01
2.	Liabilitas	164,61	173,64	176,94	182,25	183,60
3.	Dana Syirkah Temporer	18,13	18,54	18,54	20,84	21,06
4.	Ekuitas	72,64	82,82	88,35	93,67	95,35
5.	Penempatan Dana	41,33	46,78	48,40	49,32	49,81
6.	Pinjaman Yang Diberikan	168,59	180,92	186,75	194,88	201,63
7.	Simpanan/Tabungan	142,49	148,87	151,38	153,34	154,61
8.	Pinjaman Yang Diterima	12,49	14,65	14,80	17,10	17,10

1.5 PERKEMBANGAN PROGRAM FLAGSHIP OJK

1.5.1 Layanan Keuangan Tanpa Kantor (LAKU PANDAI)

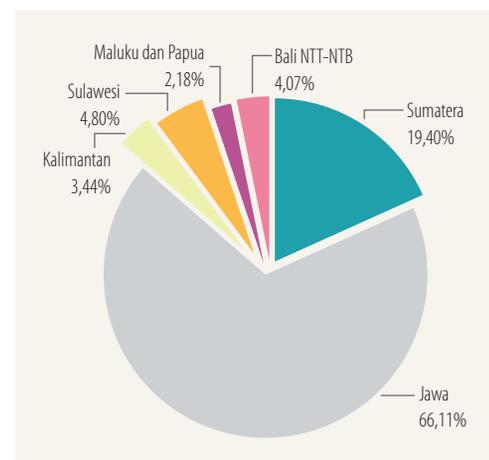
Jumlah agen Laku Pandai pada triwulan II-2017 mencapai 368.214 agen (356.152 agen perorangan dan 12.062 outlet badan hukum) yang tersebar di 34 Provinsi dan 508 Kota/Kabupaten. Sementara itu, jumlah dana dan nasabah tabungan berkarakteristik *basic saving account* (BSA) yang berhasil dihimpun masing-masing sebesar Rp1.120,6 milyar dan 10.016.335 nasabah. Dari 368.214 agen Laku Pandai tersebut, sebesar 66,11% tersebar di wilayah pulau Jawa, diikuti pulau Sumatera (19,40%), pulau Sulawesi (4,80%), pulau Bali-NTB-NTT (4,07%), pulau Kalimantan (3,44%), dan sisanya pulau Maluku dan Papua (2,18%).

Tabel I - 51 Realisasi Laku Pandai Triwulan II-2017

Agen Laku Pandai	
Perorangan	Badan Hukum
356.152	12.062
Nasabah Laku Pandai	
Jumlah Rekening	Outstanding Tabungan BSA
10.016.335	Rp1.120,6 miliar

Sumber: OJK

Grafik I - 54 Wilayah Penyebaran Agen LAKU PANDAI



Sumber: OJK

Rencana pengembangan Laku Pandai yang akan dilakukan oleh beberapa bank penyelenggara, yaitu:

- Pemasaran asuransi mikro melalui agen Laku Pandai;
- Pemanfaatan agen Laku Pandai untuk menyalurkan bantuan sosial non tunai. Saat ini yang sudah terimplementasi penyaluran bansos non tunai berupa Bantuan Pangan Non Tunai;
- Penyaluran kredit melalui agen Laku Pandai baik berupa kredit mikro maupun *referral* KUR Mikro;
- Pembayaran zakat melalui agen Laku Pandai untuk mendukung Zakat *Inclusion*; dan
- Kampanye nasional program Laku Pandai untuk memudahkan transaksi keuangan di daerah.

OJK bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berpartisipasi dalam rangka program inklusi zakat (*Zakat Inclusion*) yang merupakan salah satu bentuk implementasi dari Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Program Inklusi Zakat memastikan ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk, layanan jasa keuangan untuk pembayaran dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya dengan memanfaatkan jaringan Agen Laku Pandai. Pemanfaatan jaringan agen Laku Pandai antara lain dalam rangka optimalisasi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Latar belakang diperlukannya program ini karena kegiatan zakat dapat mendukung pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Selain itu, dalam indeks zakat nasional, ketika seorang *mustahiq* (orang yang menerima zakat) sudah memiliki sumber daya yang berkelanjutan maka diharapkan para *mustahiq* memiliki rekening tabungan. Dengan kata lain, hal ini dapat mendukung peningkatan inklusi keuangan di Indonesia. Adapun target penyaluran zakat di Indonesia

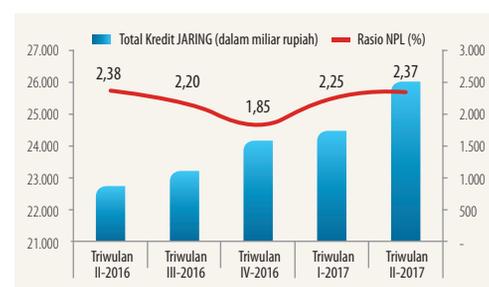
yaitu sebesar 280.000 *mustahiq* dengan total target dana terhimpun sebesar Rp6 triliun. Adapun berdasarkan data BAZNAS, diketahui total *muzaqi* (pembayar zakat) yang tercatat namanya adalah sebanyak 3,5 juta orang.

Kegiatan pembayaran zakat melalui agen Laku Pandai telah diluncurkan oleh Presiden RI, Wakil Presiden RI, Ketua Dewan Komisiner OJK, serta Ketua BAZNAS pada 14 Juni 2017 di Istana Negara. Melalui program Inklusi Zakat ini diharapkan dapat mendukung pencapaian target inklusi keuangan Indonesia di 2019 serta lebih memasyarakatkan zakat secara lebih luas sehingga kegiatan zakat, infak, dan sedekah dapat lebih mudah diakses atau dilakukan oleh seluruh masyarakat.

1.5.2 Jangkauan, Sinergi, dan Guideline (JARING)

Sampai dengan triwulan II-2017, penyaluran kredit program JARING tumbuh 6,52% (*qta*) menjadi Rp26,1 triliun, lebih baik dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya (1,07%, *qta*). Namun demikian, peningkatan kredit tersebut belum diiringi perbaikan kualitas kredit, tercermin dari NPL *gross* yang meningkat menjadi 2,37%. Peningkatan tersebut terjadi pada sektor industri pengolahan, perdagangan hasil perikanan dalam negeri, dan ekspor udang olahan. Sementara itu, penurunan kualitas kredit utamanya pada sektor hulu penangkapan ikan. Dengan demikian, secara umum kredit JARING tumbuh lebih baik meskipun masih terbatas, serta diiringi dengan risiko kredit yang masih terjaga.

Grafik I - 55 Kredit & NPL Sektor Maritim terkait JARING



Sumber: OJK, Juni 2017

Tabel I - 52 NPL Kegiatan Usaha Kredit Maritim (%)

Kegiatan Usaha	2016		2017	
	Triwulan II	Triwulan I	Triwulan I	Triwulan II
Penangkapan	2.55	3.33	4.02	
Budidaya	3.37	2.41	2.18	
Jasa Sarana Produksi	6.76	5.56	5.25	
Industri Pengolahan	1.59	0.83	0.91	
Perdagangan	2.03	2.51	2.56	
NPL JARING	2.38	2.25	2.37	

Sumber: OJK, Juni 2017

* Program JARING (Jangkau, Sinergi, dan *Guideline*) merupakan program inisiatif OJK dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam pembiayaan sektor Kelautan dan Perikanan.

1.5.3 Simpanan Pelajar (SIMPEL)

SimPel/SimPel iB merupakan program inklusi keuangan yang bertujuan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Sampai akhir periode laporan, terdapat 279 bank yang menjadi peserta dalam program SimPel/SimPel iB dengan jumlah rekening SimPel/SimPel iB mencapai 6.794.842 dan nominal sebesar Rp1,05 Triliun. Selain itu, terdapat Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang sudah terjalin antara Bank dan sekolah sebanyak 148.222 PKS.

1.5.4 Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) Sektor Riil

RDPT adalah alternatif investasi bagi pemodal profesional untuk berinvestasi di pasar modal di mana investasi tersebut ditempatkan pada efek Perusahaan Sasaran yang bergerak di sektor riil. Saat ini, RDPT menunjukkan pertumbuhan yang meningkat seiring dengan komitmen pemerintahan untuk membangun sektor riil. Secara umum RDPT sektor riil menempatkan investasi di Perusahaan Sasaran yang bergerak di bidang seperti: manufaktur, properti, tekstil, transportasi, dan energi.

Pada triwulan II-2017, terdapat 76 RDPT dengan total dana kelolaan mencapai Rp20,08 triliun (naik 23,80% qoq). RDPT ini terdiri dari 54 RDPT

sektor riil dengan jumlah dana kelolaan sebesar Rp16,09 triliun dan 22 RDPT non sektor riil dengan jumlah dana kelolaan sebesar Rp3,99 triliun.

1.5.5 Efek Beragun Aset – Surat Partisipasi (EBA SP)

EBA SP merupakan EBA yang dibentuk oleh penerbit yang portofolio asetnya berupa piutang-piutang yang disekuritisasi. Tujuan EBA SP adalah untuk membantu pembiayaan perumahan bagi masyarakat Indonesia. Saat ini EBA SP memiliki portofolio pada piutang nasabah Kredit Pemilikan Rumah dan diterbitkan oleh PT Sarana Multigriya Finansial (Persero). Pada triwulan II-2017, terdapat empat EBA SP dengan nilai sekuritisasi sebesar Rp2,47 triliun (naik 72,72% qoq). Jumlah ini meningkat dari triwulan I-2017 yang memiliki tiga EBA SP dengan nilai sekuritisasi sebesar Rp1,43 triliun.

1.5.6 Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

AUTP bertujuan untuk memberikan perlindungan dalam bentuk bantuan modal kerja kepada petani apabila terjadi kerusakan pertanian, serangan hama padi yang menyebabkan gagal panen. Dalam rangka mendukung program pemerintah OJK terlibat aktif dalam penyusunan Peraturan Menteri Pertanian tentang Asuransi Pertanian dan Pedoman Pengelolaan Bantuan Premi. AUTP diberikan untuk areal tanam padi seluas 1 juta Ha lahan pertanian, dengan harga pertanggungan sebesar Rp 6.000.000/ha. Suku premi asuransi diperkirakan sebesar 3% dari harga pertanggungan atau Rp 180.000/ha/MT. Premi AUTP 80 % ditanggung pemerintah dan 20% menjadi tanggungan petani. Porsi premi AUTP beban pemerintah sebesar Rp150.000.000.000 bersumber dari dana APBN.

Sampai dengan triwulan II-2017, jumlah lahan pertanian yang terdaftar meningkat 65,82% menjadi 859.811,38 (ha) atau 85,98% dari target 1 juta Ha.

1.5.7 Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)

Sampai dengan triwulan II-2017, realisasi premi AUTS adalah sebesar Rp8.223,60 juta dengan rincian premi subsidi (80%) sebesar Rp6.578,88 juta dan premi non subsidi (20%) sebesar Rp1.644,72 juta. Jumlah sapi yang tercover AUTS adalah 41.373 ekor sapi atau 34,48% dari target 120 ribu ekor sapi di 26 Provinsi. Sampai dengan triwulan II-2017, klaim AUTS yang masih dalam proses adalah sebesar Rp389,10 juta dan klaim yang telah dibayar adalah sebesar Rp7.799,73 juta.

1.5.8 Asuransi Nelayan

Program Asuransi Nelayan merupakan tindak lanjut dari UU Perlindungan Nelayan. Berdasarkan skema yang ditawarkan, nelayan berhak mendapatkan kompensasi saat mengalami musibah baik ketika melaut maupun tidak sedang melaut dengan besaran yang disesuaikan.

Bila seorang nelayan meninggal saat melaut, ahli waris akan mendapat santunan Rp200 juta. Jika terluka sampai cacat permanen, santunan sebesar Rp100 juta, dan untuk biaya pengobatan mendapat Rp20 juta. Adapun untuk santunan kecelakaan di luar aktifitas penangkapan ikan, jika sampai mengakibatkan kematian, ahli waris

mendapat Rp160 juta, cacat permanen Rp100 juta, dan untuk biaya pengobatan sebesar Rp20 juta. Asuransi Nelayan ini diharapkan dapat membuat nelayan lebih mandiri dalam meningkatkan produktifitas penangkapan.

Sampai dengan triwulan II-2017, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menandatangani MoU dengan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) pada Juni 2017 untuk pelaksanaan Asuransi Nelayan dan mulai dilaksanakan pada Juli 2017.

1.5.9 Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal

Asuransi penyingkiran kerangka kapal dilatarbelakangi adanya ketentuan Pasal 203 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 119 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian dan Pasal 18 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang *Salvage* dan/atau Pekerjaan Bawah Air, yang mengatur bahwa pemilik kapal wajib mengasuransikan kapalnya dengan asuransi penyingkiran kerangka kapal dan/atau perlindungan dan ganti rugi.

Sampai dengan triwulan II-2017, realisasi jumlah kapal yang dicover asuransi penyingkiran kerangka kapal (*wreck removal*) meningkat 24,3% menjadi 4.401 kapal.



Tinjauan
Operasional
**Sektor Jasa
Keuangan**



Penerbitan sembilan POJK dan 13 SEOJK yang mengatur Pengawasan Perbankan, Pasar Modal dan IKNB

Peluncuran *Roadmap* Pengawasan Terintegrasi sebagai arah kebijakan pengawasan terhadap Konglomerasi Keuangan (KK).



Peluncuran Sistem Informasi Perizinan Dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) Penerbitan Obligasi dan Sukuk

Kesepakatan ASEAN *Corporate Governance* (CG) Scorecard 2017

Penandatanganan MoU dan Lol dengan enam lembaga domestik dan satu lembaga internasional



OJK Meraih Penghargaan *The Global Inclusion Award* 2017

Peluncuran Galeri Investasi *Mobile* di Universitas Cenderawasih



Peluncuran Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan (SPKK)

Tinjauan Operasional Sektor Jasa Keuangan



2.1 AKTIVITAS PENGATURAN

2.1.1 Pengaturan Bank

Program penelitian dan pengaturan pada sektor perbankan difokuskan untuk mencapai sasaran strategis berupa peningkatan kualitas pengaturan industri perbankan yang selaras dan terintegrasi dengan industri jasa keuangan lainnya serta pengembangan industri perbankan yang stabil dan berdaya saing global.

a. Pengaturan Bank Umum

Pada triwulan II-2017, OJK menerbitkan empat POJK dan tiga SEOJK terkait ketentuan bank umum. Kebijakan yang diterbitkan adalah sebagai berikut:

1. POJK Nomor 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*/RP) Bagi Bank Sistemik
Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari UU RI Nomor 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK). Peraturan ini mengatur kewajiban bank sistemik untuk mempersiapkan rencana dalam rangka mencegah dan

mengatasi permasalahan keuangan yang mungkin terjadi di Bank Sistemik dengan cara menyusun suatu RP. Adapun pokok pengaturan dalam peraturan ini antara lain: (i) Kewajiban Bank Sistemik dalam menyusun dan menyampaikan rencana aksi (*Recover Plan*) serta (ii) memiliki instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal.

2. POJK Nomor 15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum
Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari UU RI Nomor 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK). POJK ini mengatur mengenai penanganan permasalahan bank, baik penanganan terhadap bank sistemik maupun selain bank sistemik. Selain itu, peraturan ini mengatur tentang status pengawasan bank yang terdiri dari tiga tahap, yaitu pengawasan normal, pengawasan intensif, dan pengawasan khusus, serta penetapan kriteria dari status pengawasan dimaksud.

3. POJK Nomor 16/POJK.03/2017 tentang Bank Perantara
Penerbitan peraturan ini sebagai tindak lanjut dari UU RI Nomor 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK). POJK ini mengatur mengenai prosedur pendirian bank perantara, mulai dari proses pendirian, operasional, dan pengakhiran Bank Perantara.
 4. POJK Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)
Penerbitan peraturan ini bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan sebuah sistem baru yang mendukung akses informasi perkreditan yang bernama Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) terkait pengaturan mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui SLIK. SLIK bermanfaat untuk memperlancar proses penyediaan dana, penerapan manajemen risiko, penilaian kualitas debitur, dan meningkatkan disiplin industri keuangan.
 5. SEOJK Nomor 16/SEOJK.03/2017 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing terkait Perpajakan dalam Rangka Pertukaran Informasi Secara Otomatis Antarnegara dengan Menggunakan Standar Pelaporan Bersama (*Common Reporting Standard*)
Peraturan ini merupakan peraturan pelaksana dari POJK Nomor 25/POJK.03/2016 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing terkait Perpajakan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.
 6. SEOJK Nomor 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum
Peraturan ini merupakan peraturan pelaksana dari POJK Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum
 7. SEOJK Nomor 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan
Peraturan ini merupakan peraturan pelaksana dari POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) di Sektor Jasa Keuangan
- b. Pengaturan BPR**
- Pada triwulan II-2017, OJK menerbitkan satu POJK dan satu SEOJK terkait ketentuan BPR antara lain:
1. POJK Nomor 19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Penerbitan peraturan ini untuk menjembatani pengawasan normal BPR menuju pengawasan khusus. POJK ini juga merupakan harmonisasi peraturan dengan ketentuan mengenai KPMM dan rasio modal inti BPR dan BPRS.
Adapun pokok-pokok pengaturan dalam POJK ini, antara lain: (i) *Threshold* kriteria status pengawasan BPR dan BPRS; dan (ii) Kriteria BPR dan BPRS yang tidak dapat disehatkan
 2. SEOJK Nomor 15/SEOJK.03/2017 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Peraturan ini merupakan peraturan pelaksanaan dari POJK Nomor 75/POJK.03/2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

2.1.2 Pengaturan Pasar Modal

Selama periode laporan, OJK menerbitkan tiga POJK dan dua SEOJK terkait pengaturan Pasar Modal, yaitu:

1. POJK Nomor 20/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 23/POJK.04/2014 tentang Pedoman Penerbitan dan pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi Dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan
Peraturan ini merupakan penyempurnaan dari POJK Nomor 23/POJK.04/2014 Tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi Dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan.
2. POJK Nomor 21/POJK.04/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual.
Latar belakang revisi peraturan sebagai langkah *market deepening* dan terdapat potensi investor yang ingin berinvestasi pada Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) namun terkendala dengan minimum dana kelolaan yang dirasa cukup besar, yaitu Rp10 miliar.
3. POJK Nomor 22/POJK.04/2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek. POJK ini sebagai perubahan Peraturan Bapepam-LK Nomor X.M.3 tentang Pelaporan Transaksi Efek.
Perubahan Peraturan ini bertujuan untuk memfasilitasi perkembangan kebutuhan infrastruktur pasar, pengawasan perdagangan efek melalui data pelaporan dan konsolidasinya dengan data penyelesaian transaksi, sekaligus meningkatkan integritas pasar, memperbaiki kualitas pembentukan harga di pasar dan memperkuat fungsi pengawasan transaksi efek bersifat utang dan sukuk.
4. SEOJK Nomor 20/SEOJK.04/2017 tentang Persyaratan Penyelenggaraan Program Pendidikan Lanjutan bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Efek.

5. SEOJK Nomor 19/SEOJK.04/2017 tentang Pengakuan Terhadap Asosiasi Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

Penyusunan SEOJK ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Rancangan Surat Edaran ini merupakan tindak lanjut dari POJK Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

2.1.3 Pengaturan IKNB

Pada triwulan II-2017, OJK menerbitkan satu POJK dan sembilan SEOJK terkait pengaturan IKNB dengan detail sebagai berikut:

1. POJK Nomor 17/POJK.05/2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah
Penerbitan peraturan ini mengatur mengenai sanksi administratif kepada setiap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan peraturan pelaksanaannya.
Adapun pokok-pokok materi pengaturan dalam POJK ini antara lain: (1) Jenis Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian; (2) Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi Perusahaan Perasuransian; dan (3) Sanksi Administrasi Berupa Denda Administratif.
2. SEOJK Nomor 17/SEOJK.05/2017 tentang Laporan Pelaksanaan Penempatan Reasuransi/Retrosesi
Peraturan ini merupakan amanat ketentuan

- dari POJK nomor 14/POJK.05/2015 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri. SEOJK ini mengatur mengenai bentuk, susunan, dan tata cara pengisian laporan pelaksanaan penempatan reasuransi/retrosesi untuk seluruh lini usaha asuransi dan masing-masing lini usaha asuransi serta tata cara penyampaian laporan pelaksanaan penempatan reasuransi/retrosesi.
3. SEOJK Nomor 22/SEOJK.05/2017 tentang Dasar Penilaian Aset yang Diperkenankan dalam Bentuk Investasi dan Bukan Investasi Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
Peraturan ini mengatur dasar penilaian terhadap investasi yang diperbolehkan di perusahaan asuransi dan reasuransi sebagaimana diatur dalam POJK nomor 71/POJK.05/2016.
 4. SEOJK Nomor 23/SEOJK.05/2017 tentang Dasar Penilaian Aset yang Diperkenankan dalam Bentuk Investasi dan Bukan Investasi bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah
Peraturan ini mengatur mengenai dasar penilaian terhadap investasi yang diperbolehkan di perusahaan asuransi syariah dan reasuransi syariah sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 72/POJK.05/2016.
 5. SEOJK Nomor 24/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Perhitungan Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR) bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
SEOJK ini mengatur mengenai pedoman perhitungan jumlah MMBR bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.
 6. SEOJK Nomor 25/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Perhitungan Dana *Tabarru'* Minimum Berbasis Risiko dan Modal Minimum Berbasis Risiko bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah
Peraturan ini mengatur mengenai pedoman perhitungan jumlah dana *tabarru'* dan Dana *Tanahud* Minimum Berbasis Risiko (DTMBR) serta MMBR bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah.
 7. SEOJK Nomor 26/SEOJK.05/2017 tentang Tata Cara Pengajuan dan Persetujuan Penempatan Investasi dan Bukan Investasi pada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah
Peraturan ini mengatur mengenai penempatan investasi yang melebihi batasan serta penempatan atas aset yang diperkenankan dalam bentuk bukan investasi pada aset reasuransi yang bersumber dari perjanjian kontrak jangka panjang (*longterm contract*) program reasuransi dukungan modal (*capital oriented reinsurance*) dan biaya akuisisi yang ditangguhkan (*deferred acquisition cost*).
 8. SEOJK Nomor 27/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Pembentukan Cadangan Teknis Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
Peraturan ini mengatur mengenai pedoman pembentukan cadangan teknis bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.
 9. SEOJK Nomor 28/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Pembentukan Penyisihan Kontribusi dan Metode Perhitungan Penyisihan Klaim pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah
Peraturan ini mengatur pedoman pembentukan penyisihan teknis bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Adapun pokok-pokok materi pengaturan ini adalah (1) Pedoman Umum Pembentukan Penyisihan Teknis; (2) Pembentukan Penyisihan Teknis Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud*; (3) Pembentukan Penyisihan Teknis Dana Perusahaan.
 10. SEOJK Nomor 29/SEOJK.05/2017 tentang Laporan Aktuaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi

Syariah, dan Perusahaan Reasuransi Syariah Peraturan ini mengatur mengenai bentuk dan susunan laporan aktuaris tahunan perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi syariah, dan perusahaan reasuransi syariah.

2.2 AKTIVITAS PENGAWASAN

2.2.1 Pengawasan Terintegrasi

A. Profil Konglomerasi Keuangan (KK)

OJK mencatat bahwa total aset dari 48 Grup KK sebesar Rp5.980 triliun, sedangkan total aset industri jasa keuangan Indonesia sebesar Rp8.931 triliun. Dengan demikian, persentase perbandingan total aset 48 grup KK terhadap total aset industri jasa keuangan cukup signifikan yaitu 66,96%.

B. Implementasi Pengawasan Terintegrasi

Selama periode laporan, telah dilakukan penyusunan *Integrated Supervisory Plan* (ISP) Tahun 2017 terhadap 42 KK. Selain itu, OJK telah menyusun KYFC dan IRR posisi Desember 2016 untuk 42 KK. Selanjutnya dilakukan Forum Panel Pengawasan Terintegrasi (FPPT) terhadap 6 KK pada bulan akhir periode laporan.

2.2.2 Pengawasan Perbankan

A. Pemeriksaan Umum dan Pemeriksaan Khusus

Berdasarkan *Standard Operating Procedure* (SOP) pengawasan terhadap bank wajib dilakukan pemeriksaan umum setahun sekali secara berkala. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan dilakukan pemeriksaan umum setiap waktu apabila diperlukan.

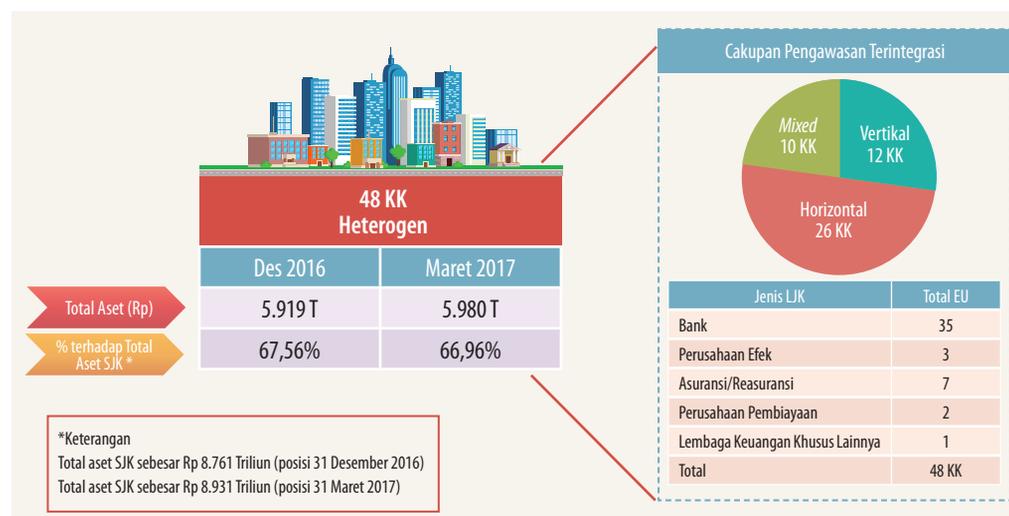
Sampai dengan triwulan II-2017, telah direalisasikan pemeriksaan terhadap 1.007 bank yang terdiri dari 991 kantor pusat dan 230 Kantor Cabang. Dari 1.007 bank, 948 adalah kantor BPR dan BPRS dan 59 adalah kantor BUK dan UUS.

Tabel II - 1 Pemeriksaan Bank Umum

Jenis Bank	Pemeriksaan Umum					
	Rencana			Realisasi		
	Triwulan I-II 2017			Triwulan I-II 2017		
	KP	KC	Jumlah Entitas	KP	KC	Jumlah Entitas
BUK	46	179	56	45	175	56
UUS	3	4	3	2	3	3
BPR	956	51	956	882	45	882
BPRS	66	5	66	62	7	66
Total	1.071	239	1.081	991	230	1.007

Sumber: OJK

Grafik II - 1 Profil Konglomerasi Keuangan Indonesia dan Cakupan Pengawasan Terintegrasi



Pengawas selain melakukan pemeriksaan umum juga melaksanakan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus merupakan pemeriksaan yang dilakukan secara insidental dan berkaitan dengan aspek tertentu dari bank seperti produk bank, aktivitas atau kegiatan usaha tertentu, indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh bank, ataupun hal-hal lainnya yang dirasakan perlu didalami dan diperiksa lebih jauh. Pelaksanaan pemeriksaan khusus ini dapat berdiri sendiri/tersendiri ataupun merupakan lanjutan dari pemeriksaan umum yang dilakukan secara bersamaan, antara lain pemeriksaan khusus modal disetor, *fit and proper*, pemeriksaan dugaan tindak pidana, Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), suku bunga, setoran modal, aktifitas operasional, IT dan treasuri.

Sampai dengan triwulan II-2017, telah dilakukan 191 pemeriksaan khusus terhadap BUK dan BPR dengan cakupan pemeriksaan antara lain pemeriksaan setoran modal, aktivitas operasional, *joint audit*, GCG, teknologi dan informasi, *fraud*, serta penetapan pencabutan.

Tabel II - 2 Pemeriksaan Khusus Bank

Subjek Pemeriksaan	Triwulan I-II 2017
Setoran Modal	67
Aktivitas Operasional	88
Teknologi dan Informasi	5
<i>Joint Audit</i>	3
GCG	1
<i>Fraud</i>	8
Penetapan Pencabutan	1
Lainnya	18
Total	191

Sumber: OJK

B. Perizinan Produk dan Aktivitas Bank

Dalam rangka memberikan panduan kepada Bank dalam menerbitkan dan mengeluarkan produk dan aktivitas baru, OJK mensyaratkan agar perbankan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh BI sebelumnya.

Hal ini mengingat produk dan aktivitas yang ditawarkan perbankan khususnya terkait dengan produk dan aktivitas baru, berkembang menjadi semakin kompleks dan bervariasi, sehingga eksposur risiko yang ditanggung bank dari penerbitan produk dan pelaksanaan aktivitas tersebut menjadi semakin tinggi.

Sampai dengan triwulan II-2017, produk dan aktivitas baru untuk BUK dan BPR yang telah diterbitkan mencapai 292 produk yang sebagian besar terkait dengan reksa dana dan *bancassurance* serta produk lainnya seperti surat berharga, *cash management*, *e-banking*, dan lain-lain.

Tabel II - 3 Produk dan Aktivitas Baru Perbankan Triwulan II-2017

Prdoduk/Aktivitas Baru	Triwulan I-II 2017
Reksa Dana	105
<i>Bancassurance</i>	63
<i>E-Banking</i>	13
Perkreditan/Pembiayaan	8
Surat Berharga (Obligasi/MTN/Sukuk)	15
Pendanaan	14
APMK	6
<i>Structured Product</i>	10
LC	3
<i>Cash Management</i>	16
Fitur SMS Notifikasi	1
<i>e-Commerce</i>	1
Kepemilikan Logam Mulia	2
Lainnya	35
Total	292

Sumber: OJK

C. Penegakan Kepatuhan Bank

- 1) Uji Kemampuan dan Kepatuhan (*Existing*)
Pada triwulan II-2017, terdapat satu Direksi bank yang telah menjalani proses *Fit and Proper Existing*. Selain itu, untuk *database track record* (TR), selama triwulan II-2017 terdapat penambahan 10 pelaku yang dilakukan oleh pihak-pihak yang telah mendapat persetujuan untuk menjadi Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali (PSP), dan Non-Pejabat Eksekutif untuk pelanggaran yang terjadi pada periode

sebelumnya. Adapun modus yang dilakukan antara lain terkait dengan pelanggaran prinsip kehati-hatian dan pelanggaran/penyimpangan SOP.

Tabel II - 4 Track Record Tindak Tipibank Triwulan II-2017

Objek Track Record	Jumlah Input TR
Kepala Kantor Perwakilan	1
Direksi	3
Pejabat Eksekutif	1
Non Pejabat Eksekutif	5
TOTAL	10

Sumber: OJK

2) Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan

Selama triwulan II-2017, terdapat 11 Penyimpangan Ketentuan Perbankan (PKP) pada enam kantor bank. PKP tersebut selanjutnya dianalisis dan dikoordinasikan guna memastikan kebutuhan investigasi untuk tindak lanjut. Sebagai tindak lanjut, telah dilakukan investigasi terhadap tiga PKP pada satu kantor bank (BPR). Pada triwulan II-2017 tidak terdapat PKP yang dilimpahkan ke tahap penyelidikan/penyidikan.

Tabel II - 5 Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan

Keterangan	Triwulan II – 2017					
	Bank Umum		BPR		TOTAL	
	Kantor Bank	PKP (Kasus)	Kantor Bank	PKP (Kasus)	Kantor Bank	PKP (Kasus)
A. PKP yang Diterima dan Ditindaklanjuti	1	1	5	10	6	11
1. Telah Dilakukan Investigasi	0	0	1	3	1	3
2. Dikembalikan Kepada Pengawasan	1	1	3	6	4	7
3. Proses Analisis awal	0	0	1	1	1	1
B. Dilimpahkan Kepada Penyelidikan OJK	0	0	0	0	0	0

Sumber: OJK

Tipibank pada umumnya bersumber dari internal bank seperti kelemahan pengawasan internal, kurangnya integritas pegawai, dan kelemahan sistem bank, maka perlu peningkatan pengawasan manajemen bank melalui pelaksanaan *independent review* oleh SKAI, kaji ulang kebijakan internal, serta pengamanan teknologi informasi dan infrastruktur pendukungnya.

3) Sosialisasi

Dalam rangka peningkatan pemahaman terhadap dugaan tipibank, pada triwulan II-2017 OJK melakukan sosialisasi kepada industri perbankan dan aparat penegak hukum di Jakarta, Yogyakarta, Mataram, dan Palembang. Kegiatan ini penting agar industri perbankan dikelola oleh bankir-bankir yang *fit* dan *proper* serta apabila ditemukan adanya *fraud* dapat segera diproses guna menimbulkan *announcement effect*.

4) Pemberian Keterangan Ahli atau Saksi

Dalam rangka memenuhi permintaan Aparat Penegak Hukum (APH), selama triwulan II-2017 terdapat 74 permintaan keterangan ahli dan/atau saksi. Permintaan tersebut berasal dari Kepolisian Negara RI (Polri) sebanyak 60 permintaan keterangan dan Kejaksaan RI sebanyak 14 permintaan keterangan. Permintaan keterangan dari Polri terdiri dari 46 keterangan sebagai ahli dan 14 keterangan sebagai saksi, sedangkan permintaan keterangan dari Kejaksaan RI terdiri dari 12 keterangan sebagai ahli dan 2 keterangan sebagai saksi.

Tabel II - 6 Pemberian Keterangan Ahli/Saksi Triwulan II-2017

No.	APH	Permintaan		
		Saksi	Ahli	Total
1.	Kepolisian RI	14	46	60
2.	Kejaksaan RI	2	12	14
TOTAL		16	58	74

Sumber: OJK

D. Kelembagaan Bank Umum Konvensional

1) Perizinan

Pada triwulan II-2017 telah diselesaikan 117 perizinan perubahan jaringan kantor bank umum yang terdiri dari pembukaan kantor, penutupan kantor, pemindahan alamat kantor, dan perubahan status. Perizinan tersebut sebagian besar berupa penutupan kantor (43,59% - 51 perizinan), diikuti pemindahan alamat (23,08% - 27 perizinan), perubahan status (22,22% - 26 perizinan), dan pembukaan kantor (11,11% - 13 perizinan).

Tabel II - 7 Perizinan Perubahan Jaringan Kantor BUK*

No	Jenis Kegiatan	Triwulan I-2017	Triwulan II-2017
1	Pembukaan Bank Umum		
a.	Kantor Wilayah (Kanwil)	4	3
b.	Kantor Cabang (KC)	7	3
c.	Kantor Cabang Pembantu (KCP)	13	3
d.	Kantor Fungsional (KF)	1	4
e.	Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar Negeri	-	-
2	Penutupan Bank Umum		
a.	Izin Usaha	1	-
b.	Kantor Perwakilan	-	-
c.	Kantor Cabang (KC)	1	3
d.	Kantor Cabang Pembantu (KCP)	24	27
e.	Kantor Fungsional (KF)	17	21
3	Pemindahan Alamat Bank Umum		
a.	Kantor Pusat (KP)	2	1
b.	Kantor Wilayah (Kanwil)	-	1
c.	Kantor Cabang (KC)	5	5
d.	Kantor Cabang Pembantu (KCP)	18	17
e.	Kantor Fungsional (KF)	1	3
f.	Kantor Perwakilan Bank	-	-
4	Perubahan Status Bank Umum		
a.	Peningkatan Status		
	- KCP menjadi KC	6	2
	- KK menjadi KCP	10	10
	- KF menjadi KCP	-	-
	- KK menjadi KC	-	-
b.	Penurunan Status Bank Umum		
	- KP menjadi KC	-	-
	- KC menjadi KCP	11	11
	- KCP ke KF/KK	3	3
5	Perubahan Penggunaan Izin Usaha (Perubahan Nama)	-	-
6	Perubahan Badan Hukum	-	-
7	Merger Bank Umum	-	-
8	Izin Bank Devisa	-	-
9	Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Luar Negeri di Indonesia	1	-
	Jumlah	125	117

Sumber: LKPBU, Juni 2017

*)Ket: Hanya mencakup perubahan perizinan jaringan kantor di wilayah Jabodetabek

2) Jaringan Kantor

Pada triwulan II-2017, jaringan kantor BUK meningkat 756 jaringan kantor dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu dari 135.944 menjadi 136.700 jaringan kantor. Peningkatan terbesar terjadi pada ATM/ADM yang bertambah sebanyak 713 unit, sementara pengurangan terbesar terdapat pada kantor fungsional yang berkurang sebanyak 18 kantor.

Tabel II - 8 Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional

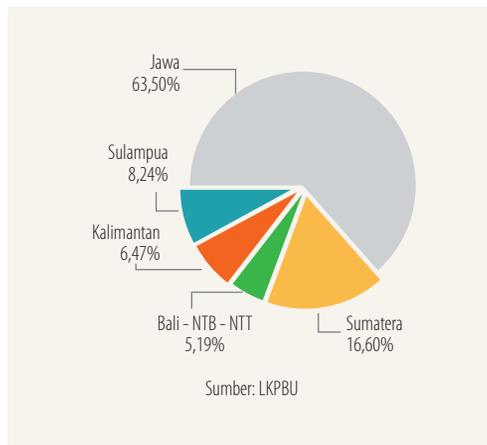
Status Kantor	Triwulan I-2017	Triwulan II-2017	Perubahan Δ
Kantor Pusat Operasional	51	51	-
Kantor Pusat Non Operasional	55	54	(1)
Kantor Cabang Bank Asing	9	9	-
Kantor Wilayah Bank Umum (Konvensional+Syariah)	169	175	6
Kantor Cabang (Dalam Negeri)	2.890	2.890	-
Kantor Cabang (Luar Negeri)	-	1	1
Kantor Cabang Pembantu Bank Asing	33	28	(5)
Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	16.800	16.850	50
Kantor Cabang Pembantu (Luar Negeri)	-	-	-
Kantor Kas	10.682	10.680	(2)
Kantor Fungsional (Konvensional+Syariah)	1.641	1.623	(18)
Payment Point	1.688	1.700	12
Kas Keliling/Kas Mobil/Kas Terapung	1.520	1.530	10
Kantor di bawah KCP KCBA yang Tidak Termasuk 11,12,13,14 *)	23	13	(10)
Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar negeri	2	2	-
ATM/ADM	100.381	101.700	713
TOTAL	135.944	136.700	756

Sumber: Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU)

Berdasarkan pembagian wilayah, sebaran jaringan kantor BUK sebagian besar berada di pulau Jawa dengan jumlah sebanyak 86.801 jaringan kantor (63,50%), diikuti pulau Sumatera 22.699 (16,60%), Sulampua 11.261 (8,24%), Kalimantan 8.851 (6,47%), dan Bali-NTB-NTT 7.088 (5,19%). Peningkatan jumlah jaringan kantor terjadi pada seluruh wilayah dengan

peningkatan terbesar berada di pulau Jawa yang bertambah sebanyak 374 jaringan kantor.

Grafik II - 2 Penyebaran Jaringan Kantor BUK Pada Triwulan II-2017



3) Uji Kemampuan dan Kepatutan (*New Entry*)

Pada triwulan II-2017, terdapat 9 pemohon FPT *New Entry* yang lulus mengikuti proses wawancara, terdiri dari tiga Dewan Komisaris dan enam anggota Direksi. Disertai dengan *carry over* periode sebelumnya, terdapat 20 calon pengurus yang mendapat surat keterangan lulus.

Tabel II - 9 FPT Calon Pengurus dan PSP Bank Umum selama Triwulan II-2017

New Entry	Wawancara		Surat Keputusan (SK) FPT		Jumlah Tidak ditindak-lanjuti	Total
	Lulus	Tidak Lulus	Lulus	Tidak Lulus		
PSP/PSPT	0	0	2	0	1	3
Dewan Komisaris	3	1	5	1	5	15
Direksi	6	1	13	0	8	28
Total	9	2	20	1	14	46

Sumber: OJK

E. Kelembagaan BPR

1) Perizinan

Selama periode laporan, terdapat sembilan BPR dalam pengawasan khusus dan dua pencabutan izin usaha

BPR yang telah diselesaikan. Selain itu, terdapat dua pencabutan izin usaha dilakukan terhadap PT BPR Triharta Indah dan PT BPR Indomitra Mega Kapital.

Tabel II - 10 Perizinan BPR

Perizinan BPR	Triwulan I-2017	Triwulan II-2017
Pendirian BPR	-	-
Merger BPR	-	-
Konsolidasi BPR	-	-
BPR dalam Pengawasan Khusus	12	9
Pencabutan Izin Usaha	3	2
Konversi Syariah	-	-
Total	15	11

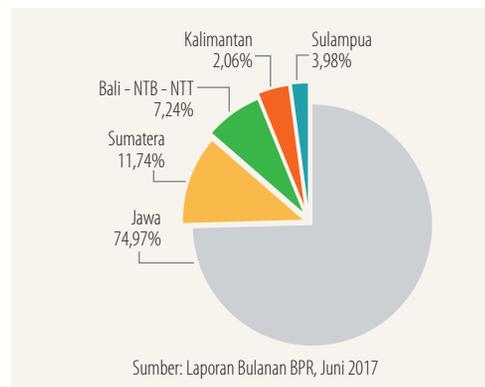
Sumber: OJK, Juni 2017

2) Jaringan Kantor

Jumlah BPR pada triwulan II-2017 berkurang 11 dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi 1.619 BPR. Jumlah jaringan kantor dari 1.619 BPR tersebut bertambah 45 kantor dibandingkan triwulan sebelumnya dari 6.110 menjadi 6.155 jaringan kantor.

Penyebaran jaringan kantor pada lima wilayah di Indonesia masih belum merata, yaitu masih terpusat di wilayah Jawa (74,97% atau 4.616 kantor), diikuti wilayah Sumatera (11,74% atau 723 kantor), wilayah Bali-NTB-NTT (7,24% atau 446 kantor), wilayah Sulampua (3,98% atau 245 kantor), dan wilayah Kalimantan (2,06% atau 127 kantor).

Grafik II - 3 Penyebaran Jaringan Kantor BPR Triwulan II-2017



3) Uji Kemampuan dan Kepatutan *Fit and Proper Test (FPT) New Entry*

Pada triwulan II-2017, OJK telah melakukan *FPT New Entry* kepada 362 calon pengurus dan PSP BPR dengan hasil 307 calon Pengurus/PSP BPR yang mendapatkan persetujuan untuk menjadi Direksi, Komisaris dan PSP, serta 55 calon yang ditolak. Jumlah calon yang lulus tersebut meningkat sebesar 18% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tabel II - 11 Daftar Hasil *Fit and Proper Test New Entry* BPR

New Entry	2017					
	Triwulan I			Triwulan II		
	Lulus	Tidak Lulus	Total	Lulus	Tidak Lulus	Total
Direksi	124	34	158	203	43	246
Komisaris	113	18	131	86	12	98
PSP	22	0	22	18	0	18
Pengurus	1	1	2	0	0	0
Jumlah	260	53	313	307	55	362

Sumber: OJK

2.2.3 Pengawasan Pasar Modal

A. Pengawasan Lembaga dan Transaksi Efek

1) Pengawasan Transaksi Saham

Selama periode laporan, OJK telah melakukan pengawasan terhadap transaksi efek berupa *monitoring* 69 saham atas laporan harian, mingguan, dan bulanan serta perdagangan yang diindikasikan tidak wajar (*unusual market activity*) di mana tujuh saham telah ditindaklanjuti ke proses penelaahan dan enam saham telah diputuskan untuk di-*discard* setelah dilakukan analisis lebih lanjut mengenai indikasi pelanggaran, serta 56 saham sedang dilakukan *monitoring*.

OJK juga melakukan penelaahan terhadap perdagangan tujuh saham sebagai tindak lanjut dari hasil kegiatan *monitoring unusual market activity* di

mana aktivitas perdagangan atas saham tersebut diindikasikan tidak wajar, di mana dari saham-saham tersebut, terdapat tiga saham sedang dilakukan penelaahan, dan empat saham telah ditingkatkan ke pemeriksaan teknis.

Selain itu, OJK juga melakukan pemeriksaan teknis terhadap lima saham untuk membuktikan adanya indikasi transaksi semu, manipulasi perdagangan dan/atau perdagangan orang dalam, di mana satu saham sedang dilakukan pemeriksaan, sementara empat saham telah selesai pemeriksaan.

2) Pengawasan Transaksi Surat Utang dan Efek Lainnya.

Selama triwulan II-2017, OJK melakukan pengawasan transaksi surat utang dan efek lainnya antara lain penelaahan atas laporan dari Penerima Laporan Transaksi Efek (PLTE) April dan Mei berupa keterlambatan pelaporan transaksi Efek masing-masing oleh 19 dan 17 Partisipan. OJK juga melakukan *review alert* pada April dan Mei yang menghasilkan 2.245 *alert* obligasi pemerintah, 631 *alert* obligasi korporasi dan 101 *alert* waran.

Selama periode laporan, OJK menerima permohonan pembatalan pelaporan transaksi obligasi pada sistem PLTE oleh dua partisipan yang terdiri dari dua pelaporan. OJK juga melakukan penelaahan atas laporan bulanan mengenai kecenderungan Pasar Surat Utang dari *Indonesia Bond Pricing Agency* (IBPA).

3) Pengawasan *Self Regulatory Organization*, Lembaga Penilai harga Efek dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal

Pada periode pelaporan, OJK melakukan pengawasan terhadap *Self Regulatory Organization* (SRO), Lembaga Penilai Harga Efek (LPHE) dan

Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) dengan melaksanakan beberapa kegiatan antara lain: (1) Penyampaian Surat Kepada SRO terkait luran Keanggotaan Tahunan Dana Perlindungan Pemodal bagi PPE yang Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah 2017; (2) Penyampaian Laporan analisis atas Laporan Realisasi Anggaran dan Rencana Kerja PT KSEI, PT KPEI dan PT P3IEI triwulan IV tahun 2016; dan (3) Penyampaian surat Penetapan Apresiasi Kinerja Tahun 2016 Bagi Direksi dan Komisaris PT BEI, PT KPEI dan PT KSEI.

- 4) Pengawasan Perusahaan Efek
 Selama periode pelaporan, OJK memberikan persetujuan terhadap 18 perubahan susunan direksi, delapan perubahan susunan komisaris, dan empat proses persetujuan perubahan pemegang saham. OJK juga melakukan analisis dan pemantauan atas laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) terhadap 129 Perusahaan Efek serta melakukan analisis dan pemantauan atas 44 Perusahaan Efek yang melakukan Penjaminan Emisi Efek terhadap 46 Emiten di mana seluruh Perusahaan Efek tersebut mampu melakukan tugasnya sebagai Penjamin Emisi Efek. Selain itu, OJK juga melakukan Pemantauan terhadap laporan bulanan atas Laporan Kegiatan Perantara Pedagang Efek (LKPPE) dalam triwulan II-2017 yaitu LKPPE periode Maret 2017 sampai dengan LKPPE periode Mei 2017, di mana terdapat delapan Perusahaan Efek yang belum menyampaikan LKPPE dan satu Perusahaan Efek yang terlambat menyampaikan LKPPE periode April 2017.

B. Pengawasan terhadap Pengelolaan Investasi

OJK melakukan pemeriksaan kepatuhan pelaku industri pengelolaan investasi terhadap 16 kantor pusat Manajer Investasi (MI), di mana sebanyak delapan MI telah selesai Laporan Hasil Pemeriksaannya (LHP) dan dua MI dalam proses finalisasi LHP. OJK juga melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap 17 kantor cabang APERD dan PE APERD, di mana sebanyak 13 APERD telah selesai LHP-nya dan tiga APERD dalam proses finalisasi LHP serta satu APERD masih dalam proses permintaan konfirmasi ke APERD serta enam MI masih dalam tahap proses permintaan konfirmasi ke MI. Terkait dengan pemeriksaan kepatuhan terhadap empat BK, terdapat satu BK dalam proses finalisasi LHP dan tiga BK dalam proses permintaan konfirmasi. Adapun untuk pemeriksaan kepatuhan terhadap satu KIK DIRE, saat ini telah selesai LHP nya. Pengawasan terhadap pelaku industri pengelolaan investasi juga didukung oleh sistem *E-monitoring* yang digunakan untuk melakukan pemantauan transaksi industri pengelolaan investasi. Selain itu, terkait laporan MKBD OJK mencatat bahwa dua MI yang tidak menyampaikan laporan April, Mei, dan Juni 2017, dua MI yang terlambat menyampaikan laporan April 2017 dan satu MI yang terlambat menyampaikan laporan Mei 2017.

C. Pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik

OJK melakukan pengawasan terhadap berbagai aksi korporasi yang dilakukan oleh Emiten dan Perusahaan Publik, yaitu sebagai berikut:

Tabel II - 12 Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik

No	Aksi Korporasi	Triwulan III-2016	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017	Triwulan II-2017
1	Transaksi Afiliasi	59	63	53	37
2	Transaksi Afiliasi Bersamaan Dengan Transaksi Material	-	-	-	3
3	Transaksi Material Tidak Memerlukan RUPS	8	3	11	7
4	Transaksi Material yang Harus Terlebih Dahulu Mendapat Persetujuan RUPS	3	2	8	10
5	Transaksi Perubahan Kegiatan Usaha Utama	-	-	1	-
6	Pembagian Saham Bonus	-	-	-	-
7	Pembagian Dividen Berupa Kas	14	2	3	30
8	Pembagian Dividen Saham	-	-	-	1
9	Laporan <i>Buyback</i> Saham	3	1	7	-
10	Laporan <i>Buyback</i> Saham dalam Kondisi Pasar Yang Berpotensi Krisis	6	4	-	-
11	Pembelian Kembali Obligasi	-	-	1	-
12	Penelaahan Terhadap Program ESOP/MSOP	-	3	1	1
13	Penelaahan Atas Rencana Penggabungan Usaha	-	2	-	-
14	Penelaahan Atas Penawaran Tender	1	-	2	-
15	Penelaahan Atas Penawaran Tender Sukarela	-	-	-	-
16	Penelaahan Atas Rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD	3	3	2	8
17	Penelaahan <i>Go Private</i>	-	-	-	-

Pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik juga dilakukan melalui pemantauan atas penyampaian laporan berkala, antara lain sebagai berikut:

Tabel II - 13 Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik

No	Laporan Berkala	LKT 2015		LT 2015		LKTT 2016		LKT 2016		LT 2016	
		EPP	%	EPP	%	EPP	%	EPP	%	EPP	%
1	Tepat Waktu	509	84,3%	507	83,9%	537	88,9%	529	84,1%	437	69,5%
2	Terlambat	70	11,6%	71	11,8%	50	8,3%	48	7,6%	65	10,3%
3	Belum Menyampaikan	13	2,2%	14	2,3%	14	2,3%	26	4,1%	100	15,9%
4	Beda Tahun Buku dan Belum Menyampaikan	0	0,0%	12	2,0%	0	0,0%	5	0,8%	7	1,1%
5	Belum Wajib Menyampaikan	12	2,0%	0	0,0%	3	0,5%	20	3,2%	20	3,2%

LKT: Laporan Keuangan Tahunan
LKTT: Laporan Keuangan Tengah Tahun
LT: Laporan Tahunan
EPP: Emiten dan Perusahaan Publik

Selama periode laporan, OJK mencatat bahwa terdapat 130 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, dengan rincian 121 tepat waktu dan sembilan laporan terlambat. Selain itu, OJK melakukan pemantauan atas kesesuaian dengan ketentuan Pasar Modal terhadap 122 laporan keterbukaan atas informasi atau fakta material, 70 laporan hasil pemeringkatan efek, 343 hasil RUPS, serta 16 laporan penjabatan Penawaran Umum.

OJK melakukan rekapitulasi terhadap laporan hutang valas yang disampaikan setiap bulan oleh Emiten dan Perusahaan Publik, dengan total laporan sebanyak 488 laporan dengan tujuan untuk melihat *exposure* hutang valas terhadap Emiten dan Perusahaan Publik. OJK juga melakukan Pemeriksaan Teknis terhadap 14 Emiten dan Perusahaan Publik dengan detail sebagai berikut :

- Satu Emiten dan Perusahaan Publik untuk memastikan pemenuhan Peraturan Nomor X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik,
- Dua Emiten dan Perusahaan Publik untuk memastikan pemenuhan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;
- Satu Emiten dan Perusahaan Publik untuk memastikan adanya dugaan pelanggaran tentang Kepatuhan terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 23 tentang Pendapatan, POJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, Kepatuhan Perseroan terhadap Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
- Satu Emiten dan Perusahaan Publik untuk memastikan pemenuhan Kepatuhan Perseroan terhadap Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan

- Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik dan pemenuhan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;
- e. Satu Emiten dan Perusahaan Publik untuk memastikan pemenuhan Kepatuhan terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 22 tentang Kombinasi Bisnis, POJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik, Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian Dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten Atau Perusahaan Publik;
 - f. Satu Emiten dan Perusahaan Publik untuk memastikan pemenuhan atas ketentuan-ketentuan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan No. IX.E.2 terkait dengan transaksi penerimaan pinjaman Perseroan, memastikan pemenuhan atas ketentuan-ketentuan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam POJK No. 31/POJK.04/2015 terkait dengan perjanjian kerja sama dalam hal menunjukan distributor utama Perseroan, pemenuhan atas peraturan-peraturan OJK khususnya penerapan atas peraturan terkait tata kelola perseroan, Memahami dan melihat langsung proses bisnis Perseroan, dan melihat kemampuan Perseroan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya;
 - g. Satu Emiten dan Perusahaan Publik untuk memastikan Pemenuhan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan No. VIII.G.7 atas pengakuan pendapatan yang disajikan dalam laporan keuangan, Pemenuhan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam POJK Nomor 60/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu atas kepemilikan saham Perseroan, POJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik atas pemberitaan di media;
 - h. Satu Emiten dan Perusahaan Publik untuk memastikan Pemutakhiran informasi terkini atas kelangsungan usaha dan restrukturisasi Grup Texmaco serta rencana Perseroan ke depan;
 - i. Dua Emiten dan Perusahaan Publik untuk memastikan pemenuhan POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
 - j. Satu Emiten dan Perusahaan Publik untuk memastikan pemenuhan POJK Nomor 58/POJK.04/2016 tentang Direksi dan Dewan Komisaris dan pemenuhan POJK Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik; dan
 - k. Dua Emiten untuk memastikan pemenuhan peraturan terkait Tata Kelola Perusahaan yaitu POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, POJK Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik, POJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, dan POJK Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- D. Pengawasan terhadap Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal**
- OJK melakukan penelaahan atas 55 laporan perubahan data dan informasi Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari 29 laporan Akuntan, 11 laporan Konsultan Hukum dan 15 laporan Penilai. OJK juga melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap dua Biro Administrasi Efek dan dua Perusahaan Pemingkat serta

menyelesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap seluruh pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan tersebut. Kegiatan *Monitoring onsite* triwulan II-2017 dilakukan terhadap satu Biro Administrasi Efek dan menyelesaikan Laporan Hasil *Monitoring* (LHM).

OJK melakukan pemeriksaan kepatuhan (*onsite*) terhadap empat profesi Penilai dengan ruang lingkup pendalaman Pedoman Pengendalian Mutu (PPM) KJPP dan penerapan Peraturan tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha dan Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal, satu profesi Penilai berupa pemeriksaan insidental serta tiga Konsultan Hukum dengan ruang lingkup kesesuaian pelaksanaan penugasan profesional oleh Konsultan Hukum dengan kode etik, standar profesi sebagaimana diatur dalam Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dan sistem pengendalian mutu dalam melakukan uji tuntas hukum dan memberikan pendapat hukum. LHP dan LHM telah diselesaikan untuk seluruh kegiatan pemeriksaan dan *monitoring* terhadap profesi tersebut.

Sampai akhir triwulan II-2017, OJK mengirimkan berkas pemeriksaan kepada 12 KAP yaitu berupa daftar permintaan klarifikasi dan dokumen pendukung berdasarkan hasil reviu awal atas pedoman pengendalian mutu KAP. OJK juga melakukan penelaahan atas enam permohonan izin perorangan sebagai Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) dan telah menerbitkan enam Surat Keputusan Izin ASPM.

E. Penegakan Hukum Industri Pasar Modal

Pemeriksaan Pasar Modal

Sampai dengan triwulan II-2017, jumlah pemeriksaan Pasar Modal yang ditangani oleh OJK yaitu sebanyak 38 pemeriksaan yang terdiri dari:

1. 14 Pemeriksaan terkait Emiten dan Perusahaan Publik dengan dugaan pelanggaran antara lain: dugaan

pelanggaran terhadap ketentuan penyajian Laporan Keuangan, ketentuan pokok-pokok anggaran dasar perseroan yang melakukan penawaran umum Efek bersifat ekuitas dan perusahaan publik, ketentuan transaksi material dan perubahan kegiatan usaha, ketentuan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dan ketentuan keterbukaan informasi yang harus segera diumumkan kepada publik;

2. 22 Pemeriksaan terkait Transaksi dan Lembaga Efek dengan dugaan pelanggaran antara lain: dugaan pelanggaran terhadap upaya yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan baik mengenai perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli, menjual atau menahan Efek, ketentuan pengawasan terhadap wakil dan pegawai perusahaan Efek, ketentuan tentang larangan bagi orang dalam dari Emiten untuk melakukan pembelian atau penjualan Efek dan ketentuan tentang perilaku perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai perantara pedagang Efek;
3. Dua Pemeriksaan terkait Pengelolaan Investasi dengan dugaan pelanggaran antara lain: dugaan pelanggaran terhadap ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan fungsi-fungsi Manajer Investasi, ketentuan perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi, dan ketentuan perizinan wakil manajer investasi.

Sampai dengan triwulan II-2017, terdapat satu pemeriksaan yang ditingkatkan ke Penyidikan.

Penetapan Sanksi dan Penanganan Keberatan Pada Industri Pasar Modal

Selama triwulan II-2017, OJK menetapkan sebanyak 137 sanksi administratif kepada para pelaku industri Pasar Modal, yakni:

- 25 sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis terkait keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman, serta tiga sanksi terkait pelanggaran selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman.
- 102 Sanksi Administratif berupa Denda terkait dengan keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman serta lima Sanksi Administratif Berupa Denda terkait dengan kasus pelanggaran ketentuan di bidang Pasar Modal selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman. Total nilai Sanksi Administratif Berupa Denda yang dikenakan sebesar Rp1.560.350.000,-
- Empat sanksi administratif berupa Pencabutan Izin, di mana dua sanksi administratif berupa Pencabutan Izin Perorangan selaku Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) dan Wakil Manajer Investasi (WMI) terkait dengan pelanggaran selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan dan pengumuman dan dua sanksi administratif berupa Pencabutan Izin Usaha kepada Perusahaan Efek selaku Penjamin Emisi Efek (PPE) dan Perantara Pedagang Efek (PEE) terkait dengan pelanggaran selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman.
- Satu sanksi administratif berupa Pembatalan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Akuntan Publik terkait dengan pelanggaran selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman. Sebagai tindak lanjut atas penetapan Sanksi Administratif Berupa Denda di 2016 dan 2017, OJK menetapkan 19 Surat Teguran Pertama dan tiga Surat Teguran Kedua terkait dengan keterlambatan pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda. Selanjutnya

terdapat satu piutang macet atas Sanksi Administratif Berupa Denda yang telah diproses pelimpahannya ke Panitia Urusan Piutang Negara.

Penanganan Keberatan Atas Sanksi Administratif

Selama periode pelaporan, OJK menindaklanjuti 40 Permohonan Keberatan, di mana 26 Keberatan telah ditanggapi dan 14 Keberatan masih dalam proses.-

2.2.4 Pengawasan IKNB

A. Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan

- 1) Analisis Laporan (*off-site supervision*)
OJK melaksanakan pengawasan tidak langsung (*off-site*) atas laporan bulanan perusahaan asuransi dan reasuransi pada triwulan II-2017 sebagai berikut:

Tabel II - 14 Penyampaian Laporan Bulanan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi

Jenis Perusahaan	April 2017			Mei 2017			Juni 2017		
	M	TM	T	M	TM	T	M	TM	T
Asuransi Jiwa	49	1	0	49	1	0	49	1	-
Asuransi Umum dan Reasuransi	81	0	0	81	0	0	81	0	1
Asuransi Wajib	3	0	0	3	0	0	3	0	-
BPJS Kesehatan	1	0	0	1	0	0	1	0	-

M: Menyampaikan; TM: Tidak Menyampaikan; T: Terlambat

Dalam rangka pengawasan *off-site* Asuransi dan BPJS Kesehatan, OJK melakukan analisis terhadap 33 laporan keuangan berkala, yang terdiri dari 1 laporan perusahaan asuransi umum, 31 laporan perusahaan asuransi jiwa, dan 1 laporan perusahaan reasuransi.

- 2) Pemeriksaan (*on-site supervision*)
Selama periode laporan OJK melakukan pemeriksaan terhadap empat perusahaan asuransi umum, empat perusahaan asuransi jiwa dan satu perusahaan reasuransi.

- 3) Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
Triwulan II-2017 OJK menerbitkan 12 LHP yang keseluruhannya merupakan LHP Final
- 4) Pemantauan Tindak Lanjut dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
Sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan final yang dilakukan, OJK memberikan rekomendasi kepada perusahaan asuransi. Untuk memantau pelaksanaan rekomendasi, OJK menerbitkan surat tanggapan atas pelaksanaan rekomendasi oleh perusahaan. Selama periode laporan, terdapat 32 rekomendasi yang harus dilaksanakan.
- 5) Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi
Pada triwulan II-2017, OJK mengenakan sanksi peringatan pertama kepada 27 perusahaan, sanksi peringatan kedua kepada delapan perusahaan, dan sanksi peringatan ketiga kepada satu perusahaan. Selain menerbitkan pengenaan sanksi, OJK juga mencabut 10 surat pencabutan sanksi peringatan pertama.
- 6) Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan
OJK menindaklanjuti pengaduan yang berkaitan dengan klaim asuransi sebanyak 32 tindak lanjut kepada perusahaan asuransi, pihak pelapor dan kepada konsorsium Asuransi TKI selaku pihak dilaporkan.
- 7) Kegiatan Lain
Sektor perasuransian OJK melakukan beberapa kegiatan terkait pengawasan sebagai berikut:
 - a. Penatausahaan Dana Jaminan
Dana Jaminan merupakan bagian dari aset perusahaan asuransi dan reasuransi sebagai jaminan terakhir dalam rangka melindungi

kepentingan para pemegang polis. Seluruh dana jaminan perusahaan wajib ditatausahakan di bank kustodian yang bukan merupakan afiliasi dari perusahaan, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia. Pada triwulan II-2017, OJK memproses 24 permohonan pencairan/penggantian dana jaminan.

- b. Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan
OJK menerima 30 permohonan surat keterangan tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan diselesaikan seluruhnya.
- c. Pengesahan Cadangan
Selama periode triwulan II-2017, terdapat 22 permohonan pengesahan cadangan premi yang diajukan oleh perusahaan. Seluruh permohonan tersebut telah dianalisis dan ditindaklanjuti.

B. Pengawasan Dana Pensiun

- 1) Analisis Laporan (*off-site supervision*)
Rekapitulasi penyampaian laporan bulanan Dana Pensiun pada triwulan II-2017 adalah sebagai berikut:

Tabel II - 15 Penyampaian Laporan Bulanan Dana Pensiun

Jenis Dana Pensiun	Telah Menyampaikan			Belum Menyampaikan		
	April 2017	Mei 2017	Juni 2017	April 2017	Mei 2017	Juni 2017
Dana Pensiun Pemberi Kerja	213	206	206	18	24	24
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	25	24	24	0	1	1
Total	238	230	230	18	25	25

Laporan berkala Dana Pensiun yang diterima OJK pada triwulan II-2017 adalah sebagai berikut:

Tabel II - 16 Penerimaan Laporan Berkala Dana Pensiun

Jenis Laporan	Jumlah
Laporan Keuangan Semester II 2016	163
Laporan Aktuaris	6
Laporan Teknis 2016	168
Laporan Keuangan 2016 <i>audited</i>	43
Daftar Investasi Bulanan	7
Laporan Investasi 2016 <i>unaudited</i>	28
Laporan Investasi 2016 <i>audited</i>	46
Laporan Keuangan Bulanan	65

- 2) Pemeriksaan (*on-site supervision*)
 Pada triwulan II-2017, OJK melakukan pemeriksaan langsung terhadap tujuh Dana Pensiun. OJK juga menerbitkan tiga LHPL Sementara dan 10 LHPL Final Dana Pensiun.

C. Pengawasan BPJS Ketenagakerjaan

- 1) Analisis Laporan (*off-site supervision*)
 OJK menerima sembilan laporan berkala dari BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri dari tiga laporan pengelolaan program Dana Jaminan Sosial periode Maret-Mei 2017 dan enam laporan keuangan bulanan periode Maret-Mei 2017 masing-masing untuk Badan dan Dana Jaminan Sosial.
- 2) Pemeriksaan (*on-site supervision*)
 OJK melakukan rapat pembahasan internal Pemantauan Langsung Tindak Lanjut Pemeriksaan (PTLP) atas pemeriksaan *batch* I-2016 yang digunakan sebagai materi pemantauan langsung tindak lanjut pemeriksaan.

D. Pengawasan Lembaga Pembiayaan

- 1) Analisis Laporan Berkala (*off-site supervision*)
 Rekapitulasi penyampaian laporan bulanan lembaga pembiayaan untuk periode triwulan II-2017 adalah sebagai berikut:

Tabel II - 17 Penyampaian Laporan Bulanan Lembaga Pembiayaan

Jenis Laporan	Terlambat			Tidak Terlambat		
	Maret 2017	April 2017	Mei 2017	Maret 2017	April 2017	Mei 2017
LBPP	2	2	4	197	197	195
LBPMV	13	8	7	49	54	55
LBPPI	0	0	0	2	2	2

* LBPP: Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan, LBPMV: Laporan Bulanan Perusahaan Modal Ventura, LBPPI: Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

- 2) Pemeriksaan Langsung (*on-site supervision*)

Pada triwulan II-2017, OJK melakukan pemeriksaan langsung terhadap 16 Lembaga Pembiayaan, yang terdiri dari delapan Perusahaan Modal Ventura dan delapan Perusahaan Pembiayaan. Pemeriksaan terhadap perusahaan pembiayaan dilakukan dengan menerapkan *Risk Based Supervision* (RBS). Kewajiban penyampaian laporan *self-assessment* atas tingkat risiko perusahaan pembiayaan telah disampaikan oleh Perusahaan Pembiayaan.

- 3) Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Selama periode pelaporan, OJK menerbitkan 24 LHP dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II - 18 Penerbitan LHP Lembaga Pembiayaan

Kegiatan	Jumlah
LHPLS telah dikirimkan	15
LHPLF telah dikirimkan	9

- 4) Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi

Selama triwulan II-2017, OJK mengenakan 503 sanksi administratif kepada lembaga pembiayaan dengan rincian 354 sanksi peringatan pertama, 83 sanksi peringatan kedua, 62 sanksi peringatan ketiga dan empat sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana disajikan berikut:

Tabel II - 19 Penegakan Kepatuhan kepada Lembaga Pembiayaan

	Sanksi Administratif I	Sanksi Administratif II	Sanksi Administratif III	Pembekuan Kegiatan Usaha	Total Sanksi Perusahaan
Sanksi yang diterbitkan terhadap Perusahaan Pembiayaan	272	59	53	3	387
Sanksi yang diterbitkan terhadap Perusahaan Modal Ventura	82	24	9	1	116
Total Sanksi diterbitkan	354	83	62	4	503

- 5) Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan OJK menangani dan menindaklanjuti enam pengaduan yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan usaha perusahaan pembiayaan.

E. Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro

- 1) Pemberian Izin Usaha LKM
Selama triwulan II-2017, OJK memberikan izin usaha kepada 10 LKM yang terdiri dari izin usaha penuh sebanyak tiga LKM dan izin usaha bersyarat sebanyak tujuh LKM. Sebanyak delapan LKM menjalankan usaha secara konvensional dan dua LKM menjalankan usaha secara syariah.

Tabel II - 20 Penerbitan Izin Usaha Penuh LKM selama Triwulan II-2017

No.	Nama LKM
1.	Koperasi LKMA Gapoktan Tani Maju Desa Wonoyoso Kecamatan Buaran
2.	Koperasi LKMS Berkah Amanah Ummat
3.	Koperasi LKMA Tani Sukses Mandiri

Tabel II - 21 Penerbitan Izin Usaha Bersyarat LKM selama Triwulan II-2017

No	Nama LKM
1.	Koperasi LKMA Tigo Sajaringan
2.	Koperasi LKMA Gapoktan Tani Asri
3.	PT LKM BKD Sleman
4.	Koperasi LKMS Agribisnis Gapoktan Panampung Prima
5.	Koperasi LKM Lembah Sarang Olang
6.	Koperasi LKMA Batu Taba Sepakat
7.	Koperasi LKMA Lubuak Simato

- 2) Sosialisasi UU LKM dan Pengembangan LKM

Dalam rangka mensosialisasikan UU LKM dan peraturan pelaksanaannya, serta pengembangan LKM, OJK menjadi narasumber dalam berbagai acara antara lain di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Madiun, Kebumen, Tulungagung, Kendal, Ambon, Solo, Yogyakarta, Purbalingga dan Banjarbaru.

- 3) Pelaksanaan Pendampingan Secara Langsung dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan LKM

Selama triwulan II-2017, OJK melakukan pendampingan pada beberapa LKM di beberapa daerah, antara lain:

Tabel II - 22 Pendampingan Langsung Penyusunan Laporan Keuangan LKM selama Triwulan II-2017

No	Lokasi	Nama LKM
1.	Bogor	PT LKM Bogor
2.	Depok	Koperasi Wesal Keuangan Syariah
3.	Tegal	1. Koperasi LKM Syariah BTM Kota Tegal 2. Koperasi LKM Syariah BTM Artha Surya
4.	Pemalang	Koperasi LKM Syariah BTM Pemalang
5.	Kebumen	1. Koperasi LKM Gapoktan Demang Tani 2. Koperasi LKM Gapoktan Sekar Harum Karanggayam
6.	Sragen	1. Koperasi LKM Sumber Makmur 2. Koperasi LKM Murih Raharjo 3. Koperasi LKM Desa Bendo 4. Koperasi LKM Soko Rahayu

F. Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus

Selama triwulan II-2017, OJK melakukan pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*) atas laporan bulanan dari Lembaga Keuangan Khusus, yaitu 21 Perusahaan Penjaminan, PT Pegadaian (Persero), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT Danareksa (Persero), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Pada triwulan II-2017, telah dilakukan pemeriksaan langsung terhadap delapan perusahaan penjaminan.

G. Pengawasan Perusahaan Jasa Penunjang IKNB

Terkait dengan pengawasan atas perusahaan jasa penunjang OJK telah melakukan

beberapa kegiatan antara lain melakukan analisis atas laporan keuangan dan laporan operasional Perusahaan Penunjang IKNB berdasarkan penyampaian laporan keuangan tahunan 2016 sebanyak 188 perusahaan pialang perasuransian; melakukan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan khusus sebanyak 13 perusahaan yang terdiri dari 10 Perusahaan Pialang Asuransi, dua Perusahaan Pialang Reasuransi, dan satu Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dengan hasil 16 Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara (LHPS) dan empat di antaranya sudah diterbitkan menjadi Laporan Hasil Pemeriksaan Final (LHPF); dan melakukan pengenaan sanksi atas pelanggaran ketentuan yang dilakukan perusahaan jasa penunjang sebanyak 25 sanksi yang terdiri dari 10 Sanksi Peringatan Pertama (SP1), enam Sanksi Peringatan Kedua (SP2), satu Sanksi Peringatan Ketiga (SP3), tujuh Sanksi Administratif berupa Denda, dan satu Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (SPKU); serta menindaklanjuti penanganan pengaduan yang diterima oleh pengawas sebanyak satu pengaduan secara tepat waktu.

H. Pelayanan Kelembagaan dan Produk IKNB

Pada triwulan II-2017, OJK menerima 72 permohonan selain dari 113 permohonan

Tabel II - 23 Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Kelembagaan Jasa Penunjang IKNB selama Triwulan II 2017

No	Jenis Layanan	Permohonan Triwulan II 2017	Out-standing Triwulan I 2017	Status		
				Selesai	Proses*	Batal
1	Pemberian Izin Usaha	1	2	0	3	0
2	Perubahan Kepemilikan	16	42	16	41	1
3	Penambahan Modal	4	9	4	9	0
4	Perubahan Pengurus	18	35	10	40	3
5	Perubahan Alamat	10	13	9	14	0
6	Pembukaan Kantor Cabang	4	0	2	2	0
7	Perubahan Nama	2	2	1	3	0
8	Pendaftaran Tenaga Ahli	16	10	5	20	1
9	Rekomendasi Tenaga Kerja Asing	1	0	0	1	0

* Dalam proses meliputi permintaan kelengkapan dokumen, menunggu penjadwalan *fit and proper test* atau masih proses analisis.

pelayanan kelembagaan dan produk IKNB *outstanding* di mana 47 dinyatakan selesai, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II - 24 Pendaftaran Profesi selama Triwulan II-2017

Jenis Profesi	Jumlah Profesi yang Terdaftar pada triwulan II 2017	Total Jumlah Pendaftaran Profesi sampai dengan triwulan II
Akuntan Publik	3	241
Konsultan Aktuaria	9	24
Penilai	31	76
Jumlah	43	341

1. Penetapan Hasil Pengujian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direksi, Komisaris, Pemegang Saham Pengandali, dan Tenaga Ahli

Pada triwulan II-2017, OJK menetapkan 38 hasil Pengujian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) di mana 37 direkomendasikan dan satu tidak direkomendasikan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II - 25 Jumlah Penetapan Hasil Pengujian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) selama Triwulan II-2017

Jabatan	Pelaksanaan PKK Triwulan II-2017		Jumlah
	Direkomendasikan	Tidak Direkomendasikan	
Pemegang Saham Pengandali	16	-	16
Komisaris	13	-	13
Direksi	8	1	9
Jumlah	37	1	38

Jumlah perusahaan penunjang usaha perasuransian pada triwulan II-2017 adalah 238 perusahaan dengan rincian seperti pada tabel berikut:

Tabel II - 26 Jumlah Perusahaan Penunjang Berdasarkan Jenis Usaha

No	Jenis Perusahaan	Sampai dengan Triwulan I 2017	Triwulan II 2017		Jumlah
			Pemberian Izin	Pencabutan Izin	
1.	Pialang Asuransi	169	-	-	169
2.	Pialang Reasuransi	42	-	-	42
3.	Jasa Penilai Kerugian	27	-	-	27
	Jumlah	238	-	-	238

2. Pemberian Izin Usaha

Selama triwulan II-2017, terdapat 41 permohonan izin usaha/pendaftaran baru, sehingga terdapat 65 permohonan pemberian izin usaha/pendaftaran IKNB, di mana lima permohonan telah diberikan izin usaha dan 15 perusahaan telah memperoleh pernyataan terdaftar. Sementara 28 permohonan telah ditanggapi dan dimintakan kelengkapan dokumen serta 17 permohonan masih dalam proses analisis. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel II - 27 Permohonan Pemberian Izin Usaha

IKNB	Permohonan		Total	Selesai	Telah ditanggapi*	Proses analisis
	Out-standing Triwulan I-2017	Diterima Triwulan II-2017				
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	1	0	1	0	1	0
Dana Pensiun	0	1	1	0	1	0
Perusahaan Pembiayaan	1	0	1	0	1	0
Perusahaan Modal Ventura	3	1	4	2	2	0
Perusahaan Penjaminan	0	0	0	0	0	0
Perusahaan Pergadaian	6	8	14	5	9	0
LPMBTI (P2P Lending)	13	31	44	13	14	17
Total	24	41	65	20	28	17

3. Pencabutan Izin Usaha

Selama triwulan II-2017, OJK menerima lima permohonan pencabutan izin sehingga jumlah permohonan pencabutan izin usaha sampai 30 Juni 2017 adalah 15 permohonan, di mana 11 permohonan ditetapkan pencabutan izin usahanya dan dua perusahaan mengajukan pembatalan, sedangkan dua permohonan masih menunggu kelengkapan dokumen. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel II - 28 Jumlah Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank Konvensional

IKNB	Permohonan		Total	Selesai	Telah ditanggapi	Proses analisis
	Out-standing Triwulan I-2017	Diterima Triwulan II-2017				
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	1	1	2	2	0	0
Dana Pensiun	6	0	6	6	0	0
Perusahaan Pembiayaan	2	2	4	3	1	0
Perusahaan Modal Ventura	1	1	2	1	1	0
Perusahaan Penjaminan	0	1	1	1	0	0
Total	10	5	15	13	2	0

Sampai dengan triwulan II-2017, jumlah lembaga jasa keuangan non-bank (LJKNB) konvensional adalah sebagai berikut:

Tabel II - 29 Jumlah Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank Konvensional

No	IKNB	Jumlah
I	Asuransi dan Reasuransi *	
1	Asuransi Jiwa	53
2	Asuransi Umum	75
3	Reasuransi	5
4	Penyelenggara Program Asuransi Sosial & BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan	3
5	Penyelenggara Asuransi untuk PNS, TNI dan POLRI	2
	Total Asuransi dan Reasuransi	138
II	Dana Pensiun	
1	DPPK PPIP	43
2	DPPK PPMP	171
3	DPLK	24
	Total Dana Pensiun	238
III	Lembaga Pembiayaan*	
1	Perusahaan Pembiayaan	195
2	Modal Ventura	64
3	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	2
	Total Lembaga Pembiayaan	261
IV	Lembaga Jasa Keuangan Lainnya*	
1	Perusahaan Penjaminan	21
2	Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan / PT SMF	1
3	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia / Indonesia Eximbank	1
4	Perusahaan Pegadaian / PT Pegadaian (Persero)-Izin Usaha	4
5	Perusahaan Pergadaian –Pendaftaran	6
6	Penyelenggara P2P Lending – Izin Usaha	1
7	Penyelenggara P2P Lending – Pendaftaran	14
	Total Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	48
	TOTAL LJKNB	689

4. Perubahan Kepemilikan Perusahaan/ Perubahan Anggaran Dasar/Perubahan Pemegang Saham/Perubahan Peraturan Dana Pensiun serta Merger dan Akuisisi

Selama periode laporan, OJK menerima 63 permohonan terkait proses Perubahan Kepemilikan Perusahaan/Perubahan Anggaran Dasar/Perubahan Pemegang Saham/ Perubahan PDP, sehingga OJK telah memproses sebanyak 272 permohonan dengan detail sebagai berikut:

Tabel II - 30 Permohonan Perubahan Kepemilikan Perusahaan, Anggaran Dasar, Pemegang Saham, Peraturan Dana Pensiun serta Merger dan Akuisisi IKNB Triwulan II-2017

IKNB	Permohonan		Total	Selesai	Telah ditanggapi	Proses analisis
	Out-standing Triwulan I-2017	Diterima Triwulan II-2017				
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	24	29	53	50	3	0
Dana Pensiun	40	14	54	30	24	0
Perusahaan Pembiayaan	101	13	114	39	74	1
Perusahaan Modal Ventura	32	2	34	6	27	1
Perusahaan Penjaminan	12	5	17	10	5	2
Total	209	63	272	135	133	4

Selama periode triwulan II-2017, tidak terdapat penambahan permohonan merger. Sementara itu, permohonan akuisisi IKNB yang diproses sampai triwulan II-2017 sebanyak 23 permohonan yang terdiri dari tiga perusahaan asuransi dan 20 perusahaan pembiayaan.

Tabel II - 31 Permohonan Akuisisi IKNB

IKNB	Permohonan		Total	Selesai	Telah ditanggapi	Proses analisis
	Out-standing Triwulan I-2017	Diterima Triwulan II-2017				
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	2	1	3	1	2	0
Perusahaan Pembiayaan	15	5	20	7	13	0
Total	17	6	23	8	15	0

Selama periode triwulan II-2017 terdapat tiga perusahaan yang telah melaporkan perubahan nama dan seluruhnya telah ditetapkan keputusannya oleh OJK, yaitu:

- PT Proline Finance Indonesia (d/h PT Danpac Indonesia)
- PT Dian Mandiri Multifinance (d/h PT Adhika Primadhana Multifinance)
- PT First Indo American Leasing Tbk (d/h PT First Indo American Leasing)

5. Kantor Cabang, Kantor Pemasaran dan Kantor Selain Kantor Cabang

OJK menerima 220 pelaporan pembukaan, penutupan dan perubahan alamat kantor cabang sehingga total permohonan yang harus diproses adalah 451. Sampai akhir periode pelaporan, 306 permohonan telah dicatat/disetujui dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II - 32 Pelaporan Pembukaan, Penutupan dan Perubahan Alamat Kantor Cabang IKNB

IKNB	Permohonan		Total	Selesai	Telah diproses dan ditanggapi *)	Dalam proses analisis
	Out-standing Triwulan I-2017	Diterima Triwulan II-2017				
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi						
• Pembukaan Kantor Cabang	5	6	11	11	0	0
• Penutupan Kantor Cabang	0	2	2	2	0	0
• Perubahan Alamat	8	1	9	9	0	0
Lembaga Pembiayaan dan LJKK						
• Pembukaan Kantor Cabang	83	93	176	107	44	25
• Penutupan Kantor Cabang	20	7	27	15	4	8
• Perubahan Alamat	115	111	226	162	22	42
Total	231	220	451	306	70	75

Untuk pencatatan kantor pemasaran dan kantor selain kantor cabang, selama triwulan II-2017 telah diterima 129 laporan pembukaan kantor pemasaran dan kantor selain kantor cabang. Dengan demikian, terdapat 138 permohonan di mana 118 permohonan telah selesai dan sisanya masih dalam proses atau menunggu kelengkapan dokumen.

Tabel II - 33 Pencatatan Kantor Pemasaran dan Kantor Selain Kantor Cabang IKNB

IKNB	Permohonan		Total	Selesai	Telah diproses dan ditanggapi *)	Dalam proses analisis
	Outstanding Triwulan I-2017	Diterima Triwulan II-2017				
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	0	56	56	56	0	0
Perusahaan Pembiayaan	9	73	82	62	9	11
Jumlah	9	129	138	118	9	11

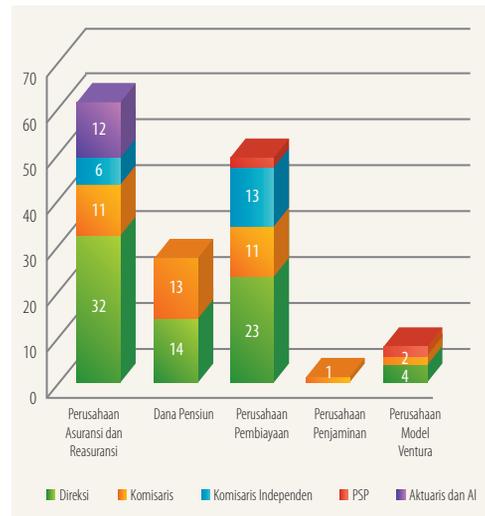
6. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama IKNB

Selama triwulan II-2017, OJK telah menerima 226 permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan IKNB sehingga terdapat 386 permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan Pihak Utama IKNB, di mana sebanyak 183 permohonan telah selesai dilaksanakan dan sisanya permohonan masih dalam proses penjadwalan dan kelengkapan dokumen dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II - 34 Permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pihak Utama IKNB

IKNB	Permohonan		Total	Selesai	Telah diproses dan ditanggapi *)	Dalam proses analisis
	Outstanding Triwulan I-2017	Diterima Triwulan II-2017				
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	0	90	90	67	23	0
Dana Pensiun	51	61	112	50	50	12
Perusahaan Pembiayaan	109	71	180	66	110	4
Perusahaan Penjaminan	0	4	4	0	3	1
Jumlah	160	226	386	183	186	17

Dari jumlah 183 yang selesai tersebut, 37 permohonan dikembalikan/batal dan 146 permohonan telah ditetapkan hasilnya. Adapun 146 yang telah ditetapkan hasilnya terdiri atas 61 Direksi, 38 Komisaris, 19 Komisaris Independen, empat Pemegang Saham Pengendali dan 12 Aktuaris dan 12 Auditor Internal.

Grafik II - 4 Rincian Permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pihak Utama IKNB

a. Pelaporan Perubahan Kepengurusan IKNB

Selama triwulan II-2017, terdapat 132 pelaporan perubahan pengurus IKNB. Dari jumlah dimaksud, 107 telah dicatat dan sisanya telah ditanggapi atau dalam proses analisis. Dari jumlah yang dicatat, 23 merupakan pelaporan pengurus perusahaan asuransi, 53 dana pensiun, 27 perusahaan pembiayaan serta dua perusahaan modal ventura dan dua perusahaan penjamin. Secara rinci pelaporan perubahan pengurus IKNB adalah sebagai berikut:

Tabel II - 35 Pelaporan Perubahan Kepengurusan IKNB

IKNB	Permohonan		Total	Selesai	Telah diproses dan ditanggapi *)	Dalam proses analisis
	Outstanding Triwulan I-2017	Diterima Triwulan II-2017				
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	0	34	34	23	11	0
Dana Pensiun	0	65	65	53	9	3
Perusahaan Pembiayaan	0	29	29	27	0	2
Perusahaan Modal Ventura	0	2	2	2	0	0
Perusahaan Penjaminan	0	2	2	2	0	0
Jumlah	0	132	132	107	20	5

b. Pelaporan Syarat Keberlanjutan Pengurus IKNB

Selama triwulan II-2017, telah diterima 225 pelaporan di mana 190 telah dicatat dan 35 menunggu kelengkapan atau dalam proses analisis dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II - 36 Pelaporan Syarat Keberlanjutan Pengurus IKNB

IKNB	Permohonan		Total	Selesai	Telah diproses dan ditanggapi *)	Dalam proses analisis
	Outstanding Triwulan I-2017	Diterima Triwulan II-2017				
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	0	68	68	68	0	0
Dana Pensiun	0	75	75	58	0	17
Perusahaan Pembiayaan	0	82	82	64	11	7
Jumlah	0	225	225	190	11	24

c. Pelaporan Tenaga Ahli

Terkait pelaporan tenaga ahli, selama triwulan II-2017, terdapat 35 pelaporan tenaga ahli yang seluruhnya merupakan tenaga ahli dari perusahaan asuransi.

Tabel II - 37 Pelaporan Tenaga Ahli

IKNB	Permohonan		Total	Selesai	Telah diproses dan ditanggapi *)	Dalam proses analisis
	Outstanding Triwulan I-2017	Diterima Triwulan II-2017				
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	0	35	35	24	11	0
Jumlah	0	35	35	24	11	0

d. Pelaporan Tenaga Asing

Selama triwulan II-2017, terdapat 37 pelaporan penggunaan tenaga kerja asing dari 28 perusahaan asuransi dan sembilan perusahaan pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II - 38 Pelaporan Tenaga Asing

IKNB	Permohonan		Total	Selesai	Telah diproses dan ditanggapi *)	Dalam proses analisis
	Outstanding Triwulan I-2017	Diterima Triwulan II-2017				
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	0	28	28	17	11	0
Perusahaan Pembiayaan	0	9	9	9	0	0
Jumlah	0	37	37	26	11	0

7. Perizinan Produk Asuransi

Pada periode triwulan II-2017, terdapat 443 permohonan pelaporan/persetujuan produk serta *bancassurance* sehingga sampai dengan periode pelaporan terdapat 554 permohonan yang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II - 39 Permohonan Pelaporan/Persetujuan Produk serta *Bancassurance*

Uraian	Permohonan		Total	Selesai	Telah diproses dan ditanggapi *)	Proses Analisis
	Outstanding Triwulan I-2017	Diterima Triwulan II-2017				
Pencatatan Nama Lain	1	8	9	5	4	0
Pencatatan Perubahan Produk	35	104	139	108	31	0
Pencatatan Produk Baru	10	28	38	30	8	0
Persetujuan Perubahan Produk	6	55	61	47	14	0
Persetujuan Produk Baru	59	169	228	153	72	3
Persetujuan Bancassurance	0	79	79	78	1	0
Jumlah	111	443	554	421	130	3

I. Pelayanan Kelembagaan Jasa Penunjang IKNB

OJK melaksanakan fungsi pelayanan kepada perusahaan dan profesi penunjang IKNB seperti perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi. Adapun pelayanan tersebut meliputi:

- Layanan pemberian dan pencabutan izin usaha;
- Perizinan perubahan nama perusahaan;
- Persetujuan perubahan kepemilikan;
- Persetujuan penambahan modal;
- Persetujuan perubahan pengurus;
- Pencatatan perubahan alamat kantor;
- Persetujuan pembukaan kantor cabang;

- h. Pendaftaran tenaga ahli;
- i. Pendaftaran tenaga kerja asing;
- j. Pendaftaran konsultan aktuarial, akuntan publik, dan penilai yang melaksanakan kegiatan di IKNB;
- k. Pelaksanaan pengujian kemampuan dan kepatutan bagi Direksi, Komisaris, Pemegang Saham Pengendali, Tenaga Ahli dan Tenaga Kerja Asing, serta;
- l. Penetapan kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Pemegang Saham Pengendali, Tenaga Ahli, dan Tenaga Kerja Asing.

Data permohonan selengkapnya adalah pada tabel berikut:

Tabel II - 40 Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Kelembagaan Jasa Penunjang IKNB selama Triwulan II-2017

No	Jenis Layanan	Permohonan Triwulan II 2017	Out-standing Triwulan I 2017	Status		
				Selesai	Proses*	Batal
1	Pemberian Izin Usaha	1	2	0	3	0
2	Perubahan Kepemilikan	16	42	16	41	1
3	Penambahan Modal	4	9	4	9	0
4	Perubahan Pengurus	18	35	10	40	3
5	Perubahan Alamat	10	13	9	14	0
6	Pembukaan Kantor Cabang	4	0	2	2	0
7	Perubahan Nama	2	2	1	3	0
8	Pendaftaran Tenaga Ahli	16	10	5	20	1
9	Rekomendasi Tenaga Kerja Asing	1	0	0	1	0

* Dalam proses meliputi permintaan kelengkapan dokumen, menunggu penjadwalan *fit and proper test* atau masih proses analisis.

Tabel II - 41 Pendaftaran Profesi selama Triwulan II-2017

Jenis Profesi	Jumlah Profesi yang Terdaftar pada triwulan II 2017	Total Jumlah Pendaftaran Profesi sampai dengan triwulan II (per 30 Juni 2017)
Akuntan Publik	3	241
Konsultan Aktuarial	9	24
Penilai	31	76
Jumlah	43	341

Penetapan hasil Pengujian Kemampuan dan Kepatutan sepanjang periode laporan terlampir sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel II - 42 Jumlah Penetapan Hasil Pengujian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) selama Triwulan II-2017

Jabatan	Pelaksanaan PKK Triwulan II 2017		Jumlah
	Direkomendasikan	Tidak Direkomendasikan	
Pemegang Saham Pengendali	16	-	16
Komisaris	13	-	13
Direksi	8	1	9
Jumlah	37	1	38

Jumlah perusahaan penunjang usaha perasuransian pada triwulan II-2017 adalah 238 perusahaan dengan rincian seperti pada tabel berikut:

Tabel II - 43 Jumlah Perusahaan Penunjang Berdasarkan Jenis Usaha

No	Jenis Perusahaan	Sampai dengan Triwulan I 2017	Triwulan II 2017		Jumlah
			Pemberian Izin	Pencabutan Izin	
1.	Pialang Asuransi	169	-	-	169
2.	Pialang Reasuransi	42	-	-	42
3.	Jasa Penilai Kerugian	27	-	-	27
	Jumlah	238	-	-	238

2.3 AKTIVITAS PENGEMBANGAN

2.3.1 Pengembangan Pengawasan Terintegrasi

Roadmap Pengawasan Terintegrasi

Pada periode laporan, OJK menyusun *Roadmap* Pengawasan Terintegrasi yang bertujuan untuk memberikan arah kebijakan, pengembangan sistem/metodologi pengawasan, dan penguatan implementasi pengawasan terintegrasi terhadap Konglomerasi Keuangan (KK), sejalan dengan kebijakan umum pengawasan terhadap Sektor Jasa Keuangan yang tertuang dalam *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia Tahun 2015 - 2019. *Roadmap* Pengawasan Terintegrasi 2017-2019 mencakup tiga aspek utama, yaitu:

- 1) Kebijakan Pengawasan Terintegrasi terhadap KK;

- 2) Sistem dan Metodologi Pengawasan Terintegrasi terhadap KK; dan
- 3) Implementasi Pengawasan Terintegrasi terhadap KK.

Untuk mendukung pelaksanaan *Roadmap*, OJK telah melaksanakan empat kajian terkait pengawasan terintegrasi: Kajian Manajemen Risiko Likuiditas, Kajian *Equity Risk (Market Risk)*, Kajian Manajemen Permodalan Terintegrasi, dan Kajian Risiko Konsentrasi dan Kajian Risiko Kredit.

2.3.2 Pengembangan Industri Perbankan

A. Pengembangan Bank Umum

Pada triwulan II-2017, OJK menyelesaikan beberapa pedoman internal dan sistem bagi Pengawas Bank antara lain:

1. SEDK Pedoman Penilaian Tingkat Risiko TPPU dan TPPT Berdasarkan Pendekatan Berbasis Risiko Bagi Bank Umum.
Dalam rangka menghadapi *Mutual Evaluation Review (MER) 2017*, Indonesia harus memenuhi rekomendasi FATF yaitu menerapkan *Risk Based Approach* dalam pengawasan terhadap APU PPT di Sektor Jasa Keuangan. OJK beserta *Task Force APU PPT* membuat *tools* bagi pengawas dalam melakukan pemeriksaan APU PPT bank berdasarkan *Risk Based Approach*. serta menyusun dan menyelesaikan pedoman terkait tata cara penilaian risiko APU PPT.
2. Sistem Informasi Rencana Bisnis Bank (SI RBB)
SI RBB merupakan sistem yang dikembangkan untuk membantu pengawas dalam mengkompilasi dan mengolah data RBB yang disampaikan bank pada akhir November tahun berjalan. Mengingat pentingnya informasi yang dihasilkan oleh data RBB dimaksud dan keterbatasan waktu yang tersedia, proses kompilasi dan olah data RBB perlu dioptimalkan dengan

bantuan sistem informasi yang dapat meningkatkan kualitas data yang Lengkap, Akurat, Kini dan Utuh.

B. Pengembangan BPR

Pada triwulan II-2017, sedang disusun dua kajian terkait sistem informasi yang mendukung pengawasan BPR, yaitu:

1. Kajian *Early Warning System (EWS)*
EWS adalah instrumen yang mendukung pelaksanaan proses pengawasan untuk mendeteksi secara dini adanya perkembangan yang tidak diinginkan atau bahkan membahayakan kelangsungan usaha BPR yang dapat disebabkan antara lain permasalahan likuiditas, tingginya kegagalan kredit atau kinerja yang buruk. EWS merupakan alat bantu bagi Pengawas BPR dalam mengambil keputusan pengawasan dan dalam melihat kondisi BPR melalui rasio-rasio yang terdapat dalam sistem EWS.
2. Kajian Sistem Informasi Pengawasan (SIP) BPR untuk Modul Pemahaman Terhadap BPR (KYBPR)
Tujuan dari pengembangan SIP modul KYBPR ini antara lain: (a) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi Pengawasan BPR berdasarkan Risiko khususnya pada tahapan KYBPR; dan (b) Membantu pengawas serta meminimalisir *human error* dalam penyusunan dokumen KYBPR;

2.3.3 Pengembangan Industri Pasar Modal

A. Kajian Pasar Modal

1. Kajian Pengawasan Terhadap Pemerintah Daerah Sebagai Pihak Penerbit Obligasi Daerah.
Pelaksanaan Kajian Pengawasan Terhadap Pemerintah Daerah Sebagai Pihak Penerbit Obligasi Daerah dilatarbelakangi upaya

mendukung pendanaan infrastruktur dan sektor ekonomi prioritas dengan mendorong pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk merealisasikan rencana penerbitan obligasi daerah. Kajian dilakukan dengan metode (1) studi literatur terhadap Indonesia, Amerika Serikat, dan Jepang; (2) penyebaran kuesioner kepada investor; dan (3) *focus group discussion*.

2. Kajian *Update* Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) terhadap penyajian dan pengungkapan laporan keuangan produk investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK)
Sejalan dengan adanya perubahan SAK serta guna memberikan kepastian hukum bagi industri yang menerbitkan produk investasi berbentuk KIK mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangan, dilakukan kajian dengan melakukan *update* atas Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk KIK sesuai perkembangan SAK terkini. Kajian ini diharapkan memberikan rekomendasi terhadap RPOJK tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk KIK.
3. Kajian *Awareness* Manajemen Entitas Pelapor Terhadap Tanggung Jawab Atas Penyusunan Laporan Keuangan
Kajian ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai kesadaran manajemen suatu entitas terhadap tanggung jawab penyusunan laporan keuangan dan memperoleh dasar untuk melakukan sosialisasi mengenai tanggung jawab manajemen terhadap penyusunan Laporan Keuangan.
4. Analisis Pengungkapan Tata Kelola Emiten dan Perusahaan Publik dalam Laporan Tahunan 2016

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan keterbukaan informasi terkait struktur dan pelaksanaan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik

5. ASEAN *Corporate Governance* (CG) *Scorecard* 2017
ASEAN CG *Scorecard* (ACGS) merupakan salah satu inisiatif ASEAN *Capital Market Forum* (ACMF) dalam rangka peningkatan pelaksanaan *Corporate Governance* perusahaan tercatat di ASEAN. ACMF menyepakati agar setiap negara menunjuk pihak independen sebagai *Domestic Ranking Body* (DRB) termasuk di dalamnya CG *Expert* yang menjadi perwakilan OJK dalam setiap kegiatan penilaian ACGS. Berdasarkan ACMF *Meeting*, disepakati bahwa tahun 2017 akan dilaksanakan penilaian terhadap perusahaan tercatat di Indonesia
6. Kajian Opini Akuntan Atas Kesesuaian Penyusunan Laporan Keuangan Terhadap Ketentuan Regulator
Kajian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan akuntansi yang pernah diterbitkan oleh regulator di pasar modal; mengetahui dampak ketentuan regulator yang berbeda, mengatur lebih atau memilih kebijakan akuntansi yang diperkenankan dalam PSAK terhadap opini Akuntan; melakukan identifikasi ketentuan Standar Akuntansi Keuangan dan Standar Audit di negara perbandingan.

B. Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu (SEPMT)

OJK melaksanakan Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu selama triwulan II-2017 ke tiga kota yaitu Yogyakarta, Surabaya dan Palembang. Kegiatan yang dilakukan antara lain yaitu FGD Wartawan, Pendalaman Materi Pasar Modal dan Seminar Pasar Modal

OJK melaksanakan beberapa kegiatan lain terkait sosialisasi dan edukasi bidang Pasar Modal melalui *Games* Investasi Pasar Modal - *Stocklab* yang berlangsung di empat kota yaitu Semarang, Kendari, Aceh dan Bandung. Selain itu, juga dilakukan *Training of Trainers StockLab* yang berlangsung di enam kota yang terdiri dari Kendari, Semarang, Bandung, Padang, Batam, dan Palembang,

2.3.4 Pengembangan IKNB

Program 1000 Aktuaris

Program 1000 aktuaris bertujuan untuk mempercepat jumlah aktuaris sehingga kebutuhan profesional aktuaris untuk IKNB dapat terpenuhi. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam program ini adalah sosialisasi dan promosi, perkuliahan singkat sertifikasi aktuaris bekerja sama dengan Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI), serta pendidikan dan pelatihan aktuaris keahlian khusus asuransi umum.

Pada triwulan II-2017, telah dilaksanakan seminar mengenai Program 1000 Aktuaris ke perguruan tinggi di Aceh yaitu Universitas Syiah Kuala dengan mengundang narasumber dari Persatuan Aktuaris Indonesia dan Tim *Risk Management, Economic Sustainability & Actuarial Science Development in Indonesia (READI)*

Risk Management, Economic Sustainability & Actuarial Science Development in Indonesia (READI)

Proyek READI bertujuan untuk membangun Indonesia sebagai pusat regional dalam ilmu aktuaris dan manajemen risiko, dengan meningkatkan jumlah dan kualitas lulusan ilmu aktuaris Indonesia sehingga tersedia untuk bisnis, akademis dan lembaga pemerintah, serta untuk memperkuat profesi aktuaris di

Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan akreditasi bagi aktuaris Indonesia dari pihak regulator senior dan perwakilan industri asuransi.

Selama triwulan II-2017, beberapa kegiatan yang telah dilakukan terkait READI antara lain menyampaikan permohonan dukungan dan kerja sama untuk proses pengumpulan data dasar Proyek READI kepada Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK), Kementerian Keuangan, seluruh Direktur perusahaan asuransi, seluruh Ketua Asosiasi Sektor Perasuransian, serta universitas *Partner* proyek READI di Indonesia

Program Pembiayaan Ekonomi Kreatif

Dalam rangka meningkatkan penyaluran pembiayaan perusahaan pembiayaan (PP) pada Sektor Produktif khususnya di sektor industri kreatif berorientasi ekspor dan UMKM, serta mendukung Program Pemerintah dalam rangka meningkatkan pembiayaan ekspor pada ekonomi kreatif dan UMKM sebagai sumber pertumbuhan baru ekonomi Indonesia dalam jangka panjang, OJK membentuk Pokja Program Pembiayaan Ekonomi Kreatif.

Tujuan program pembiayaan ekonomi kreatif antara lain: (a) Meningkatkan penyaluran pembiayaan PP pada sektor produktif khususnya di sektor industri kreatif berorientasi ekspor dan UMKM; (b) Meningkatkan sinergi antar industri di IKNB; dan (c) Mendukung program pemerintah dalam rangka meningkatkan pembiayaan ekspor pada ekonomi kreatif dan UMKM sebagai sumber pertumbuhan baru ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.

Selama periode laporan terdapat tujuh Perusahaan Pembiayaan yang menyalurkan pembiayaan pada 15 sektor ekonomi kreatif dengan nilai Rp1,5 triliun.

Sistem Informasi Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) Penerbitan Obligasi dan Sukuk

OJK meluncurkan Sistem Informasi Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) Penerbitan Obligasi dan Sukuk untuk Emiten Bank sebagai upaya mempercepat dan menyederhanakan proses Perizinan dengan cara mengintegrasikan berbagai proses bisnis di kompartemen pasar modal dan perbankan. Proses perizinan penerbitan obligasi dan sukuk untuk Emiten Bank yang selama ini dilakukan secara sekuensial ditransformasikan menjadi perizinan melalui satu pintu dan dokumen permohonan juga disederhanakan. Melalui SPRINT, proses perizinan Penerbitan Obligasi dan Sukuk Untuk Emiten Bank dipersingkat dari yang semula membutuhkan waktu 105 hari menjadi 22 hari kerja saja.

Sistem ini merupakan upaya kongkrit OJK menjaga momentum terus membaiknya kondisi ekonomi nasional dengan membangun mekanisme perizinan Penerbitan Obligasi dan Sukuk.

Sistem Informasi Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) ini juga telah

ditetapkan sebagai *virtual single window* bagi Industri Jasa Keuangan dalam melakukan proses perizinan di lingkungan OJK. Melalui Aplikasi SPRINT, diharapkan dapat mewujudkan perizinan yang TUNTAS (Transparan, TerpadU, AkuNTabel, CepAt, dan Sederhana). Melalui SPRINT, selain mengurangi risiko perbedaan kebijakan yang dikeluarkan oleh masing-masing kompartemen, juga mengurangi duplikasi dokumen permohonan yang harus diajukan oleh pemohon.

Sebagai bentuk transparansi proses perizinan, SPRINT juga dilengkapi fitur *tracking* sehingga Pemohon dapat senantiasa melakukan *monitoring* terhadap progress perizinan atau pendaftaran yang telah diajukan. Selain sebagai bentuk transparansi, fitur *tracking* ini juga dimaksudkan untuk mengurangi interaksi antara pemohon dengan regulator, sehingga dapat mengurangi potensi *moral hazard* dari pemohon maupun regulator, sekaligus meningkatkan kualitas *good governance* di lingkungan OJK.

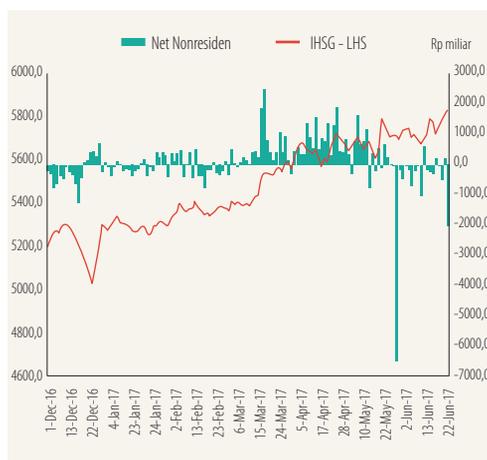
2.4 STABILITAS SISTEM KEUANGAN

2.4.1 Pasar Keuangan dan Lembaga Jasa Keuangan

OJK menilai secara umum kondisi sektor jasa keuangan dalam negeri pada triwulan II-2017 masih terjaga. Perkembangan ekonomi global menunjukkan bahwa arah pemulihan ekonomi masih menghadapi tantangan terutama diindikasikan dengan belum solidnya data-data indikator perekonomian AS dan proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2017 oleh Bank Dunia yang tidak berubah dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya, beberapa indikator lembaga jasa keuangan relatif masih solid dengan aktivitas intermediasi yang masih terjaga.

Pada periode laporan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia mengalami penguatan sebesar 4,7% (*qtq*). Meskipun pada penghujung triwulan II-2017 investor nonresiden mulai melakukan aksi jual, investor nonresiden sepanjang triwulan II-2017 masih membukukan *net buy* di pasar saham domestik sebesar Rp9 triliun, sehingga sepanjang 2017 tercatat *net buy* sebesar Rp17,4 triliun.

Grafik II - 5 IHSG dan Arus Modal Nonresiden di Pasar Saham

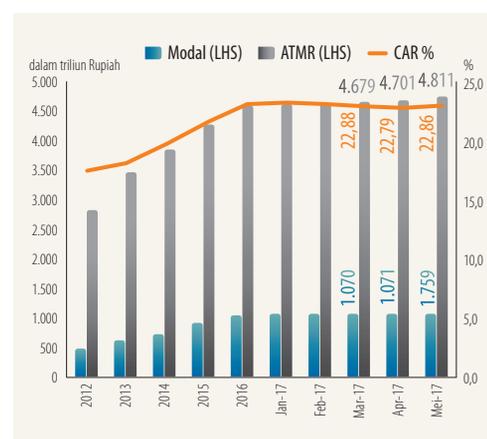


Pasar surat utang juga mencatat perkembangan positif tercermin dari imbal hasil (*yield*) Surat Berharga Negara (SBN) mencatatkan penurunan rata-rata sebesar 20 *basis point*. *Net buy* nonresiden pada triwulan II-2017 tercatat sebesar Rp47,3 triliun, dan sepanjang 2017 telah mencatatkan *net buy* sebesar Rp104,7 triliun.

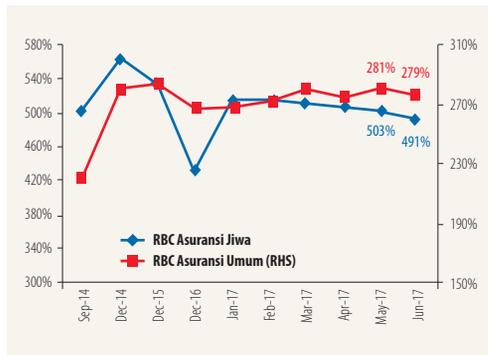
Kegiatan intermediasi lembaga jasa keuangan pada triwulan II-2017 menunjukkan perbaikan, meskipun kredit perbankan tumbuh melambat sebesar 8,42% *yoy* (Maret 2017: 9,24%). Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan per Mei 2017 kembali mencatatkan pertumbuhan sebesar 11,57% *yoy*, meningkat dibandingkan data periode sebelumnya. Piutang pembiayaan yang disalurkan oleh perusahaan pembiayaan juga masih melanjutkan tren peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 8,95% *yoy*.

Ketahanan industri lembaga jasa keuangan terpantau masih memadai. Risiko likuiditas, kredit, dan pasar perbankan masih terjaga, ditopang permodalan yang memadai. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berada pada level 22,86%, jauh di atas ketentuan minimum 8%. Permodalan perusahaan asuransi baik asuransi umum maupun asuransi jiwa terjaga pada level yang memadai, yaitu sebesar 278,6% dan 491,2%.

Grafik II - 6 Capital Adequacy Ratio (CAR) Perbankan

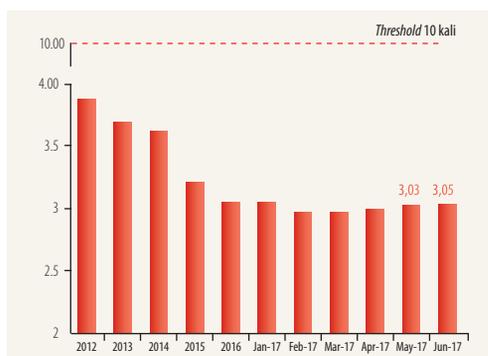


Grafik II - 7 Risk-Based Capital (CAR) Industri Asuransi Jiwa dan Asuransi Umum



Pada perusahaan pembiayaan, *gearing ratio* perusahaan pembiayaan berada pada level 3,05 kali, masih jauh di bawah ketentuan maksimum (10 kali). Dengan tingkat *gearing ratio* yang relatif rendah, industri perusahaan pembiayaan dinilai masih memiliki ruang yang cukup untuk bertumbuh lebih lanjut.

Grafik II - 8 Gearing Ratio Perusahaan Pembiayaan



Risiko likuiditas di sektor perbankan relatif rendah, tercermin dari alat likuid yang cukup memadai untuk mengantisipasi potensi penarikan DPK. Pada akhir triwulan II-2017, rasio Alat Likuid terhadap *Non-Core Deposit* (AL/NCD) dan rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) tercatat cukup tinggi, masing-masing sebesar 88,85% dan 18,58%.

Risiko kredit di lembaga jasa keuangan terpantau mengalami sedikit peningkatan. Meskipun demikian, rasio kredit bermasalah masih terjaga jauh di bawah *threshold* (5%). *Non-Performing Loan* (NPL) industri perbankan berada dalam tren meningkat pada level rendah 3,07%

gross dan 1,33% net. Sementara itu, tingkat *Non-Performing Financing* (NPF) perusahaan pembiayaan juga terjaga pada level 3,47% meskipun sedikit meningkat jika dibandingkan posisi Maret 2017 yang sebesar 3,16%.

Peningkatan tertinggi rasio NPL terjadi pada sektor pertambangan dan transportasi terkait masih rendahnya harga komoditas. Seiring dengan perbaikan kinerja intermediasi serta perbaikan permintaan global maupun domestik, diperkirakan risiko kredit lembaga jasa keuangan akan bergerak ke arah penurunan.

Penguatan pasar keuangan domestik pada triwulan II-2017 berpengaruh terhadap risiko pasar yang *manageable*. Seiring dengan kinerja pasar saham dan obligasi yang menguat, nilai investasi asuransi dan dana pensiun terus meningkat. Hal ini menggambarkan risiko pasar asuransi dan dana pensiun masih termitigasi dengan baik. Sementara itu, Utang Luar Negeri (ULN) perusahaan pembiayaan juga tercatat relatif stabil.

2.4.2 Respons Kebijakan

OJK memantau perkembangan terkini pada perekonomian dan pasar keuangan, baik global maupun domestik, yang berpotensi mempengaruhi kondisi sektor jasa keuangan nasional. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait juga diperkuat agar kinerja industri keuangan dan stabilitas sistem keuangan nasional tetap terjaga.

OJK melanjutkan respons kebijakan pengawasan yang diperlukan dalam rangka menjaga stabilitas sektor jasa keuangan nasional. OJK memastikan bahwa lembaga jasa keuangan telah melakukan langkah-langkah antisipasi yang memadai dalam menjaga agar profil risiko tetap berada pada level yang *manageable*.

OJK berupaya menjaga momentum perbaikan ekonomi domestik dengan mengoptimalkan kapasitas permodalan LJK yang masih cukup memadai untuk mendorong intermediasi. Pertumbuhan kredit perbankan 2017 ini diperkirakan akan mencapai 9%-12%.

2.5 EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

2.5.1 Peraturan Edukasi dan Perlindungan Konsumen

Sepanjang triwulan II-2017, OJK menerbitkan beberapa peraturan eksternal di bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen yaitu:

1. SEOJK Nomor 30/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan dalam rangka Meningkatkan Literasi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan ini mengatur antara lain ruang lingkup kegiatan literasi keuangan oleh PUJK, pelaksanaan kegiatan terkait literasi keuangan paling sedikit setahun sekali serta pembentukan fungsi khusus literasi Keuangan oleh PUJK.

2. SEOJK Nomor 31/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan dalam rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan ini mengatur antara lain ruang lingkup kegiatan inklusi keuangan oleh PUJK, pelaksanaan kegiatan terkait inklusi keuangan paling sedikit setahun sekali serta pembentukan fungsi khusus inklusi Keuangan oleh PUJK.

2.5.2 Inklusi Keuangan

Kegiatan *Coaching Clinic* TPAKD

Tim percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) merupakan forum koordinasi antar instansi dan *stakeholders* terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Penyusunan program-program TPAKD dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal utama antara lain: karakteristik dan kebutuhan daerah, potensi ekonomi daerah

yang dapat dikembangkan dengan produk dan layanan jasa keuangan. Pada triwulan II-2017, OJK telah mengukuhkan satu TPAKD Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan serta telah dilakukan *coaching clinic* TPAKD kepada Kantor Regional dan Kantor OJK di bawah KR 5 Sumatera Bagian Utara dan KR 7 Sumatera Bagian Selatan. *Coaching clinic* dilakukan dalam rangka pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi terhadap program kerja TPAKD.

Layanan Keuangan Mikro (Laku Mikro)

Pada triwulan II-2017, telah dilakukan *Capacity Building* kepada tenaga pemasar Laku Mikro. Kegiatan ini dihadiri oleh 70 orang yang dibagi menjadi dua *batch* dengan materi informasi mengenai Laku Mikro, Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai), serta Asuransi Mikro.

Partisipasi dalam ASEAN *Financial Inclusion Forum*

ASEAN *Financial Inclusion Forum* merupakan upaya meningkatkan kemampuan peserta dari negara ASEAN mengenai inklusi keuangan dan hal-hal yang mendukung inklusi keuangan. Adapun materi yang akan dibahas antara lain strategi nasional inklusi keuangan, layanan keuangan digital, pembiayaan UMKM serta edukasi keuangan dan perlindungan konsumen.

Sosialisasi "Peran Industri Jasa Keuangan dalam Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Indonesia"

Sebagai upaya untuk menginformasikan ketentuan-ketentuan terkait Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dan Masyarakat, OJK menyelenggarakan sosialisasi terkait topik tersebut yang bertujuan memberikan pemahaman serta kesadaran dalam berkontribusi meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Sosialisasi ini dihadiri oleh 210 peserta yang berasal dari industri jasa keuangan di wilayah Sumatera Utara, akademisi, dan masyarakat umum.

Sosialisasi “Kesiapan Industri Jasa Keuangan dalam Rangka Penerapan POJK No. 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat” di Bandung

Dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan di Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, OJK menyelenggarakan Sosialisasi dengan tema “Kesiapan Industri Jasa Keuangan Dalam Rangka Penerapan POJK No. 76/POJK.07/2016 Tentang Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen Dan/Atau Masyarakat”.

Sosialisasi yang dihadiri 245 peserta tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pokok-pokok dan persiapan implementasi POJK Nomor 76/POJK.07/2016 serta memberikan *awareness* PUJK tentang pentingnya literasi keuangan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan masyarakat terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan serta mengubah sikap dan perilaku keuangan masyarakat menjadi lebih baik.

Launching Results of The Survey on Financial Inclusion and Access (SOFIA) di Indonesia

Oxford Policy Management melakukan *Survey on Financial Inclusion and Access (SOFIA)* di Indonesia dengan dukungan dana dari Pemerintah Australia (*Australian Department for Foreign Affairs and Trade*) dan Pemerintah Swiss (*Swiss State Secretariat for Economic Affairs*). Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan survei tersebut, diselenggarakan kegiatan “*Launching Results of The Survey on Financial Inclusion and Access (SOFIA)* di Indonesia”. Kegiatan ini bertujuan menampilkan hasil temuan utama pada survei SOFIA terhadap pemangku kepentingan terkait seperti pembuat kebijakan, regulator, dan pelaku industri jasa keuangan. Selain itu, tujuan utama dari survei dimaksud adalah mengukur dan menggambarkan tingkat akses masyarakat di Indonesia bagian timur dan

Jawa Timur terhadap produk dan atau layanan jasa keuangan.

2.5.3 Literasi dan Edukasi Keuangan

Dalam rangka meningkatkan pemahaman publik akan tugas dan wewenang OJK serta memberikan wawasan keuangan bagi masyarakat umum, OJK secara aktif melaksanakan sosialisasi dan edukasi untuk berbagai kalangan dan berlokasi di berbagai daerah, antara lain:

1. **Workshop Implementasi Materi OJK dan IJK dalam Kurikulum 2013 Tingkat SMA**

Dalam rangka mendukung implementasi materi OJK dan IJK dalam kurikulum 2013 tingkat SMA, OJK melaksanakan kegiatan *workshop* bagi guru SMA. Kegiatan tersebut merupakan hasil kerja sama bersama Kementerian Pendidikan dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Ekonomi Tingkat SMA. Pemberian materi kepada peserta yaitu, Pengenalan OJK dan program Edukasi dan Perlindungan Konsumen serta sesi diskusi materi tentang OJK, Difusi Inovasi Model Pembelajaran, Revisi Kurikulum 2013, dan *Workshop* Penyusunan Perangkat Pembelajaran (meliputi RPP dan penilaian).

2. **Edukasi Keuangan Bagi Anggota Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi DKI Jakarta**

OJK melaksanakan Edukasi Keuangan kepada anggota Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Tim Penggerak PKK DKI Jakarta. Kegiatan diikuti 153 orang peserta yang terdiri atas anggota TP PKK Provinsi DKI Jakarta. Peserta kegiatan menerima materi edukasi keuangan yaitu perencanaan keuangan, materi pembiayaan mikro, materi asuransi pendidikan, materi Tabungan Emas, dan materi pengenalan OJK.

3. **Edukasi Keuangan dan Pelatihan Kewirausahaan dalam Rangka Pemberdayaan Pemuda dan Perintis UMKM**

OJK bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surabaya melaksanakan Kegiatan Edukasi Keuangan dan Pelatihan Kewirausahaan dalam Rangka Pemberdayaan Pemuda dan Perintis UMKM di Surabaya. Kegiatan diikuti oleh 484 orang peserta yang terdiri dari Pemuda dan Perintis UMKM. Peserta edukasi keuangan menerima materi perencanaan keuangan dan produk/layanan jasa keuangan mencakup asuransi Mikro dan Pergadaian.

4. Seminar Internasional *"Changing Behavior through Financial Literacy, Financial Inclusion, and Consumer Protection"*

OJK menyelenggarakan Seminar Internasional yang bertema *"Changing Behavior through Financial Literacy, Financial Inclusion, and Consumer Protection"*. Kegiatan tersebut diikuti oleh 301 peserta pada hari pertama dan 237 peserta pada hari kedua yang terdiri atas peserta internasional yang berasal dari berbagai otoritas keuangan dan organisasi Internasional, serta perwakilan industri jasa keuangan, asosiasi, institusi terkait, dan akademisi.

5. Kegiatan *Field Trial* PISA di Wilayah Jawa Timur

Dalam rangka persiapan pelaksanaan *Programme for International Student Assessment (PISA)* 2018, OJK bekerja sama dengan Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), melakukan *workshop* kepada kepala sekolah dan guru sekolah yang menjadi sampel *field trial* PISA di Surabaya. Peserta yang mengikuti *field trial* seluruhnya dilakukan secara *computer based*. Masing-masing sesi berdurasi sekitar 3,5 jam, yaitu (a) Sesi 1: Tes PISA dan (b) Sesi 2: Angket PISA. Materi yang diujikan pada tes PISA meliputi Bahasa Indonesia, sains, matematika, keuangan.

6. Kegiatan Edukasi Keuangan bagi Perempuan

Kegiatan edukasi keuangan ini menyoar segmen perempuan dan ibu rumah tangga yang tergabung dalam komunitas Hijabers kota Bandung. Tema yang diusung dalam kegiatan ini adalah "Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pengelolaan Keuangan yang Bijak". Selain materi pengelolaan keuangan, sebanyak 78 peserta juga diedukasi mengenai cara berinvestasi produk/jasa keuangan yang sesuai dengan kemampuan, termasuk kewaspadaan terhadap penawaran investasi ilegal/bodong.

7. *Training of Trainers* Guru Ekonomi Tingkat SMA

Training Of Trainers (ToT) bagi guru ekonomi Tingkat SMA di wilayah Balikpapan, Kalimantan Timur diikuti oleh 103 guru ekonomi tingkat SMA. Selain penyampaian materi, dilakukan sesi simulasi mengajar untuk melihat kemampuan peserta dalam memahami materi yang disampaikan. Kegiatan simulasi mengajar tersebut dihadiri oleh 98 siswa.

8. Peluncuran Galeri Investasi *Mobile* Universitas Cenderawasih, di Jayapura

Peluncuran program Galeri Investasi *Mobile* (GIM) Universitas Cenderawasih (UNCEN) bertempat di Jayapura merupakan kerja sama OJK dengan PT Bursa Efek Indonesia, Universitas Cenderawasih, dan PT Phintraco Sekuritas. Peluncuran GIM dilanjutkan dengan Seminar Pasar Modal, Perencanaan Keuangan, dan Waspada Investasi. Kegiatan dihadiri oleh 110 peserta.

9. Inagurasi Kegiatan Edukasi Keuangan bagi Komunitas Muda dan Perintis UMKM di Surabaya

OJK melaksanakan edukasi keuangan dalam rangka inagurasi komunitas muda

dan perintis UMKM yang diselenggarakan di Surabaya. Kegiatan ini dihadiri oleh 816 peserta dan merupakan satu rangkaian Program Pemberdayaan Komunitas yang ditujukan kepada para pemuda usia produktif yang belum memiliki pekerjaan dan komunitas ibu rumah tangga yang merupakan perintis UMKM. Kegiatan ini diawali dengan sesi pemberian materi dengan materi yaitu, perencanaan keuangan dan tabungan, produk dan layanan perbankan, tabungan emas, dan asuransi mikro.

10. Safari Ramadhan

OJK melaksanakan Safari Ramadhan sebagai bentuk edukasi keuangan dan perencanaan keuangan. Serupa dengan tahun sebelumnya, Safari Ramadhan dilaksanakan di empat lokasi di kawasan Jakarta dan Bogor dengan rincian sebagai berikut:

1. Safari Ramadhan I – Jakarta
Safari Ramadhan I dihadiri oleh 126 orang Ibu-ibu Kelompok Pengajian dan Wanita Muslimah. Materi yang disampaikan antara lain Perencanaan keuangan, asuransi syariah, dan pembiayaan syariah
2. Safari Ramadhan II- Bogor
Safari Ramadhan II dihadiri oleh 137 Ibu-ibu Pengurus dan Anggota Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Bogor. Materi yang disampaikan antara lain perencanaan Keuangan, pergadaian, serta asuransi pendidikan syariah dan Waspada Investasi
3. Safari Ramadhan III- Jakarta
Safari Ramadhan III dihadiri oleh 77 peserta masyarakat umum. Materi yang disampaikan antara lain Haji Mabru dan Investasi Berkah Bersama Produk dan Jasa Keuangan
4. Safari Ramadhan IV- Jakarta
Safari Ramadhan IV dihadiri oleh 131 anggota dan pengurus Kongres Wanita Indonesia (KOWANI). Materi yang disampaikan antara lain Cerdas Keuangan Syariah, Kunci Berkah dan Sejahtera

2.5.4 Perlindungan Konsumen

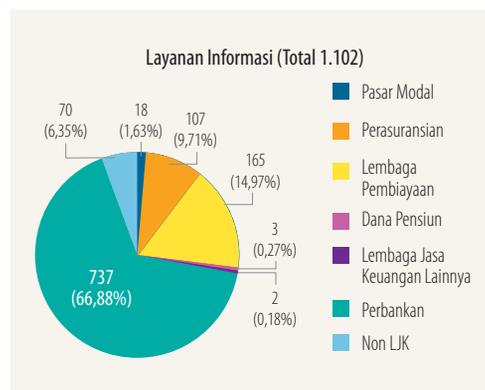
Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi

Keberadaan Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi (*Financial Customer Care – FCC*) memberikan manfaat bagi konsumen sektor jasa keuangan dan masyarakat. Pada triwulan II-2017, layanan konsumen OJK menerima 4.822 layanan yang terdiri dari 1.102 informasi, 3.689 pertanyaan dan 31 pengaduan. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 26,6% (1.749 layanan) dibandingkan periode sebelumnya.

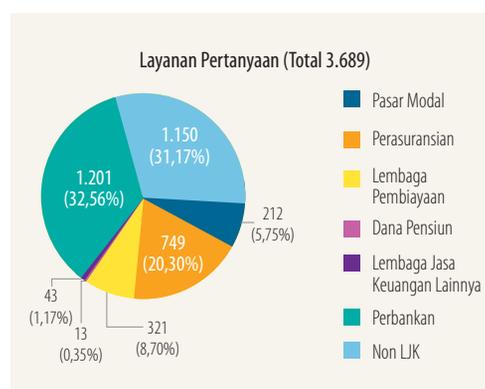
Tabel II - 44 Pelayanan Konsumen Per Sektor Triwulan II-2017

Jenis Layanan	Total Layanan (Triwulan II-2017)	% Total Layanan (Triwulan II-2017)
Pertanyaan	3.689	69,99%
Informasi	1.102	25,48%
Pengaduan	31	4,52%
Total	4.822	100%

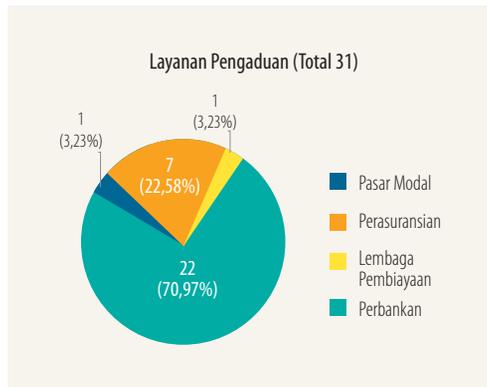
Grafik II - 9 Rincian Layanan Informasi



Grafik II - 10 Rincian Layanan Pertanyaan



Grafik II - 11 Rincian Layanan Pengaduan



Berdasarkan sektornya, persentase layanan informasi terdiri dari sektor perbankan sebesar 66,9%, sektor IKNB sebesar 25,1%, dan sektor pasar modal sebesar 1,6%, serta lain-lain sebesar 6,4%. Secara substansi, layanan informasi terbanyak pada sektor perbankan terkait Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan yaitu sebesar 27,1%, pada sektor IKNB adalah terkait Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan pada lembaga pembiayaan sebesar 14,8%, dan pada sektor pasar modal terkait Laporan Pasar Modal sebesar 27,8%. Sedangkan pada sektor lain-lain, substansi informasi terkait dengan sektor jasa keuangan yang paling banyak disampaikan adalah mengenai Legalitas Perusahaan non LJK (31,4%), dan Pelayanan Non LJK (25,7%). Sampai dengan Juni 2017, tingkat penyelesaian layanan informasi yang diterima adalah sebesar 77,0%.

Pada layanan pertanyaan, dari sektor perbankan adalah sebesar 32,6%, sektor IKNB sebesar 30,5%, dan sektor pasar modal sebesar 5,7%, serta kategori lain-lain, yaitu sebesar 31,2%. Pertanyaan terbanyak pada sektor perbankan adalah terkait Peraturan Perbankan sebesar 8,7%, pada sektor IKNB adalah terkait Legalitas LJK dan Produk sebesar 39,4%, dan pada sektor pasar modal terkait Perizinan Profesi dan Jasa Penunjang sebesar 29,2%. Pada kategori lain-lain substansi pertanyaan terkait dengan sektor jasa keuangan yang paling banyak disampaikan adalah mengenai Legalitas Non LJK sebesar 43,5%.

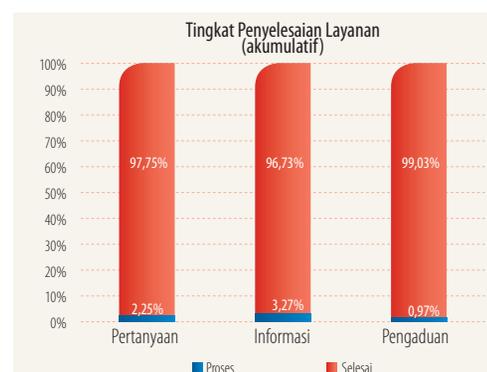
Tabel II - 45 Akumulasi Pelayanan Konsumen Per Sektor 2013-Triwulan II-2017

Jenis Layanan	Total Layanan (akumulatif)	% Total Layanan (akumulatif)
Pertanyaan	60.392	69,99%
Informasi	21.989	25,48%
Pengaduan	3.903	4,52%
Total	86.284	

Terkait dengan layanan pengaduan, terdapat 31 layanan pengaduan yang masuk yaitu pada sektor perbankan, IKNB dan pasar modal. Pada sektor perbankan terbanyak yaitu mengenai Pelaporan Sistem Informasi Debitur. Pada Sektor IKNB pengaduan terbanyak yaitu mengenai Penolakan Pencairan Klaim, dan pada sektor pasar modal terdapat pengaduan mengenai Pemindahan Efek.

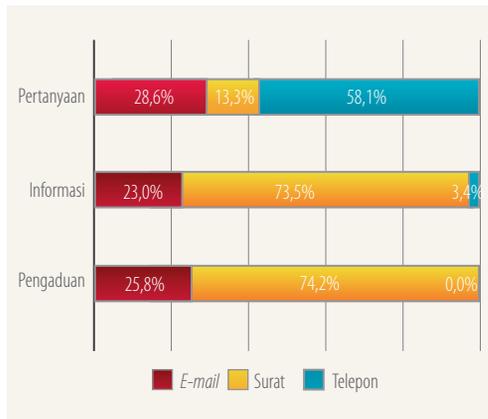
Secara akumulatif OJK telah menerima total 86.284 layanan dengan, tingkat penyelesaian layanan informasi adalah sebesar 96,73% (21.271 layanan), layanan pertanyaan sebesar 97,75% (59.032 layanan), serta layanan pengaduan mencapai 99,03% (3.865 pengaduan).

Grafik II - 12 Tingkat Penyelesaian Layanan



Dalam rangka mempermudah konsumen dan/ atau masyarakat dalam mengakses layanan konsumen, OJK menyediakan berbagai kanal penerimaan layanan antara lain melalui media *email*, telepon maupun surat.

Grafik II - 13 Kanal Layanan



Berdasarkan grafik kanal layanan penerimaan triwulan II-2017, layanan pertanyaan, konsumen dan/atau masyarakat lebih banyak mempergunakan kanal telepon dibandingkan email dan surat. Sedangkan untuk layanan informasi dan layanan pengaduan terbanyak adalah melalui kanal surat.

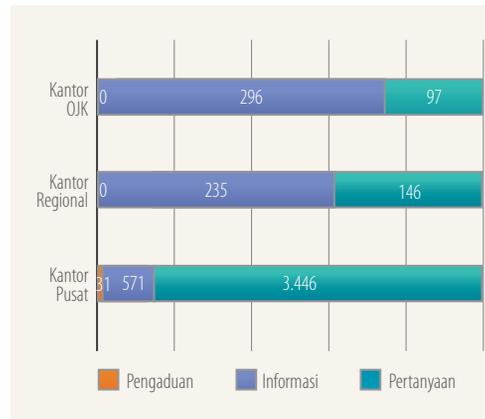
Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas layanan konsumen, OJK memberikan tugas dan kewenangan kepada seluruh Kantor Regional (KR) dan Kantor OJK (KOJK) yang tersebar Indonesia untuk menerima dan menangani layanan konsumen.

Tabel II - 46 Penerimaan Layanan per *Business Unit*

Penginput	Total Layanan
Kantor Pusat	4.048
Kantor Regional	381
Kantor OJK	393
Total	4.822

Berdasarkan tabel penerimaan layanan, secara total satuan kerja di Kantor Pusat menerima layanan konsumen terbanyak yaitu sebesar 83,9% dari total penerimaan layanan pada triwulan II – 2017.

Grafik II - 14 Perbandingan Penerimaan Layanan Berdasarkan Satuan Kerja



Peluncuran Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan

Dalam rangka menjamin lima prinsip perlindungan konsumen dalam setiap kegiatan di sektor jasa keuangan di Indonesia, maka OJK menyusun Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan (SPKK) 2013-2027. SPKK terdiri dari empat pilar yaitu: Pilar Infrastruktur, Pilar Regulasi, Pilar *Market Conduct*, dan Pilar Edukasi & Komunikasi. OJK melaksanakan peluncuran SPKK 2017 dengan tema "Membangun Perilaku Cerdas Keuangan untuk Kesejahteraan Rakyat". Peluncuran tersebut, diharapkan mendorong semangat koordinasi antara konsumen, pelaku usaha, dan regulator akan semakin kuat sehingga dapat mewujudkan perlindungan konsumen keuangan yang optimal dan berkelanjutan di masa mendatang.

Focus Group Discussion (FGD) Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan Terhadap Tindakan Karyawan

OJK menyelenggarakan FGD mengenai Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan Terhadap Tindakan Karyawan di Kantor OJK Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, seharusnya Pelaku Usaha Jasa Keuangan memberikan ganti rugi kepada konsumen dalam hal terjadi kerugian konsumen yang diakibatkan oleh oknum Pelaku

Usaha Jasa Keuangan; walaupun Pelaku Usaha Jasa Keuangan memidanakan karyawannya atau pihak ketiga dan karyawan atau pihak ketiga tersebut telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Dalam melakukan perbuatannya karyawan atau pihak ketiga tersebut menggunakan atribut lembaga jasa keuangan tempat yang bersangkutan bekerja dan memalsukan dokumen atas produk tersebut termasuk informasi-informasi produk tersebut.

Sosialisasi Pentingnya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Perbankan, Perasuransian, dan Pembiayaan

OJK menyelenggarakan Sosialisasi Pentingnya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Perbankan, Perasuransian, dan Pembiayaan di Kantor Regional III OJK Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Semarang. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha jasa keuangan di sektor perbankan, perasuransian, dan pembiayaan, di daerah Regional III OJK dan sekitarnya mengenai mekanisme penyelesaian sengketa.

Pelaksanaan *Thematic Surveillance* dan Operasi Intelijen Pasar

Memasuki triwulan II-2017 sinergi langkah pengawasan sektor jasa keuangan antara prudensial dan *market conduct* semakin harmonis. Pengawasan *market conduct* memperhatikan interaksi antara konsumen dengan pelaku usaha jasa keuangan (aspek kualitatif). Sementara itu, pengawasan prudensial fokus pada tingkat kesehatan PUJK (aspek kuantitatif).

Pilot project pengawasan *market conduct* berupa pemeriksaan *thematic surveillance onsite* pada dua bank dengan metode pengamatan dokumen, wawancara dan observasi lapangan telah selesai dilaksanakan. Pada pemeriksaan *thematic surveillance onsite*, tema yang diambil adalah praktik penawaran produk melalui *telemarketing* dan perjanjian baku. Secara umum, aspek yang dilihat dalam

pemeriksaan *thematic surveillance onsite* adalah aspek kebijakan, implementasi dan evaluasi dengan mempertimbangkan *product life cycle*.

Temuan pemeriksaan *thematic surveillance onsite* perjanjian baku secara umum masih memperlihatkan adanya praktik penyusunan klausul perjanjian baku oleh PUJK yang mengandung unsur eksonerasi yaitu adanya unsur pengalihan tanggung jawab PUJK kepada nasabah. Di samping itu, terdapat temuan terkait aspek transparansi dalam penjelasan manfaat, biaya dan risiko produk. Sementara itu, temuan pemeriksaan *thematic surveillance onsite* praktik penawaran produk melalui *telemarketing* meliputi aspek transparansi yaitu tidak ada penjelasan mekanisme yang memadai kepada konsumen untuk menolak dalam hal jumlah dana pinjaman yang disetujui tidak sama dengan pengajuan. Temuan lainnya terkait perjanjian baku produk KTA yang dipasarkan melalui *telemarketing*, dipandang belum memadai.

Forum Group Discussion Cybercrime Sektor Jasa Keuangan

Maraknya *cybercrime* di Indonesia memiliki korelasi dengan tingkat literasi keuangan masyarakat di Indonesia yang saat ini dinilai masih relatif rendah. Berdasarkan Survei Literasi kedua OJK 2016, tingkat literasi keuangan masyarakat berada pada angka 29,66%. Kendati mengalami peningkatan dari survei di 2013 (21,84%) tingkat literasi keuangan tersebut masih dibawah negara-negara tetangga seperti Thailand dan Filipina.

OJK mencatat dalam empat tahun terakhir jumlah pengguna *e-banking* (SMS banking, *phone banking*, *mobile banking* dan *internet banking*) mengalami lonjakan signifikan sebesar 271% yaitu dari 13,6 juta nasabah pada 2012 menjadi 50,4 juta nasabah pada 2016. Jumlah ini berbanding lurus dengan frekuensi transaksi melalui *e-banking* yang meningkat sebesar 169% yaitu dari 150,8 juta transaksi pada 2012 menjadi 405,4 juta transaksi pada 2016.

Tabel II - 47 Jumlah Data Layanan Konsumen OJK Kejahatan Berbasis Internet

Tahun	Jumlah Layanan
2013	1
2014	58
2015	126
2016	80
2017	28
Total	293

Sejalan dengan jumlah pengguna dan frekuensi transaksi *e-banking* yang meningkat, jumlah data layanan konsumen yang diterima OJK juga mengalami peningkatan. Sejak 2013 hingga April 2017, didapati jumlah data layanan yang diterima melalui *Financial Customer Care* (FCC) OJK terkait kejahatan berbasis internet sebesar 293 layanan yang melibatkan 23 PUJK dan nasabah. Kenaikan tertinggi berada di 2015 yaitu sebanyak 126 layanan.

Fakta tersebut di atas mendorong OJK menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk memetakan permasalahan dan tantangan *cybercrime* pada Industri Keuangan di atas dengan mengundang narasumber yang memahami dan mengetahui strategi untuk mengurangi risiko kejahatan yang terjadi melalui layanan berbasis internet pada Industri Keuangan, antara lain dari Kemenko Polhukam, Kepolisian RI, Kemenkominfo, Bank Indonesia, Pelaku Usaha Jasa Keuangan, dan praktisi *cyber security* (perwakilan komunitas mantan peretas).

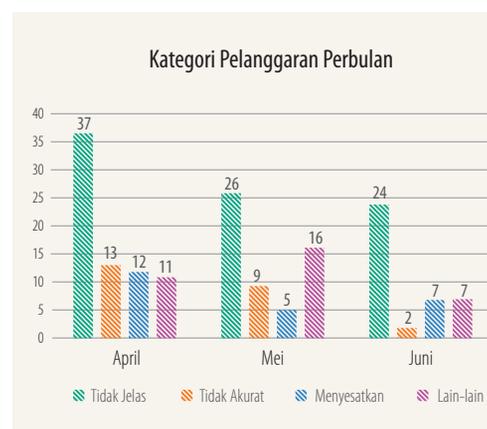
Pemantauan Iklan Triwulanan

Monitoring harian yang dilaporkan secara triwulanan mencakup iklan yang dipublikasikan melalui media cetak nasional dan lokal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Adapun kriteria pemantauan terhadap iklan meliputi aspek akurasi, kejelasan, kejujuran dan tidak menyesatkan, sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan.

Selama periode laporan, OJK mencatat sebanyak 138 iklan berkaitan dengan produk/jasa keuangan, yang terdiri dari 115 iklan dari sektor perbankan, 21 iklan dari sektor IKNB, dan dua iklan sektor Pasar Modal. Berdasarkan sebaran iklan per bulan tercermin bahwa produk yang diduga melakukan pelanggaran terbanyak sepanjang triwulan II-2017 adalah produk tabungan, modal ventura, kartu kredit, *e-banking*, dan *foreign exchange*.

Dari seluruh iklan tersebut, 67% (93 iklan) diduga melanggar POJK dan SEOJK terkait dengan kriteria yang paling banyak dilanggar berturut-turut adalah tidak jelas, lain-lain, tidak akurat, dan menyesatkan.

Grafik II - 15 Jumlah Pelanggaran Iklan Berdasarkan Kategori



Masih banyak PUJK yang tidak memberikan informasi lengkap terkait penawaran yang dilakukan melalui iklan di media massa. Apabila diamati secara seksama, pola dugaan pelanggaran iklan menunjukkan kecenderungan melakukan kesalahan yang sama secara berulang. Hal ini bisa jadi mengindikasikan keterbatasan pemahaman PUJK terkait ketentuan yang mengatur iklan produk dan/atau layanan jasa keuangan, ataupun terdapat unsur kesengajaan untuk menyembunyikan sebagian informasi. Bahkan, kategori "lain-lain" yang harus mencantumkan bahwa lembaga keuangan terkait terdaftar dan diawasi oleh OJK juga menjadi salah satu kategori dengan dugaan pelanggaran

terbanyak. Padahal, hal ini menjadi salah satu pertimbangan masyarakat dalam memilih produk keuangan resmi.

Investor Alert Portal

OJK melakukan *update* berkala terhadap *list* investasi yang tidak terdaftar dan tidak di bawah pengawasan OJK dalam *Investor Alert Portal* (IAP). Daftar entitas dalam IAP bersumber dari hasil identifikasi dan verifikasi atas informasi dan/atau pertanyaan masyarakat kepada OJK melalui layanan konsumen *Financial Customer Care* (FCC). Di samping itu, IAP juga mencantumkan entitas yang secara resmi telah dihentikan kegiatannya oleh Satuan Tugas Waspada Investasi.

Selama triwulan II-2017, terdapat 13 entitas baru teridentifikasi dalam IAP sehingga sampai dengan semester I-2017 sejumlah 104 entitas telah masuk dalam daftar IAP. Masyarakat tetap diimbau agar tidak melakukan investasi pada entitas dalam IAP tersebut. Hal ini merupakan salah satu upaya preventif OJK untuk mencegah kerugian konsumen dan masyarakat akibat praktik investasi yang tidak jelas legalitasnya. Melalui IAP, diharapkan adanya peningkatan *awareness* dan pemahaman masyarakat dalam menyikapi penawaran investasi dengan keuntungan yang terlalu atraktif dan cenderung tidak masuk akal.

IAP dapat diakses melalui *minisite* Sikapiuangmu di *portal* <http://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/AlertPortal/Home> atau melalui aplikasi *mobile* Sikapi Uangmu yang tersedia di *Playstore* dan *Apple Store*. Selanjutnya, OJK mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk menyampaikan informasi terkait penawaran investasi yang mencurigakan melalui telepon 1500-655, *email* konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id.

2.6 PENYIDIKAN SEKTOR JASA KEUANGAN

Selama periode pelaporan, OJK berupaya mewujudkan kegiatan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan selama periode laporan antara lain:

2.6.1 Koordinasi dengan Instansi Terkait

Dalam rangka memperkuat langkah penyidikan dan dalam rangka membangun sistem peradilan pidana yang kredibel, OJK rutin menggelar koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait untuk menangani lebih lanjut setiap perkara kepada Kejaksaan RI, LPS, dan PPAK sebagai bagian dari penegakan hukum.

2.6.2 Penanganan Perkara

Pada periode laporan, berdasarkan kriteria prioritas, OJK menerbitkan empat Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang terdiri dari empat perkara Perbankan (tiga perkara BPR dan satu perkara BPD). Berdasarkan hasil penyidikan dan gelar perkara, OJK melimpahkan satu berkas perkara BPR kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan RI dan dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan RI. Selanjutnya barang bukti dan tersangka pada perkara tersebut diserahkan OJK kepada pihak Kejaksaan Negeri. Atas P-21 tersebut, OJK melaksanakan fungsi penyidikan sebagaimana dimaksud pasal 49 dan pasal 50 UU No 21 tahun 2011 tentang OJK. Selanjutnya P-21 tersebut merupakan yurisprudensi untuk Tindak pidana bank yang terjadi di Bank Pemerintah pusat atau daerah.

2.6.3 Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi)

Satgas Waspada Investasi dibentuk mengingat maraknya ajakan kepada masyarakat untuk berinvestasi pada produk investasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan variasi jenis dan bentuk serta sasaran yang makin beragam. Kesadaran akan semakin berkembangnya industri jasa keuangan saat ini, menuntut pengawasan lebih intensif sehingga dapat menghasilkan deteksi dini terhadap kegiatan investasi yang diduga telah merugikan banyak masyarakat.

2.6.4 Sosialisasi Satgas Waspada Investasi

Dalam rangka upaya pencegahan terhadap kegiatan penawaran investasi yang diduga ilegal, Satgas Waspada Investasi melakukan kegiatan sosialisasi dan/atau *focus group discussion* mengenai tawaran penempatan dana dengan janji tingkat keuntungan yang tinggi dan perlu diwaspadai. Pada periode pelaporan, Satgas Waspada Investasi telah melakukan sosialisasi waspada investasi yang diduga ilegal kepada masyarakat sekaligus melakukan pembekalan kepada tim kerja di tiga daerah yakni, Bandung, Bali, dan Pontianak. Selanjutnya di triwulan II-2017, Satgas Waspada Investasi Pusat mengadakan seminar nasional dengan tema "Optimalisasi Peran Satuan Tugas Waspada Investasi".

2.6.5 Penyampaian Informasi Melalui Media

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat, Satgas

Waspada Investasi (SWI) melakukan siaran pers guna memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan investasi ilegal yang merugikan masyarakat dan perkembangan penanganannya melalui media massa. Sampai dengan periode pelaporan, SWI melakukan kegiatan tersebut antara lain wawancara dengan media hukum *online* terkait investasi ilegal serta melakukan Siaran Pers dengan judul "Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Waspada Penawaran Investasi di Media *Online*", "Tiga Entitas Penghimpunan Dana Dihentikan Satgas Waspada Investasi" dan "Jelang Lebaran, Satgas Waspada Investasi Hentikan Kegiatan Usaha 3 Entitas"

2.6.6 Penanganan Permasalahan Investasi oleh Satgas Waspada Investasi

Pada periode pelaporan, OJK dan Satgas Waspada Investasi telah menghentikan kegiatan usaha sejumlah 13 entitas. Dengan demikian selama 2017 sudah terdapat 32 entitas yang telah dihentikan kegiatan usahanya. Selanjutnya, entitas yang telah diproses hukum oleh pihak Kepolisian adalah sebanyak lima entitas.

2.7 PENANGANAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

1. Pengembangan Kerangka Pengaturan Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan

Untuk melengkapi POJK mengenai APU PPT, OJK menyusun pedoman pelaksanaan penerapan program APU PPT yang tertuang dalam SEOJK tentang Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko untuk masing-masing sektor Perbankan, Pasar Modal, dan IKNB. Pada periode laporan, OJK menerbitkan

SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program APU PPT di Sektor Perbankan.

2. Pengembangan *Risk Based Supervisory Tools* dalam Pengawasan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan

Sebagai tindak lanjut dari pengembangan *Risk Based Supervisory Tools (RBS Tools)* dalam melakukan pengawasan penerapan program anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU PPT) di sektor Pasar Modal, pada periode laporan, OJK menerbitkan Surat Edaran Dewan Komisiner Nomor 1/SEDK.04/2017 tentang Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko dalam Penerapan Program APU PPT pada Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek. Adapun SEDK tentang Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko dalam Penerapan Program APU PPT di Sektor Perbankan sedang dalam proses *legal review* sesuai dengan ketentuan *rule making process*. Peraturan ini menjadi pedoman bagi pengawasan program APU PPT berbasis risiko, untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengawasan dilakukan sesuai dengan penilaian risiko dari industri jasa keuangan, yang meliputi faktor risiko dari sisi kelembagaan Lembaga Jasa Keuangan, faktor risiko yang mencerminkan kinerja Lembaga Jasa Keuangan, dan faktor risiko yang menilai skala mitigasi risiko dari lingkungan pengendalian internal Lembaga Jasa Keuangan.

3. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi pelaku industri

jasa keuangan, selama periode laporan, OJK melakukan sosialisasi POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan yang merupakan penyempurnaan dan integrasi peraturan terkait APU PPT bagi tiga Sektor Jasa Keuangan yaitu Perbankan, Pasar Modal, dan Industri Keuangan Non-Bank. Rangkaian kegiatan pengembangan kapasitas SDM baik pelaku industri jasa keuangan dan pengawas sektor jasa keuangan yaitu:

1. OJK menyelenggarakan rangkaian kegiatan sosialisasi POJK APU PPT bagi internal, eksternal dan pelaku industri OJK melalui satuan kerja pengaturan dan pengawasan OJK, serta pihak eksternal yang meliputi pelaku industri di tiga Sektor Jasa Keuangan tersebut dengan total peserta sebanyak 1.208 orang.
2. OJK menyelenggarakan enam kegiatan sosialisasi POJK APU PPT yang dihadiri oleh total 467 peserta bertempat di Bali, Medan, Semarang, Palembang, dan Surabaya.
3. OJK bekerja sama dengan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan PPAATK, telah menyelenggarakan Pelatihan APU PPT berdasarkan POJK APU PPT yang dihadiri oleh 90 peserta.

Kegiatan sosialisasi POJK APU PPT terus dilaksanakan secara berkesinambungan yang juga akan dilanjutkan dengan *workshop* pendampingan penerapan program APU PPT berbasis risiko di sektor jasa keuangan untuk meningkatkan efektivitas implementasi POJK APU PPT oleh para PJK.

2.8 HUBUNGAN KELEMBAGAAN

Dalam melaksanakan tugas pengaturan, pengawasan dan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, OJK memiliki hubungan kerja dan koordinasi yang baik dengan berbagai lembaga antara lain dengan DPR, BPK, Pemerintah, BI, LPS, serta pihak lainnya.

2.8.1 Kerja sama Domestik

Selama periode triwulan II-2017, OJK melakukan enam penandatanganan kerja sama domestik sebagai berikut:

Tabel II - 48 Hubungan Kerja Sama Domestik OJK

No.	Tanggal	Kerja Sama Domestik	Ringkasan Kerja Sama
1	18 April 2017	MOU OJK bersama Persyarikatan Muhammadiyah tentang Pengembangan Keuangan Syariah, Peningkatan Literasi Keuangan dan Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Keuangan Syariah, Peningkatan Literasi Keuangan dan Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan - Penelitian, Pengajaran dan Pengabdian Masyarakat dalam rangka pengembangan sektor jasa keuangan, peningkatan literasi keuangan, dan perlindungan konsumen.
2	2 Juni 2017	MOU OJK bersama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia <i>Banking School</i> tentang Pengembangan Sektor Jasa Keuangan, Peningkatan Literasi Keuangan dan Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan	Penelitian, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pengembangan sektor jasa keuangan, peningkatan Literasi Keuangan dan Perlindungan Konsumen.
3	5 Juni 2017	MOU OJK bersama Universitas Ahmad Dahlan tentang Pengembangan Sektor Jasa Keuangan, Peningkatan Literasi Keuangan dan Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan	Penelitian, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pengembangan sektor jasa keuangan, peningkatan Literasi Keuangan dan Perlindungan Konsumen.
4	5 Juni 2017	MOU OJK bersama Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tentang Pengembangan Sektor Jasa Keuangan, Peningkatan Literasi Keuangan dan Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan	Penelitian, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pengembangan sektor jasa keuangan, peningkatan Literasi Keuangan dan Perlindungan Konsumen.
5	12 Juni 2017	MOU OJK bersama Universitas Pertahanan tentang Kerja Sama Dalam Bidang Penelitian, Pendidikan, dan Pengabdian Masyarakat Dalam Rangka Pengembangan Sektor Jasa Keuangan	Penelitian, penyediaan narasumber dan pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan pemahaman sektor jasa keuangan dan Ekonomi Pertahanan.
6	13 Juni 2017	MOU OJK bersama Forum Rektor Indonesia tentang Pengembangan Sektor Jasa Keuangan, Peningkatan Literasi Keuangan dan Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan	Penelitian, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pengembangan sektor jasa keuangan, peningkatan Literasi Keuangan dan Perlindungan Konsumen.

Di samping penandatanganan kerja sama antar lembaga, OJK juga menjalin hubungan kelembagaan dengan menyelenggarakan 39 kegiatan kelembagaan bersama mencakup *Focus Group Discussion* (FGD) mengenai tindak lanjut UU PPKSK, perkembangan industri jasa keuangan syariah, program inklusi keuangan, Pengukuhan TPAKD dan Satgas Waspada Investasi, implementasi KUR, perkembangan perekonomian daerah, peningkatan UMKM, pendampingan kunjungan kerja DPR, dan

sosialisasi mengenai peran, fungsi, dan kinerja OJK yang melibatkan beberapa lembaga negara, antara lain:

- Dewan Perwakilan Rakyat;
- Kementerian Keuangan;
- Bank Indonesia;
- Lembaga Penjamin Simpanan;
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Pemerintah Daerah; dan
- Industri Jasa Keuangan.

OJK Meraih Penghargaan *The Global Inclusion Award 2017*

OJK memperoleh penghargaan *The Global Inclusion Award 2017* untuk regional Asia dan Pasifik. *The Global Inclusion Award 2017* adalah program yang diselenggarakan oleh *Child and Youth Finance International* (CYFI) bekerja sama dengan Pemerintah Jerman selaku Tuan Rumah penyelenggara pertemuan G20 tahun 2017. Pada *The Global Inclusion Award 2017*, Indonesia

mengungguli India dan Pakistan yang sebelumnya masuk final untuk regional Asia dan Pasifik. Juri kompetisi menilai Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat yang tampak dari berbagai upaya untuk memenuhi target inklusi keuangan sebesar 75% pada 2019 dan target peningkatan literasi keuangan pertahun sebesar 2%.



2.8.2 Kerja Sama Internasional

1. Kerja Sama Internasional & Regional

a. ASEAN Banking Integration Framework (ABIF)

Dalam rangka mendukung kebijakan dan pelaksanaan tugas OJK, diperlukan penyelesaian negosiasi dalam rangka peningkatan komitmen jasa keuangan di ASEAN. Peningkatan komitmen perbankan antara lain dilaksanakan melalui paket perundingan jasa keuangan dalam lingkup ABIF, serta paket komitmen jasa keuangan lainnya.

Perkembangan proses negosiasi ABIF antara OJK dan negara-negara ASEAN selama triwulan II-2017, adalah sebagai berikut:

i. OJK dengan Banco Sentral ng Pilipinas (BSP)

Penandatanganan *Letter of Intent* antara OJK dan BSP telah dilaksanakan di Jakarta. Penandatanganan Lol bertujuan untuk menandai dimulainya proses penyusunan Perjanjian Bilateral dalam implementasi ASEAN Banking Integration Framework (ABIF), yang diharapkan dapat membuka jalan bagi ekspansi perbankan Indonesia ke Filipina. Melalui perjanjian bilateral antara kedua negara, Indonesia dan Filipina, diharapkan dapat menjadi satu langkah ke depan dalam mewujudkan integrasi perbankan di ASEAN di bawah kerangka ABIF.

ii. OJK dengan Monetary Authority Singapore (MAS) dan Central Bank Myanmar (CBM)

OJK melakukan pembahasan draft Lol baik melalui *side meeting* dengan MAS dan CBM pada pertemuan Working Committee on Financial Services Liberalization (WCFSL) ke-54

b. Keterwakilan Posisi OJK Dalam Forum Perdagangan Jasa Internasional

Terdapat beberapa posisi (*stand point*) OJK yang dapat diterima sebagai posisi RI dalam Forum Perdagangan Jasa Internasional.

Sampai triwulan II-2017, terdapat lima jenis perundingan yang telah dilaksanakan, di mana posisi OJK telah diajukan dan diterima sebagai posisi Indonesia antara lain:

i. Perundingan Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)

OJK merupakan *lead negotiator* perundingan putaran ke-7 IA-CEPA. Pada perundingan ini keseluruhan posisi OJK diterima sebagai posisi Indonesia, antara lain : Modalitas, Market Access, Liberalisasi IKNB, Pembukaan Mode 2 pada “*non-life insurance*”

ii. Perundingan EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA);

OJK menindaklanjuti hasil perundingan putaran ke-12 IE-CEPA.

iii. Perundingan ASEAN Working Committee on Financial Services Liberalization (WC-FSL)

Posisi OJK telah diterima sebagai posisi Indonesia pada perundingan WCFSL ke-54 antara lain pada isu-isu berikut:

- *ASEAN Insurance Integration,*
- *Monitoring Tool and Framework for financial services commitments, and implementation under the AFAS,*
- *Review of the AFAS Financial services Obligations, dan*
- *KPI on ASEAN Economic Community 2025.*

iv. Perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)

- Posisi OJK diterima sebagai posisi Indonesia pada perundingan *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* ke-17 *Sub-Working Group on Financial Services (SWG-FIN)* ke-9 terutama pada *Annex on Financial Services* (khususnya definisi *financial institution*). OJK bertindak sebagai *lead negotiator* bersama dengan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan
- v. Perundingan *Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA)*. Indonesia pada perundingan IEU-CEPA, menyampaikan proposal terkait *guideline*, modalitas liberalisasi dan prosedur perundingan untuk perdagangan jasa yang terdiri atas tiga bagian yaitu *General Principles*, *Mechanism of Negotiation*, dan *Modalities and Procedures*. Proposal ini dimaksudkan sebagai pedoman baik bagi pihak Indonesia maupun UE dalam proses perundingan.
 - c. Tahap Negosiasi Penyusunan *Memorandum of Understanding (MoU)*
 - a. MoU OJK dengan Lembaga Sektor Keuangan Internasional :
Sampai dengan triwulan II-2017 telah dilakukan tahap negosiasi MoU antara OJK dengan :
 - *Central Bank Iran*;
 - *Reserve Bank of India*;
 - *Bank Of Thailand*; dan
 - *Monetary Authority of Brunei Darussalam*;
 - b. MoU OJK dengan Institusi asing :
Sampai dengan triwulan II-2017 telah dilakukan tahapan negosiasi *Cooperation Agreement* antara lain dengan pihak *Australian Securities and Investments Commission (ASIC)* yang sudah ditandatangani pada April 2017.
2. **Partisipasi OJK dalam forum *Internasional Standard Setting Bodies* dan Lembaga Internasional lainnya:**
Selama periode laporan, OJK berpartisipasi aktif pada forum *International Standard Setting Bodies*, antara lain:
 - a. Partisipasi pada pertemuan level teknis Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka koordinasi implementasi reformasi keuangan global dalam forum *Financial Stability Board (FSB)*;
 - b. Tanggapan OJK atas Permintaan Masukan Bahan *OECD Ministerial Council Meeting (MCM) 2017*;
 - c. Tanggapan OJK Sektor Pasar Modal terhadap Isu *Sovereign Exposure*;
 3. **Pengelolaan, pemantauan dan evaluasi bantuan teknis donor asing dan lembaga internasional**
Pada triwulan II-2017, terdapat beberapa kegiatan terkait pengelolaan, pemantauan dan evaluasi bantuan teknis dari donor asing dan lembaga internasional, antara lain:
 - a. *Financial Market Development Integration Program Sub-Program 2 (FMDIP Subprogram 2)* Pemenuhan dokumen atas *matrix policy* yang diusulkan ADB dalam kaitan OJK sebagai *implementation agency* pada program FMDIP Subprogram-2;
 - b. *Bilateral Meeting* antara OJK dan ILO terkait kerja sama kolaborasi OJK dan ILO dalam *Promise Impact Project*;
 4. **Peningkatan Kerja Sama Kelembagaan dengan Pengawas Industri Jasa Keuangan Asing**
Pada triwulan II-2017, terdapat beberapa kegiatan terkait peningkatan kerja sama

kelembagaan dengan pengawas IJK asing, antara lain:

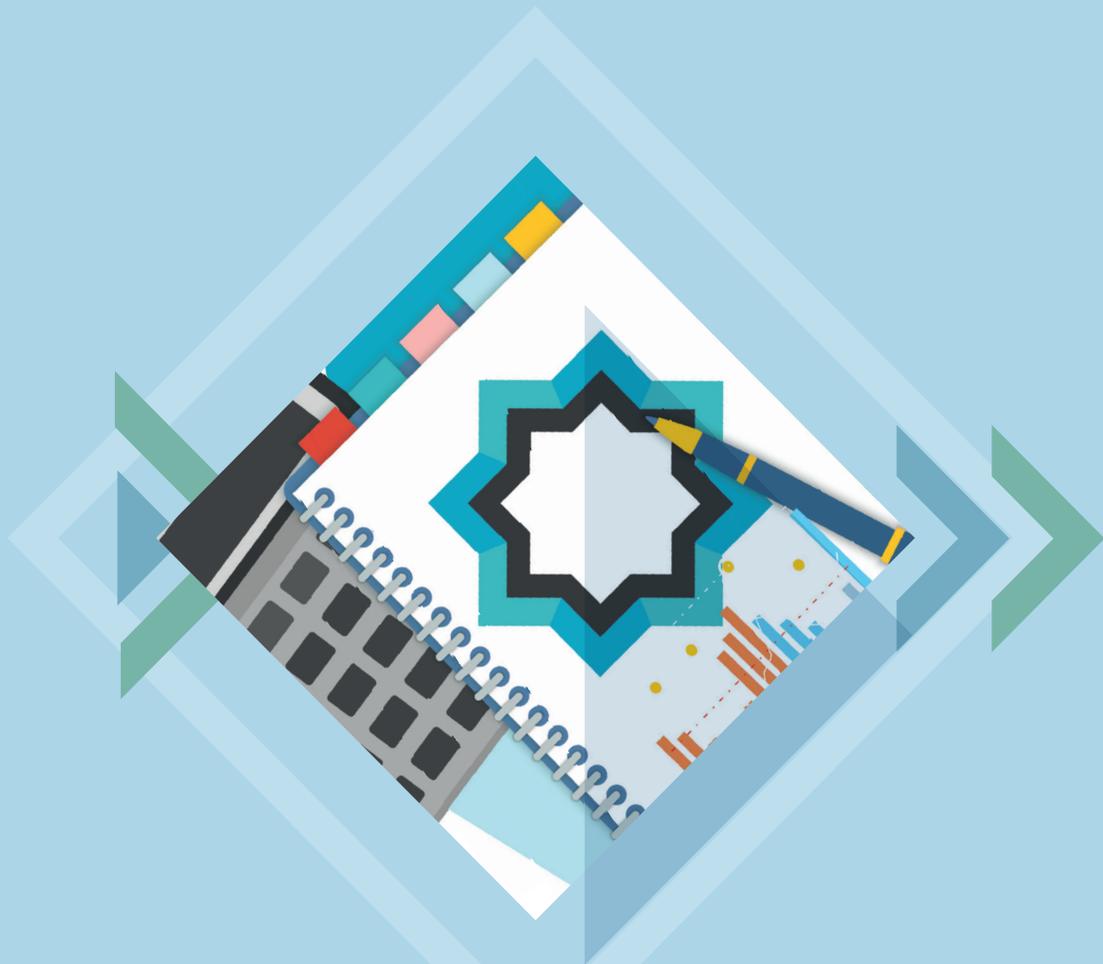
- a. Kolaborasi penyelenggaraan *event* antara OJK dan UNDP (*Social Finance and Social Enterprise*), dalam diskusi mengenai potensi pengembangan *Social Finance* dan *Social Enterprise* di Indonesia.
- b. *FGD on Marine, Aviation dan Goods in International Transit (MAT) Insurance*. FGD ini ditujukan untuk mengetahui tanggapan dan masukan dari Kementerian Perhubungan dan industri mengenai kesiapan Indonesia dalam melakukan liberalisasi terkait *MAT Insurance* sebagai mana disebutkan dalam SAP AEC bahwa Indonesia akan melakukan liberalisasi AEC pada periode 2018-2019;
- c. Pelaksanaan *Knowledge Sharing Session* OJK-PROKSI dan ILO dengan topik keuangan mikro, keuangan inklusi, asuransi mikro;

- d. OJK bersama dengan ILO mengadakan acara *Training of Trainers* Kewirausahaan dengan turut mengundang Kantor Regional dan Kantor Operasional OJK seluruh Indonesia

2.9 HUBUNGAN KOORDINASI KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER

Selama triwulan II-2017, OJK melanjutkan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, termasuk melalui wadah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Rapat KSSK tersebut menyimpulkan bahwa stabilitas sistem keuangan berada dalam kondisi normal. Hal ini berdasarkan penilaian atas perkembangan nilai tukar, makroprudensial, sistem pembayaran, pasar modal, perbankan, lembaga keuangan non bank, penjaminan simpanan, fiskal dan SBN. Namun, terdapat beberapa risiko yang harus dicermati baik dari eksternal maupun domestik.



Tinjauan Industri
dan Operasional
Sektor Jasa
Keuangan Syariah



Pengembangan



Kajian Pembentukan APEX IT *Company* untuk BPRS

Call for Paper - Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS) XVI

iB *Research Grant Program* 2017

Kajian Lindung Nilai Syariah dalam Pasar Modal

Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Asuransi Syariah

Kegiatan



Kampanye Aku Cinta Keuangan Syariah melalui iB *Vaganza* – Medan (8.081 Nasabah Baru), Keuangan Syariah Fair – Semarang (7.310 Nasabah Baru) dan iB *Vaganza* – Mataram (9.440 Nasabah Baru)

Forum *Sharia Banking for Business Matching* bersama Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF)

Olimpiade Perbankan Syariah Tingkat SMA dan Olimpiade Nasional Ekonomi Islam Tingkat Universitas

Tinjauan Industri dan Operasional Sektor Jasa Keuangan Syariah



3.1 TINJAUAN INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH

3.1.1 Perkembangan Perbankan Syariah

Selama triwulan II-2017, perbankan syariah menunjukkan perkembangan positif tercermin dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pembiayaan. Tingkat efisiensi dan indikator likuiditas juga menunjukkan perbaikan. Namun demikian, terdapat beberapa penurunan dibandingkan triwulan I-2017, yaitu rasio ketahanan modal, dan rentabilitas sebagai dampak tantangan perbaikan internal.

Pada triwulan II-2017, aset perbankan syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tercatat sebesar Rp387,87 triliun mengalami pertumbuhan sebesar 5,35% (*qtq*) atau meningkat sebesar Rp19,70 triliun. Total aset perbankan syariah didominasi aset BUS dan UUS yang sebesar Rp378,20 triliun atau sebesar 97,51% dari total

aset perbankan syariah, sementara aset BPRS sebesar Rp9,67 triliun.

Pembiayaan BUS, UUS, dan BPRS mengalami peningkatan sebesar 5,92% (*qtq*) atau Rp15,26 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi sebesar Rp272,84 triliun. Pembiayaan tersebut terdiri atas pembiayaan yang disalurkan BUS dan UUS sebesar Rp265,32 triliun dan pembiayaan yang disalurkan BPRS sebesar Rp7,52 triliun. Jumlah pembiayaan bermasalah pada BUS dan UUS cukup terjaga, berada di bawah ketentuan maksimum 5%, dan mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar -0,30% (*qtq*) menjadi sebesar 3,99%.

DPKBUS, UUS, dan BPRS mengalami peningkatan tertinggi sebesar Rp15,86 triliun (*qtq*) atau naik 5,43% (*qtq*) menjadi sebesar Rp308,05 triliun, yang terdiri atas DPK BUS dan UUS sebesar Rp302,01 triliun, sementara DPK BPRS sebesar Rp6,04 triliun. Jika dilihat dari komposisinya, DPK BUS dan UUS mengalami peningkatan cukup signifikan pada instrumen Giro dengan pertumbuhan sebesar 17,47% menjadi sebesar Rp35,97 triliun, diikuti oleh Deposito yang

memiliki porsi 59,30% dari total DPK BUS dan UUS mengalami peningkatan sebesar 5,53% menjadi sebesar Rp179,10 triliun, serta Tabungan mengalami peningkatan sebesar 1,28% menjadi sebesar Rp86,94 triliun. Peningkatan pembiayaan yang lebih besar daripada DPK tersebut menyebabkan rasio FDR BUS dan UUS mengalami peningkatan menjadi sebesar 87,85%, naik 0,30%. Nilai rasio FDR 87,85% masih dalam *range* (lebih besar dari 80%) yang mengindikasikan ekspansi pembiayaan bank syariah diimbangi dengan sumber dana (*funding*) yang cukup karena bank memiliki kemampuan likuiditas semakin baik.

Pada periode laporan, rasio efisiensi seperti dari BOPO juga mengalami pertumbuhan positif tercermin dari BOPO BUS dan UUS menurun sebesar -1,45% menjadi 87,13%, hal ini menunjukkan kemampuan bank yang semakin efisien dalam mengelola operasionalnya. Di sisi lain, CAR BUS mengalami penurunan menjadi sebesar 16,42%. Rasio rentabilitas ROA mengalami sedikit penurunan dari nilai triwulan menjadi 1,49%. Sementara itu, jumlah jaringan kantor BUS dan UUS cenderung stabil pada angka 2.185 unit kantor.

Tabel III - 1 Indikator Perbankan Syariah

Indikator Utama	Triwulan II-2016	Triwulan III-2016	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017	Triwulan II-2017	Pertumbuhan (<i>qtq</i>)	
						Nominal	%
SHARE TOTAL ASET BUS + UUS + BPRS							
Total aset BUS + UUS (dalam Triliun Rupiah)	306,22	331,76	356,50	358,74	378,20	19,46	5,42
Total aset BPRS (dalam Triliun Rupiah)	8,12	8,60	9,16	9,42	9,67	0,25	2,64
Share Aset Perbankan Syariah (BUS+UUS+BPRS) terhadap Total Perbankan Indonesia (BUS+BUK+BPRS+BPR)	4,85	5,17	5,34	5,29	5,42		0,13
BUS + UUS							
DPK (dalam Triliun Rupiah)	241,34	263,52	279,33	286,18	302,01	15,83	5,53
- Giro	23,84	29,07	27,97	30,62	35,97	5,35	17,47
- Tabungan	70,24	78,35	85,19	85,84	86,94	1,10	1,28
- Deposito	147,25	156,10	166,17	169,72	179,10	9,39	5,53
Pembiayaan (dalam Triliun Rupiah)	222,17	235,01	248,01	250,54	265,32	14,78	5,90
Jumlah NPF (dalam Triliun Rupiah)	11,23	10,14	10,31	10,75	10,59	-0,16	-1,53
CAR (%) – BUS	14,72	15,43	16,63	16,98	16,42		-0,56
NPF Gross (%)	5,05	4,31	4,16	4,29	3,99		-0,30
ROA (%)	1,11	1,04	0,95	1,53	1,49		-0,05
BOPO (%)	92,36	92,83	93,62	88,58	87,13		-1,45
FDR (%)	92,06	89,18	88,78	87,55	87,85		0,30
Jumlah Bank							
- BUS	12	13	13	13	13	0,00	0,00
- UUS	22	21	21	21	21	0,00	0,00
Jumlah Kantor	2.129	2.210	2.201	2.184	2.185	1	0,05
BPRS							
DPK (dalam Triliun Rupiah)	5,00	5,44	5,82	6,02	6,04	0,20	0,38
Pembiayaan (dalam Triliun Rupiah)	6,46	6,45	6,66	7,04	7,52	0,38	6,80
Jumlah NPF (dalam Triliun Rupiah)	0,59	0,68	0,58	0,70	0,81	0,11	15,04
CAR (%)	20,22	20,72	21,73	21,53	20,62		-0,91
NPF Gross (%)	9,18	10,47	8,63	9,94	10,71		0,77
ROA (%)	2,18	2,45	2,27	2,29	2,24		-0,05
BOPO (%)	87,94	87,91	87,09	85,13	86,50		1,37
FDR (%)	129,35	118,63	114,40	116,98	124,47		7,49
Jumlah Bank	165	164	166	166	167	1	0,60
Jumlah Kantor	428	430	453	454	456	2	0,44

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia dan Sistem Informasi Perbankan OJK, Juni 2017

Tabel III - 2 Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah (dalam jutaan rupiah)

Tahun	Jakarta Islamic Index (JII)	Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)	Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)	
2012	1.671.004,23	2.451.334,37	4.126.994,93	
2013	1.672.099,91	2.557.846,77	4.219.020,24	
2014	1.944.531,70	2.946.892,79	5.228.043,48	
2015	1.737.290,98	2.600.850,72	4.872.701,66	
2016	2.035.189,92	3.170.056,08	5.753.612,76	
2017	Triwulan I	2.106.211,65	3.323.611,39	6.055.232,91
	Triwulan II	2.231.679,45	3.491.395,41	6.372.813,67

Tabel III - 3 Perkembangan Indeks Saham Syariah (dalam jutaan rupiah)

Tahun	Jakarta Islamic Index (JII)	Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)	Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)	
2012	594,78	144,99	4.316,69	
2013	585,11	143,71	4.274,18	
2014	691,04	168,64	5.226,95	
2015	603,35	145,06	4.593,01	
2016	694,13	172,08	5.296,71	
2017	Triwulan I	718,35	180,49	5.568,11
	Triwulan II	749,60	185,22	5.829,71

B. Perkembangan Sukuk Korporasi

Selama periode laporan terdapat penerbitan 16 seri Sukuk Korporasi dengan total nilai penerbitan sebesar Rp3,43 triliun. Terdapat pula satu seri Sukuk Korporasi yang jatuh tempo senilai Rp250 miliar. Dengan demikian, jumlah *outstanding* Sukuk korporasi menjadi sebanyak 71 seri atau

meningkat sebesar 29,09% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Sukuk korporasi memiliki nilai *outstanding* sebesar Rp15,314 triliun atau meningkat sebesar 20,77% dibandingkan triwulan sebelumnya.

Tabel III - 4 Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi

Tahun	Emisi Sukuk		Sukuk <i>Outstanding</i>		
	Total Nilai (dalam miliar rupiah)	Total Jumlah	Total Nilai (dalam miliar rupiah)	Total Jumlah	
2012	9.790	54	6.883	32	
2013	11.994	64	7.553	36	
2014	12.956	71	7.105	35	
2015	16.114	87	9.902	47	
2016	20.425	102	11.878	53	
2017	Triwulan I	20.793	105	12.134	55
	Triwulan II	21.443	111	15.314	71

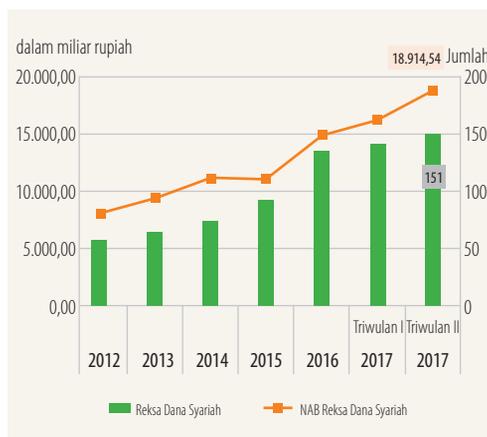
C. Perkembangan Reksa Dana Syariah

Selama triwulan II-2017 terdapat sembilan Reksa Dana Syariah efektif terbit sehingga total Reksa Dana Syariah yang beredar sebanyak 151 dengan NAB sebesar Rp18,91 triliun atau meningkat 6,34% dari sisi jumlah dan meningkat 17,31% dari sisi NAB. Proporsi jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah terhadap total industri Reksa Dana masing-masing mencapai 9,89% dari total 1.527 Reksa Dana dan 4,94% dari total NAB Reksa Dana sebesar Rp382,84 triliun.

Tabel III - 5 Perkembangan Reksa Dana Syariah

Tahun	Perbandingan Jumlah Reksa Dana				Perbandingan NAB (dalam miliar rupiah)				
	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konvensional	Reksa Dana Total	%	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konvensional	Reksa Dana Total	%	
2010	48	564	612	7,84%	5.225,78	143.861,59	149.087,37	3,51%	
2011	50	596	646	7,74%	5.564,79	162.672,10	168.236,89	3,31%	
2012	58	696	754	7,69%	8.050,07	204.541,97	212.592,04	3,79%	
2013	65	758	823	7,90%	9.432,19	183.112,33	192.544,52	4,90%	
2014	74	820	894	8,31%	11.236,00	230.225,59	241.462,09	4,65%	
2015	93	998	1.091	8,52%	11.019,43	260.949,57	271.969,00	4,05%	
2016	136	1.289	1.425	9,54%	14.914,63	323.835,18	338.749,81	4,40%	
2017	Triwulan I	142	1349	1491	9,52%	17.306,90	347.114,82	364.421,72	4,75%
	Triwulan II	151	1.376	1.527	9,89%	18.914,54	363.929,69	382.844,23	4,94%

Grafik III - 2 Perkembangan Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah



D. Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara, adalah surat berharga yang diterbitkan oleh negara berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Sampai akhir Juni 2017, jumlah keseluruhan SBSN *outstanding* sebanyak 55 seri dengan nilai sebesar Rp503,19 triliun.

Tabel III - 6 Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara

Tahun	Nilai <i>Outstanding</i> (dalam triliun rupiah)	Total Jumlah <i>Outstanding</i>
2010	44,34	16
2011	77,73	22
2012	124,44	36
2013	169,29	42
2014	206,10	42
2015	296,07	47
2016	411,37	53
2017	Triwulan I	480,29
	Triwulan II	503,19

E. Perkembangan Jasa Syariah di Pasar Modal

Penerbitan efek syariah di pasar modal memerlukan jasa dari para pihak yang

mempunyai pengalaman dan kompetensi yang cukup dari sisi penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal antara lain Penjamin Emisi Efek, Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Wali Amanat. Sampai akhir triwulan II-2017, para pihak yang terlibat mempunyai jasa layanan syariah meliputi:

- Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana Syariah berjumlah 45 Manajer Investasi;
- Pihak yang memperoleh persetujuan dari OJK sebagai Pihak Penerbit DES berjumlah 10 perusahaan aset manajemen;
- Bank Kustodian yang memperoleh rekomendasi DSN-MUI untuk memberikan layanan syariah berjumlah 14 bank;
- Perusahaan Efek yang mengembangkan dan melaksanakan perdagangan *online* saham berdasarkan prinsip syariah (*online trading* syariah) berjumlah 12 Perusahaan Efek;
- Perusahaan Efek sebagai penjamin Emisi dalam penerbitan Sukuk Korporasi berjumlah 12 Penjamin Emisi Efek;
- Wali Amanat yang terlibat dalam penerbitan Sukuk Korporasi berjumlah enam Wali Amanat; dan
- Pihak yang memperoleh izin Ahli Syariah Pasar Modal dari OJK berjumlah 41 Ahli Syariah Pasar Modal.

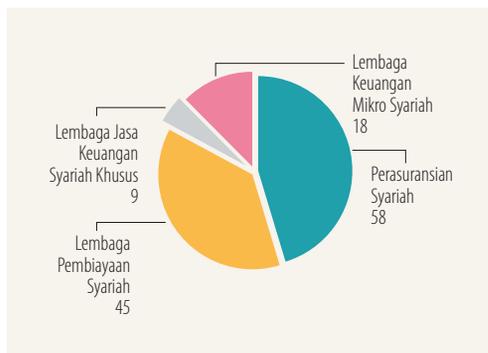
3.1.3 Perkembangan IKNB Syariah

Selama triwulan II-2017, aset IKNB Syariah mengalami kenaikan sebesar 5,44% dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi Rp97,61 triliun. Aset industri lembaga pembiayaan syariah masih mendominasi porsinya yaitu sebesar 39,73% dari total aset IKNB syariah secara keseluruhan.

Tabel III - 7 Aset IKNB Syariah (dalam triliun rupiah)

No.	Industri	Triwulan II-2016	Triwulan III-2016	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017	Triwulan II-2017
1	Perasuransian Syariah	30,61	32,99	33,24	35,25	37,37
2	Lembaga Pembiayaan Syariah	30,12	33,90	36,94	37,64	38,78
3	Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus	17,25	17,18	18,43	19,61	21,39
4	Lembaga Keuangan Mikro Syariah	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07
Total		78,03	84,13	88,67	92,57	97,61

Sampai akhir triwulan II-2017, terdapat 58 perusahaan perasuransian syariah, 45 lembaga pembiayaan syariah, sembilan lembaga jasa keuangan syariah khusus, dan 18 lembaga keuangan mikro syariah. Selain itu, terdapat satu unit syariah perusahaan asuransi yang mengembalikan izin.

Grafik III - 3 Jumlah Entitas IKNB Syariah Triwulan II-2017

A. Industri Perasuransian Syariah

Pada triwulan II-2017, industri perasuransian syariah mengalami peningkatan nilai aset, investasi, dan kontribusi bruto masing-masing sebesar 6,01%, 5,32%, dan 103,3% menjadi Rp37,37 triliun, Rp32,26 triliun, dan Rp6,16 triliun. Klaim bruto, dan kewajiban juga mengalami peningkatan masing-masing sebesar 110,34% dan 4,54% menjadi Rp2,44 triliun dan Rp7,37 triliun dibandingkan triwulan I-2017.

Tabel III - 8 Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah (dalam triliun rupiah)

No.	Jenis Indikator	Triwulan II-2016	Triwulan III-2016	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017	Triwulan II-2017
1	Aset					
	Asuransi Jiwa Syariah	24,86	26,87	27,08	28,93	30,42
	Asuransi Umum Syariah	4,54	4,80	4,80	4,91	4,98
	Reasuransi Syariah	1,21	1,32	1,37	1,42	1,96
	Jumlah	30,61	32,99	33,24	35,25	37,37
2	Investasi					
	Asuransi Jiwa Syariah	22,46	24,49	24,56	26,28	27,41
	Asuransi Umum Syariah	2,97	3,18	3,16	3,23	3,36
	Reasuransi Syariah	0,97	1,04	1,08	1,12	1,49
	Jumlah	26,40	28,71	28,81	30,63	32,26
3	Kontribusi Bruto					
	Asuransi Jiwa Syariah	4,61	6,92	9,49	2,39	4,91
	Asuransi Umum Syariah	1,12	1,61	2,13	0,51	0,95
	Reasuransi Syariah	0,22	0,33	0,41	0,13	0,30
	Jumlah	5,96	8,86	12,03	3,03	6,16
4	Klaim Bruto					
	Asuransi Jiwa Syariah	1,54	2,46	3,32	0,85	1,73
	Asuransi Umum Syariah	0,36	0,54	0,76	0,22	0,46
	Reasuransi Syariah	0,16	0,20	0,25	0,09	0,24
	Jumlah	2,07	3,20	4,34	1,16	2,44
5	Kewajiban					
	Asuransi Jiwa Syariah	3,43	3,46	3,45	3,91	4,07
	Asuransi Umum Syariah	2,42	2,65	2,56	2,66	2,66
	Reasuransi Syariah	0,37	0,44	0,46	0,47	0,64
	Jumlah	6,22	6,55	6,47	7,05	7,37

Pengelolaan perusahaan perasuransian syariah dilakukan dalam bentuk *full fledged* dan unit syariah. Sampai akhir periode laporan, terdapat 58 perusahaan yang terdiri dari 11 perusahaan asuransi syariah, 44 perusahaan asuransi yang memiliki unit syariah, satu perusahaan reasuransi syariah, dan dua perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah.

B. Industri Pembiayaan Syariah

Pada triwulan II-2017, jumlah aset perusahaan pembiayaan syariah mengalami kenaikan sebesar 2,74% menjadi Rp37,49 triliun.

Tabel III - 9 Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah (dalam miliar rupiah)

No.	Komponen	Triwulan II-2016	Triwulan III-2016	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017	Triwulan II-2017
1	Kas dan Setara Kas	589,90	608,15	643,08	602,17	955,26
2	Aset Tagihan Derivatif			16,77	-10,27	-
3	Investasi Jangka Pendek dalam Surat Berharga					-
4	Piutang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah - Neto	26.716,28	29.890,29	33.073,30	33.746,41	34.050,84
5	Penyertaan Modal					-
6	Investasi Jangka Panjang dalam Surat Berharga					-
7	Aset yang Disewaoperasikan - Neto		125,85	109,00	95,71	111,28
8	Aset Tetap dan Inventaris - Neto	132,00	166,61	151,85	144,30	124,20
9	Aset Pajak Tangguhan		24,48	19,30	23,23	23,57
10	Rupa-Rupa Aset	1.596,32	1.942,18	1.727,63	1.888,20	2.224,19
	Total	29.034,49	32.757,56	35.740,95	36.489,75	37.489,36

Sampai akhir periode laporan, terdapat 37 perusahaan pembiayaan syariah, yang terdiri atas tiga perusahaan berbentuk *full fledged* dan 34 perusahaan berbentuk UUS. Pada perusahaan modal ventura syariah, terdapat empat perusahaan berbentuk *full fledged* dan tiga perusahaan berbentuk UUS dengan total aset sebesar Rp1.041,59 miliar. Selain itu, terdapat satu perusahaan pembiayaan infrastruktur unit syariah dengan aset sebesar Rp107,38 miliar

C. Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus terdiri dari Perusahaan Penjaminan Syariah, kegiatan syariah pada PT Pegadaian (Persero) dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Jumlah perusahaan penjaminan syariah sebanyak empat perusahaan, terdiri atas dua *full fledged* dan dua UUS dengan total aset sebesar Rp831,77 miliar. Aset kegiatan syariah pada PT Pegadaian (Persero) dan LPEI masing-masing sebesar Rp4,64 triliun dan Rp15,92 triliun. Sementara

itu, jumlah Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah sebanyak 18 perusahaan berbentuk *full fledged* dengan total aset Rp71,12 miliar

3.2 PENGATURAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

3.2.1 Pengaturan Perbankan Syariah

Sepanjang triwulan II-2017, OJK menerbitkan lima POJK dan empat SEOJK perbankan konvensional yang berlaku pula bagi perbankan syariah yaitu:

1. POJK Nomor 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik;
2. POJK Nomor 15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum;
3. POJK Nomor 16/POJK.03/2017 tentang Bank Perantara;
4. POJK Nomor 19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
5. POJK Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan;
6. SEOJK Nomor 15/SEOJK.03/2017 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
7. SEOJK Nomor 16/SEOJK.03/2017 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Dalam Rangka Pertukaran Informasi Secara Otomatis Antarneegara dengan Menggunakan Standar Pelaporan Bersama (*Common Reporting Standard*);
8. SEOJK Nomor 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum; dan
9. SEOJK Nomor 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan.

3.2.2 Pengaturan IKNB Syariah

Selama triwulan II-2017, OJK menerbitkan satu POJK dan lima SEOJK yang juga berlaku bagi IKNB konvensional, antara lain:

1. POJK Nomor 17/POJK.05/2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
2. SEOJK Nomor 23/SEOJK.05/2017 tentang Dasar Penilaian Aset yang Diperkenankan dalam Bentuk Investasi dan Bukan Investasi bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
3. SEOJK nomor 25/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Perhitungan Dana *Tabarru'* Minimum Berbasis Risiko dan Modal Minimum Berbasis Risiko bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
4. SEOJK nomor 26/SEOJK.05/2017 tentang Tata Cara Pengajuan dan Persetujuan Penempatan Investasi dan Bukan Investasi pada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
5. SEOJK nomor 28/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Pembentukan Penyisihan Kontribusi dan Metode Perhitungan Penyisihan Klaim pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
6. SEOJK nomor 29/SEOJK.05/2017 tentang Laporan Aktuaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

3.3 PENGAWASAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

3.3.1 Pengawasan Perbankan Syariah

Kondisi permodalan industri Perbankan Syariah (terutama untuk BUS) sampai dengan triwulan II-2017 secara umum cukup memadai di mana Rasio KPMM berada di atas *threshold* yakni 16,88% (rasio KPMM minimum 14%) meskipun sedikit menurun jika dibandingkan periode sebelumnya. Penurunan tersebut antara lain disebabkan perkembangan kegiatan usaha BUS di triwulan II-2017 telah mendorong pertumbuhan pembiayaan sebesar 1,43% menjadi Rp180,63 triliun. Optimalisasi kegiatan usaha terus dilaksanakan di tiap BUS tercermin dari rasio BOPO sebesar 86,88% relatif menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Meski demikian, masih tingginya rasio tersebut secara umum disebabkan struktur dana BUS yang didominasi oleh dana mahal (deposito), rendahnya *fee based income* yang disebabkan variasi produk terbatas dan jangkauan jaringan kantor bank yang belum optimal.

Rating peringkat RBBR di perbankan syariah masih sama dengan periode sebelumnya (Desember 2016), yaitu tergolong Cukup Sehat. Adapun potensi risiko, masih berasal dari risiko kredit dan risiko operasional, sehingga *Supervisory Plan 2017* masih difokuskan pada kedua risiko tersebut. Adapun aspek permodalan dan rentabilitas hanya menjadi *concern Supervisory Plan* pada BUS tertentu.

Selama triwulan II-2017 OJK melaksanakan 47 proses perizinan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap tiga calon PSP dan 33 Pengurus Bank Syariah serta 11 calon Dewan Pengawas Syariah (DPS), dengan hasil tiga calon pengurus bank dinyatakan memenuhi syarat (disetujui); satu calon DPS dinyatakan memenuhi syarat (layak); satu calon DPS dibatalkan permohonannya oleh pihak bank; serta 10 dokumen calon pengurus Bank Syariah

dan empat calon DPS dikembalikan karena tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Hingga akhir triwulan II-2017 terdapat 20 proses perizinan penilaian kemampuan dan kepatutan pengurus bank syariah, tiga calon PSP, dan lima calon DPS yang masih dalam proses penyelesaian. Sementara itu, pada kegiatan perizinan produk baru, terdapat tiga permohonan masuk yang seluruhnya masih dalam proses penyelesaian.

Terkait pengembangan jaringan kantor perbankan syariah, terdapat 41 permohonan jaringan kantor perbankan syariah yang terdiri dari pembukaan kantor, pemindahan alamat kantor, penutupan kantor, dan penghentian kegiatan LSB dengan hasil 26 permohonan telah disetujui, satu permohonan dikembalikan

karena belum memenuhi ketentuan yang berlaku, dan 14 permohonan masih dalam proses penyelesaian.

OJK juga menerima 15 permohonan perizinan lainnya berupa permohonan persetujuan prinsip pendirian bank syariah, permohonan izin usaha pendirian bank syariah, permohonan perubahan kegiatan usaha dari bank konvensional menjadi bank syariah (konversi), permohonan *spin off* UUS, dan permohonan akuisisi dengan hasil satu permohonan izin usaha pendirian bank syariah dan dua permohonan akuisisi bank syariah disetujui; satu permohonan konversi dibatalkan oleh bank; dua permohonan *spin off* UUS dan satu permohonan akuisisi telah dikembalikan kepada bank karena tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Selain itu, terdapat delapan permohonan yang masih dalam proses penyelesaian.

Tabel III - 10 Layanan Perizinan Perbankan Syariah

Jenis Proses Perizinan	Disetujui	Tolak	Dihentikan	Dibatalkan	Belum Memenuhi Persyaratan Administratif	Belum Memenuhi Ketentuan Yang Berlaku	Dalam Proses Penyelesaian	Total Per-mohonan Masuk	Total perizinan selesai
Fit and Proper Test :									
1. Pemegang Saham Pengendali (PSP)	-	-	-	-	-	-	3	3	-
2. Pengurus Bank Syariah (komisaris dan direksi)	3	-	-	-	10	-	20	33	13
3. Dewan Pengawas Syariah (DPS)	1	-	-	1	4	-	5	11	6
Total Permohonan Proses FPT	4	-	-	1	14	-	28	47	19
Perizinan Produk Baru	-	-	-	-	-	-	3	3	-
Total Permohonan Perizinan Produk Baru	-	-	-	-	-	-	3	3	-
Pengembangan Jaringan Kantor :									
1. Pembukaan Kantor Baru	4	-	-	-	-	1	3	8	5
3. Penutupan Kantor	7	-	-	-	-	-	6	13	7
4. Pemindahan Alamat Kantor	15	-	-	-	-	-	5	20	15
Total Permohonan Pengembangan Jaringan Kantor	26	-	-	-	-	1	14	41	27
Perizinan Lainnya :									
1. Izin Prinsip	-	-	-	-	-	-	4	4	-
2. Izin Usaha	1	-	-	-	-	-	-	1	1
3. Izin Prinsip Disetujui namun belum mengajukan Izin Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Konversi	-	-	1	-	-	-	1	2	1
5. Pemisahan <i>Spin off</i>	-	-	-	-	-	2	-	2	2
6. Kantor Bank Asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Merger & Akuisisi	2	-	-	-	-	1	3	6	3
8. Konsolidasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Perubahan Nama	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Penutupan/Pencabutan Izin Usaha bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Kegiatan Usaha Dalam Valas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Proses Perizinan Lainnya	3	-	1	-	3	-	8	15	7

3.3.2 Pengawasan Pasar Modal Syariah

Selama triwulan II-2017, OJK telah memberikan persetujuan kepada PT Indosurya *Asset Management* sebagai Pihak Penerbit DES. Sampai dengan akhir triwulan II-2017, terdapat 10 Pihak yang memperoleh persetujuan dari OJK sebagai Pihak Penerbit DES, yaitu:

1. PT CIMB Principal *Asset Management*
2. PT Manulife Aset Manajemen Indonesia
3. PT BNP Paribas *Investment Partners*,
4. PT Schrodgers *Investment Management* Indonesia,
5. PT Aberdeen *Asset Management*,
6. PT Bahana TCW *Investment Management*,
7. PT Mandiri Manajemen Investasi,
8. PT Maybank *Asset Management*,
9. PT Eastspring *Investments* Indonesia, dan
10. PT Indosurya *Asset Management*.

Selama periode triwulan II-2017, terdapat tiga Pihak Penerbit DES yang mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan DES per 31 Mei 2017 dan sedang dalam proses pengenaan sanksi.

3.3.3 Pengawasan IKNB Syariah

Selama periode laporan, OJK melakukan pengawasan terhadap 58 perusahaan perasuransian syariah dan menerbitkan empat Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Sementara (LHPLS) serta lima Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Final (LHPLF) terhadap Perusahaan Perasuransian syariah. OJK juga melakukan pemeriksaan *on-site* terhadap tiga Perusahaan Perasuransian syariah.

Terkait dengan pengawasan terhadap Lembaga Pembiayaan dan Industri Lembaga Jasa Keuangan Syariah Lainnya, OJK menerbitkan tiga LHPLS Perusahaan Pembiayaan Syariah, satu LHPLF Perusahaan Pembiayaan Syariah, dan satu LHPLF Perusahaan Penjaminan Syariah, serta melakukan pemeriksaan *on-site* terhadap lima Perusahaan Pembiayaan Syariah.

Berkaitan dengan layanan kelembagaan, OJK memberikan izin pembukaan unit usaha syariah dua perusahaan penjaminan, pemberian izin usaha pergadaian syariah, pemberian izin pembukaan tiga kantor cabang unit usaha syariah perusahaan pembiayaan, pengadministrasian pembukaan kantor di luar kantor pusat perusahaan asuransi syariah, pengadministrasian pengangkatan pimpinan unit syariah perusahaan asuransi, pencabutan izin satu unit usaha syariah perusahaan pembiayaan, dan pengadministrasian pengangkatan tenaga ahli perusahaan asuransi syariah.

Selama triwulan II-2017, OJK melakukan persetujuan atas 14 produk baru asuransi jiwa syariah, empat produk baru asuransi kerugian, pencatatan atas perubahan empat produk asuransi jiwa syariah. OJK melakukan uji kemampuan dan kepatutan terhadap satu direktur perusahaan penjaminan syariah, satu direktur perusahaan modal ventura syariah, satu komisaris perusahaan penjaminan syariah, satu komisaris perusahaan reasuransi syariah, dua dewan pengawas syariah perusahaan asuransi syariah, dua dewan pengawas syariah perusahaan penjaminan syariah, dan dua dewan pengawas syariah perusahaan pembiayaan syariah.

3.4 PENGEMBANGAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

3.4.1 Pengembangan Perbankan Syariah

Selama triwulan II-2017, OJK melaksanakan beberapa kegiatan untuk mengembangkan perbankan syariah antara lain sebagai berikut :

1. Kajian Tata Kelola dan Manajemen Risiko BPRS

Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan prinsip tata kelola pada BPRS, merumuskan aspek yang perlu dikembangkan dalam rangka implementasi tata kelola organisasi BPRS sesuai dengan

volume usaha BPRS serta mengidentifikasi dampak penerapan tata kelola organisasi BPRS yang ideal. Pada triwulan II-2017 telah dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan beberapa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Banten, Lampung, dan Bandung. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian proses pengumpulan data terkait penyusunan kajian Tata Kelola dan Manajemen Risiko untuk BPRS.

2. Kajian Pembentukan *Jakarta International Islamic Financial Centre* (JIIFC)

Kajian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi bentuk atau desain pusat keuangan syariah internasional yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Pada triwulan II-2017 ini, telah diselesaikan tinjauan pustaka mengenai perkembangan perbankan syariah di dunia dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

3. Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS) XVI

Dalam rangka mendorong perkembangan riset keuangan syariah khususnya di kalangan *civitas academica*, OJK dan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) akan menyelenggarakan kegiatan Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS) XVI pada 12-13 September 2017. Pada triwulan II-2017 tengah dilaksanakan kegiatan *Call for Paper* dengan jumlah *paper* yang masuk sebanyak 84 *paper*.

4. Kegiatan Kelompok Kerja Pemberdayaan Perbankan Syariah dalam Pengembangan Pertanian Organik di Indonesia 2017

Dalam rangka meningkatkan pembiayaan perbankan syariah di sektor strategis terutama sektor pertanian organik, OJK membentuk Pokja Pertanian Organik 2017. Pokja Pertanian Organik beranggotakan 24 perwakilan kementerian dan regulator, perbankan syariah, akademisi, dan komunitas pertanian organik.

Selama triwulan II-2017, dilaksanakan pemaparan profil-profil calon nasabah

potensial binaan dari lembaga pendamping yang menjadi anggota Pokja Pertanian. Pokja Pertanian Organik juga melakukan kunjungan ke desa binaan Pertanian Sehat Indonesia – Dompét Dhuafa yaitu Desa Kwajon, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Tujuan kegiatan tersebut untuk menggali informasi terkait pertanian organik khususnya padi dari hulu sampai hilir yang mencakup aspek produksi, tata niaga, dan potensi pembiayaan ke sektor pertanian organik.

5. *iB Research Grant Program 2017*

Pada triwulan II-2017, telah ditetapkan penerima *grant* dari *iB Research Grant Program 2017* dengan detail sebagai berikut:

Kategori S1

1. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Jakarta dengan judul penelitian Pengaruh *Adversity Quotient* dan Spiritualitas terhadap Kinerja Karyawan.
2. Mahasiswa Universitas Diponegoro dengan judul penelitian Konsep *Crowdfunding* Syariah Untuk Pengembangan Produk Perbankan Syariah Dari Perspektif *Shariah Compliance*.

Kategori S2

1. Mahasiswa Universitas Sebelas Maret dengan judul penelitian Pengembangan Modul Edukasi Literasi Keuangan Islam Untuk UMKM.
2. Mahasiswa Universitas Gadjah Mada dengan judul penelitian *Capital Buffer* dan Risiko Unik Bank Syariah (Studi Empiris Bank Syariah di ASEAN dan MENA).

Kategori S3

1. Mahasiswa Universitas Brawijaya dengan judul penelitian Peran *Islamic Banking Service Quality* (IBSQ) dalam Menciptakan Kebahagiaan Nasabah dan Retensi Nasabah Bank BUMN Syariah yang Dimediasi oleh Kepuasan Nasabah.

2. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul penelitian Optimalisasi Skema Bagi Hasil Sebagai Solusi Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Bank Syariah di Indonesia.

Penerima *grant* akan menyelesaikan penelitian tersebut sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh OJK.

6. Kajian Pembentukan APEX IT *Company* untuk BPRS

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan teknologi informasi (TI) bagi BPRS melalui pembentukan lembaga pengayom APEX IT *Company*, OJK melaksanakan Kajian Pembentukan APEX IT *Company* untuk BPRS. Kajian tersebut bertujuan untuk memetakan skema/model pengembangan TI bersama bagi BPRS dalam sebuah lembaga pengayom APEX IT *Company* serta mengidentifikasi dan mengelaborasi isu-isu strategis terkait pengembangan TI bersama tersebut.

Adapun kegiatan pengembangan pengawasan perbankan syariah yang dilakukan pada triwulan II-2017 antara lain sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan Pelatihan Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (LSMK BUS UUS) dalam rangka meningkatkan pemahaman petugas pelaporan dan meningkatkan kualitas data LSMK.
2. *Coaching Clinic* Pelaporan LSMK Bulanan BUS/UUS kepada Bank Umum Syariah (BUS) dan/atau Unit Usaha Syariah dalam rangka meningkatkan kualitas Data Pelaporan LSMK Bulanan BUS/UUS.

Selanjutnya, *output* dari proses *review* kebijakan dan standar serta hubungan kerjasama dengan pihak internasional dalam pengembangan perbankan syariah selama triwulan II-2017 adalah sebagai berikut :

1. Kajian *Review* Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Stimulus Perbankan Syariah)

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa berlaku POJK Nomor 12/POJK.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian dalam rangka Stimulus pada Agustus 2017, perlu disusun kajian mengenai dampak penerapan kebijakan tersebut. Kajian ini dilakukan sejalan dengan Kajian *Review* Stimulus Bank Umum Konvensional.

2. Kajian *Leveraging* Unit Usaha Syariah
Kajian ini bertujuan mendukung perkembangan industri perbankan syariah terkait dengan kewajiban UUS untuk melakukan *spin-off* pada 2023.
3. Kajian Dampak *Multilicense* Bagi BPRS
Penerapan ketentuan yang bersifat *one fits for all* bagi industri BPRS dirasakan tidak tepat lagi, karena terdapat kesenjangan (*gap*) aset dan permodalan yang cukup lebar dalam industri BPRS. Terkait hal tersebut, telah dilakukan *review* kajian terkait *multilicense* dan inventarisasi literatur terkait kajian tersebut.

7. Pengembangan Produk dan Edukasi Perbankan Syariah

Dalam rangka meningkatkan *awareness* dan pemahaman masyarakat terhadap perbankan/keuangan syariah, selama triwulan II-2017 telah dilakukan berbagai kegiatan antara lain :

1. Pelaksanaan Kampanye Aku Cinta Keuangan Syariah melalui kegiatan *Expo iB Vaganza* dan Keuangan Syariah Fair yang bertujuan untuk meningkatkan *outreach* nasabah baru dengan detail sebagai berikut :
 - a. *iB Vaganza* Medan yang diikuti oleh 17 BUS/UUS dan satu BPRS berhasil menambah 8.081 nasabah baru.
 - b. Keuangan Syariah Fair (KSF) Semarang yang terdiri dari 13 BUS/UUS, 19 IKNB Syariah, delapan Pasar

- Modal Syariah dengan perolehan sejumlah 7.310 nasabah baru.
- c. *iB Vaganza* Mataram yang diikuti oleh 13 BUS/UUS berhasil menambah 9.440 nasabah baru.
2. Pelaksanaan Sosialisasi dan Edukasi Perbankan Syariah kepada Komunitas Sosial Media Workshop *iB Blogger* bekerjasama dengan Kompasiana, antara lain :
 - a. *Workshop iB Blogger* di Semarang diikuti oleh 43 peserta
 - b. *Workshop iB Blogger* di Mataram diikuti oleh 68 peserta
 3. *Workshop* Regional Perbankan Syariah untuk Da'i, Pengurus Masjid di Kota Medan dengan tingkat pemahaman peserta mencapai 77,4%.
 4. *Workshop* Pembiayaan Sektor Prioritas Pertanian Organik melalui Perbankan Syariah. Adapun tingkat pemahaman peserta mencapai 93%.
 5. Olimpiade Perbankan Syariah untuk Sekolah Menengah Atas/Sederajat yang diikuti oleh sebanyak 34 tim.
 6. Kegiatan literasi dan sosialisasi perbankan dan keuangan syariah dalam bentuk penugasan sebagai narasumber berbagai forum diskusi dan edukasi, yaitu :
 - a. *Sharia Banking For Bussiness Matching* yang diselenggarakan oleh Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) di Batusangkar Sumatera Utara
 - b. Olimpiade Nasional Ekonomi Islam yang diselenggarakan oleh Universitas Gunadharma
 - c. Seminar Nasional Perkembangan Hukum Perbankan Syariah dan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama yang diselenggarakan oleh Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
 - d. Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah Lingkungan Peradilan Agama Seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI
 - e. *ToT* Keuangan Syariah bagi Pengurus Masjid dan Da'i Wilayah Provinsi Riau
 - f. Pelatihan Akad Perbankan Syariah yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Jawa Timur

3.4.2 Pengembangan Pasar Modal Syariah

1. Kajian Terkait Produk Investasi Syariah Berbasis Pertanian
Kajian Terkait Produk Investasi Syariah Berbasis Pertanian bertujuan mengidentifikasi produk investasi syariah di pasar modal yang digunakan sebagai sumber permodalan baru di sektor pertanian serta memperluas alternatif pembiayaan bagi sektor pertanian dan sarana investasi untuk investor.
2. Kajian Terkait *Bundling Product* dengan Keuangan Syariah Lainnya
Kajian ini bertujuan mengeksplorasi produk gabungan baru dengan sektor industri keuangan syariah lainnya sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan pasar modal syariah melalui inovasi produk investasi serta memberikan alternatif investasi bagi investor.
3. Kajian Terkait Lindung Nilai Syariah dalam Pasar Modal
Lindung nilai merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan untuk menghadapi risiko ketidakpastian di masa mendatang, terutama risiko pasar. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi lindung nilai syariah di pasar modal serta melihat aspek kesyariahan atas lindung nilai di Pasar Modal dan akad yang memungkinkan digunakan.
4. Penyusunan Kajian Lanjutan terkait Inisiasi UU tentang Efek Syariah
Kajian ini merupakan kajian lanjutan yang bertujuan untuk mengidentifikasi muatan isi yang akan dibahas dalam UU tentang Efek Syariah.

5. Kajian Terkait Proses Pernyataan Pendaftaran Efek Syariah
Kajian ini bertujuan sebagai landasan argumentasi mengenai urgensi revisi POJK Nomor 18/POJK/04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan sukuk, sehingga mendorong pengembangan sukuk korporasi melalui penyediaan regulasi yang jelas, mudah dipahami, efisien dan efektif, serta fleksibel.
6. Kajian Penyusunan Materi Pasar Modal Syariah dalam Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) bagi Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM)
Kajian ini bertujuan untuk menentukan bahan referensi dalam menyusun materi Pasar Modal Syariah dalam PPL bagi ASPM dan menetapkan standar kualifikasi bagi lembaga yang akan menyelenggarakan PPL bagi ASPM
7. Kajian terkait Perluasan Akses bagi Masyarakat untuk Berinvestasi di Produk Pasar Modal Syariah

Kajian ini bertujuan untuk menentukan strategi pengembangan pasar modal syariah melalui perluasan akses serta mengidentifikasi pihak-pihak yang berpotensi memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk berinvestasi di produk pasar modal syariah.

3.4.3 Pengembangan IKNB Syariah

Beberapa kegiatan sosialisasi dan *workshop* dilakukan untuk mengembangkan IKNB syariah antara lain sebagai berikut :

1. Sosialisasi IKNB Syariah dengan tema "Peluang dan Tantangan IKNB Syariah di Indonesia". Sosialisasi ini bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Tanjung Redeb.
2. *Workshop* Penyusunan Pelaporan Keuangan Asuransi Syariah



Manajemen Strategis dan Tata Kelola Organisasi



Manajemen Strategis dan Tata Kelola Organisasi



4.1 MANAJEMEN STRATEGI DAN KINERJA OJK

4.1.1 Pelaksanaan Siklus Manajemen Strategi dan Kinerja

OJK memiliki Sistem Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK) yang mengintegrasikan penyusunan dan penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta penilaian kinerja OJK. Siklus MSAK OJK terdiri dari empat tahap. Pada periode laporan, siklus MSAK berada pada tahap keempat yaitu evaluasi pelaksanaan *strategy map*, *scorecard*, realisasi RKA dan penilaian kinerja triwulan I-2017 melalui pengisian capaian masing-masing Satuan Kerja (Satker) pada Sistem Pengelolaan Kinerja (SIMPEL). Untuk memastikan pengelolaan kinerja dilakukan dengan tata kelola yang baik, telah disusun manual penghitungan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari masing-masing Satuan Kerja (Satker).

Pada periode laporan, OJK mulai melakukan evaluasi *Destination Statement* 2012 – 2017 untuk melihat sejauh mana pencapaian rencana jangka menengah OJK selama periode 2012 – 2017 serta apa hambatan dan tantangan yang dihadapi OJK ke depan. Proses evaluasi

Destination Statement 2012 – 2017 dilakukan melalui pelaksanaan *Board Retreat* I 2017 untuk mendapatkan masukan dan arahan atas pencapaian OJK selama ini serta hal-hal yang perlu menjadi perhatian pada penyusunan *Destination Statement* 2017 – 2022.

Untuk mendukung proses *monitoring* pencapaian kinerja, OJK mengintegrasikan Sistem Pengelolaan Kinerja (SIMPEL) dengan Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMARIO). Dengan integrasi ini, diharapkan risiko yang mempengaruhi pencapaian IKU dapat dimitigasi dengan baik. Pengembangan sistem juga dilakukan untuk mempermudah penyusunan Laporan Bulanan internal OJK melalui pengembangan Sistem Informasi Laporan Kegiatan Bulanan.

Sebagai bentuk akuntabilitas lembaga, OJK menerbitkan Laporan Triwulan I-2017 sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan OJK selama periode laporan. OJK juga menerbitkan Laporan Capaian Kinerja OJK 2012 – 2017 yang menginformasikan pencapaian OJK selama 2012 – 2017 baik dalam mendukung pengembangan sektor jasa keuangan, mendorong SJK dalam mendukung sektor prioritas pemerintah serta pengembangan kapasitas organisasi.

Grafik IV - 1 Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK)
(sesuai PDK No.1/PDK.01/2013)



4.1.2 Pelaksanaan Sasaran Strategis OJK

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, OJK memiliki *Strategy Map* 2017 yang di dalamnya terdapat tujuh Sasaran Strategis OJK yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Sektor Jasa Keuangan (SJK) yang Tangguh, Kontributif dan Inklusif
Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui indeks penetrasi SJK seperti target peningkatan kredit (Perbankan), pertumbuhan Emiten dan perusahaan publik (Pasar Modal) serta pertumbuhan premi asuransi, piutang pembiayaan, aset penjaminan dan aset dana pensiun (IKNB) serta melalui pengukuran indeks kesehatan SJK seperti rasio *Capital Adequacy Ratio* (Perbankan), Perusahaan Efek yang memenuhi persyaratan Modal Kerja Bersih Disesuaikan/MKBD (Pasar Modal), serta rasio tingkat kesehatan IKNB. Selain itu, Sasaran Strategis juga diukur melalui kenaikan Indeks Inklusi keuangan dan tingkat kepuasan *Stakeholder* terhadap kinerja OJK.
2. Mengembangkan SJK yang Kontributif
Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui tingkat kontribusi SJK pada sektor prioritas pemerintah, pengembangan *sustainable finance* dan peningkatan kualitas dan peran pelaku SJK.

3. Mengembangkan SJK yang Stabil
Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui tingkat penyelesaian Penguatan Protokol Manajemen Krisis, tindak pengawasan dalam rangka menciptakan IJK yang *resilient*, tingkat pelayanan perizinan terintegrasi, dan peningkatan kualitas *Surveillance* Sistem Keuangan.
4. Mengembangkan SJK yang inklusif
Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui pengembangan produk dan atau layanan keuangan dan mikro, tingkat pelaksanaan program Manfaat Balik kepada IJK dan *Stakeholder*, serta peran OJK terhadap peningkatan perekonomian dan pembangunan daerah.
5. Mendorong Akselerasi Pertumbuhan SJK Syariah
Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui tingkat pelaksanaan program akselerasi pertumbuhan syariah dan tingkat kualitas pelaksanaan *Outreach* SJK yang terintegrasi.
6. Meningkatkan Pengaturan SJK yang Selaras dan Terintegrasi
Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui tingkat penyelesaian penerbitan peraturan yang dapat meningkatkan SJK yang kontributif, stabil dan inklusif

4.2 AUDIT INTERNAL, MANAJEMEN RISIKO, DAN PENGENDALIAN KUALITAS

Implementasi *Combined Assurance* Demi Menguatkan *Governance* OJK

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik, OJK melakukan penguatan pengendalian internal melalui pelaksanaan *Combined Assurance* (CA) bertujuan untuk memastikan pencapaian yang tujuan strategis OJK secara efektif dan efisien. Untuk mendukung pelaksanaan CA, selama periode pelaporan, OJK melaksanakan audit dengan tema asurans terkait pengawasan sektoral.

Dari sisi pengendalian kualitas, reviu kualitas dilakukan melalui pendekatan analisis berdasarkan enam kategori atas tujuh tema ekspektasi *stakeholders*, sasaran kualitas, komitmen manajemen, sumber daya manusia, desain proses dan evaluasi kinerja serta program perbaikan. Analisis tersebut dimaksudkan untuk mengetahui proses bisnis yang memerlukan *improvement*. Selama periode laporan, terdapat tiga tema reviu kualitas yang menjadi fokus yakni penanganan gugatan penyidikan, perlindungan konsumen, pengembangan SJK syariah dan efektivitas, serta tata kelola OJK.

Dari sisi manajemen risiko, OJK melakukan reviu dengan tema inklusi keuangan. Reviu ini mengidentifikasi penyebab risiko lebih secara komprehensif, mengevaluasi penanganan mitigasi risiko peningkatan inklusi serta memberikan usulan untuk mengoptimalkan penanganan risiko untuk mengurangi level risiko dimaksud.

Mitigasi Risiko OJK Triwulan II-2017

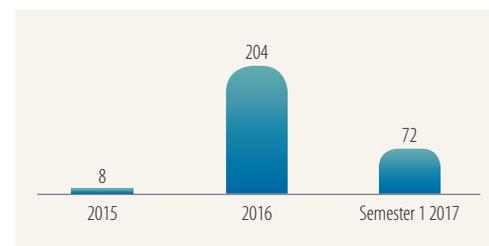
OJK menyusun Laporan Realisasi Mitigasi Risiko OJK Triwulan II-2017 di mana terdapat 17 risiko yang semuanya telah dimitigasi oleh Satker pemilik risiko. Tiap risiko dapat memiliki lebih dari satu rencana mitigasi risiko. Realisasi mitigasi risiko OJK dikategorikan dalam kriteria: Sudah Dilaksanakan, Sedang Dilaksanakan, dan Belum Dilaksanakan. Total rencana mitigasi risiko berjumlah 591 rencana mitigasi risiko. Sampai periode laporan, seluruh Satker di Kantor Pusat telah menyampaikan laporan tersebut. Sementara itu, untuk Kantor Regional dan Kantor OJK (KR/KOJK) sebanyak 35 KR KOJK (94%) telah menyampaikan progres realisasi mitigasi risiko melalui Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMARIO).

Program Pengendalian Gratifikasi (PPG)

OJK melaksanakan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) melalui beberapa program kegiatan antara lain melakukan pengelolaan laporan gratifikasi. Pada periode laporan, OJK

menerima dan mengelola 50 laporan gratifikasi sehingga total laporan gratifikasi yang telah dikelola sejak 2015 sejumlah 284 laporan dengan total nilai sebesar Rp2,3 miliar.

Grafik IV - 2 Jumlah Laporan Gratifikasi



OJK juga melakukan *enhancement* Sistem Informasi Pelaporan Gratifikasi "SiPeGa" yang bertujuan mengintegrasikan antara SiPeGa dengan *email* pelapor, *database* laporan gratifikasi, dan *dashboard* gratifikasi yang berisi galeri dan data statistik gratifikasi. Selanjutnya, OJK menargetkan perolehan sertifikasi ISO 9001:2015 dengan melakukan *Quality Internal Audit (QIA)*, *Document Review and Preparation* ISO 9001:2015 dan *Stage 1 and Stage 2 Audit* ISO 9001:2015. Berdasarkan hasil audit yang dilakukan, OJK dinyatakan lulus sertifikasi ISO 9001:2015.

Whistle Blowing System

Dalam rangka penguatan *governance*, OJK memiliki sistem pelaporan pelanggaran yaitu OJK *Whistleblowing System* (OJK WBS). OJK WBS adalah sistem untuk menyampaikan, mengelola dan menindaklanjuti laporan mengenai dugaan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Internal OJK. Jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan dalam OJK WBS adalah:

- Korupsi, kolusi dan nepotisme;
- Kecurangan (*fraud*), yaitu termasuk penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi;
- Pencurian;
- Pembiaran melakukan Pelanggaran;
- Benturan kepentingan; dan/atau
- Perbuatan melanggar hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal OJK.

Selama periode laporan, terdapat sembilan laporan sehingga jumlah laporan mencapai 165 laporan di mana 20 laporan sedang ditindaklanjuti dan 16 laporan yang selesai ditindaklanjuti

Kerjasama OJK dengan KPK dalam Pengelolaan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara)

Sampai akhir periode pelaporan tingkat kepatuhan pegawai OJK dalam menyampaikan LHKPN-nya sebanyak 99,92%. Selain itu demi menjaga kepatuhan pegawai OJK untuk menyampaikan LHKPN, dilakukan pembahasan rekomendasi penerapan sanksi administratif bagi pegawai yang tidak menyampaikan LHKPN.

4.3 RAPAT DEWAN KOMISIONER

Selama periode laporan, Rapat Dewan Komisioner (RDK) diselenggarakan sebanyak 15 kali yang membahas 13 topik yang bersifat laporan dan 44 topik dalam rangka pengambilan keputusan. Secara rutin RDK menerima laporan *Market Update* yang merupakan perkembangan terkini kondisi industri jasa keuangan dari sektor perbankan, pasar modal dan Industri Keuangan Non Bank.

Sejumlah kebijakan strategis telah ditetapkan di antaranya Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) tentang Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (DINFRA). Rancangan peraturan tersebut sebagai

dukungan OJK terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 tentang kebutuhan pembiayaan infrastruktur nasional.

RPOJK lain dari Pasar Modal yang diputuskan adalah RPOJK terkait dengan penawaran umum oleh emiten dengan aset skala kecil atau emiten dengan aset skala menengah. Tujuan ketentuan ini adalah dalam rangka mempermudah akses emiten skala kecil dan emiten skala menengah untuk memanfaatkan Pasar Modal sebagai sumber pendanaan.

Dari bidang perbankan beberapa RPOJK yang mendapatkan persetujuan adalah RPOJK tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio/NSFR*) Bagi Bank Umum. Sebagai bagian dari pengaturan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usaha perbankan, OJK memandang perlu untuk mendorong penguatan pengelolaan likuiditas perbankan di Indonesia. Dari bidang IKNB, untuk meminimalisasi beban perusahaan perasuransian dari kewajiban pelaporan yang terlalu banyak dan bersifat duplikasi, OJK memutuskan RPOJK tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian.

Sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi di OJK, RDK harus dilakukan dengan efektif dan efisien. Salah satu upaya untuk menjaga efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan RDK, Dewan Komisioner dapat menyelenggarakan forum lain yang dihadiri oleh Dewan Komisioner yaitu forum *Board Seminar*. Selama periode laporan, *Board*

Grafik IV - 3 Gambaran Topik yang Dibahas dalam Rapat Dewan Komisioner



Seminar diselenggarakan sebanyak delapan kali dengan jumlah topik yang dibahas sebanyak 20 topik. Seluruh peraturan yang telah dikeluarkan harus terlebih dahulu dibahas dalam forum ini. Selain peraturan, forum BS juga membahas hasil kajian mengenai strategi perlindungan konsumen, kajian pengembangan industri keuangan syariah, penataan organisasi, dan beberapa peraturan internal OJK.

Terkait pengelolaan opini publik, OJK memiliki program analisis kuantitatif dan kualitatif untuk setiap pemberitaan OJK di media. Analisis ini dilakukan melalui *monitoring* terhadap *tone* berita mengenai OJK dan Industri Keuangan secara umum, serta berita mengenai OJK

Total pemberitaan selama periode laporan, adalah 5.834 berita dengan rincian proporsi sebesar 4.752 berita positif, dua berita negatif, dan 1.080 pemberitaan netral.

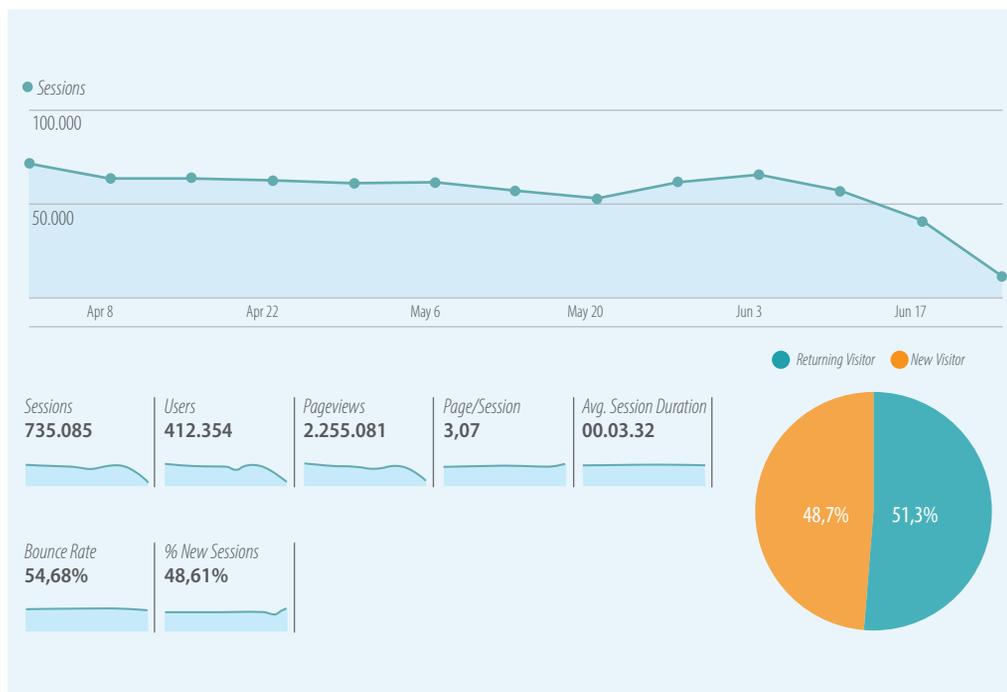
4.4 KOMUNIKASI

4.4.1 Komunikasi Informasi OJK

OJK melakukan serangkaian kegiatan komunikasi yang terintegrasi dan berkesinambungan melalui media cetak, elektronik dan digital, termasuk di antaranya *website* OJK dan media jejaring sosial seperti *Twitter*, *Facebook*, dan *Youtube*.

Terkait dengan relasi media, OJK menerbitkan 44 siaran pers. Penerbitan siaran pers bertujuan untuk mengumumkan program atau kegiatan OJK, peraturan terbaru OJK, atau isu lainnya terkait dengan pelaku Industri Jasa Keuangan yang memiliki nilai berita agar dapat dipublikasikan di media massa.

Grafik IV - 4 Statistik Pengunjung Website OJK



Tabel IV - 1 Judul Siaran Pers Triwulan II-2017

No	Judul Siaran Pers
1	Indonesia Change Management Forum (ICMF)
2	Dukung Perkembangan Industri Jasa Keuangan Syariah, OJK Launching Forum CEO Sikompak Syariah
3	Peresmian Desa Pandai OJK Di Kabupaten Kudus
4	OJK Gelar Dialog Dengan Pemangku Kepentingan di Daerah
5	OJK Dorong Pemda Manfaatkan Perbankan Syariah "Gelar Expo Islamic Banking - iB Vaganza Di Medan"
6	OJK Dorong Industri di Daerah Manfaatkan Pembiayaan Pasar Modal
7	OJK Dorong Masyarakat Punya Sikap Keuangan (<i>Financial Attitudes</i>)
8	Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Dalam Kondisi Terjaga
9	OJK Jalin Kerjasama Dengan Persyarikatan Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Malang
10	OJK Dorong Masyarakat Ikut Program Dana Pensiun
11	Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan pada Bidang Perzakatan Nasional, OJK Jalin Kerja Sama dengan Baznas
12	Kembangkan Fintech OJK Jalin Kerjasama dengan Australian Securities And Investments Commission (ASIC)
13	OJK Fasilitasi Rencana Pembukaan Kantor Cabang BNI di Melbourne Australia.
14	OJK Majukan Industri Dana Pensiun Untuk Tingkatkan Kesejahteraan Pegawai di Indonesia
15	Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Waspadai Penawaran Investasi di Media Online
16	Perluas Sistem Informasi Debitur, OJK Luncurkan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)
17	Kinerja Keuangan Syariah Indonesia Terus Meningkat
18	Perbaiki Perilaku Konsumen Penting Untuk Menuju Industri Keuangan yang Kuat
19	OJK Raih Penghargaan <i>Global Inclusion Awards 2017</i>
20	OJK-KKP Lakukan <i>Monitoring</i> Dan Evaluasi Program JARING di Malang
21	<i>Global Inclusion Awards 2017</i> , Pengakuan Internasional Untuk Program Inklusi Keuangan Indonesia
22	Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga Diiringi Perbaikan Intermediasi
23	OJK Intensif Sosialisasi Keuangan Syariah Ke Masyarakat "Gelar Keuangan Syariah Fair di Semarang"
24	OJK Minta Industri Jasa Keuangan Antisipasi Serangan "Ransomware Wannacry"
25	OJK Akan Terapkan Sistem <i>E-Registration</i> di Pasar Modal
26	Membangun Perilaku Cerdas Keuangan Untuk Kesejahteraan Rakyat "Peluncuran Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan (SPKK) Otoritas Jasa Keuangan Periode 2013 – 2027"
27	Program Aksi Pangan Beraksi di Lahan Pertanian Jagung di Dompu NTB
28	Tiga Entitas Penghimpunan Dana Dihentikan Satgas Waspada Investasi
29	Dorong Investasi Di Pasar Modal, OJK Luncurkan Galeri Investasi Mobile Di Timur Indonesia
30	Daftar Efek Syariah OJK Capai Angka Tertinggi:
31	Dorong Pengembangan UMKM, OJK Raih Penghargaan Walikota Surabaya
32	OJK Dorong <i>Fintech</i> Sinergi dengan Industri Jasa Keuangan
33	OJK tandatangani Kesepakatan Kerjasama dengan Banco Sentral ng Pilipinas
34	Kerjasama Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, OJK Gandeng Dua Universitas di Yogyakarta
35	OJK Tingkatkan Kampanye Keuangan Syariah di Momentum Ramadhan
36	OJK: Stabilitas Ekonomi Membutuhkan Kekuatan Pertahanan Jalin Kerjasama Dengan Universitas Pertahanan
37	Rancangan Peraturan OJK: Konglomerasi Keuangan Wajib Bentuk Perusahaan Induk
38	OJK Luncurkan Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah "Mewujudkan Indonesia Sebagai Pusat Keuangan Syariah Dunia"
39	Peluncuran Pembayaran Zakat Melalui Agen Laku Pandai oleh Presiden RI
40	Kerjasama <i>Sparkassenstiftung Fuer Internationale Kooperation</i> (SBFIC) dengan Asbada dalam Pengembangan Kredit Usaha Mikro
41	OJK Bentuk Forum Pakar <i>Fintech</i> (<i>Fintech Advisory Forum</i>)
42	OJK Beri Sanksi Pelanggaran Pasar Modal Kepada PT Inti Kapital Sekuritas dan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT AAA Sekuritas) dan Pihak-Pihak Terkait
43	OJK Percepat Waktu Perizinan Penerbitan Obligasi dan Sukuk Bagi Emiten Bank Melalui SPRINT
44	Jelang Lebaran, Satgas Waspada Investasi Hentikan Kegiatan Usaha tiga Entitas

OJK juga menyelenggarakan jumpa pers sebanyak 12 kali dengan detail sebagai berikut :

Tabel IV - 2 Jumpa Pers Triwulan II-2017

No	Nama Kegiatan
1	Indonesia Change Management Forum (ICMF)
2	OJK Dorong Industri di Daerah Manfaatkan Pembiayaan Pasar Modal
3	OJK Dorong Masyarakat Ikut Program Dana Pensiun
4	OJK Majukan Industri Dana Pensiun Untuk Tingkatkan Kesejahteraan Pegawai di Indonesia
5	Perluas Sistem Informasi Debitur, OJK Luncurkan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)
6	Kinerja Keuangan Syariah Indonesia Terus Meningkat
7	Perbaiki Perilaku Konsumen Penting Untuk Menuju Industri Keuangan Yang Kuat
8	<i>Global Inclusion Awards 2017</i> , Pengakuan Internasional Untuk Program Inklusi Keuangan Indonesia
9	OJK Intensif Sosialisasi Keuangan Syariah Ke Masyarakat "Gelar Keuangan Syariah Fair"
10	Membangun Perilaku Cerdas Keuangan Untuk Kesejahteraan Rakyat "Peluncuran Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan (SPKK) Otoritas Jasa Keuangan Periode 2013 – 2027"
11	OJK tandatangani Kesepakatan Kerjasama dengan Banco Sentral ng Pilipinas
12	Rancangan Peraturan OJK: Konglomerasi Keuangan Wajib Bentuk Perusahaan Induk

Sebagai upaya untuk menjaga relasi yang baik dengan media, OJK mengadakan *media gathering* dan *focus group discussion* (FGD) sebagai sarana tatap muka dan diskusi antara jurnalis dengan OJK. Kegiatan tersebut juga berfungsi sebagai sarana *agenda setting*. Pada kegiatan tersebut, OJK memberikan pendalaman materi mengenai isu-isu OJK yang perlu mendapatkan pemberitaan media di masa mendatang. Selama triwulan II-2017, OJK menyelenggarakan tiga *Focus Group Discussion*.

4.4.2 Kunjungan Instansi

OJK menerima kunjungan masyarakat (instansi, lembaga pendidikan, dan sebagainya) sebagai salah satu upaya untuk mengedukasi masyarakat terhadap peran dan fungsi OJK. Permintaan kunjungan dapat dilakukan dengan mengirimkan surat permohonan kunjungan beserta waktu dan topik yang diinginkan ke *email* visitojk@ojk.go.id. Sampai akhir periode laporan, OJK menerima 13 kunjungan instansi dengan total 1.034 peserta.

Tabel IV - 3 Kunjungan Instansi Triwulan II-2017

No.	Instansi	Peserta
1	Indosat Ooredoo	10
2	SMA Negeri 4 Sukabumi	53
3	UPH Surabaya Fakultas Hukum	40
4	SMK Al-Falah Tanjungjaya	43
5	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	75
6	Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga	92
7	SMK Bina Bangsa Mandiri Cikeas	59
8	Universitas Pendidikan Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis	30
9	Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga	100
10	Universitas Gunadarma	100
11	SMK Islam Randutonggal	130
12	Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan FEV Univ. Lampung	100
13	Universitas Padjajaran Magister Kenotariatan	102
14	Universitas Nurtanio Bandung	100

4.4.3 OJK TV

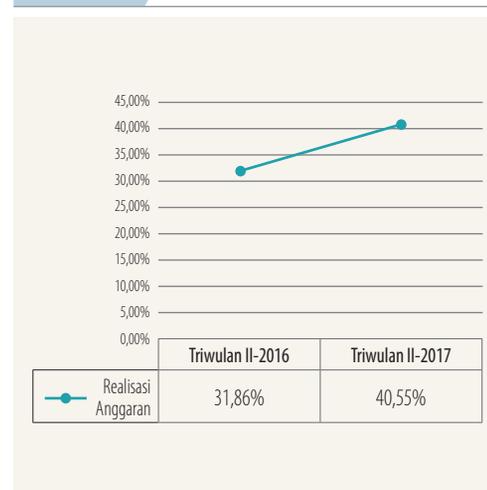
OJK TV merupakan salah satu media informasi terbaru OJK yang mendokumentasikan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan OJK yang dikemas dalam bentuk video dokumentasi dan peliputan berita (*news video*) yang didiseminasikan melalui kanal *Youtube* Jasa Keuangan. Selama periode laporan, OJK TV memproduksi sebanyak 34 liputan dan disaksikan oleh lebih dari 250.000 *viewers*.

4.5 KEUANGAN

4.5.1 Realisasi Anggaran

Sebagaimana pada 2016, Anggaran OJK 2017 sebesar Rp4.371,49 miliar dibiayai dari penerimaan pungutan OJK. Sampai akhir periode laporan, realisasi anggaran OJK sebesar Rp1.772,510 miliar (40,55%), meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan realisasi tersebut merupakan indikator bahwa OJK lebih optimal dalam menyusun anggaran dan melaksanakan program kerja yang telah disusun.

Grafik IV - 5 Realisasi Anggaran



Laporan Keuangan OJK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)



OJK menerima secara resmi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan OJK Tahun Anggaran 2016 yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hasil pemeriksaan opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk laporan keuangan 2016 merupakan yang keempat kalinya sejak OJK mulai beroperasi pada 2012.

OJK telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan sistem pengendalian

internal dan tata kelola perusahaan. Di antaranya adalah menyusun mekanisme kerja yang lebih efektif, menerapkan 4DX dalam *monitoring* proses pengadaan barang dan jasa di OJK, meningkatkan kompetensi pegawai mengenai proses pengadaan barang dan jasa, menyempurnakan kebijakan akuntansi, serta menyempurnakan sistem aplikasi keuangan dan sistem informasi penatausahaan aset.

4.5.2 Penyempurnaan Pengelolaan Keuangan

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan secara akuntabel, OJK secara aktif melakukan penyempurnaan peraturan dan sistem aplikasi keuangan. Sampai akhir periode laporan, penyempurnaan sistem aplikasi Keuangan yang dilakukan antara lain finalisasi Sistem Informasi Akuntansi OJK (SI-AUTO) dan penyusunan *blueprint* proses bisnis dan spesifikasi SI-AUTO tahap dua. SI-AUTO merupakan aplikasi yang mengintegrasikan empat aplikasi keuangan dan satu aplikasi penataan aset OJK saat ini.

Dengan pembangunan aplikasi SI-AUTO, diharapkan dapat mendukung pengelolaan keuangan OJK, antara lain melalui:

- (a) peningkatan kehandalan data keuangan;
- (b) pengelolaan keuangan yang terintegrasi dan sesuai dengan praktik umum (*best practice*); dan
- (c) simplifikasi proses bisnis pengelolaan keuangan.

Di samping itu, dalam rangka meningkatkan kualitas penganggaran, OJK telah melakukan persiapan implementasi *Performance Based Budgeting* (PBB), antara lain penjabaran (*alignment*) antara strategi kinerja dan anggaran dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran OJK 2018 serta penyusunan awal Standar Biaya OJK dengan pendekatan PBB.

4.6 SISTEM INFORMASI

OJK terus berupaya mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Demi terwujudnya tujuan tersebut, OJK terus melakukan pengembangan dan penyempurnaan sistem informasi antara lain:

4.6.1 Penguatan Sistem Informasi untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas Pokok

a) Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT)

SPRINT merupakan aplikasi perizinan berbasis *web* secara *end-to-end solution* dan adaptif, di mana LJK dapat melakukan registrasi perizinan dan pemantauan proses perizinan di OJK secara cepat dan transparan. Aplikasi ini dikembangkan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi waktu proses perizinan dan mengurangi frekuensi korespondensi serta memudahkan pihak eksternal dalam memantau proses permohonan perizinan. Pengembangan SPRINT pada 2017 difokuskan pada modul Dana Pensiun.

b) Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT)

SIPT bertujuan untuk membantu pengawas terintegrasi dalam melakukan analisis, menentukan keputusan terkait konglomerasi keuangan, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan serta standarisasi pelaksanaan tugas pengawasan. Pengembangan SIPT pada 2017 difokuskan pada modul *Financial Conglomerate Ratio*.

c) Sistem Aplikasi Pengawasan dan Monitoring

OJK mengembangkan sistem aplikasi untuk mendukung tugas pokok pengawasan dan *monitoring*. Pada periode laporan, sistem aplikasi yang berada pada tahap pengembangan antara lain: (a) Pengembangan Sistem Informasi *Risk Based Supervision* (SIRIBAS), (b) Pengembangan Sistem Informasi Penetapan Tarif Premi Asuransi (SIPETIR), (c) Pengembangan Sistem *Monitoring Data Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi* (SIKARIN), (d) Pengembangan Sistem Informasi Pasar Modal Terpadu (SIPM), dan (e) Pengembangan Sistem Informasi Perbankan.

Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

slik LAYANAN KEUANGAN **DALAM SEKALI KLIK**

KINI LAYANAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SLIK

? **SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan)** merupakan sistem informasi terpadu yang dikelola OJK digunakan untuk lembaga jasa keuangan di Indonesia untuk mendapatkan informasi data kredit dari debitur

Manfaat Akses Informasi SLIK

- Kebutuhan penyediaan fasilitas kredit
- Pengelolaan manajemen risiko
- Dalam rangka pemenuhan peraturan OJK

- Beroperasi paralel run dengan SID BI s/d Des 2017
- SLIK dapat diakses di slik.ojk.go.id

SID **slik**

Mulai 1 Januari 2018

SLIK Beroperasi Penuh Menggantikan peran SID (Sistem Informasi Debitur) atau BI Checking yang dikelola Bank Indonesia

www.ojk.go.id @OJKINDONESIA official.ojk Jasa Keuangan Download Aplikasi Otoritas Jasa Keuangan untuk Informasi Terkini seputar Industri Jasa Keuangan

SLIK dibangun untuk mengakomodasi kebutuhan industri, OJK, dan kebutuhan lembaga lain. Melalui SLIK, lembaga di bidang keuangan akan menyampaikan laporan debitur secara lengkap, akurat,

terkini, utuh, dan tepat waktu sehingga diharapkan kualitas informasi debitur dapat tetap terjaga. SLIK akan menerima pelaporan data debitur, fasilitas penyediaan dana, data agunan dan data terkait lainnya

dari berbagai jenis lembaga keuangan serta memberikan layanan informasi debitur yang dibutuhkan oleh lembaga keuangan, masyarakat, Lembaga Pengelolaan Informasi Perkreditan (LPIP), dan pihak-pihak lain. Informasi debitur dapat diakses untuk kebutuhan penyediaan fasilitas kredit, pengelolaan manajemen risiko dan dalam rangka pemenuhan peraturan OJK.

Proses pelaporan SLIK dilakukan secara *parallel run* bersamaan dengan pelaporan SID untuk periode bulan data Maret – November 2017. Untuk selanjutnya, pada 1 Januari 2018, Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) akan sepenuhnya menggantikan peran SID yang dikelola Bank Indonesia. Jumlah debitur yang akan dilaporkan ke dalam SLIK sebesar 96,4

juta debitur dan akan terus mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah pelapor SLIK.

Pelapor SLIK diproyeksikan akan terus meningkat seiring timbulnya kewajiban pada perusahaan pergadaian, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur yang akan menjadi pelapor dalam aplikasi SLIK. Sementara itu, Lembaga Keuangan Mikro, *Peer to peer lending*, serta Lembaga lain di luar LJK seperti Koperasi Simpan Pinjam dapat menjadi pelapor SLIK apabila telah memenuhi syarat dan mendapat persetujuan oleh OJK. Sebagai payung hukum pelaksanaan pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui SLIK, OJK menerbitkan POJK yang mengatur hal tersebut.



4.6.2 Penguatan Sistem Informasi untuk Meningkatkan Kapasitas Organisasi

OJK mengembangkan aplikasi internal yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas manajemen internal organisasi. Pada triwulan II-2017, sistem aplikasi yang dikembangkan antara lain: (a) Sistem Informasi Pelaporan Gratifikasi (SIPEGA), (b) Sistem Informasi Pembuatan Peraturan Perundang-undangan di OJK, (c) Sistem Informasi Akuntansi OJK (SI-AUTO) tahap 2, (d) Pengembangan Aplikasi Sistem Pengelolaan Kinerja (SIMPEL), (e) Sistem Informasi Pengelolaan Pekerjaan (SIPEKA), (f) Pengembangan *E-Procurement* OJK, dan (g) Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Terintegrasi (SAKTI).

4.7 LOGISTIK

Selain penguatan sistem informasi, OJK fokus pada kegiatan strategis terkait penyediaan fasilitas serta gedung kantor, baik di pusat maupun daerah.

4.7.1 Penyiapan Gedung Kantor Pusat

Terkait dengan penyediaan Gedung Kantor Pusat, sampai dengan akhir periode laporan, *progress* penyediaan Gedung Kantor Pusat OJK Terpadu telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain (i) mengumumkan prakualifikasi dalam rangka pelelangan paket meubelair gedung kantor pusat OJK, (ii) menyelesaikan konsep perancangan interior gedung kantor pusat OJK, serta (iii) melakukan *legal audit*, dan menyusun dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) untuk konsultan *engineering audit*.

4.7.2 Penyiapan Gedung Kantor Regional/OJK

Di daerah, Kantor Regional dan Kantor OJK yang telah menempati gedung kantor sendiri baik secara sewa maupun pinjam pakai aset milik pemerintah daerah hingga periode laporan adalah sebanyak 24 Kantor, yakni:

Tabel IV - 4 Kantor Regional dan Kantor OJK yang Telah Menempati Gedung Sendiri

1.	Kantor Regional 2 Jawa Barat (Bandung)
2.	Kantor Regional 3 Jawa Tengah & D.I.Y (Semarang)
3.	Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua (Makassar)
4.	Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan (Palembang)
5.	Kantor Regional 8 Bali & Nusa Tenggara (Denpasar)
6.	Kantor Regional 9 Kalimantan (Banjarmasin)
7.	Kantor OJK Tasikmalaya (Tasikmalaya)
8.	Kantor OJK Prov. D.I.Y (Yogyakarta)
9.	Kantor OJK Solo (Solo)
10.	Kantor OJK Tegal (Tegal)
11.	Kantor OJK Purwokerto (Purwokerto)
12.	Kantor OJK Jember (Jember)
13.	Kantor OJK Kediri (Kediri)
14.	Kantor OJK Prov. Kepulauan Riau (Batam)
15.	Kantor OJK Prov. N.A.D (Banda Aceh)
16.	Kantor OJK Prov. Sulawesi Tenggara (Kendari)
17.	Kantor OJK Prov. Sulawesi Tengah (Palu)
18.	Kantor OJK Prov. Maluku (Ambon)
19.	Kantor OJK Prov. Papua (Jayapura)
20.	Kantor OJK Prov. Lampung (Bandar Lampung)
21.	Kantor OJK Prov. Jambi (Jambi)
22.	Kantor OJK Prov. Bengkulu (Bengkulu)
23.	Kantor OJK Prov. Nusa Tenggara Timur (Kupang)
24.	Kantor OJK Prov. Kalimantan Tengah (Palangkaraya)

4.7.3 Pengembangan Pengaturan dan Sistem Logistik

Dari sisi pengaturan kelogistikan, selama periode laporan OJK menetapkan Ketentuan Pedoman Penatausahaan Barang Milik OJK (BMOJK) dan Barang Milik Pihak Lainnya (BMPL) yang bertujuan untuk mengetahui dengan detail tentang Aset yang dimiliki oleh OJK. OJK juga melakukan sosialisasi awal melalui *video conference* kepada seluruh Satker pelaksana penatausahaan di kantor pusat dan kantor daerah. Untuk teknis penatausahaan barang, saat ini telah terintegrasi dalam aplikasi Si-AUTO walaupun pengolahan data masih bersifat *bridging* dengan aplikasi SISPUAS,

4.8 SDM DAN TATA KELOLA ORGANISASI

4.8.1 Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Selama periode laporan, OJK melakukan beberapa kegiatan terkait Sumber Daya Manusia antara lain :

1. Pemenuhan Pegawai

Pemenuhan pegawai OJK dilakukan melalui proses internal dan eksternal. Pada periode laporan, OJK melakukan pemenuhan baik promosi maupun mutasi untuk beberapa level jabatan dengan adanya promosi dimaksud, diharapkan pengisian lowongan jabatan dapat terpenuhi sehingga pekerjaan-pekerjaan di Satker OJK dapat berlangsung lebih baik. Sementara itu, mutasi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan organisasi.

2. *Mapping* penempatan Pegawai Calon Staf Angkatan 3 Tahun 2017 (PCS 3)

Sehubungan dengan pelaksanaan orientasi kerja PCS angkatan 3 yang akan berakhir, OJK kembali melakukan *mapping* atas penempatan PCS dimaksud. Hal ini diharapkan akan semakin meningkatkan kesesuaian penempatan pegawai sesuai dengan latar belakang pendidikan maupun pengalaman sehingga akan semakin membantu Satker untuk dapat memberikan kontribusi yang maksimal.

3. Pelaksanaan Pengisian Rencana Kerja Pegawai Tahun 2017

Penilaian kinerja OJK dilakukan melalui tiga tahapan proses, yang didahului dengan melakukan Perencanaan Kinerja, dilanjutkan *monitoring* pada pertengahan periode, dan evaluasi pada akhir periode. Selain itu, pengisian penilaian kinerja pegawai sudah dapat dilakukan secara *online* melalui modul penilaian kinerja di SIMFOSIA.

4. Penyampaian Perhitungan Hak dan Kewajiban Pegawai yang Memasuki BUP

Sebagai bentuk peningkatan layanan kepada Satker dan Pegawai di Satker, OJK memberikan informasi tentang hak dan kewajiban pegawai yang akan pensiun dengan mendatangi para pegawai tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan apresiasi tinggi kepada para pegawai yang akan pensiun.

4.8.2 Pengembangan Organisasi

Pada periode laporan, OJK melakukan beberapa perubahan dalam struktur organisasi yakni:

A. Pembentukan Organisasi Pengelola Fungsi *Fintech* dan Inovasi Keuangan Digital

Dalam rangka menjalankan fungsi pengaturan, perizinan, dan pengawasan terkait Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) dan ekosistemnya, OJK secara khusus membentuk Unit Kerja yang fokus terhadap hal tersebut yakni Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan *Fintech* dan Direktorat Inovasi Keuangan Digital.

B. Penataan Organisasi Otoritas Jasa Keuangan Fungsi Pengelolaan Data dan Informasi Statistik Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi

OJK membentuk Direktorat Manajemen Data dan Informasi Statistik SJK Terintegrasi yang berfungsi melakukan pengelolaan data dan informasi statistik SJK terintegrasi. Adapun tujuan penataan tersebut antara lain: (i) Meningkatkan kualitas data dan laporan publikasi statistik OJK; (ii) Mengintegrasikan data statistik antar sektor dan (iii) Memperjelas mekanisme koordinasi antar sektor dalam proses Pengelolaan Data Statistik di OJK.

4.8.3 Kebijakan Sumber Daya Manusia

Pada periode laporan, OJK menerbitkan dua ketentuan terkait SDM OJK, yang mengatur mengenai:

A. Fasilitas Pemeliharaan Kesehatan Pegawai OJK

OJK memberikan fasilitas pemeliharaan kesehatan berupa pelayanan fasilitas pemeliharaan kesehatan terpadu yang efektif dan efisien dengan pola *managed care* bagi Pegawai OJK beserta keluarga yang memenuhi persyaratan sebagai keluarga yang ditanggung OJK. Jenis fasilitas pemeliharaan kesehatan berupa pemeriksaan, pengobatan dan perawatan yang meliputi Rawat Jalan, Rawat Inap, Imunisasi, Alat Kesehatan dan Pemeriksaan Kesehatan Lengkap.

B. Sistem Pengembangan SDM OJK

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), OJK memberikan pengembangan SDM secara terfokus dan terencana untuk menumbuhkan motivasi Pegawai agar memberikan kontribusi yang lebih baik bagi OJK. Pengembangan dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengembangan.

Jenis- jenis program pengembangan SDM adalah:

1. Program pengembangan kepemimpinan (*leadership development program*);
2. Program peningkatan kompetensi (*competency development program*);
3. Program pendidikan formal (*graduate/post graduate Program*);
4. Program pengenalan untuk calon Pegawai (*onboarding program*);
5. Program internalisasi kultur;
6. Program bimbingan (*mentoring*); dan
7. Program penugasan (*assignment*).

4.8.4 Sistem Informasi Sumber Daya Manusia

Selama periode laporan, telah dilakukan beberapa pengembangan sistem terkait sumber daya manusia dengan detail sebagai berikut :

- A. Penyelesaian pengembangan SIMFOSIA

Pengembangan SIMFOSIA yang dikembangkan memiliki fungsi antara lain:

 1. Modul Data Kepegawaian, *Employee Self Service*, Manajemen Organisasi, Pengembangan SDM dan Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia;
 2. *Smart HR*, yang merupakan sistem aplikasi SDM OJK untuk layanan SDM dan pencarian data pegawai dalam versi aplikasi perangkat *smart phone*;
 3. *Online Learning System*.

B. Mengembangkan Pusat Informasi Layanan *Online* SDM (*minisite* SDM)

Dalam rangka peningkatan kualitas layanan SDM kepada *stakeholder* terutama layanan data dan Informasi SDM serta untuk meningkatkan program sosialisasi kebijakan melalui media *online*, OJK mengembangkan pusat Informasi layanan *online* SDM (*minisite* SDM) di halaman *web Pointer* OJK yang baru. Menu pusat layanan *online* SDM, terdiri dari: Infografis, Ketentuan SDM, Hubungi SDM, SDM Menjawab, dan Informasi untuk Pegawai baru.

Selain dari pusat Informasi layanan *online* SDM, OJK juga mempersiapkan layanan *call centre* terkait SDM melalui telepon dan email. *Call centre* terpusat di satu nomor telepon dan satu *email*, dan apabila ada pertanyaan dan permasalahan akan diteruskan ke *person in charge* (PIC) masing-masing unit kerja untuk penyelesaian.

4.9 OJK INSTITUTE

Sejalan dengan tema budaya kerja 2017 yaitu "Bangga Menjadi Insan OJK", program pengembangan SDM difokuskan pada penguatan/pembentukan karakter dan disusun dalam mencapai sasaran program transformasi OJK 2014 – 2017, dengan tetap mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaannya.

Adapun program pengembangan SDM yang akan dilaksanakan OJK *Institute* selama 2017 meliputi: (1) Program Pengembangan Kepemimpinan; (2) Program Pengembangan Kompetensi; (3) Program Pendidikan Formal; (4) Program Pengenalan untuk Calon Pegawai; (5) Program Internalisasi Kultur; (6) Program Bimbingan; dan (7) Program Penugasan Pegawai. Selain itu, OJK *Institute* juga melaksanakan kegiatan Asesmen Kepemimpinan, *recycling program* dalam bentuk *capacity building*, serta Kaji ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk Sektor Jasa Keuangan.

4.9.1 Program Pengembangan Kompetensi

Program Pengembangan Kompetensi (PPK) pegawai baik untuk kompetensi teknis (*hard skill*) maupun perilaku (*soft skill*), berdasarkan kebutuhannya dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Program Sertifikasi Pengawas Sektor Jasa Keuangan (SJK)
OJK telah menyelenggarakan Program Sertifikasi Pengawas SJK untuk level 1 sebanyak tiga *Batch* dengan total peserta 119 orang.
- b. PPK Luar Negeri (PPKLN)
Untuk PPKLN, sepanjang periode laporan, tercatat 19 pegawai telah melaksanakan pengembangan di luar negeri untuk pengembangan kompetensi teknis (*hard skill*) dan satu pegawai mengikuti pengembangan kompetensi kepemimpinan (*leadership*).

- c. PPK Dalam Negeri (PPKDN)
 - PPKDN dalam bentuk *Non-In House Training* (Non-IHT)
PPKDN Non-IHT, tercatat sebanyak 131 pegawai mengikuti program pengembangan kompetensi, yang terdiri dari 104 pegawai telah melaksanakan program pengembangan kompetensi teknis, dan 27 pegawai untuk program pengembangan kompetensi perilaku.
 - PPKDN dalam bentuk *In-House Training* (IHT)
OJK *Institute* melaksanakan 28 IHT dengan peserta secara keseluruhan mencapai 1.123 pegawai.

4.9.2 Program Pendidikan Formal

Program Pendidikan Formal merupakan bentuk pengembangan SDM pada jenjang pendidikan formal yang diberikan kepada pegawai OJK potensial yang telah memenuhi kriteria, baik untuk jenjang pendidikan Strata-2 maupun Strata-3. Pada triwulan II-2017, tercatat satu orang pegawai mengikuti skim-2 (beasiswa dari pihak lain dengan *top up* fasilitas dari OJK), yaitu atas beasiswa Australia Awards Scholarship (AAS) pada Program *Master of Commerce* di New South Wales University, Sydney, Australia.

4.9.3 Program Pengenalan Calon Pegawai

Presentasi dan penilaian makalah orientasi sebagai tugas akhir Program Pendidikan Calon Staf Otoritas Jasa Keuangan (PCS-OJK) Angkatan III telah selesai dilaksanakan. Sebagai penutup rangkaian Program PCS-OJK Angkatan III, akan dilaksanakan pelantikan pada periode selanjutnya.

4.9.4 Program Penugasan

Terkait pelaksanaan program penugasan, OJK *Institute* telah menugaskan delapan pegawai untuk mengikuti program *Secondment/ Internship* dengan rincian empat orang

mengikuti *Secondment Program on Regulation and Supervision on Financial Market Infrastructures (including supervision on Market Operator, Market Participants and Derivative Market)* dan empat orang mengikuti *Internship Program "Investment Management Product Registration and Investment Manager Licensing"*

4.9.5 Program Peningkatan Kompetensi SDM Sektor Jasa Keuangan

Selama periode laporan, terdapat lima *workshop* yang telah diselenggarakan dengan jumlah peserta sebanyak 333 peserta, yaitu *Workshop IT dan RBBR bagi BPD, Business Professional Competencies Training, Workshop Penyusunan Laporan Keuangan bagi Perusahaan Asuransi Syariah, Pelatihan Penaksir Level 1 bagi Pegadaian Swasta, Workshop Manajemen Risiko, Tata Kelola dan IT bagi BPR/BPRS.*

4.9.6 Program Asesmen Kepemimpinan

Pada periode laporan, OJK melakukan asesmen kepemimpinan bagi seluruh kepala kantor Regional dan Kantor OJK sebanyak 35 orang.

4.9.7 Program Kaji Ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

Selama periode laporan, OJK menyelesaikan program kaji ulang SKKNI Sektor Perbankan yang telah selesai dilaksanakan hingga Konvensi Nasional adalah bidang Audit Intern Bank dan bidang *Wealth Management.*

4.9.8 Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian di OJK

Sebagai salah satu bentuk manfaat balik kepada masyarakat/pelajar/mahasiswa dalam rangka memberikan kesempatan magang/penelitian di OJK, selama triwulan II-2017 OJK

telah memberikan kesempatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) kepada 96 pelajar/mahasiswa dan telah membantu mahasiswa yang melakukan penelitian di Satker terkait untuk 82 penelitian skripsi/tesis/disertasi.

4.10 MANAJEMEN PERUBAHAN

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi OJK serta *Destination Statement* 2017, OJK menyelesaikan sejumlah program dan melaksanakan kegiatan terkait fungsi pengelolaan inisiatif strategis, manajemen perubahan dan budaya organisasi selama 2017. Sesuai *Roadmap* dan *Action Plan* Program Transformasi Manajemen Perubahan 2014-2017, seluruh kegiatan difokuskan dalam rangka memenuhi tema "Bangga menjadi Insan OJK".

OJK menetapkan tiga program budaya kerja yaitu Program OJK Melayani, Program OJK Peduli, dan Program OJK Inovatif. Program budaya tersebut dirancang untuk mendukung *Roadmap* OJKway 2017 yaitu menjadikan insan OJK sebagai *brand ambassador* yang bangga terhadap institusinya. Adapun tujuan program OJK Melayani adalah untuk membangun perilaku cepat tanggap dan menerapkan pelayanan prima kepada *stakeholders*. Program OJK Peduli dicanangkan untuk meningkatkan kepedulian insan OJK terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar melalui kegiatan sosial dan juga sebagai wadah/sarana untuk mengkampanyekan OJK. Program OJK Inovatif mendorong insan OJK untuk membuat terobosan baru, perbaikan proses kerja dan mutu produk Satker sehingga menumbuhkan rasa bangga karena dapat memberikan pelayanan prima kepada *stakeholder* dan berkontribusi lebih dengan cara menciptakan inovasi-inovasi baru.

4.10.1 Kultur dan Manajemen Perubahan

Kegiatan program budaya dan perubahan yang telah berhasil dijalankan selama triwulan II-2017 adalah:

1. *Indonesia Change Management Forum II 2017 – Managing Disruption*

Indonesia *Change Management Forum* (ICMF) adalah forum komunikasi antar-fungsi *change management* berbagai institusi di Indonesia yang diprakarsai oleh OJK. ICMF dibentuk oleh formatur berbagai institusi Sektor Jasa Keuangan. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong organisasi agar lebih berinovasi sesuai dengan tuntutan lingkungan; memberikan ruang kerja sama antar institusi untuk saling belajar dan berdiskusi mengenai berbagai metode melakukan manajemen perubahan dan *insights* terkait implementasinya; dan menjadi *benchmark* bagi pihak-pihak yang ingin mempelajari teori manajemen perubahan dibandingkan dengan implementasinya sehingga memajukan ilmu manajemen perubahan.

Kegiatan ICMF berupa seminar diselenggarakan dengan tema "*Managing Disruption: Change or Die...!!*", di mana seminar tersebut mendiskusikan perubahan yang muncul sebagai dampak dari kemajuan teknologi digital yang menyebabkan *disruption* dalam bisnis/organisasi, serta menjawab pertanyaan bagaimana kita bersikap terhadap berbagai perubahan yang dipicu oleh kehadiran teknologi digital yang semakin cepat dan semakin canggih.

2. *Performance Festival 2017*

Kegiatan *Performance Festival (Perfest)* OJK 2017 diselenggarakan dalam rangka membangun *awareness* Pimpinan Satker dan Insan OJK terhadap Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK) serta meningkatkan pemahaman setiap Insan OJK atas kontribusi mereka terhadap pencapaian IKU Satker dan Sasaran Strategis OJK.

3. *Perencanaan Sumber Daya I 2017*

Forum sumber daya menjadi ajang komunikasi dan *monitoring* di antara Satker perencana sumber daya di OJK. Fungsi forum tersebut ialah untuk merencanakan pengembangan seluruh sumber daya agar lebih efektif dan terintegrasi.

4.10.2 *Monitoring Program Budaya*

Di bidang *monitoring* program budaya, OJK menjalankan sejumlah kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan dan memantau *progress* implementasi program-program perubahan dan budaya yang dilaksanakan, di antaranya yaitu:

1. *Monitoring Program Budaya 2017*

OJK memberikan kesempatan kepada masing-masing Satker untuk melakukan penilaian pelaksanaan program budaya melalui metode *self-assessment* yang didukung bukti-bukti pelaksanaan program budaya. Penilaian dan pengumpulan bukti-bukti tersebut dilakukan secara *online* melalui aplikasi *dashboard monitoring system* (ojkway.com) dan dapat diakses oleh seluruh Satker.

2. *On-Site Monitoring, Cross monitoring, dan Konsultasi*

Dalam rangka memastikan berjalannya program budaya, OJK bekerjasama dengan pihak eksternal melaksanakan kunjungan langsung (*onsite monitoring*) ke Satker di Kantor Pusat maupun Kantor Regional dan Kantor OJK. Pelaksanaan *onsite monitoring* ini untuk mengetahui validitas data laporan *self assessment* yang disampaikan Satker terkait pelaksanaan program budaya.

3. *Employee Opinion Survey (EOS) 2017*

Pada periode laporan, OJK telah melaksanakan EOS 2017 untuk mengetahui tingkat keterikatan Insan OJK dengan OJK sebagai organisasinya. Total responden EOS sebanyak 3.465 insan OJK dengan total pegawai yang mengisi kuesioner sejumlah 2.823 responden /81,5%. Berdasarkan hasil survei yang dikelompokkan menjadi lima level, tingkat keterikatan pegawai OJK terhadap organisasi di level "Komitmen Sepenuh Hati" mencapai 30,4%, level "Kerjasama yang Menyenangkan" mencapai 46,1%, level "Patuh dan Mau" mencapai 20,1%, level "Kepatuhan dengan

Kedongkolan” mencapai 3%, level “Berontak atau Berhenti” mencapai 0,4%.

4.10.3 Media Komunikasi Budaya dan Perubahan

Di bidang media komunikasi budaya, OJK telah melakukan sejumlah pengembangan dan penyempurnaan media kampanye, di antaranya:

1. Penerbitan Majalah Integrasi
Majalah Integrasi merupakan media komunikasi internal OJK yang diterbitkan untuk mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan terkait program perubahan dan budaya serta pencapaian-pencapaian yang telah diraih OJK dalam periode penerbitan. Selama periode laporan, OJK menerbitkan tiga edisi Majalah Integrasi dengan tema “Inovasi Disruptif”, “Membangun Kinerja Prima”, dan “Melanjutkan Sukses OJK”.
2. *Minisite* dan Aplikasi *Mobile OJKWay*
Website OJKWay (<http://ojkway.ojk.go.id>) dikembangkan dengan tujuan memberikan *platform* kepada Insan OJK untuk berinteraksi dengan sesama pegawai, berkomunikasi dengan pimpinan, *sharing* kegiatan budaya, dan membaca berita dan Majalah Integrasi secara digital.
3. Video Pesan Anggota Dewan Komisioner OJK melakukan penyebaran Pesan Ketua Dewan Komisioner dan Pesan Anggota Dewan Komisioner melalui *e-mail blast* ke seluruh Insan OJK. Video tersebut bertujuan mendorong para Insan OJK agar lebih efektif dan efisien dalam bekerja untuk para pemangku kepentingan.
4. Video Pedoman Perilaku 2017
Pada 2016 dibuat buku pedoman perilaku insan OJK dengan tujuan agar setiap insan OJK pada pelaksanaan tugasnya dapat menjunjung tinggi nilai-nilai OJK yaitu berintegritas, profesional, bersinergi, inklusif dan visioner dalam bekerja. Pada periode laporan, OJK melakukan komunikasi dan sosialisasi melalui media video *motion* grafis ke seluruh pegawai melalui media sosial.
5. Pengembangan Sosial Media OJK
Pada triwulan II-2017 OJK terus menggunakan Media sosial untuk mengkampanyekan nilai-nilai strategis OJK dan menyampaikan program transformasi budaya yang tengah dilaksanakan di OJK.

Akronim

AAJI	: Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia
AAS	: Australia Awards Scholarship
AASI	: Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia
AAUI	: Asosiasi Asuransi Umum Indonesia
ABIF	: ASEAN Banking Integration Framework
ACIA	: ASEAN Comprehensive Investment Agreement
ACKS	: Aku Cinta Keuangan Syariah
ADK	: Anggota Dewan Komisioner
AFAS	: ASEAN Framework Agreement on Services
AHM	: Anugerah Media Humas
AIMRPK	: Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas
AML	: Anti Money Laundering
APERD	: Agen Penjual Efek Reksa Dana
APRA	: Australia Prudential Regulatory Authority
ASBANDA	: Asosiasi Bank Pembangunan Daerah
ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations
ASIC	: Australia Securities and Investment Commission
ATIGA	: ASEAN Trade in Goods Agreement
ATISA	: ASEAN Trade In Services Agreement
ATM	: Automatic Teller Machine
ATMR	: Aset Tertimbang Menurut Risiko
AUTP	: Asuransi Usaha Tani Padi
BAE	: Biro Administrasi Efek
BAMPPPI	: Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia
BAPMI	: Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia
BAVI	: Badan Arbitrase Ventura Indonesia
BEI	: Bursa Efek Indonesia
BI	: Bank Indonesia
BIN	: Badan Intelijen Negara
BMAI	: Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia
BMDP	: Badan Mediasi Dana Pensiun
BMPP	: Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan
BMPPI	: Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia
BMT	: Baitul Mal Wat Tamwil
BNP2TKI	: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
BNSP	: Badan Nasional Sertifikasi Profesi
BOPO	: Beban Operasional Pendapatan Operasional
BPD	: Bank Pembangunan Daerah
BPKP	: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
BPK-RI	: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
BPR	: Bank Perkreditan Rakyat
BRC	: BPD Regional Champion
BS	: Board Seminar
BSA	: Basic Saving Account
BUK	: Bank Umum Konvensional

BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUS	: Bank Umum Syariah
CA	: Combined Assurance
CBRC	: China Banking Regulatory Commission
CDD	: Customer Due Diligence
CFT	: Combating the Financing of Terrorism
CKPN	: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
CR	: Cash Ratio
CRM	: Customer Relationship Management
CTKI	: Calon Tenaga Kerja Indonesia
DCC	: Data Center Collocation
DES	: Daftar Efek Syariah
DFSA	: Dubai Financial Service Authority
DJPU	: Direktorat Jendral Pengelola Utang
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPK	: Dana Pihak Ketiga
DPLK	: Dana Pensiun Lembaga Keuangan
DPPK PPIP	: Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti
DPPK PPMP	: Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DRC	: Disaster Recovery Center
EBA-SP	: Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi
EDC	: Electronic Data Capture
Eduwan	: Edukasi Wartawan
ETP	: Electronic Trading Platform
FAPM	: Forum Akuntan Pasar Modal
FGD	: Focus Group Discussion
FKMM	: Forum Koordinasi Makroprudensial-Mikroprudensial
FKSSK	: Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan
FREKS	: Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah
FSA	: Financial Services Agency
FSAP	: Financial Sector Assessment Program
FSC	: Financial Service Commission
FSS	: Financial Supervisory Service
FTA	: Free Trade Agreement
GCG	: Good Corporate Governance
GeNTa PM	: Gerakan Nasional Cinta Pasar Modal
GIZ	: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
GMRA	: Global Master Repurchase Agreement
GRC	: Governance Risk and Compliance
HKHPM	: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
HMETD	: Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
ICMA	: International Capital Market Association
IDB	: Islamic Development Bank
IFAC	: International Federation of Accountant
IFAR	: Investasi Terhadap Total Aset
IFC	: International Finance Corporation

IFCC	: Integrated Financial Customer Care
IFN	: International Finance News
IFSB	: Islamic Financial Services Board
IGBF	: Indonesia Government Bond Futures
IHSG	: Indeks Harga Saham Gabungan
IJEPA	: Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement
IJK	: Industri Jasa Keuangan
IKI	: Indikator Kinerja Individual
IKNB/NBFI	: Industri Keuangan Non Bank/Non Bank Financial Industry
IKU/KPI	: Indikator Kerja Utama/Key Performance Indicators
ILM	: Iklan Layanan Masyarakat
IMF	: International Monetary Fund
INDOBeX	: Indonesia Bond Indexes
IOSCO	: International Organization of Securities Commission
IRR	: Integrated Risk Rating
IS	: Inisiatif Strategis
JARING	: Jangkau, Sinergi, dan Guideline
JII	: Jakarta Islamic Index
JPSK	: Jaring Pengaman Sistem Keuangan
KDK	: Keputusan Dewan Komisiner
Kemenaker	: Kementerian Ketenagakerjaan
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
Kemendesa	: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
KI	: Kredit Investasi
KIK	: Kontrak Investasi Kolektif
KK	: Kredit Konsumsi
KKB	: Kredit Kendaraan Bermotor
KKP	: Kementerian Kelautan dan Perikanan
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KMK	: Kredit Modal Kerja
KOINKU	: Kompetisi Inklusi Keuangan
KOJK	: Kantor OJK
KPD	: Kontrak Pengelolaan Dana
KPJKS	: Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah
KPMM/CAR	: Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum/Capital Adequacy Ratio
KPMR	: Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
KPPU	: Komisi Pengawasan Persaingan Usaha
KPR	: Kredit Pemilikan Rumah
KR	: Kantro Regional
KSEI	: Kustodian Sentral Efek Indonesia
KUB	: Kelompok Usaha Bersama
KYC	: Know Your Customer
KYFC	: Know Your Financial Conglomerates
LAPS	: Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
LAPSPI	: LAPS Perbankan
LAPSPI	: Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia
LDR	: Loan to Deposit Ratio
LJK	: Lembaga Jasa Keuangan

LJKNB	: Lembaga Jasa Keuangan Non Bank
LKM	: Lembaga Keuangan Mikro
LoI	: Letter of Intent
LoU	: Letter of Understanding
LPEI	: Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
LPHE	: Lembaga Penilaian Harga Efek
LPS	: Lembaga Penjamin Simpanan
LTV	: Loan to Value
MCRA	: Market Conduct Risk Assessment
MEA/AEC	: Masyarakat Ekonomi Asean/Asean Economic Community
MI	: Manajer Investasi
MIA	: Manajer IKU dan Anggaran
MoU	: Memorandum Of Understanding/Nota Kesepahaman
MPSJKI	: Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia
MSAK	: Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja
NAB	: Nilai Aktiva Bersih
NIM	: Net Interest Margin
NPF	: Non Performing Finance
NPL	: Non-Performing Loan
OECD	: Organisation for Economic Co-operation and Development
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
ORP	: Outreach Program
OSINT	: Open Source Intelligence
PCE	: Pendidikan Calon Staf Edukasi dan Perlindungan Konsumen
PCP	: Pendidikan Calon Pejabat
PCS	: Pendidikan Calon Staf
PCT	: Pendidikan Calon Pegawai Tata Usaha
PDB	: Produk Domestik Bruto
PDK	: Peraturan Dewan Komisiner
PDN	: Posisi Devisa Neto
PE	: Perusahaan Efek
PELAKU	: Pusat Edukasi, Layanan Konsumen dan Akses Keuangan UMKM
PESTEL	: Politic, Economy, Social, Technology, Environment, and Law
PI	: Penasihat Investasi
PKR	: Pasar Keuangan Rakyat
PM	: Pasar Modal
PMK	: Protokol Manajemen Krisis
POJK	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
POKTAN	: Kelompok Tani
PPF	: Program Pendidikan Formal
PPG	: Program Pengendalian Gratifikasi
PPK	: Program Pengembangan Kompetensi
PPKB	: Program Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang
PPKD	: Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah
PPL	: Program Pendidikan Lanjutan
PPP	: Program Penugasan Pegawai
PSP	: Pemegang Saham Pengendali
PUB	: Penawaran Umum Berkelanjutan

PUJK	: Pelaku Usaha Jasa Keuangan
Rakerstra	: Rapat Kerja Strategis
RBS	: Risk Based Supervisory
RCEP	: Regional Comprehensive Economic Partnership
RDK	: Rapat Dewan Komisioner
REPO	: Repurchase Agreement
RGS	: Risk and Governance Summit
RKA	: Rencana Kerja Anggaran
ROA	: Return on Assets
ROE	: Return on Equity
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RSS	: Rumah Sehat Sejahtera
Satgas	: Satuan Tugas
SBN	: Surat Berharga Negara
SBSN	: Surat Berharga Syariah Negara
SDM	: Sumber Daya Manusia
SEDK	: Surat Edaran Dewan Komisioner
SEOJK	: Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
SIAI	: Sistem Informasi Audit Internal
SID/DIS	: Sistem Informasi Debitur/Debtor Information System
SIELOG	: Sistem Informasi Ekspedisi Logistik
SIMARIO	: Sistem Informasi Manajemen Risiko
SIMFOSIA	: Sistem Informasi Sumber Daya Manusia
SiMOLEK	: Mobil Literasi Keuangan
SimPel	: Simpanan Pelajar
SIMPEL	: Sistem Pengelolaan Kinerja
SIPMI	: Sistem Informasi Pelaporan Market Intelijen
SIPP	: Sistem Informasi Perusahaan Pembiayaan
SISKA	: Sistem Aplikasi Keuangan OJK
SISPANDI	: Sistem Informasi Pengelolaan Kendaraan Dinas
SISPUAS	: Sistem Informasi Penatausahaan Aset
SJK	: Sektor Jasa Keuangan
SKM	: Sahat Keuangan Maritim
SKP	: Satuan Kredit Profesi
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SLA	: Service Level Agreement
SMES	: Sederhana, Mudah, Ekonomis, dan Segera
SNKI	: Strategis Nasional Keuangan Inklusif
SNLKI	: Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia
SPE	: Sistem Pelaporan Emiten
SPP/WBS OJK	: Sistem Pelaporan Pelanggaran OJK/Whistle Blowing System OJK
SRO	: Self Regulatory Organization
STP	: Straight Through Processing
STTD	: Surat Tanda Terdaftar
SUN	: Surat Utang Negara
SWOT	: Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats
TKHT	: Tunjangan Kesehatan Hari Tua
TKI	: Tenaga Kerja Indonesia

TOT	: Training of Trainers
TPHT	: Tunjangan Perumahan Hari Tua
TPI	: Tempat Pelelangan Ikan
UMKM/MSME	: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah/Micro, Small, and Medium Enterprises
UU	: Undang-Undang
UU LKM	: Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro
UU OJK	: Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan
UUS	: Unit Usaha Syariah
WAPERD	: Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana
WBS	: Whistle Blowing System
WCFSL	: Working Committee on Financial Services Liberalisation
WMI	: Wakil Manajer Investasi
WPEE	: Wakil Penjamin Emisi Efek
WPPE	: Wakil Perantara Pedagang Efek
XBRL	: Extensible Business Reporting Language
YKP OJK	: Yayasan Kesejahteraan Pekerja
yoy	: year over year
ytd	: year to date
ZMET	: Zaltman Metaphor Elicitation Technique